



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010–2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara sistematis dan terpadu dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 yang merupakan perwujudan visi, misi dan program Bupati yang memuat kebijakan penyelenggaraan pembangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2008/2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010–2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka

ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014,
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah Dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2010-2015.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Rembang yang disusun setiap tahun sekali.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2010-2015.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

Sistematika RPJM Daerah Tahun 2010 – 2015 disusun sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan;
BAB II	: Gambaran Umum Daerah;
BAB III	: Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan;
BAB IV	: Analisis Isu-isu Strategis;
BAB V	: Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
BAB VI	: Arah Kebijakan dan Strategi;
BAB VII	: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
BAB VIII	: Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan;
BAB IX	: Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
BAB X	: Kaidah Pelaksanaan dan Ketentuan Peralihan.

Pasal 4

Penjabaran RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJM Daerah Kabupaten Rembang mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

Pasal 6

- (1) Program Pembangunan daerah periode 2010-2015 dilaksanakan sesuai RPJM Daerah.
- (2) RPJM Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 7

Penyusunan RPJM Daerah menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2010-2015.

Pasal 8

RPJM Daerah wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJM Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 dan dapat diberlakukan sebagai RPJM Daerah transisi serta sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum tersusunnya RPJM Daerah tahun 2016-2020 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI REMBANG

ttd.

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd.

HAMZAH FATHONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010–2015

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Rembang , memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Dokumen RPJM Daerah Tahun 2010-2015 ini dapat diberlakukan sebagai dokumen Transisi untuk pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum RPJM Daerah Tahun 2016-2020 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 92



RAPERDA

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010-2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2010**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2010-2015

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2010**

Lampiran
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor Tahun 2010

Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)
Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015

Lampiran
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor Tahun 2010

Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)
Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015

(Bab IX & Bab X)

DAFTAR ISI

RAPERDA DAFTAR ISI DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Landasan Hukum.....	I-1
C. Tujuan.....	I-2
D. Hubungan RPJMD Kabupaten Rembang Dengan Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya	I-3
E. Sistematika	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
A. Gambaran Geografis dan Administratif.....	II-1
B. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rembang.....	II-2
C. Capaian Kondisi Ekonomi Makro.....	II-4
D. Gambaran Umum Kondisi Masing-Masing Urusan	II-8
1. Kelompok Urusan Pemerintahan.....	II-8
2. Kelompok Urusan Prasarana Wilayah	II-19
3. Kelompok Urusan Sosial Budaya.....	II-38
4. Kelompok Urusan Ekonomi	II-68
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	III-1
A. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-1
B. Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu.....	III-8
C. Kerangka Pendanaan.....	III-11
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
A. Isu - isu Strategis Umum.....	IV-1
B. Potensi Permasalahan Masing-masing Urusan	IV-5
BAB V VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	V-1
A. Visi	V-1
B. Misi	V-1
C. Tujuan	V-2
D. Sasaran.....	V-2
E. Tahapan Pembangunan Kabupaten Rembang 2010 – 2015	V-2
BAB VI ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	VI-1
A. Arah Kebijakan.....	VI-1
B. Strategi	VI-1
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII-1
A. Kebijakan Umum	VII-1
B. Program Pembangunan Daerah Masing-Masing Urusan.....	VII-2
1. Kelompok Urusan Pemerintahan.....	VII-2
2. Kelompok Urusan Prasarana Wilayah	VII-3
3. Kelompok Urusan Sosial Budaya.....	VII-4
4. Kelompok Urusan Ekonomi	VII-5
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII-1
A. Program Indikatif.....	VIII-1
B. Kebutuhan Pendanaan	VIII-27

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
A. Indikator Agregat dan Indikator Makro	IX-1
B. Indikator Kinerja Urusan	IX-2
a. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	IX-2
b. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	IX-5
c. Rencana Pembangunan	IX-15
d. Stastik.....	IX-21
e. Kearsipan	IX-22
f. Keperpustakaan	IX-23
g. Pekerjaan Umum.....	IX-24
h. Perhubungan	IX-36
i. Perumahan.....	IX-40
j. Penataan Ruang.....	IX-41
k. Pertanahan.....	IX-44
l. Komunikasi dan Informatika.....	IX-45
m. Pendidikan.....	IX-47
n. Kesehatan	IX-56
o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.....	IX-64
p. Kebudayaan.....	IX-68
q. Kependudukan dan Catatan Sipil	IX-71
r. Kepemudaan dan Olah Raga	IX-72
s. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IX-77
t. Pariwisata.....	IX-83
u. Sosial	IX-85
v. Pemberdayaan Masyarakat Desa	IX-88
w. Ketenagakerjaan	IX-92
x. Ketransmigrasian	IX-93
y. Koperasi dan UMKM	IX-94
z. Urusan Industri.....	IX-97
a.a. Perdagangan.....	IX-99
b.b. Penanaman Modal	IX-102
c.c. Energi dan Sumber Daya MIneral	IX-104
d.d. Pertanian.....	IX-107
e.e. Ketahanan Pangan.	IX-114
f.f. Lingkungan Hidup.....	IX-115
g.g. Kehutanan.....	IX-121
h.h. Perikanan dan Kelautan	IX-123
BAB X KAIDAH PELAKSANAAN DAN KETENTUAN PERALIHAN	X-1
A. Kaidah Pelaksanaan.....	X-1
B. Ketentuan Peralihan.....	X-2

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 2. 1.	Peta Kabupaten Rembang.....	II-1
Tabel 2. 1.	Capaian Indikator Agregat Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010 ..	II-2
Tabel 2. 2.	Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Lain Sekitar Tahun 2006-2009	II-2
Tabel 2. 3.	Prediksi Capaian IPM Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2015	II-3
Tabel 2. 4.	Capaian IPG dan IDG Kabupaten Rembang Tahun 2004-2009	II-3
Tabel 2. 5.	Perbandingan Nilai IPG dan IDG Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2004-2007.....	II-4
Tabel 2. 6.	Prediksi Capaian IPG dan IDG Kabupaten Rembang Tahun 2006-2015	II-4
Tabel 2. 7.	Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Nilai Tukar Petani (%) Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010	II-5
Tabel 2. 8.	Perbandingan Nilai Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan NTP Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2006-2009.	II-5
Tabel 2. 9.	Prediksi Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Nilai Tukar Petani (%) Tahun 2009 - 2015	II-6
Tabel 2. 10.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Konstan (2000) Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010 (Juta Rupiah).....	II-6
Tabel 2. 11.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Berlaku Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010 (Juta Rupiah).....	II-7
Tabel 2. 12.	Prediksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHHK dan ADHB; PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Rembang Tahun 2009 – 2015 (Juta Rupiah)	II-7
Tabel 2. 13.	Kejadian Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2008	II-8
Tabel 2. 14.	Banyaknya Bencana Alam dan Kerugian di Kabupaten Rembang Tahun 2006-2009	II-9
Tabel 2. 15.	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Rembang Tahun 2004 – 2009	II-10
Tabel 2. 16.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang 2006–2010 (ribu Rupiah)	II-11
Tabel 2. 17.	Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Kabupaten Rembang 2006–2010.....	II-12
Tabel 2. 18.	Jumlah Pendapatan Berdasarkan Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang 2006–2010 (ribu Rupiah)	II-12
Tabel 2. 19.	Proporsi Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total PAD Kabupaten Rembang 2006 - 2010 (%)	II-13
Tabel 2. 20.	Jumlah PNS Dirinci Menurut Golongan dan Ruang Gaji Kabupaten Rembang 2003 –2009 (orang).....	II-14
Tabel 2. 21.	Jumlah PNS dirinci menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Rembang 2004 –2009 (orang).....	II-14
Tabel 2. 22.	Data Penyelenggaraan Kearsipan 2004-2009.....	II-17
Tabel 2. 23.	Data Perpustakaan Umum 2004-2009.....	II-18
Tabel 2. 24.	Panjang Jalan Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009	II-20
Tabel 2. 25.	Karakteristik Jalan Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009.....	II-21
Tabel 2. 26.	Jumlah dan Panjang Jembatan di Kabupaten Rembang Tahun 2004 – 2008.....	II-23
Tabel 2. 27.	Sumberdaya Air dan Panjang Saluran Irigasi di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009	II-24
Tabel 2. 28.	Luas Sawah berdasarkan kategori dan Kapasitas Sumberdaya air di Kabupaten Rembang	II-25
Tabel 2. 29.	Nama dan Lokasi Embung di Kabupaten Rembang.....	II-26

Tabel 2. 30.	Sumber Air Baku di Kabupaten Rembang Tahun 2007.....	II-27
Tabel 2. 31.	Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Rembang Tahun 2007	II-27
Tabel 2. 32.	Persampahan Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009.....	II-28
Tabel 2. 33.	Panjang Saluran Drainase Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2009	II-29
Tabel 2. 34.	Kawasan Perkotaan di Kabupaten Rembang Tahun 2008.....	II-30
Tabel 2. 35.	Pemberian IMB Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2008.....	II-32
Tabel 2. 36.	Perkembangan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Transportasi Darat Dan Fasilitas Keselamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2009 ...	II-33
Tabel 2. 37.	Perkembangan kasus Pelanggaran Pelayanan Transportasi Laut di Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2009.....	II-34
Tabel 2. 38.	Daerah/Lokasi Rawan Kemacetan dan Kecelakaan di Kabupaten Rembang Tahun 2009.....	II-35
Tabel 2. 39.	Daftar Jaringan Trayek Dan Kebutuhan Angkutan Pedesaan Di Kabupaten Rembang Tahun 2009	II-36
Tabel 2. 40.	Rata-rata lama Sekolah, Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2009..	II-39
Tabel 2. 41.	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan dan Pertumbuhannya di Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2009	II-39
Tabel 2. 42.	Perbandingan APK, SD, SMP dan SMA dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008.....	II-40
Tabel 2. 43.	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2010	II-40
Tabel 2. 44.	Perbandingan APM , SD, SMP dan SMA Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2008	II-40
Tabel 2. 45.	Angka Transisi SMP dan SMA Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2009	II-41
Tabel 2. 46.	Perbandingan Angka Transisi Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Rembang dengan kabupaten sekitar Tahun 2008 (%).....	II-41
Tabel 2. 47.	Angka Putus Sekolah Jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2009	II-41
Tabel 2. 48.	Jumlah Sekolah dan Pertumbuhannya di Kabupaten Rembang Tahun 2005 -2009	II-42
Tabel 2. 49.	Jumlah Murid dan Pertumbuhannya di Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2009 (orang).....	II-42
Tabel 2. 50.	Jumlah Guru dan Pertumbuhannya di Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2009.....	II-42
Tabel 2. 51.	Ratio Guru Terhadap Murid di Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2005 – 2009.....	II-43
Tabel 2. 52.	Ratio Kelas terhadap Murid di Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2005 – 2009.....	II-43
Tabel 2. 53.	Ratio Sekolah terhadap Murid di Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2005 -2009	II-43
Tabel 2. 54.	Kondisi Ruang Kelas Masing-masing Satuan Pendidikan di Kabupaten Rembang Berdasarkan Tingkat Kerusakan 2005-2009 (Unit).....	II-44
Tabel 2. 55.	Persentase Kondisi Ruang Kelas Masing-masing Satuan Pendidikan di Kabupaten Rembang Berdasarkan Tingkat Kerusakan 2005-2009 (%)	II-45
Tabel 2. 56.	Angka Kelulusan Masing-masing jenjang Pendidikan Di Kabupaten Rembang 2006 – 2009.....	II-46
Tabel 2. 57.	Jumlah Guru Berdasarkan kualifikasinya Untuk Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Di Kabupaten Rembang 2006–2009.....	II-46
Tabel 2. 58.	Jumlah Sekolah Standar Nasional, Rintisan Sekolah Berbasis Internasional Untuk Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Di Kabupaten Rembang 2005 – 2009	II-47
Tabel 2. 59.	Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Yang memiliki Sarana pendukung pembelajaran Di Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2009.....	II-47
Tabel 2. 60.	Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang melaksanakan MBS di Kabupaten Rembang 2005 – 2009.....	II-47

Tabel 2. 61.	Perkembangan desa dengan UCI, dan Persentase Bayi dengan ASI Eksklusif Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2009	II-48
Tabel 2. 62.	Perkembangan Morbiditas Masyarakat Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2009.....	II-49
Tabel 2. 63.	Perkembangan Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2009 (%)	II-50
Tabel 2. 64.	Kebutuhan Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Rembang.....	II-50
Tabel 2. 65.	Perkembangan Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2006 – 2009	II-51
Tabel 2. 66.	Perkembangan Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2006 – 2009	II-52
Tabel 2. 67.	Data Jenis Kesenian Tradisional di Kabupaten Rembang.....	II-53
Tabel 2. 68.	Data Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang	II-54
Tabel 2. 69.	Data Kegiatan Tradisi/Keagamaan/Budaya di Kabupaten Rembang ..	II-55
Tabel 2. 70.	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Keompok Umur Tahun 2004 – 2008 (Jiwa).....	II-56
Tabel 2. 71.	Penduduk Berdasarkan Usia Kerja di Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2008.....	II-56
Tabel 2. 72.	Catatan Sipil Kabupaten Rembang.....	II-57
Tabel 2. 73.	Realisasi Pelayanan Akta Catatan Sipil Kabupaten Rembang	II-57
Tabel 2. 74.	Banyaknya Kasus yang Terjadi Pada Wanita dan Anak di Kabupaten Rembang Tahun 2006-2009.....	II-59
Tabel 2. 75.	Jumlah Pengunjung Wisata di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009	II-60
Tabel 2. 76.	Perkembangan Jumlah Hotel dan Pengunjung Hotel di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009.....	II-61
Tabel 2. 77.	Jenis dan jumlah PMKS di Kabupaten Rembang Tahun 2006 - 2009 .	II-62
Tabel 2. 78.	Jenis dan jumlah PMKS yang Tertangani di Kabupaten Rembang Tahun 2006 - 2009	II-63
Tabel 2. 79.	Kelembagaan Sosial di Kabupaten Rembang Tahun 2006 - 2009.....	II-64
Tabel 2. 80.	Jumlah dan Jenis PMKS dan PSKS Yang Memperoleh Bantuan Tahun 2006 – 2009 (orang).....	II-65
Tabel 2. 81.	Data Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Rembang	II-65
Tabel 2. 82.	Data Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2006-2009	II-66
Tabel 2. 83.	Tingkat Pendidikan Pencari Kerja di Kabupaten Rembang Tahun 2007-2010 (orang).....	II-67
Tabel 2. 84.	Jumlah Peserta Ketrampilan/Kejuruan di BLK Kabupaten Rembang Tahun 2006-2009 (orang)	II-67
Tabel 2. 85.	Perkembangan Transmigran dan Jenis Keterampilan Kabupaten Rembang Tahun 2006-2009 (orang).....	II-68
Tabel 2. 86.	Kuota dan Daerah Tujuan Transmigrasi Tahun 2006 - 2009.....	II-69
Tabel 2. 87.	Perkembangan Jumlah Koperasi dirinci Menurut Kategori Koperasi Tahun 2005-2009	II-69
Tabel 2. 88.	Perkembangan Jumlah Pedagang di Kabupaten Rembang Tahun 2005 -2009	II-70
Tabel 2. 89.	Banyaknya BBM Terjual di Kabupaten Rembang 2005 – 2009 (kilo liter)	II- 72
Tabel 2. 90.	Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009	II-74
Tabel 2. 91.	Produksi dan produktivitas tanaman sayur dan buah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009.....	II-75
Tabel 2. 92.	Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009	II-75
Tabel 2. 93.	Produksi ternak Kabupaten Rembang tahun 2005-2009	II-76
Tabel 2. 94.	Neraca Bahan Makanan Kabupaten Rembang Tahun 2006-2009	II-77
Tabel 2. 95.	Lahan Kritis di Kabupaten Rembang Tahun 2009.....	II-79
Tabel 2. 96.	Penanganan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2006-2009	II-79
Tabel 2. 97.	Hasil pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor wajib uji secara berkala Kabupaten Rembang tahun 2005-2007	II-80

Tabel 2. 98.	Luas Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Rembang.....	II-80
Tabel 2. 99.	Luas lahan kritis serta kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009	II-81
Tabel 2. 100.	Luas Hutan Rakyat dan Produksi Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009.....	II-81
Tabel 2. 101.	Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009.....	II-82
Tabel 2. 102.	Jumlah Nelayan di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009 (orang) ..	II-83
Tabel 2. 103.	Jumlah Kapal di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009 (unit)	II-83
Tabel 2. 104.	Jumlah Alat Tangkap (unit) di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009	II-84
Tabel 2. 105.	Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Payau Di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009.....	II-84
Tabel 2. 106.	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar dan Perikanan Perairan Umum di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009	II-85
Tabel 3.1.	Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010 (Juta Rupiah)	III-3
Tabel 3.2.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Proporsi terhadap Total Pendapatan Kabupaten rembang Tahun 2006-2010 (Ribu Rupiah)	III-5
Tabel 3.3.	Dana Perimbangan dan Proporsi terhadap Total Pendapatan Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010 (Ribu Rupiah)	III-7
Tabel 3.4.	Lain-lain Pendapatan yang Sah dan Proporsi terhadap Total Pendapatan Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010 (Ribu Rupiah)	III-9
Tabel 3.5.	Belanja Daerah Proporsinya terhadap Total Pendapatan dan Proporsi Masing-Masing Pos Belanja terhadap Total Belanja Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010 (Ribu Rupiah)	III-11
Tabel 3.6.	Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010 (Rupiah)	III-14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pada pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen rencana pembangunan daerah seperti yang disebutkan dalam UU No. 25 Tahun 2004.

Dalam ketentuan pasal 19 Undang-Undang No. 25 tahun 2004 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik. Sementara itu dalam pasal 150 ayat (3) huruf c Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 bahwa RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Terkait dengan hal ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, sedangkan jangka waktu penetapannya paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, Kabupaten Rembang menyusun RPJM Daerah tahun 2010–2015, menyusul setelah dilaksanakannya pelantikan Kepala Daerah Kabupaten Rembang. RPJM Daerah ini akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Rembang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2010 – 2015.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Rembang tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2009 -2014;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025.

C. Tujuan

RPJM Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, disusun untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah (pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah sejalan dengan tujuan nasional dan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan lainnya, dalam satu kesatuan pola sikap serta pola tindak. RPJM Daerah ini sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah dimana didalamnya memuat strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan prakiraan maju pendanaan.

D. Hubungan RPJM Daerah Kabupaten Rembang Dengan Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya

RPJM Daerah Kabupaten Rembang merupakan satu sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini berarti bahwa RPJM Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010–2015 disusun mengacu pada RPJP Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 dan RPJM Nasional Tahun 2009-2014. RPJM Daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD tahunan dan Renstra seluruh SKPD Kabupaten Rembang.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang Tahun 2010–2015 agar tidak bertentangan dengan pengaturan pemanfaatan ruang yang telah ada, maka dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010–2015 memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang.

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan masing-masing urusan/sektor, penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010–2015 juga memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada, antara lain, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Rencana Pengembangan Tenaga Kerja Daerah (RPTKD), Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan (RAD-PP), dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP), Rencana Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu.

E. Sistematika

RPJM Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010–2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Daerah
- BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
- BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
- BAB V : Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- BAB VI : Arah Kebijakan dan Strategi
- BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
- BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- BAB X : Kaidah Pelaksanaan dan Ketentuan Peralihan



RAPERDA

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010-2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2010**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2010-2015

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2010**

Lampiran
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor Tahun 2010

Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)
Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015

Lampiran
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor Tahun 2010

Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)
Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015

(Bab IX & Bab X)

DAFTAR ISI

RAPERDA DAFTAR ISI DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Landasan Hukum.....	I-1
C. Tujuan.....	I-2
D. Hubungan RPJMD Kabupaten Rembang Dengan Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya	I-3
E. Sistematika	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
A. Gambaran Geografis dan Administratif.....	II-1
B. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rembang.....	II-2
C. Capaian Kondisi Ekonomi Makro.....	II-4
D. Gambaran Umum Kondisi Masing-Masing Urusan	II-8
1. Kelompok Urusan Pemerintahan.....	II-8
2. Kelompok Urusan Prasarana Wilayah	II-19
3. Kelompok Urusan Sosial Budaya.....	II-38
4. Kelompok Urusan Ekonomi	II-68
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	III-1
A. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-1
B. Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu.....	III-8
C. Kerangka Pendanaan.....	III-11
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
A. Isu - isu Strategis Umum.....	IV-1
B. Potensi Permasalahan Masing-masing Urusan	IV-5
BAB V VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	V-1
A. Visi	V-1
B. Misi	V-1
C. Tujuan	V-2
D. Sasaran.....	V-2
E. Tahapan Pembangunan Kabupaten Rembang 2010 – 2015	V-2
BAB VI ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	VI-1
A. Arah Kebijakan.....	VI-1
B. Strategi	VI-1
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII-1
A. Kebijakan Umum	VII-1
B. Program Pembangunan Daerah Masing-Masing Urusan.....	VII-2
1. Kelompok Urusan Pemerintahan.....	VII-2
2. Kelompok Urusan Prasarana Wilayah	VII-3
3. Kelompok Urusan Sosial Budaya.....	VII-4
4. Kelompok Urusan Ekonomi	VII-5
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII-1
A. Program Indikatif.....	VIII-1
B. Kebutuhan Pendanaan	VIII-27

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
A. Indikator Agregat dan Indikator Makro	IX-1
B. Indikator Kinerja Urusan	IX-2
a. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	IX-2
b. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	IX-5
c. Rencana Pembangunan	IX-15
d. Stastik.....	IX-21
e. Kearsipan	IX-22
f. Keperpustakaan	IX-23
g. Pekerjaan Umum.....	IX-24
h. Perhubungan	IX-36
i. Perumahan.....	IX-40
j. Penataan Ruang.....	IX-41
k. Pertanahan.....	IX-44
l. Komunikasi dan Informatika.....	IX-45
m. Pendidikan.....	IX-47
n. Kesehatan	IX-56
o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.....	IX-64
p. Kebudayaan.....	IX-68
q. Kependudukan dan Catatan Sipil	IX-71
r. Kepemudaan dan Olah Raga	IX-72
s. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IX-77
t. Pariwisata.....	IX-83
u. Sosial	IX-85
v. Pemberdayaan Masyarakat Desa	IX-88
w. Ketenagakerjaan	IX-92
x. Ketransmigrasian	IX-93
y. Koperasi dan UMKM	IX-94
z. Urusan Industri.....	IX-97
a.a. Perdagangan.....	IX-99
b.b. Penanaman Modal	IX-102
c.c. Energi dan Sumber Daya Mineral	IX-104
d.d. Pertanian.....	IX-107
e.e. Ketahanan Pangan.	IX-114
f.f. Lingkungan Hidup.....	IX-115
g.g. Kehutanan.....	IX-121
h.h. Perikanan dan Kelautan	IX-123
BAB X KAIDAH PELAKSANAAN DAN KETENTUAN PERALIHAN	X-1
A. Kaidah Pelaksanaan.....	X-1
B. Ketentuan Peralihan.....	X-2

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 2. 1.	Peta Kabupaten Rembang.....	II-1
Tabel 2. 1.	Capaian Indikator Agregat Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010 ..	II-2
Tabel 2. 2.	Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Lain Sekitar Tahun 2006-2009	II-2
Tabel 2. 3.	Prediksi Capaian IPM Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2015	II-3
Tabel 2. 4.	Capaian IPG dan IDG Kabupaten Rembang Tahun 2004-2009	II-3
Tabel 2. 5.	Perbandingan Nilai IPG dan IDG Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2004-2007.....	II-4
Tabel 2. 6.	Prediksi Capaian IPG dan IDG Kabupaten Rembang Tahun 2006-2015	II-4
Tabel 2. 7.	Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Nilai Tukar Petani (%) Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010	II-5
Tabel 2. 8.	Perbandingan Nilai Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan NTP Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2006-2009.	II-5
Tabel 2. 9.	Prediksi Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Nilai Tukar Petani (%) Tahun 2009 - 2015	II-6
Tabel 2. 10.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Konstan (2000) Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010 (Juta Rupiah).....	II-6
Tabel 2. 11.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Berlaku Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010 (Juta Rupiah).....	II-7
Tabel 2. 12.	Prediksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHHK dan ADHB; PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Rembang Tahun 2009 – 2015 (Juta Rupiah)	II-7
Tabel 2. 13.	Kejadian Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2008	II-8
Tabel 2. 14.	Banyaknya Bencana Alam dan Kerugian di Kabupaten Rembang Tahun 2006-2009	II-9
Tabel 2. 15.	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Rembang Tahun 2004 – 2009	II-10
Tabel 2. 16.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang 2006–2010 (ribu Rupiah)	II-11
Tabel 2. 17.	Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Kabupaten Rembang 2006–2010.....	II-12
Tabel 2. 18.	Jumlah Pendapatan Berdasarkan Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang 2006–2010 (ribu Rupiah)	II-12
Tabel 2. 19.	Proporsi Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total PAD Kabupaten Rembang 2006 - 2010 (%)	II-13
Tabel 2. 20.	Jumlah PNS Dirinci Menurut Golongan dan Ruang Gaji Kabupaten Rembang 2003 –2009 (orang).....	II-14
Tabel 2. 21.	Jumlah PNS dirinci menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Rembang 2004 –2009 (orang).....	II-14
Tabel 2. 22.	Data Penyelenggaraan Kearsipan 2004-2009.....	II-17
Tabel 2. 23.	Data Perpustakaan Umum 2004-2009.....	II-18
Tabel 2. 24.	Panjang Jalan Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009	II-20
Tabel 2. 25.	Karakteristik Jalan Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009.....	II-21
Tabel 2. 26.	Jumlah dan Panjang Jembatan di Kabupaten Rembang Tahun 2004 – 2008.....	II-23
Tabel 2. 27.	Sumberdaya Air dan Panjang Saluran Irigasi di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009	II-24
Tabel 2. 28.	Luas Sawah berdasarkan kategori dan Kapasitas Sumberdaya air di Kabupaten Rembang	II-25
Tabel 2. 29.	Nama dan Lokasi Embung di Kabupaten Rembang.....	II-26

Tabel 2. 30.	Sumber Air Baku di Kabupaten Rembang Tahun 2007.....	II-27
Tabel 2. 31.	Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Rembang Tahun 2007	II-27
Tabel 2. 32.	Persampahan Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009.....	II-28
Tabel 2. 33.	Panjang Saluran Drainase Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2009	II-29
Tabel 2. 34.	Kawasan Perkotaan di Kabupaten Rembang Tahun 2008.....	II-30
Tabel 2. 35.	Pemberian IMB Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2008.....	II-32
Tabel 2. 36.	Perkembangan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Transportasi Darat Dan Fasilitas Keselamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2009 ...	II-33
Tabel 2. 37.	Perkembangan kasus Pelanggaran Pelayanan Transportasi Laut di Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2009.....	II-34
Tabel 2. 38.	Daerah/Lokasi Rawan Kemacetan dan Kecelakaan di Kabupaten Rembang Tahun 2009.....	II-35
Tabel 2. 39.	Daftar Jaringan Trayek Dan Kebutuhan Angkutan Pedesaan Di Kabupaten Rembang Tahun 2009	II-36
Tabel 2. 40.	Rata-rata lama Sekolah, Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2009..	II-39
Tabel 2. 41.	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan dan Pertumbuhannya di Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2009	II-39
Tabel 2. 42.	Perbandingan APK, SD, SMP dan SMA dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008.....	II-40
Tabel 2. 43.	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2010	II-40
Tabel 2. 44.	Perbandingan APM , SD, SMP dan SMA Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2008	II-40
Tabel 2. 45.	Angka Transisi SMP dan SMA Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2009	II-41
Tabel 2. 46.	Perbandingan Angka Transisi Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Rembang dengan kabupaten sekitar Tahun 2008 (%).....	II-41
Tabel 2. 47.	Angka Putus Sekolah Jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2009	II-41
Tabel 2. 48.	Jumlah Sekolah dan Pertumbuhannya di Kabupaten Rembang Tahun 2005 -2009	II-42
Tabel 2. 49.	Jumlah Murid dan Pertumbuhannya di Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2009 (orang).....	II-42
Tabel 2. 50.	Jumlah Guru dan Pertumbuhannya di Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2009.....	II-42
Tabel 2. 51.	Ratio Guru Terhadap Murid di Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2005 – 2009.....	II-43
Tabel 2. 52.	Ratio Kelas terhadap Murid di Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2005 – 2009.....	II-43
Tabel 2. 53.	Ratio Sekolah terhadap Murid di Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2005 -2009	II-43
Tabel 2. 54.	Kondisi Ruang Kelas Masing-masing Satuan Pendidikan di Kabupaten Rembang Berdasarkan Tingkat Kerusakan 2005-2009 (Unit).....	II-44
Tabel 2. 55.	Persentase Kondisi Ruang Kelas Masing-masing Satuan Pendidikan di Kabupaten Rembang Berdasarkan Tingkat Kerusakan 2005-2009 (%)	II-45
Tabel 2. 56.	Angka Kelulusan Masing-masing jenjang Pendidikan Di Kabupaten Rembang 2006 – 2009.....	II-46
Tabel 2. 57.	Jumlah Guru Berdasarkan kualifikasinya Untuk Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Di Kabupaten Rembang 2006–2009.....	II-46
Tabel 2. 58.	Jumlah Sekolah Standar Nasional, Rintisan Sekolah Berbasis Internasional Untuk Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Di Kabupaten Rembang 2005 – 2009	II-47
Tabel 2. 59.	Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Yang memiliki Sarana pendukung pembelajaran Di Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2009.....	II-47
Tabel 2. 60.	Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang melaksanakan MBS di Kabupaten Rembang 2005 – 2009.....	II-47

Tabel 2. 61.	Perkembangan desa dengan UCI, dan Persentase Bayi dengan ASI Eksklusif Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2009	II-48
Tabel 2. 62.	Perkembangan Morbiditas Masyarakat Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2009.....	II-49
Tabel 2. 63.	Perkembangan Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2009 (%)	II-50
Tabel 2. 64.	Kebutuhan Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Rembang.....	II-50
Tabel 2. 65.	Perkembangan Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2006 – 2009	II-51
Tabel 2. 66.	Perkembangan Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2006 – 2009	II-52
Tabel 2. 67.	Data Jenis Kesenian Tradisional di Kabupaten Rembang.....	II-53
Tabel 2. 68.	Data Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang	II-54
Tabel 2. 69.	Data Kegiatan Tradisi/Keagamaan/Budaya di Kabupaten Rembang ..	II-55
Tabel 2. 70.	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Keompok Umur Tahun 2004 – 2008 (Jiwa).....	II-56
Tabel 2. 71.	Penduduk Berdasarkan Usia Kerja di Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2008.....	II-56
Tabel 2. 72.	Catatan Sipil Kabupaten Rembang.....	II-57
Tabel 2. 73.	Realisasi Pelayanan Akta Catatan Sipil Kabupaten Rembang	II-57
Tabel 2. 74.	Banyaknya Kasus yang Terjadi Pada Wanita dan Anak di Kabupaten Rembang Tahun 2006-2009.....	II-59
Tabel 2. 75.	Jumlah Pengunjung Wisata di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009	II-60
Tabel 2. 76.	Perkembangan Jumlah Hotel dan Pengunjung Hotel di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009.....	II-61
Tabel 2. 77.	Jenis dan jumlah PMKS di Kabupaten Rembang Tahun 2006 - 2009 .	II-62
Tabel 2. 78.	Jenis dan jumlah PMKS yang Tertangani di Kabupaten Rembang Tahun 2006 - 2009	II-63
Tabel 2. 79.	Kelembagaan Sosial di Kabupaten Rembang Tahun 2006 - 2009.....	II-64
Tabel 2. 80.	Jumlah dan Jenis PMKS dan PSKS Yang Memperoleh Bantuan Tahun 2006 – 2009 (orang).....	II-65
Tabel 2. 81.	Data Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Rembang	II-65
Tabel 2. 82.	Data Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2006-2009	II-66
Tabel 2. 83.	Tingkat Pendidikan Pencari Kerja di Kabupaten Rembang Tahun 2007-2010 (orang).....	II-67
Tabel 2. 84.	Jumlah Peserta Ketrampilan/Kejuruan di BLK Kabupaten Rembang Tahun 2006-2009 (orang)	II-67
Tabel 2. 85.	Perkembangan Transmigran dan Jenis Keterampilan Kabupaten Rembang Tahun 2006-2009 (orang).....	II-68
Tabel 2. 86.	Kuota dan Daerah Tujuan Transmigrasi Tahun 2006 - 2009.....	II-69
Tabel 2. 87.	Perkembangan Jumlah Koperasi dirinci Menurut Kategori Koperasi Tahun 2005-2009	II-69
Tabel 2. 88.	Perkembangan Jumlah Pedagang di Kabupaten Rembang Tahun 2005 -2009	II-70
Tabel 2. 89.	Banyaknya BBM Terjual di Kabupaten Rembang 2005 – 2009 (kilo liter)	II- 72
Tabel 2. 90.	Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009	II-74
Tabel 2. 91.	Produksi dan produktivitas tanaman sayur dan buah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009.....	II-75
Tabel 2. 92.	Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009	II-75
Tabel 2. 93.	Produksi ternak Kabupaten Rembang tahun 2005-2009	II-76
Tabel 2. 94.	Neraca Bahan Makanan Kabupaten Rembang Tahun 2006-2009	II-77
Tabel 2. 95.	Lahan Kritis di Kabupaten Rembang Tahun 2009.....	II-79
Tabel 2. 96.	Penanganan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2006-2009	II-79
Tabel 2. 97.	Hasil pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor wajib uji secara berkala Kabupaten Rembang tahun 2005-2007	II-80

Tabel 2. 98.	Luas Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Rembang.....	II-80
Tabel 2. 99.	Luas lahan kritis serta kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009	II-81
Tabel 2. 100.	Luas Hutan Rakyat dan Produksi Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009.....	II-81
Tabel 2. 101.	Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009.....	II-82
Tabel 2. 102.	Jumlah Nelayan di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009 (orang) ..	II-83
Tabel 2. 103.	Jumlah Kapal di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009 (unit)	II-83
Tabel 2. 104.	Jumlah Alat Tangkap (unit) di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009	II-84
Tabel 2. 105.	Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Payau Di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009.....	II-84
Tabel 2. 106.	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar dan Perikanan Perairan Umum di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009	II-85
Tabel 3.1.	Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010 (Juta Rupiah)	III-3
Tabel 3.2.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Proporsi terhadap Total Pendapatan Kabupaten rembang Tahun 2006-2010 (Ribu Rupiah)	III-5
Tabel 3.3.	Dana Perimbangan dan Proporsi terhadap Total Pendapatan Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010 (Ribu Rupiah)	III-7
Tabel 3.4.	Lain-lain Pendapatan yang Sah dan Proporsi terhadap Total Pendapatan Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010 (Ribu Rupiah)	III-9
Tabel 3.5.	Belanja Daerah Proporsinya terhadap Total Pendapatan dan Proporsi Masing-Masing Pos Belanja terhadap Total Belanja Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010 (Ribu Rupiah)	III-11
Tabel 3.6.	Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010 (Rupiah)	III-14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pada pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen rencana pembangunan daerah seperti yang disebutkan dalam UU No. 25 Tahun 2004.

Dalam ketentuan pasal 19 Undang-Undang No. 25 tahun 2004 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik. Sementara itu dalam pasal 150 ayat (3) huruf c Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 bahwa RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Terkait dengan hal ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, sedangkan jangka waktu penetapannya paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dilantik.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, Kabupaten Rembang menyusun RPJM Daerah tahun 2010–2015, menyusul setelah dilaksanakannya pelantikan Kepala Daerah Kabupaten Rembang. RPJM Daerah ini akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Rembang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2010 – 2015.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Rembang tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2009 -2014;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025.

C. Tujuan

RPJM Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, disusun untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah (pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah sejalan dengan tujuan nasional dan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pelaku pembangunan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan lainnya, dalam satu kesatuan pola sikap serta pola tindak. RPJM Daerah ini sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah dimana didalamnya memuat strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan prakiraan maju pendanaan.

D. Hubungan RPJM Daerah Kabupaten Rembang Dengan Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya

RPJM Daerah Kabupaten Rembang merupakan satu sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini berarti bahwa RPJM Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010–2015 disusun mengacu pada RPJP Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 dan RPJM Nasional Tahun 2009-2014. RPJM Daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD tahunan dan Renstra seluruh SKPD Kabupaten Rembang.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang Tahun 2010–2015 agar tidak bertentangan dengan pengaturan pemanfaatan ruang yang telah ada, maka dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010–2015 memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang.

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan masing-masing urusan/sektor, penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010–2015 juga memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada, antara lain, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Rencana Pengembangan Tenaga Kerja Daerah (RPTKD), Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan (RAD-PP), dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP), Rencana Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu.

E. Sistematika

RPJM Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010–2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Daerah
- BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
- BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
- BAB V : Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- BAB VI : Arah Kebijakan dan Strategi
- BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
- BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- BAB X : Kaidah Pelaksanaan dan Ketentuan Peralihan

BAB II

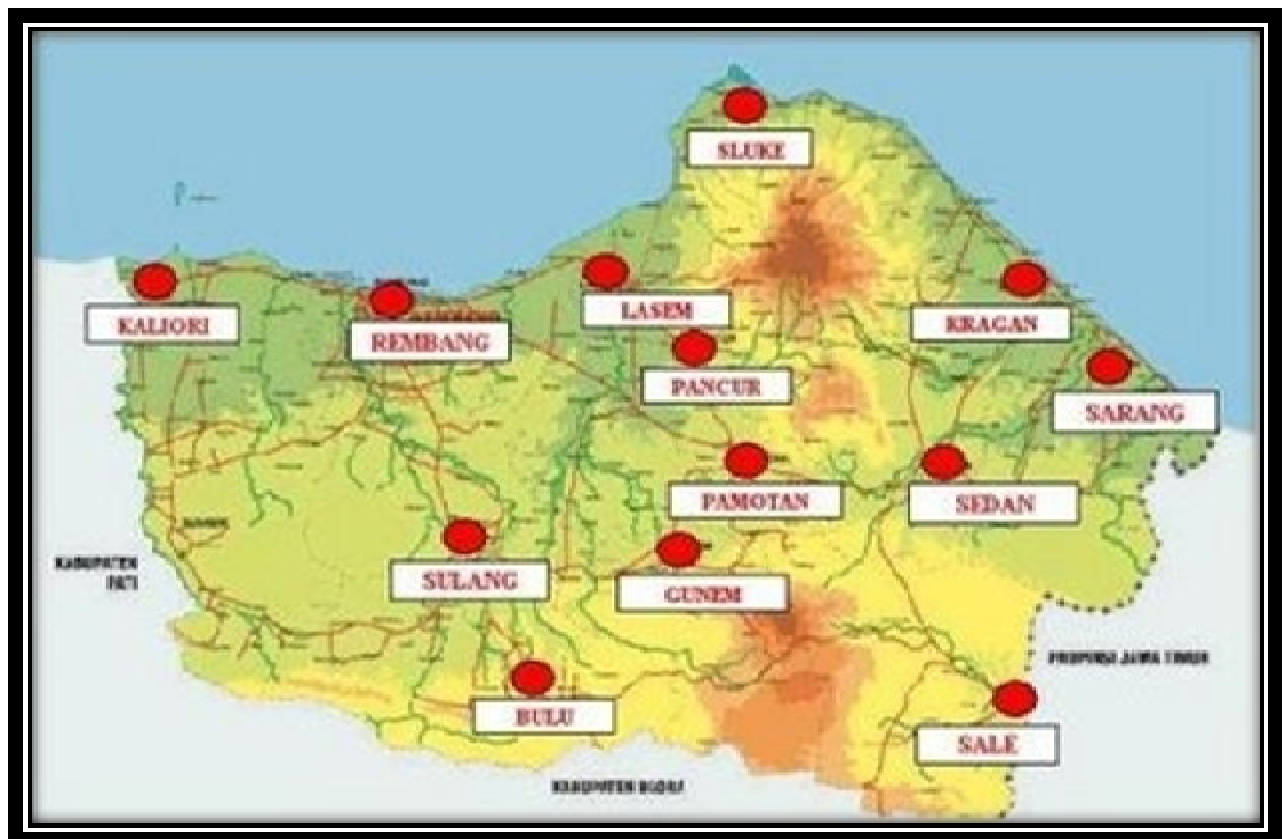
GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Gambaran Geografis dan Administratif

Kabupaten Rembang terletak pada 111° 00'-111° 30' Bujur Timur (BT) dan 6° 30'-7° 00' Lintang Selatan (LS). Secara administratif Kabupaten Rembang merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Batas-batas Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blora

Gambar 2. 1
Peta Kabupaten Rembang



Kabupaten Rembang terdiri dari 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 101.408 Ha. Kondisi topografis Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi antara lain meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Rembang 8,34% terletak pada ketinggian 1–7 meter dpl, ketinggian 7-25 m dpl sebesar 12,41% , ketinggian 25-100 m dpl sebesar 42,82 %, ketinggian 100-500 m dpl sebesar 28,08%, dan ketinggian diatas 500 m dpl sebesar 8,34%.

Kabupaten Rembang adalah beriklim tropis dengan suhu rata-rata sebesar 23°C, sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 33°C. Di wilayah Kabupaten Rembang curah hujan rata-rata 1.200 mm per tahun dimana curah hujan tertinggi terjadi bulan Januari yaitu sebanyak 272 mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi bulan Juli dan Agustus yaitu sebanyak 11 dan 13 mm/bulan.

B. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rembang

Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Rembang pada dasarnya adalah penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan dicapai selama lima tahun, yang penjabarannya dituangkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 1015. Oleh karena itu perlu ditetapkan target agregat berdasarkan beberapa indikator utama pembangunan dan dirumuskan sebagai tonggak penjurur (milesstone) atau sasaran antara yang ingin dicapai pada akhir perencanaan. Target agregat pembangunan Kabupaten Rembang digambarkan dalam beberapa indikator utama, meliputi capaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi.

Besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada range nilai terendah 40 dan tertinggi 80 yang diperhitungkan berdasarkan empat sub indikator yaitu usia harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah pendidikan dan tingkat daya beli masyarakat. Besarnya IPM Kabupaten Rembang tahun 2009 termasuk dalam katagori baik yaitu sebesar 71,55. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2005 yang hanya mencapai 69,00 meningkat menjadi 71,55 pada tahun 2009, atau meningkat sebesar 2,55 selama empat tahun terakhir.

Capaian indikator agregat dan komponen-komponen pembentuknya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 1.
Capaian Indikator Agregat Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009

No	Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	69,10	69,70	69,75	69,91	70,06
2	Rata-rata lama sekolah (tahun)	5,90	6,20	6,60	6,65	6,85
3	Angka Melek Huruf (%)	87,40	88,20	88,18	88,79	88,92
4	Pengeluaran riil perkapita (Rp)	626.100	628.500	635.040	639.290	644.240
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,00	69,70	70,54	71,12	71,55

Sumber data : Bappeda Kabupaten Rembang, 2009

Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, IPM Kabupaten Rembang pada tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pati dan Blora. Namun demikian besarnya nilai IPM tersebut masih berada dibawah IPM Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 71,64 Sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2.
Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Lain Tahun 2005-2009

No	Kabupaten dan Provinsi	2005	2006	2007	2008	2009
1	Rembang	69,00	69,70	70,54	71,12	71,55
2	Pati	70,90	70,21	70,78	71,23	71,48
3	Blora	67,90	69,24	69,89	70,60	70,70
4	Jawa Tengah	69,80	70,34	71,28	71,43	71,64

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2009

Diprediksikan pada tahun 2015, besarnya IPM Kabupaten Rembang menjadi sebesar 74,80, peningkatan tersebut terutama karena meningkatnya pendidikan dan pendapatan masyarakat. Prediksi pertumbuhan IPM Kabupaten Rembang tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 3.
Prediksi Capaian IPM Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2015

No	Tahun	UHH (tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Angka Melek Huruf	Pengeluaran Riil /Kapita (ribu Rupiah)	IPM
1	2010	70,06	7,00	89,02	650,00	72,27
2	2011	70,40	7,20	91,00	678,00	72,78
3	2012	71,00	7,30	92,00	680,00	73,30
4	2013	71,20	7,55	93,00	690,00	73,82
5	2014	71,60	7,78	94,00	700,00	74,34
6	2015	72,10	8,00	95,60	702,00	74,80

Sumber data : Hasil Analisa

Sementara itu, tolok ukur keberhasilan peningkatan kesetaraan gender dihitung berdasarkan IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). Besarnya nilai IPG paling rendah 40 dan tertinggi 80, dengan sub indikator sama dengan IPM, namun indikator tersebut terpilah antara laki-laki dan perempuan yang meliputi prosentase penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah angkatan kerja perempuan, jumlah perempuan yang bekerja di tingkat manajer dan terampil serta keterwakilan perempuan dalam politik.

Besarnya IPG Kabupaten Rembang terus mengalami kenaikan dari tahun 2004 sebesar 59,1 menjadi 63,0 pada tahun 2007 dan 63,6 pada tahun 2008 yang termasuk dalam kategori cukup baik. Peningkatan IPG terutama didukung oleh meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, angka melek huruf perempuan dan sumbangan perempuan dalam ekonomi rumah tangga. Namun IPG Kabupaten Rembang masih berada dibawah rata-rata IPG Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 yaitu 64,6.

Besarnya nilai IDG Kabupaten Rembang juga terus mengalami kenaikan yaitu sebesar 62,9 pada tahun 2004 menjadi 66,3 pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IDG Kabupaten Rembang meningkat menjadi 66,4 termasuk dalam kategori cukup baik. Meningkatnya nilai IDG Kabupaten Rembang terutama didukung oleh meningkatnya jumlah tenaga kerja perempuan, jumlah perempuan yang bekerja pada posisi puncak (manajer) dan tenaga terampil. Besarnya IDG Kabupaten Rembang tersebut sudah berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 59,7 pada tahun 2008. Besarnya nilai IPG dan IDG Kabupaten Rembang selengkapnya dapat dilihat dari data berikut ini :

Tabel 2. 4.
Capaian IPG dan IDG Kabupaten Rembang
Tahun 2004-2008

No	Indeks	2004	2005	2006	2007	2008
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	59,1	60,7	62,6	63,0	63,6
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,9	64,8	66,3	66,3	66,4

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2009

Besarnya IPG Kabupaten Rembang jika dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya menunjukkan bahwa IPG Kabupaten Rembang Tahun 2008 lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Pati (62,9), namun lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Blora (63,7). Sementara itu untuk IDG Kabupaten Rembang tahun 2008 berada diatas 2 kabupaten lain di sekitarnya. Tahun 2008 IDG Kabupaten Pati hanya sebesar (50,6) dan Kabupaten Blora (62,5), sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 5.
Perbandingan Nilai IPG dan IDG Kabupaten Rembang
Dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2004-2008

Kabupaten dan Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008
Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
Rembang	59,1	60,7	62,6	63,0	63,6
Pati	57,7	58,4	59,6	62,1	62,9
Blora	60,8	61,3	62,9	63,4	63,7
Jawa Tengah	59,8	60,8	63,7	64,3	64,6
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
Rembang	62,9	64,8	66,3	66,3	66,4
Pati	47,4	48,7	49,5	50,5	50,6
Blora	60,0	60,6	62,2	62,4	62,5
Jawa Tengah	56,5	56,9	59,3	59,7	59,7

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2009

Pada tahun 2015 besarnya IPG dan IDG Kabupaten Rembang diprediksi mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya pendidikan kaum perempuan dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Hal ini didukung oleh kebijakan dari Pemerintah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan sebagaimana Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Dalam Pembangunan dan Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Nasional yang Berkeadilan yang didalamnya mengamanatkan adanya anggaran yang responsif gender untuk mencapai tujuan pembangunan milenium pada tahun 2015.

Prediksi IPG dan IDG Kabupaten Rembang tahun 2010 – 2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 6.
Prediksi Capaian IPG dan IDG Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	63,84	64,12	64,40	64,68	64,97	65,25
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,86	68,39	68,93	69,46	70,01	70,55

Sumber : Hasil Analisa

Tabel di atas menunjukkan bahwa prediksi peningkatan IPG di Kabupaten Rembang dari tahun 2010 sebesar 63,84 meningkat menjadi sebesar 65,25, termasuk kategori cukup baik. Selama kurun waktu perencanaan diperkirakan IPG Kabupaten Rembang meningkat sebesar 1,3. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh meningkatnya pendidikan perempuan dan sumbangan pendapatan perempuan dalam ekonomi rumah tangga.

Sedangkan prediksi IDG Kabupaten Rembang pada tahun 2010 sebesar 67,86 meningkat menjadi 70,55 pada tahun 2015 yang termasuk kategori cukup baik. Selama kurun waktu perencanaan diperkirakan IDG Kabupaten Rembang meningkat sebesar 3,2. Besarnya IDG Kabupaten Rembang meningkat cukup baik, akibat dukungan kebijakan pembangunan secara nasional dan meningkatnya jumlah angkatan kerja perempuan dan jumlah perempuan yang bekerja di sektor manajemen maupun teknis.

C. Capaian Kondisi Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2010 – 2015 diprediksikan akan semakin baik. Hal ini didasari oleh perkembangan sektor riil dan ekonomi makro yang kondusif di samping semakin membaiknya stabilitas politik dalam negeri.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang dari tahun 2006 sampai dengan 2010 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2006 PDRB Kabupaten Rembang (atas dasar harga konstan tahun 2000) tumbuh sebesar 5,53%, tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 3,83%, kembali meningkat pada tahun 2009 sebesar 4,46% dan pada tahun 2010 diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 5,08%.

Sementara itu laju inflasi dari tahun 2005-2010 cenderung stabil pada kisaran 7,64%. Inflasi tertinggi pada tahun 2005 yaitu sebesar 15,36% yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 5,97%.

Mengingat struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor pertanian, maka Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang penting untuk mengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. NTP tahun 2006-2009 terhitung relatif stagnan pada kisaran 98,00. Angka tersebut masih di bawah NTP Provinsi Jawa Tengah sebesar 104,33. NTP Kabupaten Rembang yang masih dibawah nilai 100 menunjukkan bahwa indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian relatif lebih tinggi dibandingkan indeks harga hasil produksi pertanian yang berdampak pada tingkat kesejahteraan petani.

Tabel 2. 7.
Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Nilai Tukar Petani (%)
Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
Pertumbuhan ekonomi (%)	3,56	5,53	3,83	4,67	4,46
Laju Inflasi (%)	15,36	5,97	6,84	10,50	7,90
Nilai Tukar Petani (%)	97,00	98,00	97,00	99,00	98,00

Sumber : BPS Kabupaten Rembang, 2010

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang secara regional relatif setara dibandingkan dengan daerah-daerah sekitarnya. Seperti pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang sebesar 4,46% lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Blora (4,11%) dan mendekati angka pertumbuhan Kabupaten Pati (4,52%) dan sedikit dibawah angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (4,89%). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah berpengaruh terhadap pendapatan perkapita dan perluasan lapangan kerja. Sedangkan untuk inflasi Kabupaten Rembang tahun 2009 sebesar 7,9% termasuk tinggi, mengingat rata-rata inflasi di Jawa Tengah sebesar 3,32% pada tahun 2009. Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, maka angka inflasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Blora (7,37%) dan Provinsi Jawa Tengah (3,32%), namun lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Pati yang mencapai (8,9%). Perbandingan data pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi selengkapnya terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8.
Perbandingan Nilai Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi
Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2006-2009

Kab dan Provinsi	2006 (%)		2007 (%)		2008 (%)		2009 (%)	
	PE	Inflasi	PE	Inflasi	PE	Inflasi	PE	Inflasi
Rembang	5,53	5,97	3,81	6,84	4,67	10,50	4,46	7,90
Pati	4,67	7,50	4,77	11,20	4,31	7,92	4,52	8,90
Blora	3,79	8,12	3,91	7,99	4,02	9,11	4,11	7,37
Jawa Tengah	5,33	6,24	5,60	5,63	5,50	8,99	4,89	3,32

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2009. (PE = pertumbuhan ekonomi)

Pada tahun kurun 2011 – 2015 yang akan datang pertumbuhan ekonomi diprediksikan meningkat. Prediksi ini didasarkan pada asumsi bahwa kondisi perekonomian global dan nasional semakin membaik, adanya aktivitas usaha di Kabupaten Rembang dengan beroperasinya PLTU dan didirikannya pabrik semen akan memicu dinamika ekonomi di Kabupaten Rembang. Iklim usaha yang makin kondusif di Kabupaten Rembang membuka peluang usaha. Prediksi pertumbuhan indikator makro Kabupaten Rembang tahun 2010 – 2015 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 9.
Prediksi Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan Nilai Tukar Petani (%)
Tahun 2010 - 2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,08	5,44	5,60	5,76	6,17	6,33
2.	Inflasi (%)	6,00-8,00	6,00-8,00	5,00-8,00	5,00-8,00	5,00-8,00	4,00-7,00
3.	NTP (%)	98,00	98,59	99,18	99,77	100,37	100,98

Sumber : Hasil Analisa

Pada tahun 2010 - 2015 diprediksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang sebesar 5,08 – 6,33% meningkat cukup signifikan. Besarnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang lima tahun mendatang diperkirakan masih berada dibawah Jawa Tengah sebesar 6,00 - 7,00%. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar itu dibutuhkan investasi sebesar kurang lebih 50 milyar per tahun dengan asumsi bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 1% dibutuhkan investasi sebesar 200 milyar di Kabupaten Rembang. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut diasumsikan tidak terjadi krisis ekonomi global dan laju inflasi relatif stabil serta Iklim usaha yang terus meningkat. Dengan investasi sebesar itu tingkat penyerapan tenaga kerja yang diharapkan sebesar 1.500 orang per tahun.

Laju inflasi diketahui pada tahun 2010 – 2015 dengan inflasi diprediksikan berkisar 4,00% - 8,00%. Sedangkan nilai Tukar Petani diprediksikan sebesar 100,98. Prediksi ini diasumsikan bahwa kondisi perekonomian tidak mengalami *anomaly*, kondisi politik mendukung dan berjalan seperti kondisi saat ini.

Dengan perbaikan infrastruktur pertanian serta ketersediaan sarana produksi pertanian diprediksi terjadi kenaikan NTP dari 98 pada tahun 2010 menjadi 100,98 pada tahun 2015.

Gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Rembang dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB (berdasarkan harga konstan tahun 2000) dalam kurun waktu 2005 - 2009 menunjukkan perkembangan yang bersifat positif. Total PDRB (berdasarkan harga konstan tahun 2000), tahun 2009 sebesar Rp 2,18 trilyun, jumlah tersebut meningkat cukup baik dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar Rp 2,09 trilyun.

Struktur PDRB tersebut didominasi oleh 3 sektor meliputi pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor bangunan. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 10.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Berdasarkan Harga Konstan (2000) Kabupaten Rembang
Tahun 2005-2009 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Pertanian	899.635,00	942.463,41	948.517,13	977.600,61	1.007.820,18
2.	Pertambangan dan penggalian	39.096,00	41.345,71	42.046,00	43.896,29	45.880,56
3.	Industri pengolahan	73.250,00	77.118,24	81.793,95	84.634,72	86.908,28
4.	Listrik, gas dan air bersih	7.061,00	7.535,01	8.271,26	8.734,04	9.279,48
5.	Bangunan	136.300,00	146.404,21	157.863,32	171.166,22	185.133,88
6.	Perdagangan, hotel, dan restoran	304.631,00	322.564,88	342.833,18	356.075,53	371.205,25
7.	Angkutan dan komunikasi	95.089,00	100.648,98	106.307,94	111.947,89	116.130,25
8.	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	43.887,00	44.905,26	46.258,17	48.216,05	50.876,32
9.	Jasa-jasa	226.611,00	243.577,55	266.060,22	291.141,24	313.502,30
10	Jumlah PDRB	1.825.560,00	1.926.563,25	1.999.951,17	2.093.412,59	2.186.736,49
Laju Pertumbuhan			5,53	3,83	4,67	4,46

Sumber: BPS Kabupaten Rembang (2005-2009).

Perkembangan serupa tampak pada nilai PDRB (atas dasar harga berlaku), dimana selama kurun waktu 2005-2009 mengalami perkembanganyang positif. Pada tahun 2005

sebesar Rp.2,77 trilyun dan pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar Rp. 4,45 trilyun. Tiga sektor perekonomian Kabupaten Rembang yang memberikan kontribusi terbesar adalah Sektor Pertanian (dalam arti luas), Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Sektor jasa-jasa.

Nilai PDRB Kabupaten Rembang tahun 2005 – 2009 Atas Dasar Harga Berlaku disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 11.
PDRB Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009 Atas Dasar Harga Berlaku
(Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Pertanian	1.311.353,00	1.535.691,49	1.683.344,90	1.861.359,47	2.021.190,65
2.	Pertambangan dan penggalian	61.902,00	69.056,77	70.400,57	76.626,49	82.903,78
3.	Industri pengolahan	111.815,00	129.462,04	146.035,27	162.481,91	174.120,28
4.	Listrik, gas dan air bersih	10.336,00	11.857,95	13.890,49	15.807,11	17.489,68
5.	Bangunan	214.673,00	252.072,70	301.553,95	354.698,41	402.573,46
6.	Perdagangan, hotel, dan restoran	488.702,00	558.175,33	642.471,05	706.708,16	774.277,91
7.	Angkutan dan komunikasi	153.246,00	180.317,98	196.199,83	229.306,04	253.421,00
8.	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	70.309,00	77.266,00	84.051,32	93.470,96	103.008,45
9.	Jasa-jasa	348.644,00	400.693,69	468.521,03	563.779,36	625.496,14
Produk Domestik Regional Bruto		2.770.982,00	3.214.593,95	3.606.468,41	4.064.237,92	4.454.481,36
Laju Pertumbuhan (%)			16,01	12,19	12,69	9,60

Sumber: BPS Kabupaten Rembang (2005-2009).

Perkembangan kondisi ekonomi pada tahun 2015 diprediksikan akan mengalami perbaikan dan meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2010. Prediksi PDRB tahun 2015 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 12.
Prediksi PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	PDRB ADHK tahun 2000 (juta rupiah)	2.297.755,42	2.422.753,31	2.558.427,50	2.705.792,92	2.872.650,15	3.054.548,66
2.	PDRB Perkapita ADHK tahun 2000 (rupiah)	3.718.021,60	3.881.467,30	4.058.247,00	4.249.506,96	4.466.890,98	4.702.766,41

Sumber : Hasil Analisa

Besarnya PDRB per kapita di suatu daerah dapat menggambarkan secara relatif tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Besarnya PDRB per kapita (ADHK tahun 2000) pada tahun 2010 sebesar Rp. 3.718.021,60 diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar Rp. 4.702.766,41 pada tahun 2015 dengan rata-rata peningkatan sebesar Rp. 185.877,14,- per tahun.

D. Gambaran Umum Kondisi Masing-masing Urusan

1. **Kelompok Urusan Pemerintahan**

a. **Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Perkembangan demokrasi di daerah semakin membaik sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah, keterbukaan informasi publik, meningkatnya jumlah partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan jumlah media massa. Dalam rangka pengembangan kelembagaan dan partisipasi politik masyarakat diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur Jawa Tengah 2008 dan Bupati Rembang tahun 2010), Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden secara langsung tahun 2009 yang telah dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat. Partisipasi politik masyarakat dalam penggunaan hak pilih termasuk kategori baik, dengan tingkat penggunaan hak pilih (*electoral rate*) rata-rata diatas 75%, baik dalam Pileg, Pilpres dan Pilkada. Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 jumlah partai politik peserta sebanyak 38 partai telah terpilih sebanyak 45 orang anggota DPRD Kabupaten Rembang untuk masa bakti tahun 2009 – 2014. Untuk melaksanakan kegiatan pemilu tersebut di Kabupaten Rembang telah dibentuk sebanyak 1.474 unit TPS yang tersebar di 287 desa dan 7 kelurahan dan 14 kecamatan.

Pendidikan politik bagi masyarakat (*pendidikan kewargaan/civic education*) terutama tentang peningkatan kesadaran hidup bernegara sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang lebih demokratis. Pendidikan kewargaan (*civic education*) sebagai upaya pendidikan politik bagi pemilih pemula, peningkatan kesadaran hak dan kewajiban warga negara, pemahaman hukum dan hak asasi manusia (HAM). Kedepan masih sangat diperlukan adanya keberlanjutan pendidikan politik bagi Masyarakat di Kabupaten Rembang.

Pengembangan kelembagaan dalam masyarakat menunjukkan peningkatan yang cukup baik, terutama organisasi kemasyarakatan (ormas). Sampai dengan tahun 2009 ormas profesi sebanyak 36 unit, terdiri dari ormas berdasarkan kegiatan sebanyak 13 unit, ormas berdasarkan fungsi sebanyak 23 unit. Organisasi sosial yang berbasis keagamaan sebanyak 88 unit, terdiri dari organisasi berbasis Agama Islam sebanyak 13 unit, Agama Kristen sebanyak 16 unit, Agama Budha sebanyak 5 unit dan Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME sebanyak 6 unit. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) pendampingan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebanyak 33 unit. Bentuk pengembangan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok – kelompok tersebut antara lain dalam pendampingan program, seperti: PNPM Mandiri, Kelompok Simpan Pinjam (KSP), Usaha Ekonomi Produktif, UED-SP disetiap desa, Kelompok Simpan Pinjam yang dikelola kaum perempuan di perdesaan, pengawasan eksternal dan advokasi kepada Pemerintah Daerah.

Potensi gangguan keamanan dan ketertiban perlu mendapatkan perhatian. Gambaran tentang gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2. 13.
Kejadian Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Rembang
Tahun 2005-2009

No	Gangguan Keamanan dan Ketertiban	2005	2006	2007	2008	2009
1	Curat / pencurian dengan pemberatan	40	41	54	48	55
2	Curas / pencurian dengan kekerasan	5	3	2	5	6
3	Kejadian pembunuhan	-	-	1	-	1

Sumber data : Kantor Kesbangpolinmas & Polres Rembang, 2010.

Tingkat kriminalitas dalam masyarakat di Kabupaten Rembang termasuk kategori rendah, hal ini diketahui dari kejadian pencurian dan perampokan sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk. Peningkatan ketenteraman dalam masyarakat di masing-masing desa/kelurahan dilakukan dengan cara penguatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan Program Kemitraan Polisi dengan masyarakat. Banyaknya warga masyarakat yang terlatih dapat menjadi kader dalam upaya peningkatan kamtibmas, penanggulangan Pekat (penyakit masyarakat) dan tanggap bencana. Jumlah anggota rakyat terlatih dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Rembang tahun 2009 terdiri dari Matrik Hansip/ Linmas sebanyak 2.242 orang dan Hansip/Linmas Desa sebanyak 11.019 orang. Hansip/Linmas Desa/kelurahan terdiri dari warga dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang bertugas di masing-masing

desa/kelurahan.

Dalam upaya meningkatkan keamanan, ketenteraman, ketertiban dalam masyarakat di Kabupaten Rembang, sebagaimana diamanatkan dalam PP. No. 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), maka tugas pokok dan fungsi Satpol PP semakin diarahkan pada peningkatan kamtramtibmas, penegakkan Perda dan penertiban pedagang kali lima (PKL).

Wilayah Kabupaten Rembang memiliki potensi terjadinya bencana alam, antara lain banjir di wilayah dataran rendah dan pasang naik di wilayah pantai. Potensi bencana terkait dengan kekeringan cenderung semakin meluas, angin ribut, tanah longsor (di wilayah pegunungan) dan kebakaran hutan jati. Untuk itu diperlukan kesiapan aparat pemerintah dan *stakeholder* yang lain untuk tanggap terhadap bencana sehingga resiko kerugian harta benda dan jiwa dapat dikurangi. Perincian tentang kejadian bencana alam dari tahun 2005 – 2009 di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 14.
Banyaknya Bencana Alam dan Kerugian di Kabupaten Rembang
Tahun 2005-2009

No	Bencana Alam	2005	2006	2007	2008	2009
1	Banjir					
a	Kejadian (kali)	-	62	1	67	7
b	Kerugian (juta Rp)	-	1.860,00	85,00	438,00	1.89,00
c	Korban Jiwa (jiwa)	-	-	-	-	-
2	Tanah Longsor					
a	Kejadian (kali)	-	3	-	-	4
b	Kerugian (juta Rp)	-	80,00	-	-	141,00
c	Korban Jiwa (jiwa)	-	-	-	-	-
3	Angin Ribut					
a	Kejadian (kali)	5	7	6	4	13
b	Kerugian (juta Rp)	45	137,00	76,81	91,00	173,18
c	Korban Jiwa (jiwa)	-	-	-	-	-
4	Kebakaran					
a	Kejadian (kali)	20	13	17	14	-
b	Kerugian (juta Rp)	919.935	354,65	0,59	1.171,50	-
c	Korban Jiwa (jiwa)	-				
5	Gelombang Laut (Pasang)					
a	Kejadian (kali)	1		2	3	
b	Kerugian (juta Rp)	225		100,00	55,50	
c	Korban Jiwa (jiwa)	-		-	-	-
6	Abrasi Kawasan Pantai					
a	Kejadian (kali)	1		1	4	3
b	Kerugian (juta Rp)	6.800		66,00	66,10	643,50
c	Korban Jiwa (jiwa)	-	-	-	-	-

Sumber data : Kantor Kesbangpolinmas, 2009.

b. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1) Otonomi Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Undang–Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang harus melaksanakan urusan yang telah dilimpahkan kepada kabupaten yaitu sebanyak 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Pelimpahan urusan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan urusan tersebut setiap tahun dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pusat serta masyarakat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (ILPPD) seperti yang disebut dalam PP Nomor 3 tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Penyelenggaraan urusan kewenangan tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan pembiayaan, sumberdaya manusia, kelembagaan daerah dan potensi lain yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menyangkut segenap urusan kewenangan pemerintah, urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang baik telah disusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Pada tahun 2009 telah tersusun Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 5 buah, Peraturan Bupati (Perbup) sebanyak 53 buah.

Tabel 2. 15.
Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
di Kabupaten Rembang Tahun 2004 – 2009

No	Tahun	Perda	Perbup
1.	2004	10	30
2.	2005	12	34
3.	2006	14	46
4.	2007	21	48
5.	2008	14	72
6	2009	5	53

Sumber Data : Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang (2010)

Pembaruan peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam rangka tertib hukum dan perundangan di daerah. Agar dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan dan lebih terjamin. Dengan kelengkapan perangkat hukum di daerah baik Perda dan Perbup maka masyarakat lebih terlindungi dalam mendapatkan pelayanan publik. Upaya penegakkan peraturan perundangan di masa mendatang menjadi prasyarat penting bagi penegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) di daerah. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi di daerah yang dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai tujuan otonomi daerah dibutuhkan kelembagaan pemerintahan daerah yang mantap dan berprinsip pada *good and clean government*, aparatur pemerintah daerah yang profesional, penetapan standar kinerja pemerintahan daerah, baik dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi urusan kewenangan wajib dan standar kinerja bagi urusan pilihan. PP No. 65 tahun 2005 menyatakan bahwa pemerintah pusat akan menetapkan pedoman penyusunan standar pelayanan minimal dan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota akan melaksanakannya sebagai perwujudan dari pemerintahan yang baik. Standar pelayanan minimal yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat sebanyak delapan (8) urusan wajib, sebagai berikut :

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan.
- 2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.
- 4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 tahun 2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 tahun 2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat.
- 6) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 tahun 2009 tentang SPM Pusat Pelayanan Terpadu Bagi saksi dan/ Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di

- Kabupaten/Kota, dan Permen Meneg PP Nomor 1 tahun 2010 tentang SPM Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten/Kota.
- 7) Peraturan Kepala BKKBN No. 55 tahun 2010 tentang SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.
 - 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
 - 9)

Dalam peningkatan pelayanan publik maka masyarakat dapat berpartisipasi dalam penilaian kinerja penyelenggaraan urusan melalui monitoring capaian SPM dan dengan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan yang diterima masyarakat secara langsung.

Tantangan pembangunan daerah ke depan semakin kompleks dan rumit, mengingat perubahan lingkungan strategis yang dinamis, perkembangan globalisasi dan perdagangan bebas diantaranya pelaksanaan *Asian Free Trade Area* pada tahun 2010, *North American Free Trade Area (NAFTA)* dan liberalisasi moneter dan pasar modal. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rembang harus berusaha meningkatkan pelayanan publik, kebijakan pro investasi sebagai langkah menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan investasi baik PMA maupun PMDN.

2) Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan pemerintahan umum mengacu pada reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan partisipatif bertumpu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pelayanan publik yang berkualitas mencerminkan citra aparatur pemerintah dan pelayanan semakin profesional.

Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dengan membentuk pelayanan perijinan terpadu dalam bentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (*One Stop Services/OSS*) telah melayani lebih kurang 16 perijinan. Selain itu, upaya peningkatan pelayanan bidang-bidang lainnya semakin ditingkatkan, antara lain pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan air bersih, pelayanan persampahan dan lain sebagainya.

Beberapa kendala dalam optimalisasi pelayanan publik adalah terbatasnya prasarana dan sarana, kesiapan aparatur pemerintah daerah, peningkatan pelayanan publik secara digital (*e-governance*) dan kesenjangan antar perdesaan dengan perkotaan. Keterbatasan ini menyebabkan pelayanan publik memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga kecepatan dan ketepatan pelayanan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi) maupun dengan dunia usaha semakin penting di masa mendatang. Banyaknya kesepakatan kerjasama (*memorandum of understanding*) dari tahun ke tahun semakin meningkat, yaitu dari 16 kesepakatan kerjasama pada tahun 2007 menjadi 24 pada tahun 2009 yang berupa kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan kabupaten/kota yang lain, kerjasama dengan provinsi dan pemerintah pusat dan kalangan dunia usaha baik swasta, BUMN/BUMD maupun perguruan tinggi.

3) Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah dari tahun 2005–2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Sejak tahun 2005 pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Rembang mengalami peningkatan secara signifikan. Pertumbuhan PAD dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 16.
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Rembang 2005–2010

No	Tahun	PAD	Pertumbuhan (%)
----	-------	-----	-----------------

No	Tahun	PAD	Pertumbuhan (%)
1	2005	21.092.337.000	
2	2006	36.246.692.000	72
3	2007	42.255.838.407	17
4	2008	51.150.558.424	21
5	2009	56.887.895.318	11
6	2010	78.227.428.000	38

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kab. Rembang (2010)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui PAD Kabupaten Rembang meningkat cukup baik dari tahun ke tahun. Persentase pertumbuhan sejak tahun 2005 – 2010 cukup besar, yaitu 11% – 72 %. Namun demikian kualitas PAD tersebut sebenarnya terletak pada proporsi PAD terhadap APBD tahun yang bersangkutan. Proporsi PAD terhadap APBD tahun 2005 – 2010, terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 17.
Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD
Kabupaten Rembang 2005–2010

No	Tahun	PAD	APBD	Proporsi terhadap APBD (%)
1	2005	21.092.337.000	295.615.447.000	7
2	2006	36.246.692.000	481.358.999.000	8
3	2007	42.255.838.407	510.249.537.172	8
4	2008	51.150.558.424	579.272.806.693	9
5	2009	56.887.895.318	608.044.827.149	9
6	2010	78.227.428.000	696.509.030.000	11

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kab. Rembang (2010)

Dilihat dari besarnya proporsi, ternyata pertumbuhan PAD yang relatif besar belum cukup berarti apabila dibandingkan dengan besarnya APBD Kabupaten Rembang. Kemampuan membiayai daerah atau kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan hanya berkisar sebesar 7 – 11% saja, dalam enam tahun terakhir.

Sumber pendapatan daerah terbesar yang memberikan kontribusi terhadap APBD adalah retribusi daerah. Pertumbuhan masing-masing pos pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 18.
Jumlah Pendapatan Berdasarkan Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Rembang 2005–2010

No	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	Lain-lain pendapatan	Total PAD
1	2005	4.692.500.00	12.467.337.000	770.000.000	3.162.500.000	21.092.337.000
2	2006	5.152.500.00	22.656.876.000	945.000.000	7.492.316.000	36.246.692.000
3	2007	6.174.551.576	26.097.927.121	1.590.211.457	8.393.148.253	42.255.838.407
4	2008	7.622.038.604	33.259.283.610	4.467.267.722	5.801.968.488	51.150.558.424
5	2009	9.859.879.106	36.010.317.228	4.584.864.416	6.432.834.568	56.887.895.318
6	2010	13.045.000.000	25.610.047.551	4.287.386.328	35.284.994.121	78.227.428.000

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kab. Rembang (2010)

Sedangkan besarnya persentase dari masing-masing kelompok pendapatan daerah di Kabupaten Rembang secara rinci dapat dikemukakan, sebagai berikut :

Tabel 2. 19.
Proporsi Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total PAD
Kabupaten Rembang 2005 - 2010 (%)

No	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	Lain-lain pendapatan	Total PAD
1	2005	22	59	3	14	100
2	2006	14	63	3	21	100
3	2007	15	62	4	20	100
4	2008	15	62	9	11	100
5	2009	17	63	8	11	100
6	2010	17	33	5	45	100

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kab. Rembang (2010)

Kedua tabel diatas menggambarkan bahwa dari pos-pos PAD yang memberikan kontribusi terbesar adalah pos retribusi daerah dan pos pajak daerah. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah terbesar dalam lima tahun terakhir. Namun dimasa mendatang sumber pendapatan dari pajak daerah memiliki potensi yang besar dan penting untuk ditingkatkan kinerjanya. Upaya intensifikasi pajak daerah perlu semakin didorong sejalan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak. Hasil pendapatan dari pajak daerah yang tinggi mencerminkan meningkatnya kegiatan usaha di sektor riil. Melalui intensifikasi pajak daerah diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah. Pos lain yang dapat ditingkatkan adalah laba perusahaan daerah (BUMD) yang dilakukan melalui peningkatan manajemen usaha dan efisiensi di masa mendatang.

Sampai dengan tahun 2010 keuangan daerah Kabupaten Rembang terbesar berasal dari dana perimbangan (Dana Alokasi Umum /DAU, Dana Alokasi Khusus/DAK, bagi hasil pajak dan bukan pajak). Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang lain yang bersifat potensial adalah pinjaman daerah dan penjualan obligasi daerah. Namun sampai dengan tahun 2009 belum banyak kabupaten/kota di Indonesia yang menggunakan pinjaman daerah sebagai sumber dana pembangunan, bahkan belum ada daerah yang menggunakan obligasi daerah sebagai sumber dana pembangunan daerah.

4) Aparatur Daerah

Aparatur daerah merupakan perangkat daerah yang menjadi pelaksana semua urusan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui aparatur daerah semua urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dilaksanakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kondisi saat ini penyelenggaraan urusan di Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 28 unit. Untuk dapat meningkatkan pelayanan umum dan efektivitas pemerintahan secara administratif dibagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Peningkatan aparatur pemerintah desa/kelurahan di masa mendatang perlu semakin ditingkatkan, terutama dalam pelayanan umum, kamtibmas dan pembangunan desa/kelurahan.

Peningkatan kinerja aparatur semakin mendapatkan perhatian sejalan dengan program reformasi birokrasi dan profesionalisme PNS di daerah. Berdasarkan PP No. 53 tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru, diharapkan disiplin PNS di masa mendatang semakin meningkat.

5) Kepegawaian

Sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pegawai negeri sipil (PNS). Kondisi saat ini jumlah PNS di Kabupaten Rembang pada tahun 2009 berjumlah 8.700 orang, dengan jumlah penduduk sebanyak 611.886 jiwa. Perbandingan jumlah aparatur dengan penduduk diketahui sebesar 1:71 sedangkan menurut Prof Sofian Effendi, 2005 : perbandingan ideal aparatur dengan jumlah penduduk adalah 1 : 50 orang. Namun demikian untuk menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan kedepan lebih didasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai urusan dan kewenangan yang diemban pemerintah daerah.

Tabel 2. 20.
Jumlah PNS Dirinci Menurut Golongan
Kabupaten Rembang 2005 –2009 (orang)

Tahun	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Total
2005	109	1.781	4.060	1.598	7.548
2006	74	1.585	3.341	2.365	7.365
2007	331	1.895	3.286	2.643	8.155
2008	402	2.017	2.995	2.910	8.324
2009	470	2.165	2.945	3.120	8.700

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang (2010)

Berdasarkan kepangkatan dan golongan kepegawaian PNS di Kabupaten Rembang tahun 2009 sumber daya aparatur pemerintah daerah termasuk baik sekali, karena sebagian besar termasuk dalam Golongan III sebesar 33,85% dan Golongan IV sebesar 35,86% dari jumlah aparatur 8.700 orang.

Kualitas PNS terlihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Tabel sebagai berikut menggambarkan tingkat pendidikan PNS:

Tabel 2. 21.
Jumlah PNS dirinci menurut Pendidikan yang Ditamatkan
Kabupaten Rembang 2004 –2009 (orang)

No	Tahun	SD	SMP	SLTA	Diploma	S1	S2	Total
1	2005	579	569	4.120	1.008	1.221	51	7.548
2	2006	415	442	2.752	1.198	2.424	134	7.365
3	2007	516	461	2.794	1.569	2.677	138	8.155
4	2008	370	608	2.752	1.728	2.731	135	8.324
5	2009	361	606	2.671	1.917	2.985	160	8.700

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang (2010)

Tabel di atas menggambarkan bahwa kualitas PNS terlihat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 diketahui sebanyak 2.985 orang atau 34,31% berpendidikan Sarjana (S-1) dan 160 orang 1,83% bergelar Magister (S-2).

Dalam upaya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, maka dilaksanakan Diklat bagi PNS, baik melalui Diklat Pra Jabatan (PNS Golongan I dan II serta untuk Golongan III), Diklatpim dan Diklat Teknis Fungsional sebagai upaya meningkatkan kapasitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

6) Persandian

Urusan persandian merupakan salah satu kewenangan untuk melakukan komunikasi secara vertikal yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kabupaten Rembang sudah memiliki pelayanan persandian yang merupakan bagian dari Bagian Umum Setda. Bagian persandian ini belum optimal dalam mengelola persandian karena belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar pemerintah, baik secara vertikal dan antar SKPD di Kabupaten Rembang.

c. Perencanaan Pembangunan

Upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi secara nasional telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang tersebut mengamanatkan Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Agar terdapat keselarasan antara RPJM Nasional 2010–2014 dengan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah 2008–2013 dan Kabupaten/Kota telah diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Penyelerasaan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional 2010–2014 tanggal 31 Maret 2010, terutama dalam hal pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional 2010–2014 yang memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Rembang. Disamping itu, perlu diperhatikan arahan dari Inpres No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 dimana terdapat 14 program prioritas program pembangunan yang perlu ditingkatkan hasilnya lebih optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan tingkat kehidupan masyarakat di Daerah. Arahan pembangunan melalui Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan, mengamanatkan pula kepada Pemerintah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan capaian target Tujuan Pembangunan Millenium (MDG`s) dan Pro Rakyat untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, kesetaraan gender dan kelestarian lingkungan hidup yang lebih baik, capaian yang optimal di Daerah akan menyumbang prestasi di tingkat nasional.

Demikian pula, dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota, maka sampai tahun 2009 telah diterbitkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk delapan (8) urusan kewenangan wajib, meliputi : bidang kesehatan, bidang lingkungan hidup, bidang pemerintahan dalam negeri, bidang sosial, bidang perumahan rakyat, bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dan bidang pendidikan dasar. Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah diterbitkan dua SPM, yaitu bidang pusat pelayanan bagi saksi dan/korban tindak pidana perdagangan orang, bidang pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Diharapkan dengan terbitnya pedoman SPM tersebut maka diwajibkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun target capaian agar standar kinerja pelayanan dapat diukur sesuai dengan SPM.

Dengan dilantikannya pasangan Bupati/Wakil Bupati terpilih 2010-2015, hasil Pemilukada Tahun 2010, maka perlu disusun RPJM Daerah Kabupaten Rembang 2010–2015 sesuai dengan masa jabatan bupati terpilih. Dalam proses penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Rembang ini, diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui konsultasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan. Kemudian RPJM Daerah Kabupaten Rembang di bahas melalui tahap-tahap pembahasan dengan DPRD Kabupaten Rembang untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang, baik RPJP Daerah maupun RPJM Daerah masih menghadapi kendala, terutama data dan informasi yang bersifat series, akurat dan pilah gender. Data dasar sebagai pendukung perencanaan pembangunan Daerah dapat berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi, hasil validasi serta hasil kajian/penelitian dari lembaga/instansi penelitian. Data dan informasi yang akurat sangat membantu dalam mempertajam perumusan isu strategis, prediksi atau perhitungan kondisi lima tahun mendatang.

Data dan informasi yang tersedia di Bappeda Kabupaten Rembang, antara lain Sistem Informasi Profil Daerah, Buku PDRB Kabupaten Rembang, Buku Kabupaten Rembang Dalam Angka dan Data Susenas.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang telah memasukkan unsur partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder. Pelibatan stakeholder pembangunan tersebut dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hal yang sama juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyusun perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral

ekonomi, sosial budaya, prasarana wilayah dan sumber daya alam serta kesetaraan gender.

Dalam rangka percepatan pencapaian hasil-hasil pembangunan, Kabupaten Rembang telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota yang lain dan kalangan dunia usaha dalam peningkatan promosi investasi, pengelolaan potensi daerah dan sumber daya alam serta mengembangkan potensi daerah lainnya.

Untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan sesuai yang direncanakan, dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya. Setiap tahun Bappeda Kabupaten Rembang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD. Hasil monitoring dan evaluasi ini juga digunakan untuk bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rembang dan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati kepada DPRD Kabupaten Rembang di akhir masa jabatan.

d. Statistik

Data statistik yang wajib disediakan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah menurut pasal 152 ayat (1) dan (2) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain : (1) data penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah; (3) kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan PNS daerah; (4) keuangan daerah; (5) potensi sumberdaya daerah; (6) produk hukum daerah; (7) kependudukan; (8) informasi dasar kewilayahan; dan (9) informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyediaan data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dan menentukan kualitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Kelengkapan data statistik dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang permasalahan dan tantangan pembangunan daerah. Statistik diselenggarakan untuk mendukung pembangunan daerah, mengembangkan sistem statistik nasional yang handal, efektif dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik.

Kemudahan dalam memperoleh data/informasi tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yaitu bahwa segenap stakeholder pembangunan, baik SKPD, kalangan dunia usaha maupun masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan data untuk berbagai kepentingan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang sebagai instansi vertikal dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara rutin melaksanakan tugas sensus dan survei, antara lain Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, Sensus Ekonomi, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Potensi Desa (PODES), dan kegiatan penyediaan data statistik dasar lainnya. BPS Kabupaten Rembang bersinergi dan berkoordinasi dengan SKPD terkait telah menyusun publikasi setiap tahun yaitu Kabupaten Rembang Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Survei Angkatan Kerja Daerah (Sakerda), Indikator Sosial Ekonomi, Sakerda, Statistik Gender dan Indeks Harga Konsumen serta Inflasi dan penyediaan data statistik lainnya untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Proses penyusunan tersebut melibatkan dinas atau instansi terkait, yang dilakukan melalui rapat koordinasi secara terpadu dan terprogram, sehingga diharapkan penyusunan buku-buku statistik tersebut dapat memberikan data yang benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tantangan pembangunan khususnya dibidang pelayanan data/informasi kedepan semakin kompleks, hal ini mengingat pelayanan data atau informasi bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan maupun pelayanan data/informasi kepada masyarakat atau stakeholder belum terwujud secara optimal. Dimana masih dijumpai adanya data yang berbeda serta belum tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab baik aparat maupun masyarakat dalam pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang akurat dan akuntabel.

e. Kearsipan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan bidang kearsipan menjadi sangat penting dan strategis karena didalamnya mengandung makna yang luas, tidak hanya sebatas penyimpanan dokumen/arsip saja namun secara keseluruhan mencakup beberapa aspek yaitu pengumpulan, pengelolaan/penyelamatan, penyimpanan dan pemanfaatan dokumen/arsip.

Jumlah dokumen/arsip yang dikumpulkan (arsip dinamis inaktif) dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, pada tahun 2005 sebanyak 3.550 berkas dan terus mengalami peningkatan hingga sampai tahun 2009 mencapai 6.105 berkas. Dimana keseluruhan berkas arsip yang terkumpul merupakan arsip dalam bentuk tekstual.

Pelestarian dokumen/arsip dilakukan dengan cara mengalihmediakan beberapa arsip foto ke digital, pada tahun 2008 telah dialihmediakan sebanyak 50 lembar foto dan reproduksi foto sebanyak 50 lembar. Beberapa arsip yang dikelola berbentuk foto jumlahnya mencapai 3.000 eksemplar dan film sebanyak 34 eksemplar, sedangkan arsip berbentuk kaset rekaman suara sebanyak 75 buah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kearsipan, pemerintah secara berkala melakukan pemantauan dan penyuluhan kearsipan kepada seluruh SKPD. Sampai dengan tahun 2009 pengelolaan kearsipan di Kabupaten Rembang belum didukung tenaga pengelola yang memadai.

Selanjutnya data penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 22.
Data Penyelenggaraan Kearsipan
Kabupaten Rembang 2005 –2009

No.	Indikator	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Khasanah						
	Jumlah dokumen/arsip yang tersimpan dalam1 tahun	eksemplar	3550	3700	4000	5563	6105
	Jumlah pegawai arsip (arsiparis)	orang	1	1	--	--	--
	Jumlah tenaga pengelola kearsipan	orang	5	5	5	3	10
B.	Akuisisi Arsip pada SKPD						
	Jumlah SKPD yang telah diakuisisi (berkala)	SKPD	2	2	2	2	2
C.	Pengolahan Arsip						
	- (Arsip Dinamis Inaktif)	eksemplar	3550	3700	4000	5563	6105
	- Jumlah alih media foto ke digital	eksemplar	--	--	--	50	50
D.	Penyuluhan						
	- Jumlah Pemantauan dan Penyuluhan Arsip pada SKPD	kegiatan	40	30	45	45	46
	- Pembinaan petugas pengelola kearsipan	kegiatan	91	70	41	41	14

Sumber: Kantor Pustasip Kab Rembang (2009)

f. Keperpustakaan

Kewenangan penyelenggaraan Urusan Perpustakaan pemerintah kabupaten meliputi penetapan peraturan/kebijakan tentang penyelenggaraan perpustakaan untuk skala kabupaten, pembinaan teknis perpustakaan, penyelamatan dan pelestarian koleksi nasional, pengembangan jabatan fungsional pustakawan, dan pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis dan fungsional perpustakaan. Kondisi penyelenggaraan perpustakaan di daerah dapat dilihat antara lain berdasarkan tingkat kunjungan masyarakat, koleksi perpustakaan, serta kegiatan-kegiatan promosi perpustakaan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2. 23.
Data Perpustakaan Umum
Kabupaten Rembang 2005 – 2009

No	Indikator	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	9
A	Jumlah pengunjung perpustakaan umum daerah	orang	22,562	13,369	10,618	10,472	9.338
	Jumlah pengadaan koleksi buku (fiksi)	judul	340	666	-	198	3.410
		eksemplar	495	1315	-	389	5.367
	Jumlah pengadaan koleksi buku (Non fiksi)	judul	390	1138	-	1690	6.822
		eksemplar	618	1605	-	3444	17.577
	Jumlah pengadaan majalah	judul	78	18	-	10	3
		eksemplar	127	111	-	24	36
	Jumlah pengadaan surat kabar	judul	3	4	4	4	4
		eksemplar	900	1200	1200	1200	1440
	Jumlah pengadaan koleksi audio visual	judul	-	-	-	-	182
		eksemplar	-	-	-	-	182
	Jumlah tenaga perpustakaan	orang	9	10	9	9	10
	Jumlah Pustakawan	orang	1	1	1	-	-
	Jumlah anggota perpustakaan umum daerah	orang	265	182	235	182	2286
	Jumlah buku yang dipinjam	eksemplar	19,974	9,312	7,435	8,516	7.692
	Jumlah perpustakaan keliling	unit mobil	1	1	-	-	1
B	KERJASAMA & PROMOSI PERPUSTAKAAN						
	Jumlah kerjasama dengan perpustakaan perguruan tinggi	kegiatan	1	1	1	1	1
	Jumlah kerjasama dengan perpustakaan instansi/khusus	kegiatan	1	2	3	3	3
	Jumlah kegiatan promosi perpustakaan selama 1 tahun	kegiatan	2	3	3	3	3
	Jumlah kegiatan promosi minat baca selama 1 tahun	kegiatan	3	3	4	4	4
	Jumlah pertemuan rapat koordinasi pembinaan perpustakaan	kegiatan	2	2	2	2	2
C	PERPUSTAKAAN BINAAN						
	Jumlah perpustakaan masyarakat/Kelurahan	unit/gedung	28	32	38	42	56
	Jumlah perpustakaan sekolah SD	unit/gedung	34	39	45	51	56
	Jumlah perpustakaan sekolah SLTP	unit/gedung	34	34	34	35	91
	Jumlah perpustakaan sekolah SLTA	unit/gedung	12	12	13	14	14
	Jumlah perpustakaan sekolah SMK	unit/gedung	15	15	15	15	15
	Jumlah perpustakaan sekolah MI	unit/gedung	32	32	32	36	36
	Jumlah perpustakaan sekolah MTs	unit/gedung	30	32	32	34	34
	Jumlah perpustakaan sekolah MA	unit/gedung	12	13	13	14	14
	Jumlah perpustakaan perguruan tinggi	unit/gedung	1	1	1	1	1
	Jumlah taman bacaan masyarakat	unit/gedung	2	6	6	6	8
	Jumlah perpustakaan instansi/khusus	unit/gedung	1	1	1	1	2
	Jumlah perpustakaan kecamatan	unit/gedung	14	14	14	14	14
	Jumlah perpustakaan pondok pesantren	unit/gedung	3	3	4	5	5
	Jumlah perpustakaan masjid	unit/gedung	1	1	1	1	3
	Jumlah perpustakaan Puskesmas	Unit/gedung	-	-	-	-	1

Sumber: Kantor Pustasip Kab Rembang (2009)

Koleksi buku perpustakaan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu koleksi buku fiksi dan non fiksi. Tahun 2005 jumlah pengadaan koleksi buku fiksi berjumlah 340 judul buku dan meningkat menjadi 3.410 pada tahun 2009, sedangkan jumlah pengadaan koleksi buku non fiksi menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2005 sebanyak 390 judul buku, bertambah menjadi 6.822 judul buku pada tahun 2009. Dalam rangka memasyarakat perpustakaan sekaligus untuk mempromosikan minat baca, telah dilaksanakan kegiatan promosi perpustakaan dan promosi minat baca, dalam setahun rata-rata dilaksanakan sebanyak 3-4 kegiatan.

Pembangunan dibidang perpustakaan ditunjukkan pula dengan bertambahnya jumlah perpustakaan binaan pemerintah daerah. Jumlah perpustakaan masyarakat selama kurun waktu 5 tahun terakhir sampai dengan tahun 2009 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2005 sebanyak 28 buah, meningkat pada tahun 2009 menjadi 56 buah. Sedangkan jumlah perpustakaan binaan sekolah baik SD, SLTP, SLTA juga mengalami trend positif. tingkat SD/MI pada tahun 2005 sebanyak 66 buah telah meningkat pesat hingga mencapai 92 buah pada tahun 2009, tingkat SLTP/MTs sebanyak 64 pada tahun 2005 meningkat hingga mencapai 125 buah pada tahun 2009, tingkat SLTA/MA tahun 2005 sebanyak 27 buah bertambah hingga mencapai 29 buah pada tahun 2009.

Dalam rangka meningkatkan motivasi dan minat baca masyarakat, pemerintah daerah telah memiliki layanan perpustakaan keliling sebanyak 1 unit yang akan melayani masyarakat di perdesaan serta masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pada Pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus, sehingga melalui pelayanan perpustakaan keliling merupakan cara yang tepat untuk memperluas akses masyarakat terhadap perpustakaan.

2. Kelompok Urusan Prasarana Wilayah

a. Pekerjaan Umum

1) Jalan dan Jembatan

Kondisi Jalan

Secara geografis Kabupaten Rembang memiliki lokasi yang strategis karena dilalui oleh jalur pantura yang dapat menghubungkan antar propinsi di Pulau Jawa (Semarang-Surabaya) yang melalui Kabupaten Rembang (Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-Surabaya). Jaringan jalan di Kabupaten Rembang berdasarkan fungsi jalan adalah sebagai berikut:

- **Jalan Arteri Primer**

Jalan arteri melayani angkutan jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Jalan arteri primer di Kabupaten Rembang yaitu jalan antar propinsi yang melintasi Kabupaten Rembang di sepanjang jalur pantai utara melalui Kecamatan Kaliore – Rembang – Lasem – Sluke – Kragan - Sarang.

- **Jalan Kolektor Primer**

Jalan kolektor melayani angkutan perjalanan jarak dekat dengan kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk dibatasi. Di Kabupaten Rembang Jalan kolektor primer menghubungkan Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Blora melalui Kecamatan Rembang – Sulang – Bulu dan menghubungkan Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, melalui Kecamatan Lasem – Pancur - Pamotan – Sedan – Sale.

- **Jalan Lokal Primer**

Jalan lokal melayani angkutan setempat dengan perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lokal primer di Kabupaten Rembang yaitu jalan-jalan yang melalui kota-kota kecamatan.

Pada ruas-ruas jalan arteri khususnya di Kota Rembang dan Lasem yang fungsinya menghubungkan kota atau jalur regional namun saat ini juga berfungsi sebagai jalur internal kota. Himpitan fungsi yang demikian sedikit banyak menyebabkan jalan-jalan tersebut dipadati oleh pergerakan regional maupun lokal, pada akhirnya kecepatan menjadi rendah.

Panjang Jalan di kabupaten Rembang pada tahun 2009 untuk Jalan Nasional sepanjang 60,81 km dengan kondisi baik 30.65 km, kondisi sedang 18.36 km, kondisi rusak ringan 10.58 km dan kondisi rusak berat 1.22 km. Sementara Jalan Provinsi sepanjang 57,45 Km dengan kondisi baik 28.95 km, 17.35 km dalam kondisi sedang, 10 km rusak ringan dan 1.15 rusak berat.

Sedang untuk panjang Jalan Kabupaten meningkat 15,17% dari tahun 2005 sepanjang 558.9 km menjadi 642.75 km pada tahun 2009, dengan kondisi baik 260,21 Km dan 115,46 Km dalam kondisi sedang, 150 Km kondisinya rusak ringan dan 117,09 Km rusak berat.

Selengkapnya panjang dan kondisi jalan yang ada di Kabupaten Rembang baik jalan kabupaten, jalan provinsi maupun jalan nasional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 24.
Panjang Jalan Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
Bina Marga						
1	Panjang jalan kabupaten (Km)	558,09	558,09	642,75	642,75	642,75
	Kondisi jalan baik	329,34	202,57	410,72	456,36	311,66
	Kondisi sedang	110,40	148,90	167,12	115,58	105,59
	Kondisi jalan rusak ringan	113,60	246,32	94,48	128,55	132,98
	Kondisi jalan rusak berat	109,85	109,20	137,55	57,84	92,53
2	Panjang jalan Provinsi (Km)	57,45	57,45	57,45	57,45	57,45
	Kondisi jalan baik	29,00	-	-	26,78	28,95
	Kondisi sedang	-	-	-	18,31	17,35
	Kondisi jalan rusak ringan	18,94	-	-	10,83	10,00
	Kondisi jalan rusak berat	9,51	-	-	1,52	1,15
3	Panjang jalan Nasional (Km)	60,81	60,81	60,81	60,81	60,81
	Kondisi jalan baik	15,26	-	-	16,85	30,65
	Kondisi sedang	-	-	-	20,50	18,36
	Kondisi jalan rusak ringan	14,45	-	-	15,47	10,58
	Kondisi jalan rusak berat	31,11	-	-	7,99	1,22

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2009

Dilihat dari karakteristik Jalan Kabupaten dari total panjang jalan pada tahun 2009 tersebut sepanjang 601.25 Km merupakan jalan aspal, 34.20 Km dalam jalan kerikil, dan 7.30 Km masih dalam keadaan tanah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 25.
Karakteristik Jalan Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
Jalan Kabupaten						
1	Jenis Permukaan (Km)	558,09	558,09	642,75	642,75	642,75
a.	Aspal (Km)	481,19	532,99	595,95	601,25	601,25
b.	Kerikil (Km)	40,60	21,80	37,50	32,20	34,20
c.	Tanah (Km)	3,30	3,30	9,30	9,30	7,30
d.	Tidak terinci (Km)	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2009

Kondisi Jembatan

Total panjang jembatan yang ada di Kabupaten Rembang adalah 1.239,90 m, kondisi jembatan tersebut semua dalam kondisi baik. Sedangkan jembatan Provinsi adalah 398,80 m, dan kondisi jembatan tersebut juga masih dalam kondisi yang baik. Untuk jembatan Nasional sepanjang 627,60 m juga dalam kondisi baik.

Total panjang jembatan Kabupaten Rembang tahun 2009 yaitu 1,25 km. Jumlah jembatan kabupaten 99 unit dalam kondisi baik. Sementara itu jembatan yang dalam kondisi rusak ringan sebanyak 36 unit dan kondisi rusak berat 4 unit. Walaupun jembatan masih dalam kondisi baik, namun perlu diwaspadai karena sebagian jembatan telah berusia tua. Perbaikan kondisi jembatan, tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga di wilayah perdesaan sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.

Tabel 2. 26.
Jumlah dan Panjang Jembatan di Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2009

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Jembatan Kabupaten					
	Kondisi Jembatan baik (unit)	70	72	92	96	99
	Kondisi Jembatan rusak ringan (unit)	45	43	29	26	36
	kondisi Jembatan rusak berat (uni)	11	9	5	4	4
2	Panjang jembatan kabupaten (m)	1.249,90	1.249,90	1.249,90	1.249,90	1.249,90
3	Panjang jembatan Propinsi (m)	398,80	398,80	398,80	398,80	398,80
4	Panjang jembatan Nasional (m)	627,60	627,60	627,60	627,60	627,60

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2009

2) Bidang Sumber Daya Air

Kebudayaan sumberdaya air penting untuk dikelola dengan baik agar terus menerus memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (*social goods*) dan sumber daya ekonomi (*economic goods*) yang seimbang melalui pengelolaan terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sistem prasarana pengairan di Kabupaten Rembang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, untuk permukiman (air bersih) dan industri.

Prasarana pengairan di Kabupaten Rembang digunakan untuk irigasi dan penyediaan air bersih. Prasarana pengairan tersebut meliputi bendungan, bendung, waduk, embung, checkdam, saluran irigasi dan bangunan pelengkap. Masing-masing memiliki peran untuk pelayanan air irigasi sawah. Sedangkan bendungan, waduk dan embung yang tersebar di Kabupaten Rembang sebagian besar digunakan untuk penyedia (*supply*) air bersih yang dikelola oleh PDAM dan sebagian lagi untuk pengairan irigasi.

Wilayah Kabupaten Rembang memiliki 5 (lima) Daerah aliran Sungai (DAS) besar yang mempunyai beberapa anak sungai mulai dari hulu sampai hilir yaitu : (1) DAS Randugunting; (2) DAS Karanggeneng; (3) DAS Babagan; (4) DAS Kalipang dan (5) DAS Kali Kening/Semen.

Air merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, oleh karena itu sumberdaya air penting untuk dikelola sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Kabupaten Rembang memiliki jumlah sumber air sebanyak 40 unit.

Panjang saluran irigasi primer Kabupaten Rembang lima tahun terakhir memiliki panjang 130,953 Km, dengan kondisi di lapangan 45% (58,929 Km) baik, 15% (19,643 Km) mengalami rusak berat dan sisanya 40% (52,381 Km) mengalami kerusakan ringan. Untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat dari sumber air ke lokasi persawahan dibutuhkan saluran irigasi sekunder. Saluran irigasi sekunder selama lima tahun terakhir memiliki panjang 119,495 Km dengan kondisi 45% (53.772 Km) baik, 10% (11.950 Km) mengalami rusak berat dan 45% (53.773 Km) mengalami kerusakan ringan.

Di Kabupaten Rembang terdapat 16 embung dan 1 rawa, baik besar maupun kecil yang menyuplai kebutuhan air baku, yaitu embung Jatihadi, embung Banyukuwung, embung Grawan, embung Panohan, embung Jatimudo, embung Kerep, embung Kumendung, embung Rowosetro, embung Padaran, embung Kasreman, embung Brogo, embung Lodan, embung Kasur, embung Precet, embung Surutan, embung Sumbreng, dan rawa Bolodewo. Pengembangan embung-embung ini perlu terus dilakukan untuk dapat menampung aliran air hujan, sehingga dapat dijadikan cadangan untuk keperluan pertanian. Sedangkan jumlah bendungan di Kabupaten Rembang sebanyak 105 bendungan yang tersebar di 14 kecamatan.

Melihat kondisi diatas, peningkatan pengelolaan prasarana sumber daya air perlu diupayakan untuk meningkatkan jumlah pasokan air. Peningkatan tersebut dilakukan melalui peningkatan kuantitas embung dan peningkatan kualitas lingkungan di sekitarnya agar air yang tertampung tidak cepat surut dan termanfaatkan secara optimal. Peningkatan pengelolaan prasarana sumberdaya air juga dilakukan melalui Program Pengembangan Sungai Terpadu (PPST). PPST ini dilaksanakan dengan tujuan agar sungai lebih lama menampung air sehingga tidak cepat mengalir ke laut. Dengan lebih lama sungai menampung air, air dapat dikelola terlebih dahulu untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

Sedangkan untuk dapat mendistribusikan air dari sumber air menuju ke sawah, Kabupaten Rembang memiliki saluran irigasi tersier sepanjang 36.567 Km. Namun kondisi saluran irigasi tersier tersebut 2,65% (0,968 Km) baik, 7,35% (2.689 Km) mengalami kerusakan berat dan sisanya 90% (32,910 Km) mengalami kerusakan ringan.

Tabel 2. 27.
Sumberdaya Air dan Panjang Saluran Irigasi
di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah Sumber Air	43	43	43	43	43
	Jumlah sumber air yang dilindungi	43	43	43	43	43
2	Panjang saluran irigasi primer (Km)	116.467	116.467	125.520	125.870	130.953
	a. kondisi rusak berat (Km)	23.293	23.293	22.594	21.398	19.643
	b. kondisi rusak ringan (Km)	69.880	69.880	62.760	60.418	52.381
3	Panjang saluran irigasi sekunder (Km)	119.023	119.023	119.423	119.423	119.495
	a. kondisi rusak berat (Km)	23.805	23.805	17.913	17.913	11.950
	b. kondisi rusak ringan (Km)	-	-	-	-	53.773
4	Panjang saluran irigasi tersier (Km)	34.951	34.951	34.951	36.567	36.567
	a. kondisi rusak berat (Km)	6.990	6.990	8.360	1.828	2.689
	b. kondisi rusak ringan (Km)	27.961	27.961	27.961	50.785	32.910

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air 2010

Sebagai salah satu sumber daya alam, sumber daya air dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :

- Klasifikasi berdasarkan jenis sumber/cadangan sumber air
Berdasarkan jenis sumber/ cadangan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia, air dapat dibagi atas :
 - Air hujan yang meliputi :
 - Air hujan tampungan
 - Air limpasan
 - Air permukaan yang meliputi :
 - Mata air
 - Air sungai
 - Air danau/ situ dan alamiah
 - Air danau/ situ buatan
 - Bendungan/ bendung irigasi
 - Rawa
 - Air tanah yang meliputi :
 - Air tanah bebas/ air tanah dangkal
 - Air tanah semi tertekan/ artesis
 - Air tanah tertekan
- Klasifikasi sumber daya air berdasarkan alokasi penggunaannya dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bagian penting yaitu :
 - Sebagai bahan untuk kebutuhan hidup manusia dengan berbagai resiko (untuk kebutuhan domestik)
 - Untuk kebutuhan industri
 - Untuk kebutuhan pertanian
 - Sebagai sumber energi atau tenaga

Optimalisasi sumberdaya air Kabupaten Rembang berdasarkan data Neraca Sumber Daya Air (NSDA, 2006), data wilayah dan tersedianya kebutuhan air pengairan digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 28.
Luas Sawah berdasarkan kategori dan Kapasitas Sumberdaya air
di Kabupaten Rembang Tahun 2010

No.	Uraian	Luas / Kapasitas
1.	Luas daerah Kabupaten Rembang	= 1.014,08 Km ²
2.	Luas sawah irigasi terdiri: a) Luas sawah teknis b) Luas sawah ½ teknis c) Luas sawah irigasi sederhana Jumlah	= 9.025 Ha = 3.367 Ha = 9.495 Ha = 21.887 Ha
3.	Luas sawah tadah hujan	= 18.087 Ha
4.	Curah hujan rata-rata th. 2009 = 454,58 : 12	= 37.88 mm/bulan
5.	Volume Embung Banyukuwung Volume Bendungan Lodan Volume Embung Grawan Volume Waduk Panohan Jumlah	= 2.416.000 M ³ = 5.390.000 M ³ = 402.034 M ³ = 1.566.000 M ³ = 9.774.034 M ³
6.	Debit air permukaan pada tahun 2009 1. DAS Randugunting 2. DAS Karanggeneng 3. DAS Babagan 4. DAS Kalipang 5. DAS Kali Kening/Semen Jumlah	= 5.323 l/dt = 1.314 l/dt = 726 l/dt = 320 l/dt = 401 l/dt = 8.084 l/dt
7.	Mata air/ sumber-sumber air di Kabupaten Rembang : 1. Sb. Belik Kembar (Pancur) 2. Sb. Ngoto 3. Sb. Kedung Ruah 4. Sb. Sumber Agung 5. Sb. Soco (Pancur) 6. Sb. Kajar (Pasedan, Bulu) 7. Sb. Dong Bulu 8. Sb. Kajar (Lasem) 9. Sb. Gondang 10. Sb. Kebon 11. Sb. Dawe 12. Sb. Kadiwono 13. Sb. Kalidoso 14. Sb. Taban 15. Sb. Gayam 16. Sb. Nglengcong 17. Sb. Mudal (Bulu) 18. Sb. Dukoh 19. Sb. Jambon 20. Sb. Condro 21. Sb. Cadong 22. Sb. Gupit 23. Sb. Tapaan 24. Sb. Agung/Kebon 25. Sb. Brubul 26. Sb. Nglongko 27. Sb. Nglodro 28. Sb. Dowan 29. Sb. Kajar (Gunem) 30. Sb. Taban 31. Sb. Soco (Gunem) 32. Sb. Brubulan 33. Sb. Pacing 34. Sb. Kedung Lingi 35. Sb. Ngulahan 36. Sb. Watu Lawang 37. Sb. Mrican I 38. Sb. Mrican II 39. Sb. Dur Sumber 40. Sb. Bulan	= 24 l/dt = 18 l/dt = 12 l/dt = 10 l/dt = 8 l/dt = 20 l/dt = 25 l/dt = 20 l/dt = 15 l/dt = 12 l/dt = 10 l/dt = 16 l/dt = 10 l/dt = 8 l/dt = 14 l/dt = 12 l/dt = 35 l/dt = 18 l/dt = 16 l/dt = 18 l/dt = 20 l/dt = 20 l/dt = 15 l/dt = 25 l/dt = 10 l/dt = 8 l/dt = 12 l/dt = 16 l/dt = 20 l/dt = 23 l/dt = 15 l/dt = 67 l/dt = 12 l/dt = 10 l/dt = 16 l/dt = 8 l/dt = 18 l/dt = 15 l/dt = 20 l/dt = 15 l/dt

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air 2010

1.Curah Hujan

Potensi curah hujan th. 2009 setelah dihitung dalam perbandingan tinggi hujan dengan luas daerah tangkapan masing-masing stasiun penakar curah hujan adalah :
 $458,58 : 12 = 37,88 \text{ mm/bulan}$
Jumlah cadangan air potensial :
 $1.014.080.000 \times 0,03788 \times 1 \text{ M3} = 38.413.350,40 \text{ M3}$
Jumlah cadangan air efektif :
 $70 \% \times 38.413.350,40 \text{ M3} = 26.889.345,28 \text{ M3}$

2. Debit Sungai

Debit sungai = 7.376 lt/dtk
Cadangan efektif :
 $7,376 \times 60 \times 60 \times 24 \times 365 \times 1 \text{ M3} = 232.609.536 \text{ M3}$

3. Mata Air

Debit Mata air = 740 lt/dt
Cadangan efektif :
 $0,74 \times 60 \times 60 \times 24 \times 365 \times 1 \text{ M3} = 23.336.640 \text{ M3}$

4. Sumber Daya Air

Jumlah cadangan air berasal dari :
Mata air = 23.336.640 M3
Sungai = 232.609.536 M3
Curah Hujan = 38.413.350,40 M3
Jumlah = 282.835.521,28 M3

Pemanfaatan air tersebut digunakan antara lain untuk kebutuhan :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Irigasi Persawahan	= 2.131.059,456 M3
2.	Domestik a) Hidran Umum b) Instansi Pemerintah c) Niaga I d) Niaga II e) Rumah Tangga I f) Rumah Tangga II g) Sosial I h) Sosial II	= 16.729,00 M3 = 9.296,00 M3 = 1.020,00 M3 = 181.075,00 M3 = 10.432,00 M3 = 15.864,00 M3 = 3.968,00 M3 = 241.244,00 M
3.	Industri a) Industri I b) Industri II	= 341,00 M3 = 1.045,00 M3
4.	Air tak termanfaatkan	= 280.232.447,82 M3

Melihat kondisi yang demikian dapat diartikan bahwa kecenderungan sistem prasarana pengairan di Kabupaten Rembang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, kemudian untuk permukiman (air minum) dan industri. Sumberdaya air yang ada di Kabupaten Rembang pertahun apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya air tersebut masih terdapat air yang tak termanfaatkan sebanyak 280.232.447,82 M3. Hal ini karena pada saat air melimpah seperti pada saat musim penghujan, sumberdaya air tersebut belum dapat dikelola dengan baik, sehingga pada saat musim kemarau sumberdaya air tersebut kering dan tidak dapat dimanfaatkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- Daerah yang belum beririgasi teknis meliputi Kecamatan Rembang, Bulu, Sulang, Lasem, Sluke, Kragan, Sedan, Kaliori. Sedangkan kecamatan yang lainnya sudah mendapat pengairan yang cukup.
- Perubahan lahan irigasi merupakan salah satu akibat kekurangan air baku untuk jaringan irigasi, sehingga untuk masa yang akan datang perlu prioritas pengembangan sistem jaringan didasarkan pada sumber air, kebutuhan irigasi dan perlu dipikirkan kelangsungan pemakaian dari jaringan irigasi tersebut.

- Berdasarkan kemampuan jaringan irigasi teknis yang baru mencapai kurang dari 19% merupakan tantangan untuk mencapai target lebih banyak teraliri oleh jaringan irigasi teknis.
- Penggalan dan eksplorasi sumber daya air yang terus menerus dari sumber air untuk irigasi juga akan mengakibatkan penurunan debit, untuk itu usaha-usaha mempertahankan dan meningkatkan sumber daya air perlu dilakukan dengan beberapa arahan perlindungan kawasan lindung dan upaya reboisasi dan rehabilitasi dari sistem ekologi yang ada.

3) Saluran Irigasi

Sarana pengairan sangat penting peranannya dalam mendukung produktivitas pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan daerah. Prasarana pengairan yang digunakan untuk mengairi sawah di Kabupaten Rembang terdiri dari bendungan dan saluran irigasi. Air pada bendungan bersumber dari beberapa sungai besar di Kabupaten Rembang, antara lain Sungai Randugunting, Sungai Balang, Sungai Panohan Babon, Sungai Waru, Sungai Kalipang dan lain lain.

Saluran irigasi teknis yang terdapat di Kabupaten Rembang terdiri dari saluran primer, sekunder dan tersier. Secara keseluruhan panjang saluran irigasi primer sepanjang 130,953 km, saluran irigasi sekunder sepanjang 119,495 km, dan saluran irigasi tersier sepanjang 36,56 km. Dari luas persawahan sebesar 29.209 ha, sawah yang terairi dengan sarana pengairan teknis sebanyak 18%, sedangkan yang menggunakan sarana pengairan setengah teknis sebanyak 11,3%, dan lainnya (60,94%) masih tergantung dengan air hujan (tadah hujan). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan irigasi masih belum menjangkau seluruh wilayah. Kondisi seperti ini sangat tidak mendukung peningkatan produktivitas pertanian di masa mendatang.

Dengan melihat kondisi saluran yang ada, diperlukan pengembangan sarana prasarana irigasi sehingga mampu meningkatkan jangkauan areal persawahan yang dapat teraliri. Diperlukan pula pengelolaan jaringan irigasi agar tetap dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan produksi pertanian sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

4) Penyediaan Air Minum

Pengelolaan prasarana air bersih selama ini ditangani dua instansi, yaitu DPU Kabupaten Rembang yang menangani embung dan PDAM Kabupaten Rembang yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan air. PDAM Kabupaten Rembang memiliki peran sangat penting dalam pemanfaatan sumber air yang ada untuk diolah menjadi air yang bersih dan layak dikonsumsi masyarakat.

Penyediaan air bersih perpipaan yang dilayani oleh PDAM hingga tahun 2009 masih terbatas. Kondisi penduduk yang mendapatkan air PDAM sebanyak 15,47% dari penduduk Kabupaten Rembang, sedangkan sebanyak 42,16% penduduk telah menggunakan air bersih.

Selama ini produksi air minum oleh PDAM Kabupaten Rembang memanfaatkan beberapa sumber air baku yang berasal dari berbagai tempat, antara lain mata air Mudal Pamotan, Gowak, Kajar Kursi, Kajar Sanggrahan, serta memanfaatkan air embung. Jumlah embung baik besar maupun kecil yang menjadi sumber air bersih di Kabupaten Rembang hanya sebanyak 16 buah, pengelolaannya dilakukan oleh PDAM.

Sumber air perlu dipelihara dan dikelola dengan sebaik-baiknya karena wilayah Kabupaten Rembang yang berlokasi di bagian hilir merupakan daerah yang sangat tergantung dengan daerah di atasnya. Dalam kaitannya dengan penyediaan air bersih perlu dilakukan penggalan potensi sumber daya air yang masih tersedia dan berapa besar kandungannya serta kualitas air.

Prasarana air bersih di Kabupaten Rembang yang utama adalah dua embung besar yaitu embung Banyukuwung dan embung Lodan. Selain embung, sumber air bersih lain adalah mata air namun jumlahnya sedikit.

Sistem pengeloaan prasarana air bersih sudah baik, tetapi perlu pemeliharaan dan penambahan prasarana, terutama embung sebagai sumber air bersih dan reservoir serta pipa-pipa pendistribusiannya.

Lokasi embung di Kabupaten Rembang sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 29.
Nama dan Lokasi Embung di Kabupaten Rembang

No	Nama Embung	Kecamatan	Keterangan
1	E. Jatihadi	Sumber	Berfungsi
2	E. Banyukuwung	Sumber	Berfungsi
3	E. Grawan	Sumber	Belum Berfungsi
4	E. Jatimudo	Sulang	Berfungsi
5	E. Kerep	Rembang	Berfungsi
6	E. Kemendung	Rembang	Berfungsi
7	E. Rowosetro	Rembang	Kering
8	E. Padaran	Rembang	Berfungsi
9	E. Kasreman	Rembang	Berfungsi
10	E. Brogo	Rembang	Berfungsi
11	E. Lodan	Sarang	berfungsi
12	E. Kasur	Sarang	Berfungsi
13	E. Precet	Gunem	Berfungsi
14	E. Suruhan	Gunem	Berfungsi
15	E. Sumbreng	Gunem	Berfungsi
16	E. Panohan	Gunem	Belum Berfungsi

Sumber: DPU Kabupaten Rembang, 2010

Dalam proses produksi PDAM Kabupaten Rembang memanfaatkan beberapa sumber air baku sebagai berikut:

Tabel 2. 30.
Sumber Air Baku di Kabupaten Rembang Tahun 2009

NO.	SUMBER AIR	LOKASI	KAPASITAS TERPASANG (L/Dt)	KAPASITAS PRODUKSI (L/Dt)
I	Mata Air			
	1. Mudal Pamotan	Pamotan	70	47.48
	2. Gowak	Lasem	2	1.30
	3. Suco Gunem	Gunem	2	1.50
	4. Taban	Bulu	3	1.75
	5. Pasedan	Bulu	1	1,00
II	Air Permukaan			
	1. Banyu Kuwung	Sulang	35	26.57
	2. Jatimudo	Sulang	10	3.28
	3. Lodan	Sarang	20	0
III	Sungai			
	1. Semen Sale	Sale	100	78.30
IV	Sumur Dalam			
	1. Ngulaan Bulu	Bulu	3	1.14
	JUMLAH		246	162.32

Sumber : PDAM Kabupaten Rembang, 2010

Tabel 2. 31.
Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Rembang

NO.	JENIS PELANGGAN	TAHUN				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Hidran umum	130	127	113	119	111
2	Rumah Tangga	12.483	12.726	12.957	13.237	13.812
3	Niaga	907	918	913	942	962
4	Industri	31	27	31	30	26
5	Instansi Pemerintah	111	116	126	130	130
6	Sosial	421	424	427	431	437
JUMLAH		14.083	14.338	14.567	14.889	15.478

Sumber : PDAM Kabupaten Rembang 2010

Berdasarkan data tersebut di atas PDAM baru dapat melayani 18,82% dari jumlah penduduk di Kabupaten Rembang. Jumlah produksi air bersih non PDAM yang ada di Kabupaten Rembang saat ini, mata air sebesar 1.381 l/dt, potensi embung dan bendung keseluruhan sebesar 6.327.900 m³ (maksimal). Berdasarkan data di atas, potensi sumber air sebesar 1.381 l/dt (dengan asumsi standar 1 l/det untuk 1.000 jiwa) dapat dialokasikan untuk 1.381.000 jiwa jumlah tersebut belum termasuk pemanfaatan sumber air embung dan bendung.

5) Persampahan

Sampah merupakan permasalahan yang dihadapi hampir di semua kota, termasuk Kabupaten Rembang. Sampai dengan tahun 2009 volume sampah yang tidak terangkut masih lebih besar dibandingkan sampah yang terangkut. Sistem pengolahan sampah di Kabupaten Rembang menggunakan dua sistem yaitu sistem pengolahan sampah *on-site* (pengolahan pada lokasi) atau cara tradisional (dibakar atau ditimbun), dan sistem pengolahan sampah *off-site* (pengolahan secara terstruktur). Selama ini pengelolaan sampah yang tidak terangkut lebih banyak dilakukan dengan sistem *on-site*. Dengan cara ini timbul masalah apabila sampah yang akan dimusnahkan dengan cara ditimbun jumlahnya banyak, sehingga lahan yang dibutuhkan cukup luas. Begitu pula apabila jika dibakar dengan cara yang sederhana, maka dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan perencanaan dalam pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan.

Sistem pengolahan sampah yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum bidang Kebersihan dan Drainase sampai tahun 2010 baru melayani kecamatan Rembang, Lasem, Pamotan, Kragan, Sarang, Sedan dan Sulang. Sedangkan target Bidang Kebersihan dan Drainase sampai tahun 2015 mampu melayani sampah di seluruh kabupaten Rembang (14 kecamatan) dengan konsekuensi penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Bidang Kebersihan dan Drainase.

Gambaran Volume sampah terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 32.
Persampahan Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
Persampahan						
1	Volum sampah (m³)	403.332,65	424.225,35	444.167,61	495.453,33	549.424,6
2	Volume sampah terangkut (m³)	132.246,80	152.974,42	259.747,14	296.678,64	348.556,7
3	Volume sampah tidak terangkut (m³)	271.085,85	271.250,93	184.420,47	198.774,69	200.867,9

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2009

Volume sampah di Kabupaten Rembang tahun 2009 sebanyak 549.424,6 m³. Dari jumlah tersebut yang dapat diangkut 348.556,7 (60%) dan sisanya 200.867,9 (40%) tidak terangkut ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA).

Volume sampah/limbah padat di Kabupaten Rembang pada taun 2008 mencapai 495.453,33 m³, yang terangkut sekitar 296.678,64 m³ (60%), sisanya 198.774,69 m³ (40%) tidak terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Pengolahan dan kondisi sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak di Desa Landoh Kecamatan Sulang dilakukan dengan sistem pemadatan sampah dilakukan 25 kali/ bulan, dan penutupan tanah dilakukan 5 kali/ bulan. Adapun Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di Kabupaten Rembang sebagai berikut:

Lokasi TPS Terbuka :

1. TPS TPI Tasik Agung Rembang (2 lokasi)
2. TPS Selopuro Lasem
3. TPS pasar Kragan

Lokasi TPS Tertutup :

- a) Kecamatan Rembang
1. TPS TPI Tasik Agung (2 lokasi)
2. TPS Pasar Pentungan
3. TPS Gambiran
10. TPS di belakang pendopo kabupaten
11. TPS Pasar Sumberrejo
12. TPS depan Stadion KRIDA

4. TPS Undaan

5. TPS Depo

6. TPS Krapyak

7. TPS di Jl. Setia Budi

8. TPS di lapangan Borotugel

9. TPS di RSUD “Dr. Sutrasno”

13. TPS di perumahan “Griya Permai Indah”

14. TPS di BKK “Pasar Sumberrejo”

15. TPS di perumahan “Permata Hijau”

16. TPS di Jl. Mondoteko

17. TPS di belakang Balai Kartini

18. TPS Pasar barat Sumberejo
- b) Kecamatan Lasem

19. TPS di belakang terminal

20. TPS di Jolotundo

21. TPS di Karangturi

22. TPS di Selopuro

23. TPS di Ngemplak

24. TPS di alon-alon (pasar lama)
- c) Kecamatan Pamotan

25. TPS di pasar Pamotan

d) Kecamatan Sulang

26. TPS di pasar Sulang

Melihat penjelasan diatas dapat diketahui bahwa volume sampah terus bertambah sedangkan sistem perangkutan dan pengelolaannya belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada.

Analisis ke depan untuk sistem prasarana sampah diharapkan terpadu walaupun wilayah pelayanannya masih terbatas. Selama ini kecamatan yang menggunakan pengolahan offsite baru 3 (tiga) kecamatan, tetapi untuk lima tahun kedepan dengan melihat faktor jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi ada penambahan 5 kecamatan lagi yang menggunakan pengolahan offsite yaitu kecamatan Kaliori, Pamotan, Pancur, Kragan dan Sarang. Sedangkan tempat pembuangan akhir (TPA) akan dibagi dalam 3 tempat, yaitu:

1. TPA Desa Landoh (yang sekarang ada) melayani Kecamatan Rembang, Kaliori dan Sulang;

2. TPA yang melayani Kecamatan Lasem, Pancur dan Pamotan;

3. TPA yang melayani Kecamatan Kragan dan Sarang.

6) Saluran Drainase

Gambaran kondisi drainase di Kabupaten Rembang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 33.
Panjang Saluran Drainase Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2009

No	Indikator	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
Persampahan						
1	Panjang Drainase (Km)	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950
2	Panjang Drainase dalam Kondisi Baik (Km)	13.800	14.100	14.400	14.700	15.050
	Panjang drainase dalam kondisi Rusak ringan (Km)	4.200	4.100	4.000	3.850	3.700
3	Panjang Drainase dalam kondisi rusak berat (Km)	7.950	7.750	7.550	7.400	7.200

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2010

Kabupaten Rembang memiliki panjang saluran drainase sepanjang 25.950 Km , dengan kondisi baik sepanjang 15.050 km, kondisi rusak ringan sepanjang 3.700 km, dan kondisi rusak berat sepanjang 7.200 km yang berfungsi sebagai saluran untuk pembuangan industri, niaga dan pemukiman penduduk. Panjang drainase ini mengalami perbaikan rata-rata pertahun 2,34%. Untuk Kondisi rusak ringan mengalami perbaikan sebesar 2,44% pertahun sedangkan kondisi drainase yang rusak berat mengalami perbaikan setiap tahunnya 1,81%.

Penataan jaringan drainase yang baik di seluruh wilayah Kabupaten, terutama kawasan pemukiman perlu terus dikembangkan. Pengembangan jaringan drainase tersebut dilakukan dengan mengikuti kontour tanah dan sungai sebagai muara akhir. Pada sisi sebelah kanan dan kiri jalan perlu dibangun jaringan drainase agar air hujan langsung dapat disalurkan ke sungai lewat jaringan drainase yang ada. Dengan demikian jaringan drainase dapat berfungsi secara sempurna dalam pencegahan terjadinya banjir.

7) Perkotaan dan Perdesaan

1. Perkotaan

Kawasan perkotaan sebagaimana dalam rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Rembang merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kabupaten, yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, meliputi Kecamatan Rembang.
- b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yang berada di wilayah kabupaten, yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan yang akan dipromosikan menjadi PKL, meliputi Kecamatan Lasem, Pamotan dan Kragan.
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa meliputi Kecamatan Kaliori, Sumber, Bulu, Sulang, Pancur, Gunem, Sedan, Sale, Sarang dan Sluke

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, jasa pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Rembang meliputi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 34.
Kawasan Perkotaan di Kabupaten Rembang Tahun 2008

NO.	KECAMATAN	HIERARKI STRUKTUR RUANG	LUAS WILAYAH KECAMATAN	LUAS PERKOTAAN / IBU KOTA KECAMATAN (Ha)	DESA / KELURAHAN YANG TERMASUK WILAYAH PERKOTAAN/ IKK
1	Rembang	Pusat Kegiatan Lokal	5,880.769	3,183.760	1. Kel. Gegugunung Kulon 2. Ds. Gegunung Wetan 3. Kel. Pacar 4. Kel. Tanjungsarsi 5. Ds. Pandean 6. Ds. Sukoharjo 7. Ds. Kabongan Lor 8. Ds. Kabongan Kidul 9. Ds. Sumberjo 10. Ds. Tasikagung 11. Ds. Sawahan 12. Ds. Leteh 13. Kel. Sidowayah 14. Kel. Kutoharjo 15. Ds. Gedangan 16. Ds. Ngotet 17. Ds. Pulo 18. Ds. Tireman 19. Ds. Pantiharjo 20. Ds. Weton 21. Ds. Ketanggi 22. Kel. Magersari 23. Ds. Pasarbanggi 24. Ds. Mondoteko 25. Ds. Waru 26. Ds. Sridadi 27. Ds. Turusgede 28. Ds. Padaran 29. Ds. Kumendung 30. Ds. Ngadem 31. Ds. Sendangagung 32. Ds. Kedungrejo

NO.	KECAMATAN	HIERARKI STRUKTUR RUANG	LUAS WILAYAH KECAMATAN	LUAS PERKOTAAN / IBU KOTA KECAMATAN (Ha)	DESA / KELURAHAN YANG TERMASUK WILAYAH PERKOTAAN/ IKK
2	Kaliori	Pusat Kegiatan Kawasan	6,149.973	417.370	1. Ds. Tambakagung 2. Ds. Mojowarno 3. Ds. Dresi Kulon
3	Lasem	Pusat Kegiatan Lokal Promosi	4,503.796	1,226.013	1. Ds. Jolotundo 2. Ds. Sumbergirang 3. Ds. Karangturi 4. Ds. Babagan 5. Ds. Dorokandang 6. Ds. Soditan 7. Ds. Ngemplak 8. Ds. Gedongmulyo
4	Sluke	Pusat Kegiatan Kawasan	3,759.146	349.002	1. Ds. Sluke 2. Ds. Jatisari 3. Ds. Pangkalan 4. Ds. Trahan
5	Pancur	Pusat Kegiatan Kawasan	4,593.570	234.600	1. Ds. Pancur 2. Ds. Wuwur 3. Ds. Punggurharjo 4. Ds. Langkir
6	Sulang	Pusat Kegiatan Kawasan	8,453.746	326.250	1. Ds. Sulang 2. Ds. Kemadu 3. Ds. Jatimudo
7	Bulu	Pusat Kegiatan Kawasan	10,239.515	661.853	1. Ds. Bulu 2. Ds. Pasedan 3. Ds. Jukung 4. Ds. Mantingan
8	Sumber	Pusat Kegiatan Kawasan	7,672.903	296.320	1. Ds. Sumber 2. Ds. Jatihadi 3. Ds. Sekarsari 4. Ds. Kedungasem 5. Ds. Megulun
9	Pamotan	Pusat Kegiatan Lokal Promosi	8,156.085	345.750	1. Ds. Pamotan 2. Ds. Bangunrejo 3. Ds. Sidorejo
10	Gunem	Pusat Kegiatan Kawasan	8,020.341	91.999	1. Ds. Gunem 2. Ds. Kulutan 3. Ds. Sidomulyo 4. Ds. Tegalwah 5. Ds. Sendangmulyo
11	Sedan	Pusat Kegiatan Kawasan	7,964.321	240.970	1. Ds. Sedan 2. Ds. Karangasem 3. Ds. Sidorejo 4. Ds. Karas 5. Ds. Mojosari
12	Sale	Pusat Kegiatan Kawasan	10,714.406	166.880	1. Ds Sale 2. Ds Wonokerto
13	Kragan	Pusat Kegiatan Lokal Promosi	6,166.149	544.580	1. Ds. Kragan 2. Ds. Karangharjo 3. Ds. Tegalmulyo
14	Sarang	Pusat Kegiatan Kawasan	9,133.315	417.370	1. Ds. Sarang Meduro 2. Ds. Sendangmulyo 3. Ds. Kalipang 4. Ds. Temperak 5. Ds. Bajingjowo 6. Ds. Bajingmeduro 7. Ds. Karangmangu
TOTAL LUAS			101,408.035	8,502.717	

Sumber : Bappeda Kabupaten Rembang, 2009

2. Perdesaan

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perdesaan di Kabupaten Rembang meliputi semua desa yang tidak termasuk dalam kawasan perkotaan.

Strategi pengembangan kawasan pedesaan ditempuh melalui pengembangan kawasan produksi pertanian, pengembangan produk unggulan perdesaan, pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), penyediaan prasarana sarana dan pengembangan kelembagaan desa.

Pengaturan permukiman pedesaan dilakukan sebagai berikut:

- 1. Pengembangan kawasan permukiman diarahkan menyebar terutama pada simpul-simpul kegiatan (*nodes*).
- 2. Membuka hubungan pusat-pusat kegiatan dengan kantong-kantong permukiman pedesaan, termasuk penyediaan infrastruktur secara memadai untuk mendukung interaksi desa terhadap wilayah luar.
- 3. Menciptakan pola permukiman yang mampu menampung kegiatan pengolahan pertanian baik berupa kerajinan, industri kecil, maupun pariwisata.
- 4. Permukiman perdesaan akan menjadi penyeimbang pertumbuhan pusat dan wilayah belakang, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara perdesaan dan perkotaan.
- 5. Permukiman perdesaan diarahkan menjadi tempat transformasi fungsi perkotaan. Kawasan perdesaan, akan menjadi pusat distribusi dan koleksi sumberdaya yang diperlukan bagi pengembangan wilayah perdesaan.

3. Bangunan dan Lingkungan

Untuk mengendalikan pembangunan permukiman kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Rembang telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung sebagai perwujudan pelaksanaan UU no 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dimana mengatur persyaratan bangunan gedung, aturan keselamatan, aturan keamanan dan kenyamanan bangunan gedung.

Semua perijinan termasuk Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Rembang secara terpadu dilaksanakan oleh KPPT Kabupaten Rembang yang secara teknis dalam pembinaan Dinas Pekerjaan Umum. Meski banyak menghadapi kendala di lapangan, namun secara umum pelaksanaan perijinan bisa memenuhi target yang telah ditentukan. Kendala di lapangan yang terjadi karena kapasitas SDM pelaksana dan prasarana yang ada belum memadai. Secara rinci jumlah IMB yang dikeluarkan pada tahun 2005 - 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 35.
Pemberian IMB di Kabupaten Rembang
Tahun 2005 – 2009

Uraian	Satuan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah bangunan ber IMB	unit	244	398	330	510	481

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Bidang Cipta Karya 2010

b. Perhubungan

1) Perhubungan Darat

Kabupaten Rembang merupakan penghubung antara Provinsi Jawa Tengah dengan Propinsi Jawa Timur. Prasarana perhubungan untuk memudahkan mobilitas penduduk antar daerah telah tersedia dua terminal kelas B (Terminal Lasem dan Terminal Rembang) dan tujuh terminal kelas C yang menghubungkan wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan di Kabupaten Rembang. Terminal tipe C terletak di Kecamatan Rembang, Lasem, Sulang, Gunem, Sarang, Pamotan, dan Sumber. Sampai saat ini pelayanan terminal di Kabupaten Rembang sudah berfungsi sesuai dengan peruntukannya, meskipun masih memerlukan perbaikan.

Untuk memperlancar kegiatan transportasi pada simpul-simpul jalur transportasi disediakan fasilitas terminal. Berdasarkan jenis angkutannya maka terminal dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

- 1. Terminal angkutan penumpang
- 2. Terminal angkutan barang

Terminal angkutan penumpang di Kabupaten Rembang yaitu terminal Rembang tipe B sebanyak 2 unit dan terminal tipe C sebanyak 7 unit pada tahun 2009, lebih banyak dibandingkan tahun 2005 yaitu 5 unit. Terminal bus di Kabupaten Rembang sebanyak 2 unit, yaitu di Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem. Sedangkan terminal non bus (minibus dan angkudes) terdapat di Kecamatan Sumber, Gunem, Sarang, Pamotan, Sulang, Rembang dan Lasem. Agen perjalanan hanya terdapat di Kecamatan Rembang, Lasem dan Sale.

Kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Rembang meningkat, seiring pertambahan moda kendaraan setiap tahunnya. Kasus kecelakaan yang terjadi sebanyak 12 kasus pada tahun 2005 dan pada tahun 2009 meningkat menjadi sebanyak 300 kasus. Jumlah perkembangan jumlah kasus kecelakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 36.
Perkembangan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Transportasi Darat Dan Fasilitas Keselamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2009

Keterangan	Satuan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
Kecelakaan						
Jumlah Kejadian	kejadian	12	482	260	270	300
Fasilitas Keselamatan						
Rambu						
Kebutuhan	buah	1695	1695	1695	1695	1695
Terpasang	buah	746	694	695	677	612
Marka						
Kebutuhan	M	129.141	129.141	129.141	129.141	129.141
Terpasang	M	49.875	49.875	70.575	85.425	85.425
Pagar pengaman						
Kebutuhan	M	-	-	-	516	344
Terpasang	M	-	-	-	172	172
Deliniator						
Kebutuhan	buah	-	-	-	-	-
Terpasang	buah	-	-	-	-	-
Cermin Tikungan						
Kebutuhan	buah	-	-	-	-	-
Terpasang	buah	-	-	-	-	-
APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)						
Kebutuhan	buah	46	46	46	46	46
Terpasang	buah	25	31	31	31	31

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang , 2010

Pelayanan pergerakan antar daerah di Kabupaten Rembang dilayani beberapa armada Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan kendaraan umum berupa angkutan kota dan angkutan perdesaan. Data tahun 2005 jumlah armada otobus AKDP sebanyak 36 armada, AKAP sebanyak 38 armada, sedangkan angkudes sejumlah 358 armada, dan minibus sebanyak 59 armada.

Jumlah angkutan darat pada tahun 2005-2006 sebanyak 526 unit, tahun 2007 sebanyak 533 unit, tahun 2008 sebanyak 538 unit dan tahun 2009 sebanyak 541 unit. Di Terminal Rembang jumlah pergerakan arus lalu lintas bus AKDP sebanyak 1.024 trip, bus AKAP sebanyak 1.628 trip. Sementara itu, di Lasem banyaknya perjalanan (trip) bus AKDP sebanyak 4.683 trip, AKAP sebanyak 35.217 trip dan Angkudes sebanyak 41.219 trip. Pergerakan arus lalu lintas yang ada di Kabupaten Rembang sudah memenuhi jumlah penumpang, tetapi pada saat liburan hari besar masih terjadi penumpukkan penumpang.

Selain angkutan umum dan kendaraan pribadi, di Kabupaten Rembang juga banyak dilintasi kendaraan angkutan barang. Angkutan barang ini sangat berkontribusi terhadap kerusakan jalan dan jembatan serta kemacetan lalu lintas. Selama ini kontrol terhadap angkutan barang masih kurang, masih banyak angkutan barang yang membawa muatan melebihi daya angkut yang ditetapkan, dimana kewenangan dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Banyak pula angkutan barang yang berhenti di pangkalan truk ilegal di Desa Manggar, Sumbersari Kragan, Cikalán Lasem, Pancur, dan Wuwur. Selain itu banyak pula yang berhenti di sembarang tempat, sehingga menghambat arus lalu lintas jalan raya.

Dengan melihat kondisi tersebut, diperlukan peningkatan pelayanan terhadap angkutan barang dengan melakukan pengontrolan beban muatan angkutan barang, khususnya angkutan barang yang melalui jaringan jalan Kabupaten Rembang kelas II dan kelas III. Selain itu, diperlukan pula pengembangan *rest area* atau *pool truck* yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat istirahat pengemudi angkutan barang.

Dalam perkembangannya juga terdapat jenis angkutan darat bermotor roda tiga (*tossa* dan sejenisnya) yang beroperasi di berapa kecamatan terutama di kecamatan kragan, dimana peruntukannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada dasarnya pengoperasian kendaraan tersebut seharusnya hanya digunakan sebagai angkutan barang terbatas pada lingkungan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Melihat kondisi tersebut perlu upaya-upaya penangan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

2) Perhubungan Laut

Pelabuhan Tasik Agung berada pada posisi strategis terletak di antara dua pelabuhan besar yaitu Tanjung Mas (Semarang) dan Tanjung Perak (Jawa Timur). Pelabuhan tersebut terletak di Kecamatan Rembang dengan lahan pelabuhan seluas ± 14.000 m². Pelabuhan Tasik Agung merupakan pelabuhan dengan aktivitas utama berupa pendaratan perikanan tangkap dari perairan laut.

Kondisi eksisting pelabuhan regional pengumpan sekunder yang berada di Desa Tasikagung Kecamatan Rembang (yang juga sebagai pelabuhan umum) saat ini secara teknis, lingkungan, sosial budaya dan keruangan tidak layak lagi sebagai pelabuhan pengumpan atau pelabuhan pengumpul. Selanjutnya pengembangan pelabuhan umum Rembang diarahkan di wilayah pantai Kecamatan Sluke. Secara eksisting Pelabuhan Tasikagung ke depan akan dioptimalkan untuk pengembangan Pelabuhan Perikanan, sedangkan Pelabuhan Perikanan Pantai yang sudah ada ke depan akan ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara. Pengembangan pelabuhan umum Rembang tersebut berorientasi jangka panjang menjadi pelabuhan pengumpul dan atau pelabuhan utama. Pengembangan pelabuhan diharapkan menjadi infrastruktur pemicu bagi pertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka pintu gerbang akses transportasi laut guna mengangkut arus barang komoditas hinterland Kabupaten Rembang.

Keunggulan komparatif lokasi pelabuhan di wilayah pantai kecamatan Sluke adalah alternatif yang paling memungkinkan untuk lokasi pelabuhan umum untuk lalu lintas perdagangan antar pulau maupun ekspor impor antar negara. Peluang ke depan pengembangan potensi pembangunan Pelabuhan Umum Rembang adalah:

1. Mendorong pengembangan industri berbasis sumber daya alam (galian golongan C) dan pertanian perkebunan.

2. Peluang penyediaan fasilitas pendukung dalam rangka pengembangan industri minyak 'Exxon Mobil' Blok Cepu dan Blok Randugunting Rembang.
3. Pengembangan pelabuhan terintegrasi dengan rencana pembangunan kawasan industri Kabupaten Rembang.

Perkembangan pelayanan transportasi laut di wilayah Kabupaten Rembang juga terjadi beberapa pelanggaran seperti pelanggaran jalur penangkapan/pelayaran, pelanggaran alat penangkapan ikan, pelanggaran pencurian sumberdaya laut yang dilindungi, dan pelanggaran kelengkapan dokumen kapal, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 37.
Perkembangan kasus Pelanggaran Pelayanan Transportasi Laut
di Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2009

Jenis Data	2005	2006	2007	2008	2009
Pelanggaran Jalur Penangkapan/Pelayaran	9	12	-	-	-
Pelanggaran Alat Penangkapan Ikan	3	10	2	4	9
Pelanggaran Pencurian Sumberdaya Laut yang dilindungi	15	8	-	-	-
Pelanggaran Kelengkapan Dokumen Kapal	-	39	29	43	55

Sumber : Dinas Perhubungan , 2010

3) Pola Pergerakan Regional

Jalur jalan arteri primer di Kabupaten Rembang merupakan pola pergerakan linier regional (antar kabupaten dan antar provinsi). Pola ini diperkuat dengan adanya simpul angkutan penumpang yaitu di terminal Rembang dan Lasem.

Pola pergerakan terpusat di Kabupaten Rembang yaitu pola pergerakan menuju ke pusat kota Rembang dan Lasem. Pola pergerakan antar desa dari masing-masing kecamatan ke pusat kota Rembang nampak terlihat pada simpul-simpul perekonomian seperti di Pasar Rembang, Terminal angkutan kota dan kawasan perdagangan Jl. RA. Kartini.

Pola pergerakan dari arah tujuan pusat Kota Lasem menuju ke pusat perdagangan yang berfungsi sebagai pengumpul hasil produksi, hal ini dikarenakan Kota Lasem dilewati jalur pantura dan merupakan persimpangan besar menuju ke arah Sale. Pola pergerakan regional di Kabupaten Rembang juga dipengaruhi oleh tingkat intensitas trip pergerakan yang terjadi. Pola pergerakan ini dapat optimal apabila tidak terjadi hambatan pergerakan seperti kemacetan yang terjadi dan lokasi rawan kecelakaan yang ada. Lebih jelasnya mengenai lokasi rawan kemacetan dan Kecelakaan di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 38.
Daerah/Lokasi Rawan Kemacetan dan Kecelakaan
di Kabupaten Rembang Tahun 2009

No	Lokasi	Penyebab
1	Jalan raya Rembang-Kaliori	Jalan rusak dan bergelombang, pelebaran jalan, perbaikan jembatan Tasikharjo.
2	Pasar Pentungan Rembang	Penyempitan Jembatan Karanggeneng Rembang
3	Obyek wisata Taman Kartini	Adanya kegiatan syawalan mobilitas pengunjung lomban syawalan.
4	Jalan raya Rembang - Lasem	Adanya parkir truck di bahu jalan dan kendaraan keluar masuk terminal.
5	Jalan raya Lasem	Adanya kendaraan parkir di bahu jalan, parkir dokar dan becak yang tidak teratur dan adanya terminal bayangan di sekitar lokasi perempatan jalan depan masjid.
6	Jalan raya Lasem-Sarang	Jalan sempit dan banyak tikungan, perbaikan dan pelebaran jalan, adanya pasar tumpah Kragan dan Sarang, truck parkir di bahu jalan.

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, 2010

Dalam pola pergerakan transportasi di Kabupaten Rembang dapat didukung dengan distribusi pelayanan moda transportasi angkutan di wilayah pedesaan. Kondisi saat ini distribusi yang ada sudah dapat dikatakan terlayani dengan baik, hanya saja perlu peningkatan kinerja dari moda transportasi angkutan di Kabupaten Rembang. Sampai dengan Tahun 2009 kebutuhan dan ketersediaan jaringan trayek Pada wilayah Kabupaten Rembang untuk angkutan pedesaan masih belum memadai, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 39.
Daftar Jaringan Trayek Dan Kebutuhan Angkutan Pedesaan
Di Kabupaten Rembang Tahun 2009

No.	Kode	Jaringan Trayek	Kebutuhan	Tersedia	Kurang
1	AA	Rembang-Lasem-Kragan-Sarang-Sedan-Sale-Pamotan-PP	142	142	-
2	AB	Rembang-Lasem-Kragan-Sarang-PP	7	7	-
3	AC	Rembang-Lasem-Pamotan-Kragan-Sarang-PP	13	13	-
4	AD	Rembang-Lasem-Pamotan-Sedan-Sale-PP	4	4	-
5	AE	Rembang-Lasem-Pamotan-Sedan-PP	4	4	-
6	AF	Rembang-Lasem-Pamotan-PP	4	4	-
7	A	Rembang-Clangapan-Pamotan-PP	15	13	2
8	B	Rembang-Sulang-PP	20	20	-
9	C	Rembang-Ngadem-Sumber-PP	18	14	4
10	D	Rembang-Kaliori/Batangan-PP	16	16	-
11	E	Rembang-Banyudono-Sumber -PP	14	9	5
12	F	Lasem-Banyuurip-Sulang-PP	9	9	-
13	G	Pamotan-Gunem-Tegaldowo-PP	16	16	-
14	H	Sarang-Lodan-Sedan-Kragan-PP	13	13	-
15	I	Sedan-Gandrirejo- Pandangan-PP	16	14	2
16	-	Lasem-Banyuurip-Gunem-PP	7	-	7
17	-	Sumber-Sulang-Gunem-PP	14	7	7
18	-	Lasem-Kajar-PP	10	-	10
19	-	Rembang-Lasem-Pulo-Pasar-Ngebrak-PP	8	-	8
20	-	Sale-Tahunan-PP	8	-	8
		Jumlah	358	305	53

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang , 2010

a. Perumahan

Sebagian besar masyarakat pedesaan, dalam memenuhi kebutuhan rumah dipenuhi secara swadaya, yang dilaksanakan secara gotong royong. Dari pemantauan data perumahan diketahui sekitar 81,44% (115.865 unit) rumah diperoleh dengan cara membangun sendiri, 0,35% (401 unit) membeli dari pengembang dan 3,32% membeli bukan baru (4.718 unit), sisanya menyewa dengan atau tanpa membayar. Jumlah rumah permanen di Kabupaten Rembang tahun 2008 sebanyak 50.185 unit, rumah papan sebanyak 61.750 unit dan rumah bambu sebanyak 37.075 unit. Pembangunan perumahan baru yang dikembangkan oleh pengembang sampai tahun 2009 meliputi perumahan RSH Permata Hijau, RSH. Mondoteko, RSH. Puri Mondoteko, RSH. Sumber Mukti Indah, Perumnas ABRI (Desa Sumberejo), RSH. Madina Asri, RSH Perumnas ABRI (Perumahan Turusgede Permai), dengan jumlah total unit rumah yang ada sebanyak 2.335 unit.

Kondisi lingkungan permukiman yang layak huni di Kabupaten Rembang sudah cukup baik perkembangannya, dimana jumlahnya menurun dari tahun 2005 sebanyak 2.343 lingkungan permukiman kumuh menjadi 621 lingkungan permukiman kumuh di tahun 2009 atau menurun sebanyak 73,5% selama 5 tahun terakhir.

Sedangkan data perumahan dan permukiman di Kabupaten Rembang dilihat dari status kepemilikan rumah yaitu rumah milik sendiri sebesar 228,654 unit rumah pada tahun 2009. Untuk rumah sewa sebanyak 3.049 unit rumah. Sementara untuk penyediaan rumah oleh Perumnas tahun 2009 sebanyak 1.395 unit, dan penyediaan rumah oleh KPR/BTN sebanyak 1.141 unit.

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Rembang yang terus naik secara signifikan, maka perlu adanya peran pemerintah yang dapat membantu menyediakan lahan dan pembangunan rumah supaya harga rumah akan relatif lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat. Pembangunan perumahan tersebut tentunya diharapkan dapat merata disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Rembang guna menjaga integrasi pembangunan yang berkelanjutan. Namun demikian perkembangan sarana hunian berupa rumah ini sebagian besar status lahannya tidak memiliki IMB sesuai norma pertanahan. Rasio rumah penduduk yang ber-IMB terdapat 2.472 unit rumah, sedangkan jumlah seluruh rumah pada tahun 2009 sebanyak 228.654 unit.

b. Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ruang dimaksud adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

Kabupaten Rembang telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten untuk mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Rembang yang secara garis besar meliputi struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Rembang. Pada ibu kota kecamatan juga telah disusun rencana Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK).

Dalam struktur ruang wilayah kabupaten terdiri dari sistem perkotaan, sistem perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi darat, transportasi laut dan transportasi kereta api, prasarana sumber daya air, prasarana telekomunikasi, prasarana energi, dan prasarana permukiman. Sedangkan dalam pola ruang wilayah kabupaten terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Peruntukan ruang untuk kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Rembang meliputi kawasan rawan banjir secara periodik terjadi pada musim hujan dengan curah hujan yang tinggi di wilayah Kecamatan Kragan, Rembang, Lasem, Pancur, Sedan, Sale, Pamotan, Kaliori, dan Sumber. Kawasan rawan gerakan tanah atau tanah longsor terjadi di wilayah pegunungan atau pertambangan terdapat di wilayah Kecamatan Pancur, Pamotan, Kragan, Sarang, Lasem, Sluke, Gunem, Bulu, Sumber, Sale, dan Sedan. Kawasan rawan gelombang pasang atau abrasi terjadi di wilayah pantai Kecamatan Sarang, Kragan, Sluke, Lasem, Rembang, dan Kaliori. Kawasan rawan kekeringan terjadi hampir merata di semua wilayah Kabupaten Rembang. Penanggulangan kawasan rawan bencana di atas meliputi penanganan pada tahap pra bencana, tahap tanggap darurat bencana dan tahap pasca bencana.

Terkait dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di Kabupaten Rembang, perlu mendapatkan perhatian yang serius pada masa mendatang adalah perwujudan kawasan ruang terbuka hijau. Sesuai amanat Undang – Undang Penataan Ruang bahwa ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dan ruang terbuka hijau privat sebesar 10%.

c. Pertanahan

Bidang pertanahan mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan daerah dan memiliki fungsi ekonomis serta sosial. Karena mengandung fungsi ekonomis dan sosial maka kepemilikan tanah perlu dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas. Bukti kepemilikan tanah tersebut antara lain sertifikat tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP). Berdasarkan data dalam Profil Daerah Kabupaten Rembang, jumlah tanah yang bersertifikat di Kabupaten Rembang sebanyak 94.477 bidang tanah, dengan perincian Hak Milik (HM) sebanyak 87.796 sertifikat, Hak Guna Bangunan sebanyak 3.925 sertifikat dan Hak Pakai sebanyak 2.756 sertifikat, sedangkan jumlah tanah yang belum bersertifikat mencapai 343.646 bidang tanah yang meliputi tanah wakaf sebanyak 521 bidang tanah dan tanah girik sebanyak 343.125 bidang tanah. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa dari 438.123 jumlah tanah yang bersertifikat hanya 21,56% sedangkan yang belum bersertifikat sebesar 78,44%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya status hukum tanah melalui kegiatan penyuluhan maupun peningkatan pelayanan administrasi pertanahan di Kabupaten Rembang perlu terus ditingkatkan.

Pemerintah Kabupaten mempunyai sejumlah kewenangan dalam penyelenggaraan bidang pertanahan, hal ini sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan. Dalam pasal 2 ayat (2) kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang pertanahan adalah 1) pemberian ijin lokasi, 2) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, 3) penyelesaian sengketa tanah garapan, d) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, 4) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, 5) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat, 6) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, 7) pemberian ijin membuka tanah dan 8) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Penggunaan lahan wilayah Kabupaten Rembang secara umum dapat dikelompokkan menjadi lahan sawah seluas 29.958 Ha dan lahan kering seluas 71.450 Ha. Sebagian tanah sawah di Kabupaten Rembang ini merupakan sawah tadah hujan sebesar 17,84% dari keseluruhan tanah sawah. Hal ini disebabkan kondisi iklim di Kabupaten Rembang yang termasuk daerah dengan curah hujan rendah. Sedang untuk tanah kering sebagian besar merupakan tegalan yaitu sebesar 34,29% dari luas tanah kering di Kabupaten Rembang. Sedangkan penggunaan lahan untuk permukiman terkait dengan pertumbuhan penduduk yang berdampak pada penyediaan fasilitas pemukiman dan fasilitas pendukung lainnya.

d. Komunikasi dan Informatika

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika mencakup bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan deseminasi informasi. Terkait dengan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, saat ini di Kabupaten Rembang terdapat 10 kantor pos. Dilihat berdasarkan perkembangannya pelayanan pos masih cukup diperhitungkan terutama dalam hal layanan pengiriman surat dan paket pos baik lokal, regional maupun nasional.

Perkembangan pelayanan telekomunikasi dapat dilihat berdasarkan jumlah satuan sambungan telepon yang terpasang dan terpakai, pada tahun 2006-2009 satuan sambungan telepon yang telah terpasang sebanyak 4.823 unit dan yang terpakai sebanyak 4.463 SST. Arus informasi juga semakin berkembang pesat seiring dengan pemakaian layanan internet yang telah menjadi kebutuhan pokok tidak hanya bagi seluruh SKPD namun juga telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan warung internet semakin menambah kecepatan arus informasi global. Pada tahun 2008 terdapat 2 unit warnet dan meningkat pada tahun 2009 meningkat menjadi 23 unit warnet.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kabupaten terus berupaya membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

3. **Kelompok Urusan Sosial Budaya**

a. **Pendidikan**

Pembangunan pendidikan memiliki peran sangat penting dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan dikonsentrasikan pada tiga pilar yaitu pemerataan akses memperoleh pendidikan, mutu dan relevansi, serta tata kelola dan pencitraan publik penyelenggaraan pendidikan. Secara umum gambaran tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Rembang relatif rendah yang terlihat dari rendahnya angka rata-rata lama sekolah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 40.
Rata-rata lama Sekolah, Kabupaten Rembang
Tahun 2005 – 2009

No	Tahun	Rata-rata lama sekolah
1	2005	5,90
2	2006	6,20
3	2007	6,60
4	2008	6,65
5	2009	6,85

Sumber : Dinas Pendidikan Kabuoaten Rembang, 2010

Selama kurun waktu 2005–2010 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rembang menunjukkan kecenderungan meningkat. Apabila dipandang dari aspek besarnya angka rata-rata lama sekolah, capaian rata-rata lama sekolah di kabupaten Rembang termasuk kategori rendah, yaitu setara dengan kelas 6 Sekolah Dasar (SD).

Gambaran kinerja pembangunan pendidikan selama kurun waktu tahun 2005–2010 diuraikan sebagai berikut:

a) **Pemerataan Akses Memperoleh Pendidikan**

Pemerataan akses memperoleh pendidikan diukur dengan beberapa indikator, yaitu Angka Paritisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Melanjutkan (AM) dan jumlah sekolah. Tingkat pemerataan pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK untuk semua jenjang pendidikan pada kurun waktu 2005–2009 menunjukkan kecenderungan meningkat. Secara rinci perkembangan APK semua jenjang pendidikan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 41.
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan
dan Pertumbuhannya di Kabupaten Rembang
Tahun 2005 – 2009

No	APK	2005 (%)	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)
1	PAUD dan TK	-	79,51	77,65	78,02	80,48
2	SD/MI	98,40	97,74	95,16	95,16	96,83
3	SMP/MTs	84,14	86,20	88,38	90,93	95,42
4	SMA/SMK/MA	38,55	38,55	40,88	42,76	50,79

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tahun 2010.

Tabel di atas menunjukan bahwa untuk jenjang pendidikan PAUD, APK cenderung meningkat dan termasuk dalam kategori tinggi karena sudah lebih dari 80%, sementara APK PAUD Provinsi Jawa Tengah sebesar 68,41%. Dengan demikian, APK PAUD Kabupaten Rembang berada di atas APK PAUD Jawa Tengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% penduduk usia 3 – 6 tahun di Kabupaten Rembang sekolah di jenjang PAUD.

Pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, APK juga mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk menyekolahkan anak sampai dengan jenjang pendidikan SMP semakin besar. APK SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Rembang pada tahun 2009 berada pada angka 96,83% dan 95,42%. Kondisi ini menunjukkan bahwa 3,17% penduduk usia 7 – 12 tahun belum sekolah dan 4,58% penduduk usia 13-15 tahun tidak bersekolah. Meskipun APK mengalami peningkatan, namun APK pada jenjang SMA/MA/SMK masih relatif rendah, karena hampir separuh penduduk usia 13 – 15 tahun tidak sekolah di SMA/MA/SMK. APK pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA di Kabupaten Rembang dan daerah di sekitarnya terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 42.
Perbandingan APK, SD, SMP dan SMA
dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008

No.	Kabupaten /Provinsi	APK (%)		
		SD	SMP	SMA
1	Rembang	95,16	90,93	42,76
2	Jepara	110,20	91,36	39,54
3	Kudus	104,55	101,24	59,14
4	Pati	117,96	97,84	70,85
5	Blora	110,01	93,98	50,68
6	Jawa Tengah	108,93	96,61	55,11

Sumber: Dinas Pendidikan kabupaten Rembang 2009
Dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa APK SD dan SMP Kabupaten Rembang pada tahun 2008 paling rendah dibandingkan dengan kabupaten di sekitar Rembang. APK SD dan SMP Kabupaten Rembang juga lebih rendah dari APK SD dan SMP Provinsi Jawa Tengah. APK SMA di Kabupaten Rembang juga lebih rendah dari Kabupaten Pati, Kudus dan Blora, dan sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Jepara. APK SMA juga lebih rendah dari APK SMA Provinsi Jawa Tengah.

APM pada kurun waktu 2005 – 2009 menunjukkan kecenderungan menurun untuk jenjang pendidikan SD dan SMP. Turunnya APM SD dan SMP salah satunya disebabkan oleh banyaknya penduduk yang menyekolahkan anaknya pada usia 5,5 tahun atau 6 tahun, dan masuk SMP dengan usia 11 atau 12 tahun, siswa dengan usia tersebut tidak termasuk dalam penghitungan APM karena usianya di luar range yang ada yaitu 7 – 12 tahun untuk SD/MI dan 13 – 15 tahun untuk SMP/MTs. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA menunjukkan kecenderungan meningkat. APM Kabupaten Rembang untuk semua jenjang pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 43.
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2010

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	APM SD/Mi (%)	83,28	97,74	90,62	80,91	83,99	84,01
2	APM SMP/MTs (%)	60,29	86,20	88,55	65,35	66,53	66,67
3	APM SMA/SMK/MA (%)	24,20	25,86	40,92	27,59	33,10	35,21

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tahun 2010.

APM seluruh jenjang pendidikan tersebut termasuk kategori rendah, terutama untuk jenjang pendidikan SMA. Perbandingan APM Kabupaten Rembang dengan kabupaten sekitar terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 44.
Perbandingan APM , SD, SMP dan SMA Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2008

No.	Kabupaten/ Provinsi	APM (%)		
		SD	SMP	SMA
1	Rembang	80.91	65,35	27,59
2	Jepara	91,98	66,23	21,16
3	Kudus	84,32	70,28	48,41
4	Pati	98,86	77,58	39,98
5	Blora	90,50	67,55	34,37
6	Jawa Tengah	92,77	74,04	38,40

Sumber: Dinas Pendidikan kabupaten Rembang 2009
Dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa posisi APM Kabupaten Rembang berada pada posisi paling rendah dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya untuk jenjang pendidikan SD dan SMP. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA berada pada posisi keempat dari lima kabupaten di sekitar Kabupaten Rembang. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang berada di bawah APM rata-rata Jawa Tengah untuk semua jenjang pendidikan.

Pada tahun 2009 angka transisi atau angka melanjutkan untuk masing-masing jenjang pendidikan menunjukkan angka yang relatif tinggi yaitu 98,46% untuk melanjutkan ke tingkat SMP, sedangkan angka melanjutkan tingkat SMA sebesar 70,55%. Rendahnya angka transisi khususnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA, tidak terlepas pada tingkat kesejahteraan penduduk yang masih rendah, sehingga memaksa para lulusan SMP untuk bekerja. Selain itu diperkirakan rendahnya angka melanjutkan ke SMA disebabkan oleh banyaknya lulusan SMP yang melanjutkan sekolah SMA/MA/SMK di luar Kabupaten Rembang. Secara rinci perkembangan Angka Transisi (AT) terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 45.
Angka Transisi SMP dan SMA
Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2009

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1. Angka Transisi ke SMP (%)	83,32	97,00	99,62	98,46	98,92
2. Angka Transisi Ke SMA/MA/SMK (%)	39,70	70,55	64,05	70,08	70,55

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang 2009

Angka Transisi Kabupaten Rembang bila dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitar Kabupaten Rembang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 46.
Perbandingan Angka Transisi Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Rembang dengan kabupaten sekitar Tahun 2008 (%)

No.	Kabupaten/ Provinsi	SD ke SMP	SMP ke SMA
1	Jepara	80,13	110,34
2	Kudus	103,15	91,86
3	Pati	98,62	79,64
4	Rembang	98,46	70,08
5	Blora	91,94	74,76
6	Jawa Tengah	88.98	69,38

Sumber: Dinas Pendidikan kabupaten Rembang 2009
Dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa Angka Transisi ke SMP di Kabupaten Rembang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Jepara dan Blora, dan lebih rendah dari Kabupaten Pati dan Kudus. Angka Transisi ini juga lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah.

Angka putus sekolah merupakan salah satu indikator tingkat pemerataan. Angka putus sekolah di Kabupaten Rembang termasuk kategori rendah. Secara rinci angka putus sekolah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 47.
Angka Putus Sekolah Jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA
Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2009

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1. Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,15	0,16	0,12	0,06	0,05
2. Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,65	0,61	0,52	0,38	0,30
3. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA(%)	1,50	0,60	1,14	0,66	0,46

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Rembang 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI rendah, sedangkan angka putus sekolah SMP/MTs termasuk kategori sedang, karena masih di atas standar Provinsi Jawa Tengah yaitu 0,12%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA termasuk kategori tinggi, karena di atas standar Provinsi Jawa Tengah yaitu 0,22%.

Jumlah sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Rembang relatif cukup memadai. Jumlah TK pada tahun 2009 sebesar 401 unit dan jumlah *play group* sebanyak 372 unit. Jumlah SD dan MI pada tahun 2009 sebesar 452 unit. Sedangkan untuk SMP dan MTs sebanyak 59 unit. Jumlah SMA, SMK dan MA pada tahun 2009 sebesar 44 unit lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 38 unit

Proses belajar mengajar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat secara bersama baik melalui penyelenggaraan pendidikan formal maupun penyelenggaraan pendidikan non formal. Sampai dengan tahun 2009 telah tersedia prasarana dan sarana pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

Tabel 2. 48.
Jumlah Sekolah dan Pertumbuhannya di Kabupaten Rembang
Tahun 2005 -2009

No.	Jenjang Pendidikan	2005	2006	r (%)	2007	r (%)	2008	r (%)	2009
1	TK + RA	356	362	1.69	385	6.35	397	3.12	400
2	SD + MI	409	408	-0.24	462	13.24	411	-11.04	412
3	SMP+Mts	82	88	7.32	80	-9.09	90	12.50	91
4	SMA+SMK+MA	38	42	10.53	35	-16.67	38	8.57	45

Keterangan : r = pertumbuhan

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang

Jumlah murid menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 49.
Jumlah Murid dan Pertumbuhannya di Kabupaten Rembang
Tahun 2005 – 2009 (orang)

No.	Jenjang Pendidikan	2005	2006	r (%)	2007	r (%)	2008	r (%)	2009	r (%)
1	SD + MI	65.041	63.462	-2.43	63.151	-0.49	62.14	-1.60	61.654	-0.78
2	SMP+Mts	21.56	23.7	9.93	27.414	15.67	29.579	7.90	29.466	-0.38
3	SMA+SMK+MA	12.701	13.869	9.20	14.614	5.37	14.822	1.42	16.161	9.03

Keterangan : r = pertumbuhan

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah murid SD/MI selama kurun waktu 2005 – 2009 cenderung turun. Meskipun penurunan jumlah murid SD tidak begitu tajam, hal ini mengisyaratkan bahwa jumlah anak usia sekolah SD juga cenderung turun, sehingga ada

kemungkinan pada saatnya nanti banyak SD akan kekurangan murid. Sedangkan jumlah murid SMP/MTs dan SMA/SMK/MK selama kurun waktu yang sama cenderung meningkat.

Sementara itu, jumlah guru di Kabupaten Rembang selama tahun ajaran 2005 hingga 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 50.
Jumlah Guru di Kabupaten Rembang
Tahun 2005 – 2009

No.	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
1	SD + MI	4.270	4.018	4.325	4.560	4.677
2	SMP+Mts	2.013	1.622	1.912	1.913	2.090
3	SMA+SMK+MA	937	1.068	1.159	1.248	1.372

Sumber : Dinas pendidikan kabupaten Rembang 2010

Untuk mempertahankan rasio guru terhadap murid yang ideal sebesar 1:16, jumlah guru SD dipertahankan berkisar antara 4.000 – 4.500 orang, karena jumlah murid SD diprediksikan berkisar antara 60.000 – 70.000 orang. Sedangkan untuk tingkat SMP jumlah guru dipertahankan berkisar antara 1400 – 1600 orang. Sedangkan jumlah guru SMA di pertahankan berkisar 900 – 1.100 orang. Rasio guru terhadap murid sebesar itu merupakan kondisi ideal untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Ratio guru terhadap murid di Kabupaten Rembang tahun ajaran 2005 – 2009 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 51.
Ratio Guru Terhadap Murid di Kabupaten Rembang
Tahun Ajaran 2005 – 2009

No.	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
1	SD + MI	1:19	1:16	1:16	1:16	1:14
2	SMP+Mts	1:16	1:15	1:15	1:15	1:15
3	SMA+SMK+MA	1:15	1:13	1:13	1:14	1:12

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk semua jenjang pendidikan ratio guru terhadap murid cenderung mengalami penurunan. Ratio di atas menunjukkan bahwa di tingkat SD/MI pada tahun 2009 satu orang guru secara rata-rata membimbing 14 orang murid. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan guru secara rata-rata sudah mencukupi, bahkan cenderung kelebihan guru. Kondisi tersebut cenderung mempunyai kesamaan apabila dilihat dari rasio sekolah terhadap murid dan kelas terhadap murid. Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan rasio kelas terhadap murid.

Tabel 2. 52.
Ratio Kelas terhadap Murid di Kabupaten Rembang
Tahun Ajaran 2005 – 2009

No.	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
1	SD + MI	1:35	1:23	1:25	1:26	1:20
2	SMP+Mts	1:38	1:41	1:37	1:37	1:35
3	SMA+SMK+MA	1:39	1:35	1:35	1:35	1:36

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang

Data di atas menunjukkan bahwa dilihat dari rasio jumlah murid per kelas menunjukkan angka yang relatif ideal. Sedangkan rasio sekolah terhadap murid terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 53.
Ratio Sekolah terhadap Murid di Kabupaten Rembang
Tahun Ajaran 2005 -2009

No.	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009
1	SD + MI	1:144	1:155	1:156	1:164	1:150
2	SMP+Mts	1:331	1:289	1:298	1:287	1:322
3	SMA+SMK+MA	1:310	1:365	1:330	1:330	1:359

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah siswa per sekolah selama kurun waktu 2005– 2009 menunjukkan kondisi yang masih ideal. Sedangkan kondisi sekolah berdasarkan tingkat kerusakan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 54.
Kondisi Ruang Kelas Masing-masing Satuan Pendidikan
di Kabupaten Rembang Berdasarkan Tingkat Kerusakan 2005-2009 (Unit)

Jenjang Pendidikan	Kriteria	2005	2006	2007	2008	2009
TK dan RA	Baik	193	278	355	193	534
	Rusak ringan	143	160	118	143	72
	Rusak berat	53	48	23	53	8
	Jumlah	389	486	729	389	614
SD	Baik	986	1.144	976	986	1.706
	Rusak ringan	1.076	851	789	1.076	457
	Rusak berat	577	638	916	577	516
	Jumlah	2.639	2.633	2.677	2.639	2.679
MI	Baik	106	144	124	106	162
	Rusak ringan	57	37	70	57	53
	Rusak berat	38	52	53	38	45
	Jumlah	201	233	247	201	260
SMP	Baik	419	441	386	426	470
	Rusak ringan	82	73	108	108	97
	Rusak berat	19	21	62	36	21
	Jumlah	520	535	550	570	588
MTS	Baik	194	177	180	187	205
	Rusak ringan	33	41	60	72	53
	Rusak berat	8	19	23	32	31
	Jumlah	235	237	263	291	289
SMA	Baik	173	173	174	186	184
	Rusak ringan	10	9	14	16	15
	Rusak berat	27	3	1	0	0
	Jumlah	210	185	189	202	199
MA	Baik	76	93	91	90	111
	Rusak ringan	11	8	9	16	16
	Rusak berat	2	2	0	3	3
	Jumlah	89	103	100	109	130
SMK	Baik	56	83	102	101	114
	Rusak ringan	12	14	12	14	24
	Rusak berat	0	2	0	4	0
	Jumlah	68	99	114	119	138

Keterangan : Sumber Profil pendidikan kabupaten Rembang 2005/2006 – 2009/2010

Sampai dengan tahun 2009, kondisi ruang kelas untuk SD/MI yang rusak ringan dan rusak berat masih cukup besar yaitu 457 kelas (17,09%) rusak ringan dan 516 (19,26%) rusak berat. Sedangkan untuk SMP/MTs, ruang kelas yang rusak ringan maupun berat relatif sedikit. Pada masa yang akan datang diharapkan kerusakan ruang kelas untuk tingkat pendidikan dasar dapat diperbaiki seluruhnya berdasarkan MoU antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Persentase kondisi ruang kelas untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 55.
Persentase Kondisi Ruang Kelas Masing-masing Satuan Pendidikan
di Kabupaten Rembang Berdasarkan Tingkat Kerusakan 2005-2009 (%)

Jenjang Pendidikan	Kriteria	2005	2006	2007	2008	2009
TK dan RA	Baik	49,61%	57,20%	71,57%	49,61%	86,97%
	Rusak ringan	36,76%	32,92%	23,79%	36,76%	11,73%
	Rusak berat	13,62%	9,88%	4,64%	13,62%	1,30%
	Jumlah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
SD	Baik	37,36%	43,45%	36,46%	37,36%	63,68%
	Rusak ringan	40,77%	32,32%	29,47%	40,77%	17,06%
	Rusak berat	21,86%	24,23%	34,22%	21,86%	19,26%
	Jumlah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
MI	Baik	52,74%	61,80%	50,20%	52,74%	62,31%
	Rusak ringan	28,36%	15,88%	28,34%	28,36%	20,38%
	Rusak berat	18,91%	22,32%	21,46%	18,91%	17,31%
	Jumlah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
SMP	Baik	80,58%	82,43%	70,18%	74,74%	79,93%
	Rusak ringan	15,77%	13,64%	19,64%	18,95%	16,50%
	Rusak berat	3,65%	3,93%	11,27%	6,32%	3,57%
	Jumlah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Baik	82,55%	74,68%	68,44%	64,26%	70,93%
MTS	Rusak ringan	14,04%	17,30%	22,81%	24,74%	18,34%
	Rusak berat	3,40%	8,02%	8,75%	11,00%	10,73%
	Jumlah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
SMA	Baik	82,38%	93,51%	92,06%	92,08%	92,46%
	Rusak ringan	4,76%	4,86%	7,41%	7,92%	7,54%
	Rusak berat	12,86%	1,62%	0,53%	0,00%	0,00%
	Jumlah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
MA	Baik	85,39%	90,29%	91,00%	82,57%	85,38%
	Rusak ringan	12,36%	7,77%	9,00%	14,68%	12,31%
	Rusak berat	2,25%	1,94%	0,00%	2,75%	2,31%
	Jumlah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
SMK	Baik	82,35%	83,84%	89,47%	84,87%	82,61%
	Rusak ringan	17,65%	14,14%	10,53%	11,76%	17,39%
	Rusak berat	0,00%	2,02%	0,00%	3,36%	0,00%
	Jumlah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Keterangan : Sumber Profil pendidikan kabupaten Rembang 2005– 2009

Di Kabupaten Rembang, pendidikan keaksaraan, Pendidikan kesetaraan SD, SMP dan SMA, pendidikan kecakapan hidup (Life-skills) dan kewirausahaan juga berkembang cukup baik. Pendidikan life-skill menjadi muatan lokal pada kurikulum SD, SMP dan SMK, Peserta *life skill* yang diterima di pasar kerja pada tahun 2009 sebesar 42,12%. Di sisi lain, sarana dan prasarana pendidikan non formal belum memadai. Kelompok Belajar Masyarakat masih belum memiliki panti atau balai tersendiri, sehingga belum dapat secara optimal mendidik para peserta didik karena peralatan terbatas.

b) Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan

Mutu pendidikan di Kabupaten Rembang pada tahun 2005–2009 menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini terlihat dari persentase kelulusan (angka lulus) yang secara umum meningkat setiap tahunnya. Angka kelulusan untuk masing-masing jenjang pendidikan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 56.
Angka Kelulusan Masing-masing jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Rembang 2005 – 2009

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1. Angka Kelulusan SD/MI (%)	98,85	96,33	99,53	99,43	98,29
2. Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	98,33	90,75	90,04	89,65	90,54
3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)	99,51	88,53	90,66	90,72	85,50

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Rembang 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA fluktuatif dengan kecenderungan meningkat.

Kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelayakan dan jumlah guru yang mengajar. Jumlah guru yang layak mengajar terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 57.
Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasinya
Untuk Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Di Kabupaten Rembang 2005 – 2009

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1. Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4 (%)	29,35	20,15	23,82	28,35	29,35
2. Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 (%)	73,76	73,58	75,74	70,89	72,89
3. Persentase Guru SMA/SMK/MA berkualifikasi S1/D4 (%)	81,58	87,65	89,41	84,65	86,65
4. Persentase Guru TK bersertifikasi (%)	-	-	2,48	2,63	3,15
5. Persentase Guru SD/MI bersertifikasi (%)	-	2,07	8,55	13,75	23,07
6. Persentase Guru SMP/MTs bersertifikasi (%)	-	1,60	11,30	21,69	32,76
7. Persentase Guru SMA/SMK/MA bersertifikasi (%)	-	-	7,03	16,10	17,92

Sumber : Dinas pendidikan kabupaten Rembang 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar guru baik di tingkat SD, SMP maupun SMA cukup layak mengajar, namun masih perlu perhatian dalam peningkatan kualitas guru tersebut.

Sekolah Standar Nasional di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Rembang pada tahun 2009 untuk masing-masing kecamatan sebanyak satu unit di satuan tingkat pendidikan Sekolah Dasar. Sedang untuk tingkat pendidikan SMP 8 unit dan tingkat SMA/SMK sebanyak 5 unit se Kabupaten Rembang. Sekolah RSBI untuk SMP dan SMA pada tahun 2009 sebanyak 2 unit. Secara rinci terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 58.
Jumlah Sekolah Standar Nasional, Rintisan Sekolah Berbasis Internasional
Untuk Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Di Kabupaten Rembang 2005 – 2009

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1. Jumlah SD SSN	-	-	11	14	14
2. Jumlah SMP SSN	-	4	4	7	8
3. Jumlah SMA/SMK SSN	-	-	-	-	5
4. Jumlah SD RSBI	-	-	-	-	-
5. Jumlah SMP RSBI	-	1	1	1	2
6. Jumlah SMA/SMK RSBI	-	-	2	2	2

Sumber : Dinas pendidikan kabupaten Rembang 2010

Selain itu mutu pendidikan juga ditentukan oleh ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Sarana dan prasarana penunjang pembelajaran di semua jenjang pendidikan memiliki nilai strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Sekolah yang memiliki perpustakaan dan laboratorium standar di Kabupaten Rembang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 59.
Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
yang Memiliki Sarana Pendukung Pembelajaran
Di Kabupaten Rembang 2005 – 2009

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1. Persentase SD/MI yang memiliki sarana perpustakaan standar (%)	19,12	21,07	22,79	24,26	29,85
2. Persentase SD/MI yang memiliki Lab komputer (%)	-	-	-	-	-
3. Persentase SMP/MTs yang memiliki perpustakaan standar (%)	75,00	74,85	68,18	67,78	72,53
4. Persentase SMP/MTs yang memiliki lab computer (%)	35,21	37,56	38,63	38,89	40,66

Sumber : Dinas pendidikan kabupaten Rembang 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa belum banyak SD yang memiliki perpustakaan standar. Dari sekitar 452 SD yang ada baru sekitar 24,26% yang memiliki perpustakaan standar. Sementara itu tidak ada SD yang memiliki laboratorium komputer. Di tingkat SMP agak berbeda, sudah cukup banyak SMP/MTs yang memiliki perpustakaan standard dan laboratorium computer.

c) Tatakelola dan Pencitraan Publik

Tatakelola dan pencitraan publik penyelenggaraan pendidikan diukur melalui indikator persentase sekolah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara optimal.

Tabel 2. 60.
Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
yang melaksanakan MBS di Kabupaten Rembang 2005 – 2009

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1. Persentase SD/MI melaksanakan MBS (%)	17,65	17,65	91,62	95,10	99,27
2. Persentase SMP/MTs melaksanakan MBS (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Persentase SMA/SMK/MA melaksanakan MBS (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang 2010.

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir semua sekolah dari tingkat Sekolah dasar sampai menengah di Kabupaten Rembang telah melaksanakan MBS. Melalui pelaksanaan MBS ini diharapkan sekolah di Kabupaten Rembang memiliki tatakelola dan pencitraan yang baik.

b. Kesehatan

Indikator utama keberhasilan pembangunan kesehatan dapat dilihat dari beberapa hal yaitu meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu dan bayi, menurunnya prevalensi gizi buruk pada balita, menurunnya morbiditas pada masyarakat. Di Kabupaten Rembang Usia Harapan Hidup (UHH) dari tahun 2005–2009 mengalami peningkatan. UHH Kabupaten Rembang Tahun 2005 sebesar 69,10 meningkat menjadi 70,06 pada tahun 2009. Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami penurunan, pada tahun 2009 menjadi 163 per 100.000 kelahiran hidup (14 Kasus) dibandingkan dengan tahun 2005 yang hanya sebesar 174,01 per 100.000 kelahiran hidup (15 Kasus).

Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup mengalami penurunan setiap tahunnya. Rata-rata penurunan angka kematian bayi setiap tahunnya adalah 4,39%. AKB pada tahun 2005 sebesar 17,63 per 1.000 kelahiran hidup (152 kasus) turun pada tahun 2009 menjadi 17,86 per 1.000 kelahiran hidup (154 kasus) . Kondisi ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan target MGDs yaitu 17 per 1.000 kelahiran hidup.

Meningkatnya AKI dan masih tingginya AKB salah satu unsur penyebabnya adalah belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar. Hal ini dapat dilihat dari cakupan kunjungan neonatal, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan komplikasi neonatus yang ditangani dan cakupan kunjungan bayi. Pada tahun 2006 Cakupan kunjungan neonatal pada tahun 2006 sebesar 98,47% turun menjadi 94,2% pada tahun 2009. Sedangkan kunjungan bayi pada tahun 2006 sebesar 95,15% turun menjadi 94,2% pada tahun 2009, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2006 sebesar 63,9% turun pada tahun 2009 menjadi 59,41% dan cakupan komplikasi neonatus yang ditangani pada tahun 2006 sebesar 31,27% turun pada tahun 2009 menjadi 26,24%.

Persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif pada tahun 2005-2009 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2005 sebesar 28% menurun pada tahun 2009 menjadi 12,93%. Artinya masih banyak ibu yang belum memberikan ASI Eksklusif pada bayinya.

Kondisi cakupan UCI (*Universal Child Immunization*) baru mencapai 71,43% pada tahun 2009. Hal ini masih cukup jauh dari target SPM terkait cakupan UCI sebesar 100% pada tahun 2010.

Tabel 2. 61.
Perkembangan desa dengan UCI, dan Persentase Bayi dengan ASI Eksklusif
Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2009

No	Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif (%)	28	28	81,07	46,99	12,93
2.	Jumlah desa dengan UCI (unit)	127	149	181	195	210

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2010

Kasus gizi buruk balita di Kabupaten Rembang mengalami penurunan setiap tahunnya rata-rata 13,38%. Pada tahun 2006 sebesar 662 balita mengalami penurunan menjadi 456 balita pada tahun 2009. Persentase gizi buruk pada tahun 2009 mencapai 1,4%, kondisi ini masih lebih tinggi dibandingkan peresentase gizi buruk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,98%.

Angka kesakitan masyarakat Kabupaten Rembang dapat dilihat dari indikator Case Detection Rate (CDR) atau penemuan kasus TB Paru mengalami penurunan. Pada tahun 2005 CDR TB Paru sebesar 40,60% mengalami penurunan menjadi 40% pada tahun 2009. Berdasarkan SPM Kesehatan SK Menkes No 741 tahun 2008 target penemuan dan pengobatan TB Paru pada tahun 2010 mencapai 100%. Sedangkan target MDGs untuk mengendalikan dan menurunkan kasus TB Paru sebesar 80%.

Kabupaten Rembang dari tahun 2005–2009 mengalami penurunan KLB (Kejadian Luar Biasa) dari 8 kasus pada tahun 2005 dan 12 kasus pada tahun 2006 menjadi 7 kasus pada tahun 2009. KLB yang terjadi berupa penyakit DBD dan Diare. Meskipun KLB mengalami penurunan, Incident Rate (IR) kedua jenis penyakit tersebut mengalami peningkatan. Pada

tahun 2009 IR DBD mencapai 4,14 per 10.000 penduduk, Rata-rata peningkatan dari tahun 2005 – 2009 mencapai 77,89%. Target RPJM Provinsi pada tahun 2014 IR DBD harus dibawah 2 per 10.000 penduduk. Sementara itu angka kematian DBD pada tahun 2009 mencapai 2,84%. Incident Rate diare per 10.000 penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya (12,58 per tahun). Pada tahun 2009 IR Diare mencapai 16,4 per 10.000 penduduk.

Angka kesakitan penyakit tidak menular di Kabupaten Rembang rata-rata mengalami penurunan khususnya penyakit Diabetes Mellitus (DM), Hipertensi dan Jantung. Penyakit DM pada tahun 2005 sebesar 55,07 per 10.000 penduduk naik menjadi 102,67 pada tahun 2006 dan menurun pada tahun 2009 menjadi 95. Sedangkan kasus hipertensi pada tahun 2005 sebesar 28,43 per 10.000 penduduk naik menjadi 161,78 pada tahun 2006 dan menurun menjadi 108 per 10.000 penduduk pada tahun 2009 dan kasus jantung pada tahun 2005 sebesar 5,24 per 10.000 penduduk naik menjadi 8,94 per 10.000 penduduk pada tahun 2006 dan menurun pada tahun 2009 menjadi 4,7 per 10.000 penduduk. Masih ditemukan penyakit tidak menular di masyarakat disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat.

Tabel 2. 62.
Perkembangan Morbiditas Masyarakat Kabupaten Rembang
Tahun 2005 – 2009

No.	Indikator	2005	2006	2007	r (%)	2008	r (%)	2009	r (%)	r rata-rata (%)
1.	Case Detection Rate (CDR) TB Paru (%)	40,06	44,41	37	(16,69)	28	(32,14)	40	30,00	(6,28)
2.	Angka Kesembuhan (%)	67	79	80	1,27	85	(1,27)	85	0	0,42
3.	Incident rate DBD per 10.000 pddk	2,55	2,41	11,69	385,06	5,15	(126,99)	4,14	(24,40)	77,89
4.	Angka kematian DBD (%)	0	2,86	3	4,90	2,9	(3,45)	2,84	(2,11)	(0,22)
5.	Prevalensi HIV AIDS per 10.000 penduduk	0,08	0,05	0,05	-	0,13	61,54	0,33	60,61	40,71
6.	Incident rate pada diare per 1.000 balita	14,88	10,77	12,6	16,99	11,63	(8,34)	16,4	29,09	12,58
7.	Annual Parasite Indect (API) pada malaria per 1.000 penduduk	0,03	0,03	0,05	66,67	0,04	(25,00)	0,06	33,33	25,00
8.	jumlah KLB (kali)	8	12	13	8,33	8	(62,50)	7	(14,29)	(22,82)
9.	Angka kesakitan penyakit tidak menular									
a.	Diabetes Meliitus per 10.000 penduduk	55,07	102,67	137	33,44	121	(13,22)	95	(27,37)	(2,38)
b.	Hipertensi per 10.000 penduduk	28,43	161,78	165	1,99	107,5	(53,49)	108	0,46	(17,01)
c.	Penyakit Jantung per 10.000 penduduk	5,24	8,94	10	11,86	4,82	(107,47)	4,7	(2,55)	(32,72)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2010

Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Kabupaten Rembang secara keseluruhan mengalami peningkatan walaupun cakupannya masih belum optimal. Cakupan rumah tangga yang memiliki jamban pada tahun 2009 baru mencapai 45,73%. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2005 yang baru mencapai 32,44%. Sedangkan persentase rumah tangga sehat pada tahun 2009 baru mencapai 65,30% dari 159.329 KK, persentase institusi yang dibina kesehatan lingkungannya mencapai 68,70% dari 5.367 institusi, persentase rumah sehat mencapai 48,75% dari 159.329 KK, persentase pengguna air sehat baru mencapai 50,83% dan persentase rumah tangga yang memiliki SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) baru mencapai 30,83%.

Tabel 2. 63.
Perkembangan Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kabupaten
Rembang Tahun 2005 – 2009 (%)

No	Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Persentase RT memiliki Jamban	32,44	32,17	42,41	44,40	45,73
2.	Persentase rumah tangga sehat	55,48	60,20	56,98	53,44	65,30
3.	Persentase institusi yang dibina kesehatan lingkungannya	52,26	77,01	50,66	54,99	68,70
4.	Persentase rumah sehat	39	50,53	64,56	54,76	48,75
5.	Persentase pengguna air sehat	35,55	32,67	33,39	36,86	50,83
6.	Persentase rumah tangga yang memiliki SPAL	15,07	17,3	21,73	15,44	30,83

Sumber : Dinas Kesehatan, 2010

Peningkatan kualitas hidup sehat di Kabupaten Rembang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang berkualitas. Pelayanan kesehatan dasar dilayani oleh Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), sedangkan pelayanan kesehatan rujukan dilakukan oleh rumah sakit. Jumlah puskesmas pada tahun 2009 sebanyak 16 unit dengan Puskesmas rawat inap sebesar 10 unit dan puskesmas rawat jalan 6 unit. Sedangkan jumlah puskesmas pembantu sebesar 71 unit, Puskesmasling (Pusat Kesehatan Keliling) 28 unit dan PKD (Pos Kesehatan Desa) sebesar 154 unit. Dari segi jumlah, pelayanan dasar sudah cukup dilayani oleh Puskesmas, namun dari segi kualitas belum cukup baik. Sampai dengan tahun 2009 jumlah rumah sakit di Kabupaten Rembang hanya 1 unit (milik Pemerintah Daerah), dan rumah bersalin sebesar 2 unit. Sedangkan sarana kesehatan yang lain adalah pondok bersalin 2 unit, balai pengobatan sebanyak 3 unit dan praktek dokter swasta 87 unit.

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Rembang masih kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk mengacu pada Kepmenkes No 1202/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 (Tabel 2.4). Kondisi ini perlu mendapat perhatian sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih baik.

Tabel 2. 64.
Kebutuhan Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Rembang

Indikator	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Dimiliki Tahun 2009	Kebutuhan Tenaga Kesehatan Untuk Penduduk 611.886 Jiwa	Kekurangan Tenaga Kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan	917	2.332	1.503
a. Dokter Umum	63	243	183
b. Dokter Spesialis	7	36	28
c. Dokter Gigi	11	67	57
d. Bidan	359	608	260
e. Perawat	338	711	398
f. Ahli Gizi	18	121	102
g. Tenaga Farmasi dan Apoteker	76	60	31
h. Tenaga Sanitasi	28	243	215
i. Tenaga Kesmas	17	243	229

Sumber : Dinas Kesehatan, 2010

Pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan yang sangat baik. Cakupan Jamkesmas sampai dengan

tahun 2009 mencapai 100%. Artinya kuota penduduk miskin yang telah ditetapkan untuk Kabupaten Rembang telah dilayani oleh Jamkesmas. Sementara penduduk non kuota jamkesmas dilayani oleh progam JKRS (Jaminan Kesehatan Rembang Sehat). Di Kabupaten Rembang JKRS tidak hanya menangani penduduk miskin non kuota tetapi seluruh penduduk Kabupaten Rembang yang belum memiliki Jaminan Kesehatan dilayani kesehatan secara gratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sampai dengan tahun 2009 Cakupan JKRS mencapai 100%.

c. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rembang meningkat cukup tajam, dengan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2004-2009 sebesar 0.89 %. Angka ini lebih rendah dari angka rata-rata pertumbuhan penduduk nasional yaitu sebesar 1,48 % namun lebih tinggi dari angka Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,86 % pada kurun waktu yang sama. TFR (Total Fertility Rate) pada tahun 2009 sebesar 2,03%, peserta KB yang DO dari 9.458 peserta tahun 2006 menjadi 11.563 peserta tahun 2009 dan prevalensi KB aktif tahun 2006 sebesar 83,51% menjadi 82,94% tahun 2009 (Rembang Dalam Angka BPS, 2009, Jawa Tengah dalam Angka BPS 2009, dan Statistik Indonesia tahun 2009).

Sisi lain dari uraian diatas adalah ternyata jumlah peserta KB baru pada tahun 2005 sebanyak 10.817 peserta meningkat menjadi 14.187 peserta pada tahun 2009. Pemerintah daerah juga mampu menekan unmet need atau PUS yang ingin ber KB namun tidak terpenuhi dari 9,58% tahun 2005 turun menjadi 7,96% pada tahun 2009. Angka ini terhitung lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yaitu 8,3 % tahun 2009 namun tetap lebih tinggi dari target yang akan dicapai sebagaimana tercantum dalam SPM BKKBN yaitu dibawah 5% sampai dengan tahun 2014 (SPM BKKBN).

Penurunan prevalensi KB aktif, diantaranya karena partisipasi pria dalam ber KB rendah. Persentase laki-laki yang ber KB pada tahun 2005 sebesar 1,08% menjadi 1,35% pada tahun 2009. Upaya meningkatkan partisipasi KB pria dilakukan melalui program penguatan kelompok Prio Utomo yang sampai dengan tahun 2009 jumlahnya mencapai 15 kelompok. PerkembanganPembangunan KB dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2. 65.
Perkembangan Pembangunan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera Tahun 2005 – 2009

No	Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
1	Total fertility rate (TFR) (%)	1,97	2,32	2,03	2,03	2,03
2	Prevalensi peserta KB aktif (%)	84,02	83,51	80,64	81,109	82,54
3	% Laki-laki ber KB	1,08	0,83	0,85	0,84	1,35
4	Persentase Unmetneed (%)	9,58	8,41	8,23	8,03	7,96
5	Jumlah peserta KB baru (peserta)	10.817	10.817	10.360	10.301	14.187
6	Jumlah peserta KB Drop Out (peserta)	7.549	9.458	9.115	10.275	11.563

Sumber :Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Persoalan menurunnya prevalensi ber KB, angka DO KB, diantaranya disebabkan oleh terbatasnya jumlah PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) dan Sub PPKBD (Petugas Pembina KB Desa). Jumlah PLKB sampai dengan tahun 2009 sebesar 71 orang. Sedangkan

PPKBD sebanyak 294 orang dan sub PPKBD 1.011 orang. Jumlah PLKB ini belum memenuhi syarat karena rasionya mencapai 1 : 4, sedangkan ketentuan dalam SPM BKKBN yaitu 1:2 desa tahun 2014, namun untuk PPKBD telah memenuhi SPM yaitu setiap desa 1:1.

Sampai dengan tahun 2009 jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I mengalami penurunan walaupun relatif sedikit. Pada tahun 2005 jumlah keluarga Pra Sejahtera sebesar 99.068 KK turun pada tahun 2009 menjadi 98.363 KK. Sedangkan jumlah Keluarga Sejahtera I pada tahun 2005 sebanyak 16.074 KK turun menjadi 13.270 KK. Berikut kondisi indikator urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mulai tahun 2005 – 2009:

Tabel 2. 66.
Perkembangan Pembangunan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera Tahun 2005 – 2009

No	Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
1	Keluarga Pra Sejahtera (KK)	99.068	98.632	98.304	99.102	98.363
2	Keluarga Sejahtera I (KK)	16.074	15.264	12.514	12.973	13.270

Sumber :Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Sampai dengan tahun 2009 keluarga Pra KS dan KS I yang menjadi anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) baru sebanyak 2.018 KK. Sedangkan keluarga Pra KS dan KS I yang menjadi anggota BKB (Bina Keluarga Balita) sebanyak 14.883 keluarga, Bina Keluarga Remaja(BKR) sebanyak 6.108 keluarga, Bina Keluarga Lansia (BKL) sebanyak 3.871 keluarga. Sedangkan jumlah kelompok UPPKS sebanyak 162 kelompok, BKB sebanyak 432 kelompok, BKR sebanyak 203, BKL sebanyak 188 kelompok, Bina Lingkungan Keluarga (BLK) sebanyak 59 kelompok dan Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) sebanyak 55 kelompok.

d. Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran strategis dalam menentukan identitas daerah. Melalui aset budaya, suatu daerah dapat dikenal secara luas ke berbagai daerah bahkan ke mancanegara. Selain itu budaya daerah juga mencerminkan kepribadian daerah dan karakteristik daerah. Budaya daerah yang mengandung makna keagamaan mencirikan daerah sebagai daerah yang agamis, lebih jauh mencerminkan masyarakat yang menjalankan agama secara tekun dan khusuk. Nilai-nilai budaya di Kabupaten Rembang tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai budaya masyarakat pesisir di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah lainnya. Nilai-nilai keagamaan dan tradisi kemasyarakatan yang berkembang di Kabupaten Rembang oleh masyarakat kelompok usia tua terus dilestarikan. Kelompok usia muda sudah mulai meninggalkan tradisi dan nilai-nilai tersebut. Kelompok usia muda lebih senang melestarikan nilai hiburan dari pada filosofi di balik tradisi tersebut. Oleh karena itu upaya menanamkan nilai-nilai budaya tersebut penting untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang positif.

Apabila dicermati lebih jauh Kabupaten Rembang memiliki kekayaan seni dan budaya yang muncul di masyarakat. Kesenian tersebut berkembang dan menjadi besar di kalangan masyarakat yang menjadi karakteristik daerah. Kesenian yang ada di Kabupaten Rembang antara lain kethoprak, Wayang kulit, Sholawatan, Campursari, Thong-thong Lek, Pathol, Dangdut Campursari, Karawitan, Tayub, Emprak, Orek-orek, Barongan, Reyog, Rodhat, Keroncong, Hadroh, Sanggar Tari, Sanggar Lukis/Seni Rupa, Rebana Modern dan solo organ. Kesenian tersebut merupakan aset budaya dan kekayaan Kabupaten Rembang. Jumlah kelompok kesenian keseluruhan pada tahun 2009 sebanyak 371 kelompok yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang. Banyaknya kesenian yang ada di kabupaten Rembang memang merupakan potensi, namun demikian pembinaan kelompok-kelompok

kesenian tersebut belum optimal. Kelompok kesenian tersebut berkembang secara alamiah di tengah masyarakat tanpa pembinaan secara intensif oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Secara lengkap jenis kesenian yang ada di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 67.
Data Jenis Kesenian Tradisional di Kabupaten Rembang

No	Nama	Jumlah	
1.	Kethoprak	29	grup se Kab. Rembang
2.	Pedalangan	38	grup se Kab. Rembang
3.	Karawitan	55	grup se Kab. Rembang
4.	Tayub	3	grup se Kab. Rembang
5.	Campursari	7	grup se Kab. Rembang
6.	Emprak	2	grup se Kab. Rembang
7.	Orek-orek	2	grup se Kab. Rembang
8.	Pathol	2	grup se Kab. Rembang
9.	Barongan	4	grup se Kab. Rembang
10.	Rodhat	1	grup se Kab. Rembang
11.	Keroncong	4	grup se Kab. Rembang
12.	Dangdut	15	grup se Kab. Rembang
13.	Hadroh/Samproh	2	grup se Kab. Rembang
14.	Sanggar Tari	9	grup se Kab. Rembang
15.	Sanggar Seni Rupa	1	grup se Kab. Rembang
16.	Qasidah	2	grup se Kab. Rembang
17.	Jathilan	1	grup se Kab. Rembang
18.	Solo Organ	5	grup se Kab. Rembang
19.	Thong Thong Lek	21	grup se Kab. Rembang

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Rembang 2010.

Kabupaten Rembang memiliki kekayaan sejarah yang cukup besar. Berbagai peninggalan sejarah perkembangan Islam dan masuknya etnis China Ke Pulau Jawa dimiliki oleh Kabupaten Rembang. Peninggalan sejarah tersebut tersebar di berbagai kecamatan utamanya Kecamatan Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Bulu. Benda, situs dan kawasan cagar budaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 68.
Data Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang

No	Jumlah Cagar Budaya	Keterangan
	<u>Kec. Rembang</u>	9
1	Museum Kamar Pengabdian RA Kartini (2 Mei 1964)	
2	Masjid Jami' (1814)	
3	Makam Adipati Condrodiningrat (1289 H)	
4	Makam Adipati Pangeran Sedolaut (Raden Tumenggung Pratiktoningrat) 1757 / 1831 M	
5	Klenteng Mak Co Tjoe Hwie Kiong (1841)	
6	Pelabuhan Lama / Pangkalan AL Kolonial (1816)	
7	Gereja / Peninggalan Belanda Arst.Eropa (1811)	u/ Perpustakaan
8	Jangkar Dampo Awang	
9	Kapal Kuno di Ds Punjulharjo (abad ke-7)	
	<u>Kec. Lasem</u>	11
1	Petilasan dan Makam Sunan Bonang	
2	Pasujudan Sunan Bonang dan Makam Putri Cempo	
3	Bukit Jejeruk dan Makam Sultan Mahmud/Minangkabau	
4	Situs Goa dan Batu Prasasti Kajar	
5	Masjid Jami' (1588) dan Makam Adipati P.Tejukusumo V	
6	Klenteng Mak Co Thian Siang Sing Bo Dasun (abad 15)	
7	Klenteng Poo An Bio Karangturi (1740)	
8	Galangan Kapal Dasun (Jaman Majapahit/ pra abad XVI)	
9	Makam R.Panji Margono/Tan Pan Ciang, menghancurkan Kumpeni tgl 21 Juli 1741 (putra I Pangeran Tejukusumo V)	
10	Makam Adipati Nyi Ageng Maloko 1479-1490 (kakak Sunan Bonang / putra I Sunan Ampel)	
11	Makam P. Santi Puspo (Penyebar Islam abad XV) dan Adipati P. Santiyogo/Sayid Abubakar -Caruban	
	<u>Kec. Sluke</u>	4
1	Makam Putri Sarijati	
2	Makam Sukowati di Pantai Suko	
3	Makam Sunan Langgar Ds Langar	
4	Makam Pangeran Alas G.Lengis Ds. Sanetan	
	<u>Kec. Kragan</u>	2
1	Megalitikum Terjan dan Selodiri	
2	Situs Plawangan	
	<u>Kec. Bulu</u>	1
1	Makam RA Kartini (17 September 1904)	
	Jumlah	27

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, 2010

Peninggalan budaya dan sejarah di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang memiliki kekayaan peninggalan sejarah dan cagar budaya. Beberapa asset peninggalan sejarah tersebut ada yang terawat dengan baik, namun banyak yang tidak terawat dengan baik. Cagar budaya tersebut perlu dilakukan pemeliharaan dengan baik agar kondisinya semakin baik dan lestari, sehingga generasi berikutnya masih dapat menikmati dan mengetahui peninggalan sejarah tersebut.

Selain kesenian dan peninggalan sejarah, Kabupaten Rembang juga memiliki banyak kegiatan budaya. Peringatan Haul yang ada di Kabupaten Rembang juga merupakan asset budaya yang cukup potensial dalam menarik minat orang datang ke Rembang. Beberapa kegiatan budaya yang setiap tahun diselenggarakan di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 69.
Data Kegiatan Tradisi/Keagamaan/Budaya di Kabupaten Rembang

No	Kegiatan Tradisi / Keagamaan / Budaya	Keterangan
1	Sedekah Bumi	14 event
2	Sedekah Desa	14 event
3	Sedekah Laut/ Larungan (setiap 7 Syawal)	6 event
4	Hari Kartini (setiap 21 April)	14 event
5	Hari Jadi Kabupaten Rembang (setiap 27 Juli)	14 event
6	Malam Syuro (setiap malam 1 Syuro)	14 event
7	Syawalan/Kupatan/Lomban (1 - 10 Syawal)	14 event
8	Penjamasan Bende Becak (10 Dzulhijah / Idul Adha)	1 event
9	Haul Sunan Bonang (bulan Selo/Dulkangidah)	1 event
	hari Rabu Pahing / kalau tidak ada pada hari Jum'at Legi	
10	Haul Sultan Minangkabau/Mahmud (malam Jum'at Wage)	1 event
11	Haul KH.Abdullah Chafidz (27 Rabiul Awal)	1 event
12	Haul KH.Syayid Hamzah A.Syato (23 Syuro)	1 event
13	Haul KH. Bisri Mustofa (5 Rabiul Awal)	1 event
14	Haul KH. Ma'shum Ahmad (6 Rabiul Awal)	1 event
15	Haul KH. Baidlawi (15 Syawal)	1 event
16	Festival Thong Thong Lek (Menjelang Idul Fitri)	1 event

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang

e. Agama

Mayoritas penduduk Kabupaten Rembang merupakan pemeluk agama Islam. Pada tahun 2009 pemeluk agama Islam sebesar 98,74%, Katholik 0.55%, Kristen 0.52%, Budha 0.17% dan Hindu 0.02%. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, toleransi antar umat beragama cukup harmonis. Keharmonisan tersebut salah satunya dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah yang ada disekitar warga yang majemuk. Jumlah tempat ibadah yang tercatat pada tahun 2009 adalah : masjid sebanyak 626 buah, mushola 2.804 buah, gereja kristen 21 buah, gereja katholik 11 buah, Pura/kuil sebanyak 1 buah serta vihara/klentheng sebanyak 5 buah.

Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah yang memiliki pondok pesantren yang cukup banyak. Pada tahun 2009 jumlah pondok pesantren sebanyak 109 dengan jumlah santri 7.819 orang.

f. Kependudukan Catatan Sipil

Jumlah penduduk Kabupaten Rembang tahun 2009 berdasarkan data dari BPS tahun 2009 sebesar 611.886 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 304.972 jiwa (49,84%) dan perempuan sebanyak 306.914 jiwa (50,16%). Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang sebesar 603 jiwa untuk setiap kilometer persegi (km²). Dengan pusat kepadatan penduduk di wilayah perkotaan lebih padat dari pada perdesaan. Besarnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rembang tiap tahun sebesar 0,89%.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari rasio jenis kelamin, yaitu perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Sehingga diketahui rasio jenis kelamin sebesar 99,37. Dengan demikian di Kabupaten Rembang, tiap-tiap 100 penduduk perempuan ada sekitar 99 atau 100 penduduk laki-laki.

Berdasarkan data tentang angka beban tanggungan (*dependency ratio*) penduduk Kabupaten Rembang tahun 2007 sebesar 66,81 dan pada tahun 2009 angka tersebut mengalami penurunan menjadi 45.54 yang artinya dari setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15 - 64 tahun) harus menanggung beban hidup sekitar 46 penduduk usia belum produktif (0 – 14 tahun) dan usia tidak produktif (65 tahun ke atas). Gambaran tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk berdasarkan kelompok umur dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 70.
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2005 – 2009 (Jiwa)

Kelompok Umur	2005	r (%)	2006	r (%)	2007	r (%)	2008	r (%)	2009	r (%)	r rata-rata
0-4	51,099	1,03	51,591	0,96	51.769	0,35	48364	-6,58	44.280	-8,44	-2,54
5–8	52,503	1,04	53,006	0,96	54.719	3,23	51958	-5,05	55.007	5,87	1,21
9-14	55,782	1,03	56,319	0,96	56.585	0,47	56979	0,70	51.721	-9,23	-1,21
15-19	61,113	1,00	61,725	1,00	61.882	0,25	53280	-13,90	56.517	6,08	-1,11
20-24	56.250	1,04	56.796	0,97	56.886	0,16	50.559	-11,12	48.419	-4,23	-2,64
25-29	50.764	1,04	51.258	0,97	51.627	0,72	50.242	-2,68	52.756	5,00	1,01
30-34	48.282	1,04	48.748	0,97	48.759	0,02	49.189	0,88	51.736	5,18	1,62
35-39	46.970	1,03	47.419	0,96	47.615	0,41	47.587	-0,06	52.364	10,04	2,48
40-44	41.433	1,04	41.832	0,96	41.836	0,01	45.840	9,57	45.003	-1,83	1,95
45-49	31.937	1,05	32.244	0,96	32.843	1,86	39.593	20,55	37.802	-4,52	3,98
50-54	23.425	1,03	23.650	0,96	24.425	3,28	30.967	26,78	31.391	1,37	6,68
55-59	17.090	1,04	17.251	0,94	17.397	0,85	21.574	24,01	22.745	5,43	6,45
60-64	18.691	1,02	18.874	0,98	18.962	0,47	29.368	54,88	21.693	-26,13	6,24
64+	36.149	1,04	36.500	0,97	36.660	0,44	42.252	15,25	40.452	-4,26	2,69
Jumlah	591.488	1,03	597.213	0,97	601.964	0,80	607.752	0,96	611.886	0,68	0,89

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2009

Selanjutnya dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan usia kerja pada tahun 2009 mencapai 398.733 angka ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2008 mencapai jumlah 388.831 jiwa, Gambaran tentang jumlah penduduk di Kabupaten Rembang berdasarkan usia kerja tahun 2005 – 2008 dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 71.
Penduduk Berdasarkan Usia Kerja
di Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2009

Kelompok Umur	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
15 – 19	61.113	61.725	61,882	53.280	56.517
20 – 24	56.250	56.796	56,886	50.559	48.419
25 – 29	50.764	51.258	51,627	50.242	52.756
30 – 34	48.282	48.748	48,759	49.189	51.736
35 – 39	46.970	47.419	47,615	47.587	52.364
40 – 44	41.433	41.832	41,836	45.840	45.003
45 – 49	31.937	32.244	32,843	39.593	37.802
50 – 54	23.425	23.650	24,425	30.967	31.391
55 – 59	17.090	17.251	17,397	21.574	22.745
Jumlah	377.264	380.923	383,270	388.831	398.733

Sumber : BPS Kabupaten Rembang

Meningkatnya jumlah penduduk, menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Rembang terutama bagi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Sampai dengan tahun 2010 masih banyak penduduk yang belum memiliki KTP dan KK. jumlah penduduk yang memiliki KTP dan KK baru mencapai 57,50%. Gambaran tentang capaian indikator kinerja catatan sipil terkait dengan pelayanan KTP dan KK dapat disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 2. 72.
Pelayanan KTP dan KK Kabupaten Rembang

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010 *
Jumlah Kepala Keluarga	152.557	153.967	160.053	168.182	187.718
Persentase penduduk memiliki KTP Dan KK	53,10%	54,20%	55,90%	57,30%	57,50%
Jumlah KTP dan KK yang dikeluarkan setiap tahun	KTP = 38000 KK = 32889	42.106 43.412	161.990 51.885	100.063 82.983	64.199 50.892

*) Angka sementara

Sumber : Dinas Dukcapil dan BPS, 2010

Selanjutnya gambaran realisasi pelayanan akta kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 73.
Pelayanan Akta Catatan Sipil Kabupaten Rembang

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010*
Akta Kelahiran	36.635	38.965	21.383	35.171	15.010	11.565
Akta Perkawinan	58	54	52	44	44	34
Akta Perceraian	9	8	3	3	5	2
Akte kematian	40	45	45	48	53	44

*) Angka sementara

Sumber : Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2011-2015

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat diketahui jumlah akta kelahiran, perkawinan dan akte perceraian yang diterbitkan pada tahun 2006 merupakan jumlah terbesar apabila dibandingkan dengan tahun berikutnya (2007-2010). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil belum terwujud secara optimal. Dengan kondisi tersebut merupakan tantangan yang cukup berat dalam penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil, salah satu tantangannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil serta tantangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

g. Kepemudaan dan Olahraga

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dalam pasal 3 bahwa Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat tersebut maka pemuda mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut.

Potensi penduduk pada usia muda di Kabupaten Rembang tiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2009 jumlah penduduk pada usia muda mencapai 214.313 jiwa, jumlah tersebut merupakan potensi bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan dan menggerakkan kegiatan pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Rembang. Potensi pemuda yang cukup besar dapat menjadi pendorong dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan apabila potensi tersebut dikembangkan secara baik dan berkelanjutan, sebaliknya apabila potensi cukup besar tersebut tidak dikembangkan secara baik akan menjadi hambatan serta menimbulkan permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemuda seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja maupun tindakan kriminal lainnya.

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dengan memfasilitasi aktivitas kepemudaan baik lintas internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan. Fasilitasi aktivitas kepemudaan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemuda yang kreatif, inovatif serta memiliki jiwa kewirausahaan.

Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dilakukan dengan melakukan pendampingan dan pemberdayaan kelembagaan/organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Rembang seperti KNPI, AMPI, Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kepemudaan lainnya. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang tahun 2009 jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 93 organisasi yang terdiri dari KNPI sebanyak 1 organisasi, AMPI, Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pramuka, Karang Taruna dan Kosgoro masing-masing sejumlah 15 organisasi.

Pengembangan kepemudaan juga dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendorong kreativitas dan jiwa kewirausahaan generasi muda. Kegiatan tersebut adalah mengadakan kerjasama dengan kabupaten lain melalui pertukaran pemuda dan pelatihan bersama. Kegiatan kerjasama kepemudaan selama kurun 2005 sampai dengan 2009 sebanyak 6 kegiatan kerjasama yaitu kerjasama antar pelajar SLTP, SLTA, Pemuda Karang Taruna, Kelompok Usaha Pemuda Antar Produktif dan Pramuka/Pengiriman Kelompok Pramuka Pandu Wisata.

Kegiatan kepramukaan sebagai wadah pemuda dalam mengembangkan organisasi kepanduan di Kabupaten Rembang difasilitasi oleh beberapa institusi antara lain Kepolisian dengan Pramuka Saka Bayangkara, Dinas Kesehatan dengan Pramuka Saka Husada, Dinas Kehutanan dengan Pramuka Saka Wanabakti, TNI AL dengan Pramuka Saka Bahari dan kegiatan Pramuka yang diselenggarakan oleh masing-masing sekolah baik SLTP maupun SLTA. Kegiatan kepramukaan tersebut di Kabupaten Rembang mendapat dukungan sarana dan prasarana antara lain ketersediaan kesekretariatan dan Bumi Perkemahan sebagai tempat untuk mendidik dan meningkatkan kapasitas dan kualitas pemuda.

Kondisi keolahragaan di Kabupaten Rembang belum sesuai harapan, hal ini dapat dilihat perkembangan klub olah raga relatif stagnan sejak tahun 2005 sampai dengan 2008, jumlah klub olahraga sebanyak 98 klub dengan jumlah klub olahraga paling banyak adalah cabang olahraga sepakbola, pencak silat dan catur.

Selanjutnya data tentang jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Rembang ada 15 organisasi olah raga yaitu PSSI, PASI, IPSI, PERCASI, GABSI, PBVSI, PERBASI, PBSI, Tae Kwondo, Wusu, PERPANI, PTMSI, FORKI, FPTI dan PSTI. Keberadaan organisasi tersebut belum sepenuhnya memberikan kontribusi dalam peningkatan prestasi atlet olah raga. Hal ini terbukti hanya ada 7 cabang olah raga unggulan yang meraih prestasi. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan prestasi olah raga adalah belum optimalnya pembinaan dan pembibitan atlet olah raga, kebutuhan dan ketersediaan pelatih sesuai dengan kompetensi serta dukungan sarana dan prasarana masih terbatas.

h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Inpres No. 9 tahun 2000 adalah upaya secara terencana untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Rembang. Indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender merupakan nilai komposit Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terpilah laki-laki dan perempuan meliputi tiga sub indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, angka lama sekolah dan pendapatan.

Selama ini di Kabupaten Rembang masih terdapat kesenjangan gender dalam memperoleh akses, partisipasi dan manfaat pembangunan. Dalam hal kedudukan perempuan dalam jabatan politik pada lembaga legislatif masih rendah yaitu sebanyak 8 orang atau sekitar 17,8%, masih dibawah jumlah ketentuan peraturan perundangan yang ada sebesar 30%. Peran perempuan dalam jabatan eksekutif 23% yaitu sebanyak 142 orang dari 612 jabatan struktural yang ada. Peran perempuan dalam bidang ekonomi sebesar 17,21% dari seluruh jumlah angkatan kerja di Kabupaten Rembang. Akses layanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas, dapat dilihat dari data jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar 432 kelompok, jumlah posyandu sebesar 1.239 kelompok.

Rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, ditunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2006 sebesar 14 kasus, tahun 2007 sebesar 24 kasus dan tahun 2008 sebesar 32 kasus. Sedangkan data kasus kekerasan terhadap anak tahun 2006 sebesar 11 kasus, tahun 2007 sebesar 11 kasus dan tahun 2008 sebesar 27 kasus. Sebagai upaya untuk penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Rembang telah terbentuk Unit Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Semai R WC3). Selain itu di Kabupaten Rembang masih terdapat pernikahan dini khususnya anak perempuan <16 tahun, tahun 2008 terdapat 24 kasus dan tahun 2009 ada 31 kasus. Sebagai bentuk upaya Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan anak maka dilaksanakan sosialisasi program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) melalui 55 PIK remaja, Pembentukan dan fasilitasi terhadap Forum Anak Rembang (FAR) sebagai bentuk media untuk menyalurkan ide dan kreatifitas anak di Kabupaten Rembang, Kebijakan Kabupaten Rembang Layak Anak, penataan kelembagaan perlindungan anak dan membangun kemitraan dengan para pihak pemangku kewajiban pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Sementara itu, jumlah anak nakal dan anak jalanan menunjukkan peningkatan yang cukup fluktuaktif. Jumlah anak nakal di Kabupaten Rembang tahun 2006 sebanyak 556 anak dan menurun pada tahun 2007 menjadi 414 anak, namun tahun 2009 kembali meningkat menjadi 556 anak. Untuk anak jalanan tahun 2006 sebanyak 481 anak, menurun menjadi 398 anak tahun 2009. Anak balita terlantar di Kabupaten Rembang tahun 2006 sebanyak 2.459 balita, tahun 2009 meningkat menjadi 2.701 balita. Sedangkan jumlah anak terlantar di Kabupaten Rembang, tahun 2006 jumlah anak terlantar sebanyak 8.432 anak, tahun 2009 menurun menjadi 7.497 anak. Meskipun jumlah anak terlantar ini mengalami penurunan pada tahun 2009, namun jumlah anak terlantar di Kabupaten Rembang masih cukup tinggi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 74.
Banyaknya Kasus yang Terjadi Pada Wanita dan Anak
di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009

No	Jenis Kasus	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	r rata- rata
1.	Anak Balita Terlantar	2.459	2.488	2.504	2.701	0,02
2.	Anak Terlantar	8.432	7.298	7.320	7.497	-0,03
3.	Anak Nakal (AN)	556	414	432	556	0,02
4.	Anak Jalanan (AJ)	481	353	384	398	-0,04

Sumber : Dinas Sosial, Tenagakerja, dan Transmigrasi, 2010

i. Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, lingkup kegiatan pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan keparawisataan.

Potensi obyek wisata di Kabupaten Rembang sebanyak 33 obyek wisata dengan jenis yang sangat beragam, meliputi wisata bahari, wisata agro, wisata hutan, wisata religius, dan wisata sejarah. Potensi obyek wisata tersebut tersebar di Kecamatan Lasem (14 obyek wisata), Kecamatan Rembang (5 obyek wisata), Kecamatan Sluke (4 obyek wisata), Kecamatan Kragan (3 obyek wisata), Kecamatan Bulu (2 obyek wisata), Kecamatan Sulang (2 obyek wisata), Kecamatan Kaliori (1 obyek wisata), Kecamatan Sarang (1 obyek wisata), dan Kecamatan Sale (1 obyek wisata).

Dari berbagai jenis potensi wisata yang ada, wisata yang potensial untuk dikembangkan adalah wisata bahari dan wisata sejarah. Potensi wisata bahari ini dapat mendukung upaya pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan Kota Rembang sebagai *Sea front City*, yaitu konsep pengembangan kota yang berorientasi pada Pantai atau laut. Obyek wisata bahari di Kabupaten Rembang antara lain pantai dan pulau-pulau kecil yang eksotik, seperti Pantai Kartini dengan Pulau Gorekan di Kec. Rembang, Pantai Pasir Putih

Tasikharjo dengan Pulau Gede dan Pulau Marongan di Kec. Kaliori, Pantai Binangun dengan Pulau Putri dan Pulau Karang Gosong di Kec. Lasem, Pantai dan Tugu peringatan pendaratan pasukan Jepang di Kec. Kragan.

Di Kabupaten Rembang terdapat obyek wisata peninggalan sejarah dan berbagai benda/bangunan cagar budaya, diantaranya Situs Plawangan, Situs Terjan, Situs Kapal Kuno Punjulharjo, Makam Jejeruk, Makam Putri Campa, Makam dan Pasujudan Sunan Bonang, Makam dan Museum Kartini, Makam Sunan Langgar dan Pangeran Alas di Sluke, Kawasan Pecinan yaitu kota kuno bernuansa China di Lasem, berbagai Kelenteng di Kecamatan Lasem dan Rembang (Kelenteng Cu An Kiong, Kelenteng Gie Yong Bio, dan Kelenteng Poo An Bio). Bangunan-bangunan peninggalan sejarah ini sangat mendukung pengembangan *heritage tourism*, yaitu pariwisata yang memanfaatkan daya tarik wisata berupa warisan masa lampau. Di Kecamatan Lasem juga terdapat tempat ibadah bagi umat Budha yang cukup besar yaitu Vihara Sendangcoyo yang cukup potensial untuk dijadikan obyek wisata religi.

Sampai dengan tahun 2009 baru lima obyek wisata di Kabupaten Rembang yang dikenakan retribusi oleh pemerintah daerah bagi pengunjungnya, yaitu Taman Rekreasi Pantai Kartini dan Museum Kamar Pengabdian RA Kartini di Kecamatan Rembang, Makam RA Kartini dan Wana Wisata Kartini Mantingan di Kecamatan Bulu, dan Hutan Wisata Sumber Semen di Kecamatan Sale. Dalam kurun waktu empat tahun jumlah wisatawan pada kelima obyek wisata tersebut menunjukkan peningkatan walaupun relatif kecil, dari sebanyak 375.201 orang (tahun 2005) menjadi 382.521 orang (tahun 2008), namun menurun pada tahun 2009 menjadi 315.822 orang. Pengunjung terbanyak terdapat di obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini (67,5%), kedua di obyek wisata Wana Wisata Kartini Mantingan (16,3%), ketiga di makam RA Kartini (15,4%), dan keempat di Museum Kamar Pengabdian RA Kartini (0,9%). Perkembangan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 75.
Jumlah Pengunjung Wisata di Kabupaten Rembang
Tahun 2005-2009

No	Obyek Wisata	2005	2006	2007	2008	2009
1	Taman rekreasi Pantai Kartini	294.318	288.557	250.143	278.586	213.049
2	Museum Kamar Pengabdian RA Kartini	3.862	3.474	2.467	1.898	2.836
3	Makam RA Kartini	33.312	29.611	34.066	43.568	48.550
4	Wana Wisata Kartini Mantingan	29.897	36.838	53.295	50.192	51.387
5	Hutan Wisata Sumber Semen	13.812	9.572	17.605	8.277	-
	Jumlah Pengunjung Nusantara (orang)	375.201	368.062	357.576	382.521	315.822
	Jumlah pendapatan daerah dari kunjungan wisata (rupiah)	676.745.110	677.518.010	744.361.110	814.609.535	859.847.400

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang (2009).

Selama ini upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata yaitu dengan turut berpartisipasi pada event-event pameran regional, seperti Jateng Expo, BIF (Borobudur Internasional Festival), BSF (Bengawan Solo Fair), Pasar Imlek, dan Jogjakarta Expo. Selain itu dilakukan pula promosi pariwisata melalui pengadaan leaflet, pengadaan buku profil pariwisata, pengadaan buku menggali warisan sejarah, promosi di media cetak, media elektronik, *sunday morning party*, sepeda wisata, karnaval hias HUT Provinsi Jateng, dan parade seni dan budaya Jawa Tengah.

Salah satu pendukung pariwisata di Kabupaten Rembang yaitu sarana akomodasi berupa hotel dan restoran. Sampai dengan tahun 2009 terdapat 17 hotel dengan daya tampung antara 20-80 orang semuanya berklasifikasi hotel melati. Jumlah wisatawan yang menginap di hotel dari sebanyak 35.052 orang pada tahun 2005, menjadi 33.660 orang pada tahun 2006, sebanyak 36.242 pada tahun 2007, sebanyak 32.664 orang pada tahun 2008, dan 38.940 orang pada tahun 2009. Perkembangan jumlah hotel dan pengunjung hotel di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 76.
Perkembangan Jumlah Hotel dan Pengunjung Hotel
di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009

No	Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah Hotel	12	12	16	17	17
2	Jumlah Kamar Hotel	209	209	272	291	302
3	Jumlah Bed/Tempat Tidur	368	368	461	480	502
4	Jumlah Pengunjung Hotel	35.052	33.660	36.242	32.664	38.940

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang (2010)

Beberapa event wisata daerah yang diadakan setiap tahun, seperti Sedekah Laut, Festival Kartini, Pameran Foto dan Lukisan, Pentas Teater, Haul Sunan Bonang, Penjamasan Bende Becak, Haul Sultan Minangkabau (Sultan Mahmud), Haul KH. Abdullah Chafidz, Syawalan/Kupatan, Festival Thong Thong Lek, Cap Go Meh, Peringatan Hari Jadi Kabupaten Rembang, Haul KH. Syayid Hamzah A.Syato, Haul KH. Bisri Mustofa, Haul KH. Ma'shum Ahmad, Haul KH. Baidlawi dan beberapa event lainnya. Berbagai event budaya tersebut merupakan daya tarik sendiri bagi wisatawan dari luar daerah apabila dikemas dan dikelola dengan baik.

Kabupaten Rembang juga memiliki potensi pendukung dalam bentuk asosiasi pariwisata (*Community Based Tourism*), seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (1 buah), Pramuwisata Khusus (1 buah), Kelompok Sadar Wisata (1 buah), Biro Perjalanan Wisata (2 buah), Agen Perjalanan Wisata (2 buah) dan Saka Pandu Wisata (1 buah). Sedangkan anggota kelompok sadar wisata selama kurun waktu lima tahun terakhir (2005-2009) menunjukkan adanya peningkatan dari sebanyak 220 orang pada tahun 2005 menjadi 352 orang pada tahun 2009.

j. Sosial

Capaian kinerja bidang sosial di Kabupaten Rembang selama tahun 2005-2009 berdasarkan jenis PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ada rata-rata menunjukkan peningkatan, namun demikian ada beberapa indikator yang menunjukkan penurunan. Indikator yang menunjukkan adanya penurunan masalah sosial terdapat pada anak terlantar yaitu rata-rata terjadi penurunan 3%, anak jalanan berkurang 4%, lanjut usia terlantar berkurang 0,02%, fakir miskin berkurang 1% dan keluarga rentan berkurang 0,05%. Sedangkan peningkatan jumlah masalah sosial terbanyak adalah pada lanjut usia yang menjadi korban tindak kekerasan yang bertambah sebesar 3,73%.

Jumlah penderita masalah sosial sampai dengan tahun 2009 yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan adalah pada anak balita terlantar sebesar 2.701 anak, anak terlantar sebanyak 7.497 anak, anak yang menjadi korban tindak kekerasan sebanyak 1.047 anak, wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 5.748 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 7.076 orang, penyandang cacat sebanyak 3.610 orang, keluarga fakir miskin (KFM) sebanyak 43.872 keluarga, keluarga berumah tak layak huni sebanyak 6.084 keluarga, keluarga rentan sebanyak 1.303 keluarga. Lebih jelasnya mengenai jenis dan jumlah PMKS di Kabupaten Rembang dan kelembagaan sosial yang ada dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 77.
Jenis dan jumlah PMKS di Kabupaten Rembang Tahun 2005 - 2009

NO	JENIS PMKS	TAHUN					
		2005	2006	2007	2008	2009	rata-rata (%)
1	Anak Balita Terlantar (orang)	202.400	2.459	2.488	2.504	2.701	0,02
2	Anak Terlantar (orang)	7.592	8.432	7.298	7.320	7.497	-0,03
3	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan (AKTK) (orang)	780	866	931	946	1.047	0,05
4	Anak Nakal (AN) (orang)	501	556	414	432	556	0,02
5	Anak jalanan (AJ) (orang)	433	481	353	384	398	-0,04
6	Anak cacat (AC) (orang)	621	689	854	1.134	1.238	0,16
	a. Cacat Tubuh (CT) (orang)	262	291	357	401	454	0,12
	b. Cacat Rungu Wicara (CRW) (orang)	116	129	161	216	268	0,21
	c. Cacat Netra (CN) (orang)	66	73	73	80	97	0,08
	d. Cacat Mental reterdasi (CMR) (orang)	86	95	120	183	231	0,26
	e. Cacat Mental eks Psikotik (orang)	27	30	32	68	86	0,36
	f. Cacat Ganda (CG) (orang)	27	27	47	82	102	0,43
	g. Cacat Bibir sumbing (CBS) (orang)	44	44	64	104	-	-
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (orang)	5.010	5.710	5.619	5.678	5.748	0,00
8	Wanita yang menjadi korban Tindak Kekerasan (WKTK) (orang)	92	92	94	116	121	0,07
9	Lanjut Usia Terlantar (LUT) (orang)	7.100	7.887	6.907	6.978	7.076	-0,02
10	Lanjut Usia yang menjadi korban tindak kekerasan (orang)	1	1	15	24	32	3,73
11	Penyandang Cacat (PACA) (orang))	2.200	2.218	3.046	3.422	3.610	0,14
	a. Cacat Tubuh (CT) (orang)	800	803	1.227	1.304	1.401	0,17
	b. Cacat Rungu Wicara (CRW) (orang)	290	299	440	501	569	0,19
	c. Cacat Netra (CN) (orang)	490	497	645	655	711	0,10
	d. Cacat Mental reterdasi (CMR) (orang)	245	245	330	368	385	0,13
	e. Cacat Mental eks Psikotik (orang)	270	279	288	112	416	0,53
	f. Cacat Ganda (CG) (orang)	57	57	57	140	128	0,34
	g. Cacat Bibir sumbing (CBS) (orang)	38	38	59	327	-	-
12	a. Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis (PACABK) (orang)	60	62	283	0	364	-
	b. Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis (eks kusta) (orang)	45	45	71	100	117	0,29
13	penyandang HIV/AIDS (orang)	-	-	-	-	-	-
14	Tuna susila (TS) (orang)	80	89	86	105	105	0,05
15	Pengemis (orang)	60	60	70	103	129	0,22
16	Gelandangan (orang)	2	2	2	3	7	0,46
17	bekas narapidana (eks Napi) (orang)	562	562	560	618	626	0,03
18	pekerja migran bermasalah (PMB) (orang)	92	92	129	354	411	0,58
19	korban penyalahgunaan NAPZA (orang)	20	20	14	24	34	0,21
20	keluarga fakir miskin (KFM) (KK)	45.006	45.596	43.747	43.793	43.872	-0,01
21	keluarga berumah tak layak huni (KK)	5.649	5.649	5.939	6.001	6.084	0,02
22	keluarga bermasalah sosial psikologis (KK)	102	102	82	94	120	0,06
23	keluarga rentan (KK)	11.670	1.679	1.251	1.276	1.303	-0,05
24	komunitas adat terpencil (KAT) (orang)	448	448	1.444	1.444	1.444	0,56
25	masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana (orang)	1.480	1.483	1.702	1.702	89	-0,20
26	Korban bencana alam (KBA) (orang)	70	800	125	47	-	-
27	korban bencana sosial (KBS) (orang)	-	-	1	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2010

Dari 27 indikator PMKS dari tahun 2005 hingga tahun 2009 baru 4 indikator yang tertangani secara rutin yaitu PMKS anak terlantar, PMKS tuna susila, PMKS pengemis dan PMKS Komunitas Adat Terpencil. Sedangkan PMKS yang tertangani tidak secara rutin sebanyak 11 indikator PMKS yaitu PMKS anak jalanan, cacat fisik, cacat fisik dan mental, PMKS Wanita Rawan Sosial Ekonomi, PMKS Lanjut Usia, PMKS Penyandang HIV/ AID, PMKS gelandangan yang tertangani, PMKS bekas narapidana, PMKS Korban Penyalahgunaan NAPZA, PMKS pekerja migran bermasalah dan PMKS Keluarga Fakir, dan indikator yang lain belum tertangani. Lebih jelasnya mengenai penanganan PMKS yang ada dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 78.
Jenis dan jumlah PMKS yang Tertangani di Kabupaten Rembang
Tahun 2005 - 2009

No	Jumlah PMKS yang tertangani	TAHUN					
		2005	2006	2007	2008	2009	r Rata-rata (%)
1	Jumlah PMKS Anak Balita Terlantar yang tertangani	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah PMKS Anak Terlantar yang tertangani	30	30	120	75	75	65,625
3	Jumlah PMKS Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan/ Diperlakukan Salah (AKTK) yang tertangani	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah PMKS Anak Nakal yang tertangani	-	-	-	-	-	-
5	Jumlah PMKS Anak Jalanan yang tertangani	20	20	-	25	10	-
6	Jumlah PMKS Anak Cacat yang tertangani	-	-	-	-	-	-
	a. Cacat fisik	-	-	30	30	-	-
	b. Cacat mental	-	-	-	-	-	-
	c. Cacat fisik dan mental	-	-	-	-	16	-
7	Jumlah PMKS Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang tertangani	-	-	-	10	20	-
8	Jumlah PMKS Wanita Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan/ Diperlakukan Salah yang tertangani	-	-	-	-	-	-
9	Jumlah PMKS Lanjut Usia Terlantar yang tertangani	-	30	105	-	30	-
10	Jumlah PMKS Lanjut Usia Yang Menjadi Tindak Kekerasan/ Diperlakukan Salah yang tertangani	-	-	-	-	-	-
11	Jumlah PMKS Penyandang Cacat yang tertangani	-	-	-	-	-	-
	a. Cacat fisik	-	-	-	-	-	-
	b. Cacat mental	-	-	-	-	-	-
	c. Cacat fisik dan mental	-	-	-	-	-	-
12	Jumlah PMKS Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis yang tertangani		-	-	-	-	-
13	Jumlah PMKS Penyandang HIV/ AIDS yang tertangani	-	-	-	15	-	-
14	Jumlah PMKS Tuna Susila yang tertangani	-	30	30	30	30	0
15	Jumlah PMKS Pengemis yang tertangani	-	30	30	30	30	0
16	Jumlah PMKS Gelandangan yang tertangani	-	-	30	-	25	-
17	Jumlah PMKS Bekas Narapidana yang tertangani	-	-	10	-	10	-

No	Jumlah PMKS yang tertangani	TAHUN					
		2005	2006	2007	2008	2009	r Rata-rata (%)
18	Jumlah PMKS Korban Penyalahgunaan NAPZA yang tertangani	-	-	-	-	40	-
19	Jumlah PMKS Pekerja Migran Bermasalah yang tertangani	-	-	-	-	200	-
20	Jumlah PMKS Keluarga Fakir Miskin yang tertangani	-	400	400	400	1.000	-
21	Jumlah PMKS Keluarga Berumah Tak Layak Huni yang tertangani	-	-	-	-	100	-
22	Jumlah PMKS Keluarga Yang Bermasalah Sosial Psikologi yang tertangani	-	-	-	-	-	-
23	Jumlah PMKS Keluarga Rentan yang tertangani	-	-	-	-	-	-
24	Jumlah PMKS Komunitas Adat Terpencil yang tertangani	-	100	50	50	-	-
25	Jumlah PMKS Korban Bencana Alam yang tertangani	50	50	50	50	40	-
26	Jumlah PMKS Korban Bencana Sosial yang tertangani	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi tahun 2010

Untuk mendukung terselenggaranya penanganan masalah kesejahteraan sosial dan PMKS, maka diperlukan peran aktif segenap partisipasi sosial masyarakat yang tercakup dalam Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS tersebut meliputi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT), Organisasi Sosial (ORSOS), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Dunia Usaha serta Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). Pada tahun 2009 jumlah pekerja sosial masyarakat sebanyak 996 orang, jumlah ini turun dari tahun 2005 yang berjumlah 1.598 orang. Demikian juga untuk wanita pemimpin kesejahteraan sosial yang semakin turun, dimana pada tahun 2005 berjumlah 352 orang menjadi 157 orang di tahun 2009.

Tabel 2. 79.
Kelembagaan Sosial di Kabupaten Rembang Tahun 2005 - 2009

No	Kelembagaan Sosial	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	r rata-rata (%)
1	Pekerja sosial Masyarakat (PSM) (orang)	1.598	1.598	1.334	992	996	-10
2	Organisasi Sosial (Orsos)	13	13	15	11	13	2
3	Organisasi Sosial Embrional	12	12	6	9	8	-3
4	Organisasi Sosial Desa (Ordes)	4	4	8	10	10	31
5	Karang Taruna (KT) (buah)	230	230	216	225	225	0,00
6	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) (orang)	352	352	304	148	157	-15
7	Dunia Usaha (DU)	13	13	9	10	10	-5
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	-	-	3	3	3	-10
9	Jumlah Sarana Sosial	7	7	7	7	8	4

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2010

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 129/Huk/2008 telah ditetapkan SPM 2008 -2015 yang mengatur masalah PMKS yang menerima bantuan, pemberdayaan soaial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), panti sosial yang menyediakan sarana dan prasana, bantuan sosial bagi korban bencana, penanganan korban bencana, penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan.

Tabel 2. 80.
Jumlah dan Jenis PMKS dan PSKS Yang Memperoleh Bantuan
Tahun 2005 – 2009 (orang)

No	Kelembagaan Sosial	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	r rata- rata (%)
1.	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	203.439	210.906	201.751	203.246	210.695	0,00
2.	PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	1.667	95	310	135	79	32
3.	Jumlah PSKS Pekerja Sosial Masyarakat yang diberikan bantuan	3	3	3	2	3	4
4.	Jumlah PSKS Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial yang diberikan bantuan	20	20	20	-	-	-
5.	Jumlah PSKS Karang Taruna yang diberikan bantuan	6	6	5	3	3	-14
6.	Jumlah PSKS Organisasi Sosial yang diberikan bantuan	5	5	5	7	7	10
7.	Jumlah PSKS Dunia Usaha yang diberikan bantuan	-	-	-	-	-	-
8.	Jumlah PSKS Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat yang diberikan bantuan	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2010

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2005 sebesar 171.101 jiwa atau 29% dari total jumlah penduduk, sedang pada tahun 2006 naik menjadi 225.074 jiwa atau 38%. Mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 cenderung menurun, pada tahun 2009 persentase penduduk miskin di Kabupaten Rembang sebesar 147.150 jiwa atau 24% dari total jumlah penduduk . Pada tahun 2015 presentase penduduk miskin diperkirakan turun menjadi sebesar 16%. Dengan asumsi program-program penanggulangan kemiskinan semakin efektif. Perkembangan kondisi Kemiskinan di Kabupaten Rembang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 81.
Data Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Rembang
Tahun 2005-2009

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah Penduduk Miskin	171.101	225.074	205.559	154750	147150
Jumlah Penduduk	591.786	597.213	601.964	607.752	611.886
Persentase Jumlah Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk	29%	38%	34%	25%	24%

Sumber : Dinas Kependudukan dan BPS, 2010

k. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya yang strategis dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan, dengan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat mewujudkan kemandirian masyarakat desa dalam menggali potensi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa, pada tahun 2009 telah dibentuk 10 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan 25 pasar desa, lembaga ekonomi masyarakat yang memperoleh fasilitasi permodalan sejumlah 70 kelompok. Sedangkan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam telah dilakukan pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di 14 kecamatan dan pelatihan 16 kelompok usaha khusus perempuan dalam penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Ditinjau dari kelembagaan atau kelompok-kelompok masyarakat desa secara kuantitatif cukup besar namun secara kualitatif kelompok-kelompok tersebut belum memberikan kontribusi secara nyata dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan pembentukan kelompok-kelompok masyarakat tidak didasari atas kebutuhan bersama melainkan dibentuk karena adanya program-program pemberdayaan masyarakat desa baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

Peran serta masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pelaksanaan pembangunan belum sesuai harapan, rendahnya keterlibatan perempuan tersebut disebabkan oleh rendahnya kapasitas perempuan serta kurangnya akses perempuan dalam setiap tahapan pembangunan.

Dari aspek penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan desa masih banyak menghadapi kendala, seperti kurangnya kapasitas aparat, kurangnya sarana prasarana pelayanan dan kurangnya ketersediaan data berupa profil desa yang mana sampai dengan tahun 2009 baru 15 desa dari 294 desa/kelurahan yang menyusun profil desa.

l. Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk angkatan kerja setiap tahun rata-rata mengalami peningkatan, pada tahun 2005 berjumlah 339.278 orang dan di tahun 2009 berjumlah 499.010 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja fluktuatif, sedangkan angka pencari kerja yang ditempatkan rata-rata menunjukkan adanya peningkatan sebesar 5,56%. Pada tahun 2009 penempatan kerja terbanyak pada AKAD yang mencapai 165 orang. Untuk penempatan tenaga kerja AKA yang pada tahun 2008 sebesar 117 orang turun menjadi 11 orang dari tahun 2009. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2009 sebesar 5,61% turun dari tahun 2008 yang mencapai 5,89%, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 82.

Data Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009

No	Kondisi Ketenagakerjaan	Tahun					r rata-rata (%)
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Penduduk angkatan kerja	339.278	303.579	303.579	453.646	499.010	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	-	65,23	70,66	68,11	68,3	1,25
3	Pencari kerja yang ditempatkan (orang)	2.211	271	289	253	324	5,56
4	Jumlah Pengangguran Terbuka (orang)	23.525	21.605	16.889	17.571	15.720	-7,08
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	-	7,59	5,27	5,89	5,61	-5,89
6	Penempatan Tenaga Kerja :						
	a. AKL (orang)	-	86	92	101	148	15,82
	b. AKAD (orang)	-	-	-	35	165	92,86
	c. AKA (orang)	45	185	197	117	11	-31,18
7	Proporsi UMK terhadap KHL (%)		85%	85%	87,50%	88%	0,88

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Rembang Tahun 2010

Tingkat pendidikan pencari kerja pada tahun 2009 didominasi oleh lulusan SMA yang mencapai 1.218 orang dimana kondisi ini sama dengan tahun 2007 dengan jumlah pencari kerja dengan pendidikan SMA sebesar 1.848 orang.

Tabel 2. 83.

Tingkat Pendidikan Pencari Kerja di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009 (orang)

No	Tingkat Pendidikan Pencari Kerja	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	r rata- rata (%)
1	Sekolah Dasar (SD)	37	178	170	37	13	-47,7
2	Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP)	168	303	507	135	74	-39,52
3	Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA)	2.477	1.062	1.848	134	1.218	238,74
4	Diploma (II dan III)	977	608	1.064	2.135	652	10,399
5	Diploma IV/Sarjana	1.537	931	1.088	2.109	911	12,346
6	Pasca Sarjana	15	1	17	12	7	-23,69

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab. Rembang Tahun 2010

Untuk meningkatkan kualitas pencari kerja pemerintah Kabupaten Rembang melalui BLK (Balai Latihan Kerja) telah mengadakan pelatihan bagi masyarakat secara rutin. Jenis ketrampilan/kejuruan yang dilatihkan meliputi 26 jenis pelatihan. Jumlah peserta pelatihan dari tahun 2005 hingga tahun 2010 menunjukkan rata-rata peningkatan sebesar 44%/tahun.

Tabel 2. 84.

Jumlah Peserta Ketrampilan/Kejuruan di BLK Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009 (orang)

No	Jenis Ketrampilan/Kejuruan	2005			2006			2007			2008			2009		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Menjahit	-	16	16	-	16	16	-	16	16	-	48	48	6	42	48
2	Montir Spd Motor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	32
3	Operator Komputer	-	-	-	-	-	-	16	16	32	16	16	32	28	36	64
4	Las Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	32
5	Las Karbit	16	-	16	16	-	16	16	-	16	-	-	-	16	-	16
6	Radio/TV	16	-	16	16	-	16	32	-	32	32	-	32	-	-	-
7	Mobil Bensin	16	-	16	16	-	16	-	-	-	16	-	16	-	-	-
8	Ukir Kayu	16	-	16	-	-	-	16	-	16	32	-	32	48	-	48
9	Bordir	-	16	16	-	-	-	-	-	16	-	32	32	-	-	-
10	Tata Rias Pengantin	-	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Tata Rias Rambut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	-	32	32
12	Teknik Pendingin	-	-	-	32	-	32	-	-	-	-	-	-	48	-	48
13	Mebeleir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	64
14	Elektro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	32
15	Teknik Batik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16
16	Weekel	-	-	-	-	-	-	16	-	16	32	-	32	-	-	-
17	Prosesing Pertanian	-	16	16	-	16	16	-	32	32	-	32	32	-	32	32
18	Proses Perternakan	-	-	-	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Ternak Kambing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	16
	Jumlah	64	64	128	96	32	128	96	80	176	128	144	272	338	158	496

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab. Rembang Tahun 2010

Permasalahan lain yang menyangkut ketenagakerjaan yaitu adanya perselisihan kerja, mogok kerja, PHK dan kecelakaan kerja yang relatif kecil yaitu pada tahun 2005–2008 sebanyak 1 kasus dan pada tahun 2009 sebanyak 2 kasus ketenagakerjaan.

m. Ketransmigrasian

Jumlah transmigran yang diberangkatkan pada tahun 2009 sebanyak 10 KK (37 jiwa) dari total 52 KK yang mendaftar. Kondisi tersebut menunjukkan penurunan dari tahun 2008 yang mencapai 15 KK (53 jiwa). Dari tahun 2005 hingga tahun 2009 transmigran yang berangkat hampir semua berprofesi sebagai petani, sedangkan untuk transmigran yang berprofesi lain relatif sedikit karena di daerah tujuan transmigrasi ketrampilan yang dibutuhkan adalah di bidang pertanian/perkebunan. Hal ini yang menyebabkan rendahnya minat calon transmigran yang berprofesi selain bertani untuk bertransmigrasi. Perkembangan Ketransmigrasian di Kabupaten Rembang Tahun 2005–2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 85.
Perkembangan Transmigran dan Jenis Keterampilan Kabupaten Rembang
Tahun 2005-2009 (orang)

No	Indikator	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	r rata-rata (%)
1	Banyaknya Transmigran :						
	a. Mendaftar :						
	1) Jiwa	51	125	36	53	194	104,42
	2) KK	15	30	10	15	52	98,89
	b. Batal Pergi :						
	1) Jiwa	15	12	14	14	153	330,95
	2) KK	5	4	6	4	41	297,22
	c. Berangkat :						
	1) Jiwa	36	116	36	53	37	5,68
	2) KK	10	36	10	15	10	5,56
2	Banyaknya Transmigran menurut ketrampilan:						
	a. Tukang batu			-	-	-	0,00
	b. Tukang kayu	10	33	-	-	-	0,00
	c. Montir radio			-	-	-	0,00
	d. Sopir			-	-	-	0,00
	e. Penjahit			-	-	-	0,00
	f. Pengrajin genteng			-	-	-	0,00
	g. Anyam - anyaman			-	-	-	0,00
	h. Pande besi			-	-	-	0,00
	i. Petani			10	14	10	-0,15

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab. Rembang Tahun 2010

Faktor lain yang berpengaruh pada rendahnya jumlah masyarakat untuk bertransmigrasi adalah karena kuota yang diberikan dari daerah tujuan terbatas. Kuota terbanyak pemberangkatan transmigran pada tahun 2006 yang mencapai 116 jiwa dan yang terendah pada tahun 2009 sebesar 37 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai kuota dan daerah tujuan transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 86.
Kuota dan Daerah Tujuan Transmigrasi Tahun 2005 - 2009

No	Lokasi/Tujuan	2005		2006		2007		2008		2009	
		K K	Jiwa	K K	Jiwa	K K	Jiwa	K K	Jiwa	K K	Jiwa
1	Takalar, Sulawesi Selatan			19	56	-	-	-	-	-	-
2	Ketapang, Kalimantan Barat			14	60	-	-	-	-	-	-
3	Mona, Sulawesi Tenggara			-	-	10	36	-	-	-	-
4	Boul, Sulawesi Tengah			-	-	-	-	15	53	-	-
5	Tapanuli, Sumatera Utara			-	-	-	-	-	-	10	37
6	Berau, Kalimantan Timur	10	36								
	Jumlah	10	36	33	116	10	36	15	53	10	37

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab. Rembang Tahun 2010

4. Kelompok Urusan Ekonomi

a. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Di Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2009 terdapat koperasi aktif meliputi 16 KUD, 334 Koperasi Primer dan 42 Koperasi Simpan Pinjam. Sedangkan yang tidak aktif terdiri dari 1 KUD dan 180 koperasi primer. Anggota koperasi simpan pinjam meningkat dari 36.450 orang pada tahun 2007 menjadi 37.520 pada tahun 2009. Selain koperasi, berbagai kegiatan ekonomi juga digerakkan oleh adanya usaha kecil, menengah dan besar. Lebih detail terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 87.
Perkembangan Jumlah Koperasi dirinci Menurut Kategori Koperasi Tahun 2005-2009

No	Indikator	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009
1	Koperasi Primer						
	Jumlah Anggota (primer)		31694	35664	73401	119455	117196
	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	Buah	397	408	352	329	334
	Jumlah Tenaga Kerja (orang)		701	726	765	774	1634
	Jumlah Modal/Aset (Rp. Juta)		161756	176679	188762	247170	259291
	Jumlah Koperasi Primer Tidak Aktif (unit)		16	51	123	178	180
2	Koperasi Sekunder						
	Jumlah Anggota (koperasi)		68	68	68	68	68
	Jumlah Kopersi Aktif (unit)	Buah	2	1	1	1	1
	Jumlah Tenaga Kerja (orang)		5	5	5	5	5
	Jumlah Modal/Aset (Rp. Juta)		1286	1343	1431	1702	1587
	Jumlah Kopersi Sekunder Tidak Aktif (unit)			1	1	1	1
3	Jumlah Koperasi Primer & Sekunder	Buah	415	461	477	509	516
	Koperasi Unit Desa (KUD)						
	Jumlah Kopersi Aktif (unit)	Buah	16	16	16	16	16
	Jumlah Tenaga Kerja (orang)		87	86	84	81	81
	Jumlah Modal/Aset (Rp. Juta)		22738	22689	22661	22636	22636
4	Jumlah KUD Tidak Aktif (unit)		1	1	1	1	1
	Koperasi Simpan Pinjam						
	Jumlah Anggota (orang)				36450	37520	37520
	Jumlah Kopersi Aktif (unit)		32	35	40	42	42
	Jumlah Tenaga Kerja (orang)		387				
	Jumlah Modal/Aset (Rp. Juta)		128291	138718		158340	

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

b. Industri

Industri yang ada di Kabupaten Rembang meliputi industri makanan dan minuman, Industri kimia-bahan bangunan, industri sandang dan kulit, industri kerajinan dan umum. Kabupaten Rembang memiliki potensi industri kecil lainnya yang berbasis pada sumberdaya alam, antara lain garam rakyat, pengolahan ikan, mebel antik, batik, bordir, kuningan, kerajinan kerang, terasi, genteng, industri pembuatan tas dan dompet, sabuk dan lain-lain.

Pada tahun 2008 terdapat sejumlah usaha besar yaitu industri pengolahan ada 4 unit, industri logam mesin dan elektronika (ILME) ada 10 unit, industri kimia dan kertas (IKK) ada 4 unit dan di kelompok industri agro dan hasil hutan ada 13 unit. Skala usaha sedang terdapat di berbagai bidang industri seperti pengolahan ada 225 unit, di ILME ada 426 unit, industri tekstil dan aneka ada 98 unit dan di kelompok industri agro dan hasil hutan ada 520 unit. Usaha kecil di industri pengolahan ada 1.182 unit, kelompok industri logam mesin dan elektronika ada 1.383 unit, kelompok industri tekstil dan aneka ada 232 unit dan kelompok industri agro dan hasil hutan ada 1.182 unit. Selain itu, tercatat produksi rata-rata industri garam rakyat sebesar 150.400 ton/tahun. Industri pengolahan ikan antara lain berupa ikan pindang, ikan asap, pengeringan ikan, pengolahan teri nasi, pengolahan rajungan dan pengolahan ubur-ubur. Sedangkan industri kerajinan yang terdapat di Kabupaten Rembang antara lain batik tulis khas yang terkenal dengan Batik Lasem. Kerajinan furnitur berupa mebel antik dan kerajinan gembol kayu juga banyak terdapat di Kabupaten Rembang. Produksi mebel antik mencapai 71.407 stel/bulan yang sebagian diekspor ke beberapa negara Eropa, antara lain Perancis dan Jerman. Selain itu terdapat juga produksi kayu olahan, pohon jenis konivera, block board, lamin board, batten board, perabot kayu, furniture dan arang kayu yang diekspor ke beberapa Negara, seperti Negara Jepang, Australia, Inggris, Hongkong, Jerman, Prancis, Belanda, Canada dan Irlandia.

c. Perdagangan

Sektor usaha perdagangan, hotel dan restoran memberikan sumbangan terbesar kedua dalam PDRB Kabupaten Rembang (harga konstan tahun 2000) setelah sektor pertanian yaitu sebesar 5,97 – 17,28%. Oleh karena itu, potensi perdagangan baik perdagangan skala kecil dan menengah sangat penting diperhatikan perkembangannya. Dukungan pemerintah daerah selama ini dalam penyediaan prasarana dan sarana perekonomian daerah meliputi pasar umum milik Pemerintah Kabupaten Rembang sebanyak 12 unit (terdiri dari 2 unit pasar induk dan 10 unit pasar tradisional daerah) dan pasar desa sebanyak 24 unit.

Kegiatan usaha perdagangan di Kabupaten Rembang lebih mengarah pada pusat perkulakan (grosir) di wilayah bagian timur antara lain Kecamatan Sluke, Kragan, Sarang dan Kecamatan Sedan. Adapun perkembangan jumlah pedagang di Kabupaten Rembang selama tahun 2005-2009 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 88.
Perkembangan Jumlah Pedagang di Kabupaten Rembang
Tahun 2005 -2008

No	Keterangan	2005	2006	2007	2008
Jumlah Pedagang		4.097	4.625	5.034	5.577
a.	Skala Kecil	3.929	4.439	4.824	-
b.	Skala Menengah	152	168	188	245
c.	Skala Besar	16	18	22	30
Pasar					
a.	Jumlah Pasar Tradisional Daerah	12	12	12	12
b.	Jumlah Pasar Tradisional Desa	27	27	24	24
c.	Jumlah Retail (Toko Swalayan/Mini market)	3	2	1	6
d.	Jumlah Sentra Perkulakan				
Nilai Ekspor (Dalam Ribuan US\$)		24.685.500	18.946.000	19.902.333	40.182.000
Nilai Impor (Dalam Ribuan US\$)		tad	tad	tad	tad

Sumber data : Kabupaten Rembang Dalam Angka (series)

Perkembangan kegiatan usaha perdagangan skala mikro dan skala kecil sangat mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat, mengingat komoditas yang diperdagangkan merupakan hasil pertanian, peternakan dan perkebunan serta kebutuhan sehari-hari di Kabupaten Rembang. Kegiatan perdagangan skala kecil, pedagang pasar dan kios banyak dilakukan oleh kaum perempuan di perdesaan yang pada umumnya memiliki modal yang terbatas.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Rembang semakin meningkatkan fungsi pasar-pasar tradisional, karena sebagian besar kegiatan perekonomian masyarakat dilakukan di pasar tradisional. Hasil penelitian KPPOD (2007) menyatakan 65% transaksi perekonomian masyarakat dilakukan di pasar tradisional. Hal lain yang perlu mendapatkan dukungan kebijakan adalah fasilitasi dan perlindungan usaha bagi pedagang sektor informal, perdagangan skala kecil dan menengah sejalan dengan berlakunya perdagangan bebas mulai 2010 berdasarkan kesepakatan C-AFTA (2010) dan NAFTA pada tahun 2015 serta perdagangan bebas sesuai dengan persetujuan dalam *World Trade Organization* (WTO).

d. Penanaman Modal

Kabupaten Rembang mempunyai potensi penanaman modal baik di bidang pertambangan (antara lain pasir kuarsa, batu gamping, bentonite, tanah liat/lempung, dll), industri kelautan (galangan kapal kayu), produksi garam (garam krosok/rakyat), pengolahan hasil laut (teri nasi dan rajungan, pengolahan ikan kering dll), industri pengolahan mebel kayu, kerajinan kuningan/tembaga maupun industri kerajinan (termasuk batik tulis). Demikian juga di bidang industri dan perdagangan maupun pertanian masih terbuka peluang penanaman modal di kawasan bahari terpadu, hotel dan restoran, industri semen, keramik, porselen, batubara, industri agribisnis dan pengolahan buah mangga, pengolahan mete, tebu, siwalan, kelapa dan sebagainya.

Pada tahun 2008 sudah ada satu persetujuan PMA dengan nilai investasi sebesar US\$ 1 juta yang dapat menyerap sebanyak 50 orang tenaga kerja, dan PMDN dengan nilai investasi Rp. 35 milyar yang diperkirakan dapat menyerap sebanyak 241 orang. Masuknya PMA maupun PMDN di Kabupaten Rembang masih tergolong sedikit, namun demikian tercatat pada tahun 2008 terdapat penanaman modal non fasilitas berupa persetujuan dan realisasi investasi sebanyak 491 unit dengan nilai investasi sekitar Rp.70,4 milyar yang diperkirakan menyerap tenaga kerja sebesar 1.292 orang serta penanaman modal dari Pemerintah Kabupaten Rembang untuk 6 unit BUMD dan 3 unit BPR.

Upaya pengembangan potensi penanaman modal baik di bidang pertambangan (antara lain pasir kuarsa, batu gamping, bentonite, tanah liat/lempung, dll), industri kelautan dan perikanan (antara lain galangan kapal kayu, garam krosok/rakyat, teri nasi dan rajungan, pengolahan ikan kering dll), industri pengolahan mebel kayu, kerajinan kuningan/tembaga maupun batik tulis dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan daya dukung serta sarana prasarana yang diarahkan pada keberlanjutan pemanfaatannya. Skala perusahaan baik skala besar, menengah maupun kecil diharapkan tetap menjaga ketersediaan air tanah, keberlanjutan ketersediaan tambang, perikanan kelautan, kayu maupun bahan baku lainnya.

Peningkatan penanaman modal yang lain adalah pembangunan infrastruktur yang mendukung usaha perdagangan seperti pasar, mall, hotel dan restoran dengan mempertimbangkan posisi strategis Kabupaten Rembang sebagai bagian dari wilayah regional. Penanaman modal di Kabupaten Rembang kedepan diarahkan untuk dapat menarik investasi dari kalangan swasta/BUMN dan hanya sebagian kecil dari pemerintah.

e. Energi dan Sumber Daya Mineral

Tingkat elektrifikasi di Kabupaten Rembang distribusi jaringannya, sudah mencapai 100%, namun elektrifikasi untuk keluarga baru mencapai 60%, berdasarkan data BPS tahun 2010 dengan daftar tunggu 8.666 calon pelanggan PLN UPJ Rembang. Dengan demikian diketahui masih terdapat lebih kurang 40% rumah tangga belum mendapatkan pelayanan listrik dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), terutama untuk rumah tangga dan kegiatan usaha di kawasan perdesaan dan desa terpencil. Setiap tahunnya ada perluasan jaringan listrik desa di berbagai dukuh dari sekitar 8 desa atau lebih dari berbagai kecamatan di Kabupaten Rembang. Beberapa kecamatan yang telah dialiri jaringan listrik desa sejak

tahun 2006-2010 sebagai berikut di Kecamatan Rembang (Kelurahan Gegunung Kulon, Desa Punjulharjo, dan Desa Mondoteko); di Kecamatan Sarang (Desa Lodan Kulon, Desa Tawangrejo, Desa Sendangmulyo, dan Desa Bonjor); Kecamatan Bulu (Desa Sedang Mulyo); di Kecamatan Sulang (Desa Sulang dan Desa pedak); Kecamatan Pamotan (Desa Tempaling, Desa Geger Simo, dan Desa Joho); Kecamatan Sedan (Desa Gesikan); di Kecamatan Pancur (Desa Wuwur), di Kecamatan Gunem (Desa Trembes dan Desa Suntri); di Kecamatan Sulang (Desa Sulang dan Desa Pedak), di Kecamatan Kaliori (Desa Gunungsari), di Kecamatan Sluke (Desa Langgar), di Kecamatan Sumber (Desa Krikilan dan Desa Grawan), dan di Kecamatan Kragan (Desa Tanjungan, Desa Tegalmulyo, dan Desa Sedangwaru).

Sistem kelistrikan Jawa Tengah termasuk dalam Interkoneksi Sistem Kelistrikan Jawa–Bali. Di Kabupaten Rembang telah dibangun PLTU Sluke oleh PLN dan pemerintah Kabupaten Rembang mengembangkan pembangkit dengan memanfaatkan potensi sumber energi listrik setempat (alternatif) terutama untuk daerah terpencil, antara lain pada tahun 2006 telah dipasang 350 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS/Solar Home System), tahun 2007 PLTS terpusat (komunal) sebanyak 30KK dan tahun 2008 sistem Komunal (30 KK), PLTB (10 KK) dan PLTS (70 KK). Sedangkan tahun 2009 PLTS SHS tersebar 100 unit dimana PLTS untuk *Solar Home System* (SHS) dan Komunal. PLTS tersebut tersebar antara lain di Desa Tengger dan Bancang Kecamatan Sale, di Desa Pasedan dan Kadiwono Kecamatan Bulu dan di Desa Kajar Kecamatan Gunem.

Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Rembang pada tahun 2007 sebanyak 96.081 unit dengan besarnya daya tersambung sebesar 64.435.215 Va dan jumlah energi terjual sebesar 104.958.138 Kwh. Pada tahun 2008 meningkat menjadi sebesar 99.645 unit, besarnya daya tersambung sebesar 69.176.065 Va dan jumlah energi terjual sebesar 117.236.104 Kwh. Sebagian besar termasuk pelanggan rumah tangga kecil (R-1) dengan daya sampai dengan 1.300 Watt.

Sedangkan banyaknya bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Rembang dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2. 89.
Banyaknya BBM Terjual di Kabupaten Rembang 2005 – 2009 (kilo liter)

No	Jenis BBM	2005	2006	2007	2008	2009
1	Premium	17.780	18.950	21.960	26.304	28.340
2	Minyak Tanah	21.098	22.250	23.350	22.010	18.010
3	Solar	25.200	27.210	29.912	38.032	40.125
4	Pertamax	43,00	46,00	48,10	49,00	49,50

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, 2005 – 2009.

Jumlah bahan bakar minyak (BBM) yang disalurkan di Kabupaten Rembang terdiri dari premium, solar dan minyak tanah, dari tahun ke tahun meningkat sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat. Jumlah premium yang disalurkan pada tahun 2005 sebesar 17.780 kl meningkat menjadi 28.340 kl pada tahun 2009. Demikian pula solar dari sebesar 25.200 kl pada tahun 2005 meningkat menjadi sebesar 40.125 kl tahun 2009. Jumlah minyak tanah yang disalurkan menurun 21.098 tahun 2005 menjadi sebesar 18.010 kl pada tahun 2009. Pada tahun 2008 dilaksanakan kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan konversi minyak tanah ke gas liquid petroleum gas (LPG) sebagai bahan bakar untuk memasak bagi rumah tangga kecil dalam tabung 3 kg dan menghilangkan subsidi bagi minyak tanah (kerosene), sehingga harga minyak tanah berfluktuasi sesuai harga pasar.

Masalah air bersih merupakan masalah serius di Kabupaten Rembang karena ketersediaan air permukaan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Alternatif pemecahannya adalah dengan memanfaatkan air tanah lewat pengeboran yang masih kurang mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat. Pengeboran air tanah untuk pengadaan air bersih pada tahun 2005 di Desa Labuan (Sluke), 2008 di Desa Panohan (Gunem), tahun 2009 di Desa Pinggan (Bulu), dan 2010 di Desa Sambiroto (Sedan) agar pemenuhan kebutuhan air bersih semakin merata di perdesaan.

Potensi pertambangan di Kabupaten Rembang cukup besar, terdapat lokasi sumur tua migas di Desa Kajar Kecamatan Gunem dan di Dusun Sumberwungu Desa Tahunan Kecamatan Sale untuk dieksploitasi. Karena sebagian wilayah Kabupaten Rembang terdiri dari pegunungan kapur maka mengandung berbagai batuan bahan galian tambang, untuk menjadi bahan baku pembuatan Semen. Kandungan yang terbesar adalah jenis Alluvium yang meliputi luas 45.470.783 ha atau 44,84% dari luas wilayah Kabupaten Rembang. Potensi lain adalah miosen fasies sedimen yaitu seluas 32.125.000 ha atau 31,68%. Bahan galian jenis batuan yang ada berupa: andesit (Kecamatan Sluke, Sedan, Lasem, Kragan, Pancur, Gunem dan Sale), pasir kuarsa (Kecamatan Sedan, Bulu, Sarang, Sale, dan Gunem), batu kapur/gamping (Kecamatan Sarang, Sedan, Pamotan, Sale, Gunem, Bulu, dan Sumber), trass (Kecamatan Sluke, Pancur, Kragan, Gunem dan Sale), fosfat (Kecamatan Pamotan, Gunem, dan Sale), ballclay (Kecamatan Sarang, Sedan, Gunem, Bulu, dan Sale), batubara (Kecamatan Gunem, Pamotan, Sarang, Sale, Bulu dan Lasem), serta gipsum (Kecamatan Sedan, Gunem, Lasem, Sarang).

Berikut ini potensi galian tambang potensial yang terkandung di wilayah Kabupaten Rembang, antara lain :

- a. Pasir Kwarsa (SiO_2). Pasir kwarsa dapat digunakan untuk bahan baku keramik, gelas, kaca, semen, piring, industri kimia lainnya. Kadar pasir kwarsa yang tereka di Kabupaten Rembang mencapai 95-97% dengan luas cadangan yang berhasil diidentifikasi (tereka) mencapai 90.890.000 m³.
- b. Fosfat (P_2O_5). Fosfat dapat digunakan langsung untuk industri terutama industri pupuk. Kadar rata-rata fosfat yang tereka adalah sebesar 27% dan luas cadangannya mencapai 430.000 m³.
- c. Ball Clay (Al_2O_3). Ballclay merupakan jenis bahan batu lempung untuk bahan baku industri keramik. Kadar Ballclay di Kabupaten Rembang adalah antara 30-40% dengan jumlah cadangan tereka sebesar 430.000 m³.
- d. Batu Gamping (CaCO_3). Batu gamping banyak digunakan sebagai bahan baku semen *portland*, pemurnian baja, industri kertas, bahan bangunan, cat, dll. Kadar batu gamping di wilayah Kabupaten Rembang yang terukur mencapai 51 - 98% dengan jumlah cadangan tereka mencapai 2.213.500 m³.
- e. Batubara. Batubara merupakan bahan bakar yang belum dimanfaatkan Kabupaten Rembang, dari luas areal yang diperkirakan mengandung batubara sebesar 135 ha dengan cadangan tereka mencapai 1.125.000 m³.
- f. Trass. Trass dengan kandungan oksida silika (SiO_2) adalah bahan yang digunakan sebagai bahan baku semen, kadarnya yang terdeteksi sebesar 51,93% - 57,35%; serta Al_2O_3 sebesar 18,04% - 20,57%. Total cadangan trass yang tereka di Kabupaten Rembang diperkirakan mencapai 28.125.000 m³. Dari luas areal yang diperkirakan mengandung trass sekitar 260 ha, baru dikelola 206,91 ha.
- g. Andesit. Andesit bermanfaat untuk bahan bangunan. Cadangan kandungan andesit di Kabupaten Rembang diperkirakan mencapai 1.438.100.000 m³ dengan luas areal sekitar 3.872 ha, baru dikelola sekitar 37,01 ha, sehingga masih ada potensi sekitar 3.834,38 ha yang belum dimanfaatkan.
- h. Tanah Liat/Lempung. Tanah liat bermanfaat sebagai *home* industri, antara lain: batu merah, genting, dll. Potensi tanah liat di Kabupaten Rembang dengan luas potensi tereka sekitar 4.607 ha dan total cadangan tereka mencapai 314.225.000 m³.
- i. Gypsum. Merupakan mineral Hidrokalsium sulfat ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), yang terbentuk karena air tanah yang mengandung ion-ion sulfat dari oksida sulfida yang berasal dari batuan/akar-akar yang berinteraksi dengan kalsium dari batu gamping/batu lempung gampingan (napal). Gypsum dapat digunakan untuk bahan konsumsi industri, konstruksi, bidang kedokteran, dan lain-lain. Kadar gypsum antara lain : CaO (30,98%), SO_3 (42,62%) serta H_2O (13,01%).
- j. Kalsit. Bermanfaat sebagai bahan baku industri semen, cat, kertas, pasta gigi, dan industri kimia lain. Lokasi bahan tambang ini terletak di Kecamatan Pamotan (Desa Samaran dan Gambiran); Kecamatan Sale (Desa Tahunan dan Ngajaran) Kecamatan Gunem (Desa Tegaldowo) Kecamatan Sumber (Desa Krikilan) Kecamatan Bulu (Desa Mantingan dan Mlatiharjo)

- k. Dolomit. Dolomit merupakan jenis batuan gamping yang sebagian unsur kalsiumnya diganti magnesium $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$. Bahan tambang jenis banyak ditemukan di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem, yang bermanfaat sebagai bahan baku *refractory* dan pupuk. Kadar dolomit antara lain MgO (19,72%) dan CaO (35,79%).

f. Pertanian

Produksi padi Kabupaten Rembang tahun 2009 sebesar 220.205 ton dari luas areal panen 40.758 ha. Luas panen padi Kabupaten Rembang tahun 2005 – 2009 terlihat fluktuatif, tertinggi pada tahun 2006 seluas 42.152 ha dan terendah tahun 2007 seluas 27.816 ha. Berkurangnya luas panen akan berdampak pada penurunan produksi dan produktivitas padi, produksi padi tahun 2006 sebanyak 205.317 ton dengan tingkat produktivitas 48,71 kw/ha sedangkan produksi tahun 2007 sebanyak 132.213 ton dengan tingkat produktivitas 47,53 kw/ha. Secara umum periode tahun 2005-2009 terjadi peningkatan produksi, luas dan produktivitas tanaman padi, dengan nilai rata-rata peningkatan masing-masing 25,95%, 15,17% dan 7,46%.

Luas areal tanaman palawija jagung tahun 2009 adalah 37.327 ha, menghasilkan produksi jagung sebanyak 135.967 ton dengan produktivitas 36,43 kw/ha. Produksi jagung terendah periode 2005-2009 terjadi akibat berkurangnya luas areal panen terjadi pada tahun 2006, dengan luas 20.556 ha menghasilkan produksi 56.117 ton. Secara umum pada periode tersebut terjadi peningkatan produksi, luas areal panen dan produktivitas rata-rata sebesar 20,26%, 10,69% dan 7,89%. Produksi kedelai tahun 2009 sebanyak 5.941 ton dengan luas areal tanam 4.895 ha produktivitas sebesar 12,14 kw/ha. Pada periode 2005-2009 terjadi peningkatan produksi, luas areal tanam dan produktivitas tanaman kedelai sebesar 40,34%; 32,80% dan 4,05%.

Tabel 2. 90.
Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Rembang
Tahun 2005-2009

Indikator	Satuan	Tahun					Rata rata pertumbuhan (%)
		2005	2006	2007	2008	2009	
padi sawah	produksi (ton)	110.587	197.491	125.684	205.850	203.545	26,22
	luas (ha)	26.450	39.657	25.683	38.885	37.346	15,54
	produktivitas (kw/ha)	41,81	49,80	48,94	52,94	54,50	7,13
padi gogo	produksi (ton)	7.066	7.826	6.529	8.130	16.960	31,83
	luas (ha)	2.269	2.495	2.133	3.025	3.412	12,52
	produktivitas (kw/ha)	31,14	31,40	30,61	26,88	49,71	17,77
Total	produksi (ton)	117.653	205.317	132.213	213.980	220.505	25,95
	luas (ha)	28.719	42.152	27.816	41.910	40.758	15,17
	produktivitas (kw/ha)	40,97	48,71	47,53	51,06	54,10	7,46
Jagung	produksi (ton)	74.006	56.117	72.817	87.778	135.967	20,26
	luas (ha)	27.288	20.556	26.336	28.360	37.327	10,69
	produktivitas (kw/ha)	27,12	27,30	27,65	30,95	36,43	7,89
Kedelai	produksi (ton)	2.862	4.481	1.816	3.697	5.941	40,34
	luas (ha)	2.741	4.044	1.733	3.440	4.895	32,80
	produktivitas (kw/ha)	10,44	11,08	10,48	10,75	12,14	4,05
Ketela pohon	produksi (ton)		32.221	29.196	41.539	5.941	16,44
Nilai Tukar Petani (NTP)	%		98	97	99	98	0,01
Jumlah Kawasan Produk Unggulan	Kawasan		15	15	20	20	11,11

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Rembang

Tanaman sayuran utama Kabupaten Rembang adalah cabe varietas Tampar dengan produksi tahun 2009 sebanyak 61.710 kw, sejak tahun 2006 produksi cabe mengalami pertumbuhan 10,8%. Tanaman buah utama Kabupaten Rembang adalah Mangga. Pada tahun 2009 produksi buah mangga sebesar 536.109 ton, sejak tahun 2006 produksi buah mangga mengalami pertumbuhan 10,66%, namun produktivitasnya mengalami penurunan 4,74%. Tanaman buah yang banyak dibudidayakan pada musim kering yaitu melon mengalami peningkatan produksi dan produktivitas periode 2005-2009 sebesar 78,63% dan 11,91 % dengan produksi pada tahun 2009 sebanyak 66.932 ton.

Tabel 2. 91.
Produksi dan produktivitas tanaman sayur dan buah Kabupaten Rembang
Tahun 2005-2009

Komoditas	satuan	tahun					Rerata pertumb (%)
		2005	2006	2007	2008	2009	
Cabe	produksi (kw)	56.640	47.100	46.810	32.140	61.710	10,80
Melon	produksi (ton)	18.815	20.175	39.462	18.325	66.932	78,63
	luas (ha)	138	148	288	135	333	48,85
	produktivitas (kw/ha)	1.363,41	1.363,18	1.370,21	1.357,41	2009,97	11,91
Mangga	produksi (ton)	476.831	769.263	1.079.637	770.672	536.109	10,66
	luas (ha)	313.375	495.883	672.399	528.002	433.721	13,63
	produktivitas (kw/ha)	15,22	15,51	16,06	14,60	12,36	-4,74

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Rembang

Tanaman perkebunan tebu periode 2005-2009 mengalami peningkatan produksi dan produktivitas rata-rata sebesar 15,34% per tahun dan 1,69% per tahun dengan produksi tahun 2009 sebanyak 27.493,19 ton pada luas areal tanam 7124 ha. Tanaman perkebunan kelapa, wijen dan mete pada periode sama mengalami penurunan produksi masing-masing sebesar -4,53%, -34,54% dan -2,69%.

Tanaman perkebunan yang paling banyak diusahakan di Kabupaten Rembang adalah kelapa, pada tahun 2005 luas areal perkebunan kelapa seluas 7.423 ha (atau 48% dari seluruh luas areal perkebunan di Kabupaten Rembang) dengan produksi 5.063.600 butir, kemudian tanaman Tebu dengan luas areal tanam 4.398 ha (28%), kemudian diikuti kapuk randu 1.669 ha (11%).

Tabel 2. 92.
Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kabupaten Rembang
Tahun 2005-2009

komoditas	satuan	tahun					Rata-rata pertumb (%)
		2005	2006	2007	2008	2009	
Tebu	produksi (ton)	16.351,76	23.129,38	20.967,9	22.756,03	27.493,19	15,36
	luas (ha)	4.398	6.140	6.709	6.904	7.124	13,74
	produktivitas (kw/ha)	37,20	37,67	31,25	32,96	38,59	1,69
Kelapa	produksi (ton)	5.063.600	4.912.007	4.787.510	4.717.525	4.192.949	-4,53
Wijen	produksi (ton)	246,8	43,26	49,05	-	73,42	-34,54
Mete	produksi (ton)	111.200	109.690	108.080	107.693	99.550	-2,69

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah penghasil bibit (bakalan) sapi potong di Jawa Tengah, dengan jenis/ras antara lain Peranakan *Ongole (PO)*, *American Brahman*, *Simmental*, dan *Limousine*. Potensi ini didukung oleh adanya kegiatan pelayanan IB (Inseminasi Buatan), tersedianya tanah-tanah marginal sebagai lahan HPT (Hijauan Pakan Ternak), dan permintaan pasar akan sapi potong maupun daging sapi yang selalu meningkat serta tersedianya pasar hewan yaitu Pasar Hewan Rembang, Pamotan dan Pasar Hewan Kragan. Jumlah ternak sapi yang diusahakan periode 2005-2009 mengalami pertumbuhan rata-rata 4,4% dengan jumlah ternak pada tahun 2009 sebanyak 115.220 ekor. Ternak kambing, domba, ayam buras, ayam boiler dan itik pada periode tersebut mengalami pertumbuhan yang berarti. Selengkapnya dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 93.
Produksi ternak Kabupaten Rembang tahun 2005-2009

Jenis ternak	Jumlah tahun					Rata-rata pertumbuhan (%)
	2005	2006	2007	2008	2009	
Sapi (ekor)	97.257	99.385	101.570	103.802	115.220	4.40
Kerbau (ekor)		335	291	299	403	8.13
Kambing (ekor)	86.604	88.492	90.260	92.068	117.243	8.38
Domba (ekor)	60.957	62.785	64.669	66.609	88.469	10.45
ayam buras (ekor)	488.231	495.063	500.012	505.012	582.120	4.67
ayam boiler (ekor)	150.000	133.080	166.324	718.728	352.200	73.71
Itik (ekor)	57.055	57.627	58.203	58.783	84.573	11.72
Produksi daging sapi (ton)	712,29	628,36	948,28	1.094,98	849,66	8.05
Daging ayam (ton)		574,91	500,79	572,93	520,54	-2.54
Telur (ton)	442,47	1.179,22	798,94	966,50	1.238,27	45.84
Susu (ton)		6,18	75,29	3,74	10,80	404.01

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Rembang

Upaya peningkatan produksi komoditas pertanian di Kabupaten Rembang dilakukan dengan mengembangkan daerah kawasan komoditas unggulan, dari 15 lokasi pada tahun 2007 menjadi 20 lokasi pada tahun berikutnya. Peningkatan produksi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) hampir mendekati nilai ideal > 100, fluktuatif antara 97-99.

Pengembangan sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dapat juga dilakukan melalui peningkatan nilai tambah produk dengan usaha diluar budidaya (*off farm*) seperti industri pengolahan pangan baik di tingkat rumah tangga maupun industri besar. Hal ini akan menutup kekurangan Kabupaten Rembang dalam hal budidaya karena terbatasnya sumber air, sehingga peningkatan kesejahteraan petani dapat diwujudkan. Mengingat keterbatasan air untuk budidaya pertanian, maka konservasi tanah dengan bahan-bahan organik menjadi pilihan terbaik agar kesuburan tanah dapat terjaga.

Pemasaran produk-produkk pertanian masih banyak menggunakan system ijon, sehingga harga produk tidak berkembang. Selain itu posisi tawar petani menjadi rendah. Kondisi ini merugikan petani karena pendapatan petani menjadi berkurang karena selisih biaya produksi dengan hasil pemasaran menjadi lebih kecil.

g. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan jumlah yang cukup, tersedia setiap saat di semua wilayah, mudah diperoleh rumah tangga, aman dikonsumsi, dan pada tingkat harga yang terjangkau. Ketahanan pangan mencakup komponen, (1) ketersediaan pangan, (2) distribusi dan konsumsi pangan, (3) akses pangan oleh masyarakat, (4) diversifikasi pangan, dan (5) keamanan pangan. Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh.

Tabel 2. 94.
Neraca Bahan Makanan Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009

Indikator	Komoditas	2005	2006	2007	2008	2009	r %
Jmlh Penduduk			597.213	601.964	607.752	611.886	0,85
Produksi (Ton)	Padi	591,588	205.299,0	132.213,0	213.982,0	220.505,0	9,8
	jagung	117,653	56.117,0	72.817,0	87.778,0	135.967,0	35,1
	kedelai	74,006	4.481,0	1.816,0	3.697,0	5.941,0	34,9
	kacang tanah	2,852	3.182,0	3.303,0	3.711,0	5.054,0	17,4
	daging sapi	712.28	10.437,8	13.544,0	16.326,7	25.289,9	35,1
	telur	833.90	1.136,2	798,9	966,5	1.000,9	(1,7)
	susu	86.35	6,2	75,3	3,7	10,8	404,0
Ketersediaan (Ton)	beras	62,802	108.210,6	69.687,9	112.787,3	116.225,5	9,8
	jagung	59,205	44.893,6	58.253,6	70.222,4	108.773,6	35,1
	kedelai	2,595	4.032,9	1.634,4	3.327,3	5.346,9	34,9
	kacang tanah	3,107	2.863,8	2.972,7	3.339,9	4.548,6	17,4
	daging sapi	712.28	7.828,3	10.158,0	12.245,0	18.967,4	35,1
	telur	833.90	999,3	702,7	850,0	880,3	(1,7)
	susu	86.35	5,2	63,5	3,2	9,1	404,0
Kebutuhan (Ton)	beras	54,941	55.200,0	55.416,2	55.770,7	57.496,1	1,4
	jagung	9,767	9.813,2	9.851,6	9.914,7	10.221,4	1,4
	kedelai	6,271	6.300,4	6.325,1	6.365,6	6.562,5	
	kacang tanah	1,988	1.997,1	2.004,9	2.017,8	2.080,2	
	daging sapi	3,141.33	3.156,2	3.168,5	3.188,8	3.287,4	1,4
	telur	4,010.97	4.029,9	4.045,7	4.071,6	4.197,5	1,4
	susu	1,851.67	1.860,4	1.867,7	1.879,6	1.937,8	1,4
Konsumsi (Kg/Kap/th)	Konsumsi beras	92.87	92,9	92,9	92,9	92,9	-
	Konsumsi Jagung	16.51	16,5	16,5	16,5	16,5	-
	kedelai	10.60	10,6	10,6	10,6	10,6	
	kacang tanah	3.36	3,4	3,4	3,4	3,4	
	Konsumsi Daging Sapi	5.31	5,3	5,3	5,3	5,3	
	Konsumsi Telur	6.78	6,8	6,8	6,8	6,8	
	Konsumsi Susu	3.13	3,1	3,1	3,1	3,1	
Surplus/ (defisit) (ton)	beras		53.010,7	14.271,7	57.016,7	58.729,4	76,5
	jagung	7,861	35.080,4	48.402,0	60.307,7	98.552,2	42,0
	kedelai	(3,676)	(2.267,5)	(4.690,7)	(3.038,3)	(1.215,6)	3,9
	kacang tanah	1,119	866,7	967,8	1.322,1	2.468,4	45,0
	daging sapi	(2,429.05)	4.672,2	6.989,5	9.056,2	15.680,0	50,8
	telur	(3,177.07)	(3.030,6)	(3.343,0)	(3.221,5)	(3.317,2)	3,2
	susu	(1,765.32)	(1.855,2)	(1.804,2)	(1.876,5)	(1.928,7)	1,3

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang, 2010

Ketersediaan beras di Kabupaten Rembang pada tahun 2009 sebanyak 116.225,54 ton, dengan angka kebutuhan pada tahun yang sama sebanyak 57.496,10 ton maka terdapat surplus beras 58.729,4 ton. Pada periode 2005-2009 terjadi peningkatan persediaan beras rata-rata 9,77%, sementara pertambahan kebutuhan beras 1,4%, dan surplus beras meningkat 76,5%. Peningkatan yang hampir sama juga terjadi pada komoditas jagung, dengan ketersediaan tahun 2009 sebanyak 108.773,6 ton, terjadi peningkatan ketersediaan pada periode tersebut 35,1%, peningkatan kebutuhan sebesar 1,4% dan peningkatan surplus sebesar 42,0%. Ketersediaan daging pada tahun 2009 sebanyak 18.967,4 ton, dengan angka kebutuhan pada tahun yang sama sebesar 3.287,4 ton maka terdapat surplus daging sebesar 15.680,0 ton. Sementara kebutuhan kacang kedelai, telur dan kebutuhan susu lebih besar dibanding ketersediaannya, sehingga terjadi defisit untuk ketiga komoditas tersebut.

Tuntutan pengembangan pangan pada masa yang akan datang tidak hanya pangan yang memiliki nilai nutrisi dan cita rasa, tetapi juga pangan yang memiliki kemampuan fisiologis aktif atau pangan yang berpengaruh positif terhadap promosi kesehatan seseorang, penampilan jasmani dan rohani. Pengembangan pangan fungsional tersebut telah menjadi tuntutan konsumen pada masa-masa yang akan datang, disamping tuntutan untuk memenuhi ketahanan pangan itu sendiri.

h. Lingkungan Hidup

Pembangunan yang berkelanjutan dan kelestarian lingkungan di daerah dalam era otonomi daerah adalah amanat UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kepada pemerintah kabupaten/kota telah ditetapkan Permeneg Lingkungan Hidup No. 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Sesuai dengan kewenangannya dalam urusan lingkungan hidup diwajibkan melaksanakan SPM tersebut, terutama pada pelaporan tentang (1) pencegahan pencemaran air, (2) pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, (3) status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi bio massa serta (4) pelayanan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran lingkungan hidup .

Sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya sehingga sumber daya alam senantiasa memiliki peran ganda, yang acapkali dilematik, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*), namun di lain pihak, kebijakan investasi ke arah penyerapan tenaga kerja telah memicu pola produksi dan konsumsi yang agresif, eksploitatif dan ekspansif sehingga fungsi lingkungan hidup semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan.

Kondisi lingkungan yang kurang baik juga ditunjukkan dengan luasnya lahan kritis. Berdasarkan data spasial lahan kritis Balai Pengelolaan DAS Pemali Jratun, pada tahun 2009 di Kabupaten Rembang terdapat lahan kritis seluas 11.605 Ha. Sebarannya sebagaimana tersaji pada tabel.

Tabel 2. 95.
Lahan Kritis di Kabupaten Rembang Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas (ha)				Jumlah
		Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	
1	Kaliori	-	-	-	-	-
2	Sumber	-	3,92	-	7,16	11,08
3	Sulang	22,61	28,83	96,13	6,34	153,91
4	Bulu	-	25,98	170,85	5,25	202,08
5	Gunem	145,71	80,29	1.891,23	198,77	2.316,61
6	Pamotan	-	-	82,05	-	82,05
7	Sedan	12,88	122,80	1.498,97	457,76	2.092,41
8	Sale	51,95	121,24	457,83	35,71	666,73
9	Sarang	13,40	44,93	308,97	11,66	378,96
10	Kragan	17,08	100,40	192,18	1.068,19	1.377,85
11	Sluke	-	577,82	153,89	1.238,19	1.969,90
12	Lasem	-	106,92	230,96	745,97	1.083,85
13	Pancur	62,23	291,36	85,22	826,57	1.265,38
14	Rembang	-	-	-	5,06	5,06
	Jumlah	325,86	1.504,48	4.606,63	5.168,29	11.605,26

Sumber : Data Statistik Dinas Pertanian dan Kehutanan

Kendala penanganan sampah di Kabupaten Rembang karena produksi sampah terus meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,44 m³/hari, sementara kemampuan pengangkutan sampah terbatas. Pada tahun 2005 sampah terangkut sebesar 169,75 m³/hari (59,12%), dari produksi mencapai 287,12 m³/hari. Penanganan sampah terus ditingkatkan, seperti ditunjukkan pada tabel, pengangkutan sampah pada tahun 2006 menjadi 61,8% dan pada tahun 2009 menjadi 71,75%. Memang masih 29,25% sampai tahun 2009 sampah yang belum tertangani, hal ini menjadi tantangan bagi semua pihak termasuk masyarakat dengan menerapkan prinsip mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang.

Tabel 2. 96.
Penanganan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang-Tahun 2006-2009

Indikator	2006	2007	2008	2009
% Sampah terangkut	61,8	67,12	69,44	71,75
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	-	-	-	-
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	1/8650	1/8075	1/7435	1/7050
Jumlah kasus pencemaran lingkungan	-	-	-	-
Luas Ruang Terbuka Hijau	-	-	-	21 Ha
Persentase ruang terbuka hijau				30%
Jumlah kasus kerusakan lingkungan	-	-	-	-
Jumlah Rehabilitasi lahan kritis	-	-	-	113 Ha
a. Penanaman Hutan rakyat (Ha)	1.558	2.100	400	170
b. Pengkayaan Hutan Rakyat (Ha)	560	2.000	-	-
c. Penanaman Hutan Mangrove (Ha)	65	100	-	-
d. Pembangunan Dam Penahan (Unit)	15	-	100	-
e. Pembangunan Sumur Resapan (Unit)	50	24	24	20
Luas Lahan Kritis	20.052	17.334	12.634	11.605

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup dan Kantor Perikanan & Kelautan

Hasil uji emisi gas buang kendaraan bermotor yang menggambarkan seberapa besar pencemaran udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Uji emisi gas buang kendaraan bermotor tersebut didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Nomor 050/1717 tanggal 23 Desember 2004, ambang batas kendaraan bensin yaitu CO 4,2% dan HC 815 Ppm dan kendaraan mesin solar batas Opositas/Bosch 20/47%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 97.
Hasil pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor wajib uji secara berkala Kabupaten Rembang tahun 2005-2009

No	Tahun	Jumlah Kendaraan yang diuji	Tidak lulus uji (cek gas buang)	Persentase tidak lulus uji
1	2005	6261	313	5,00
2	2006	6014	823	13,68
3	2007	4527	604	13,34
4	2008	6608	332	5.02
5	2009	7753	388	5.00

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, 2010

Dalam rangka menjaga kondisi lingkungan dari polusi udara sampai tahun 2009, Kabupaten Rembang memiliki ruang terbuka hijau seluas 21 ha. Untuk mempercantik keindahan kota telah terbangun 14 buah taman kota yang dilengkapi berbagai aksesorisnya. Selain itu, di sepanjang jalan ditanami pohon pelindung sepanjang 35,2 km yang terletak di Kecamatan Rembang, Kecamatan Kaliori dan Kecamatan Lasem. Jumlah lahan kritis telah berkurang dari tahun 2006 seluas 20.052 ha pada tahun 2009 menjadi 11.650 atau telah berkurang 42,13% pada periode tersebut.

i. Kehutanan

Kawasan hutan negara yang masuk wilayah Kabupaten Rembang adalah seluas 23,970.27 Ha yang dikelola oleh Perum Perhutani yaitu KPH Mantingan dan KPH Kebonharjo. Perincian kawasan hutan dari tiap-tiap KPH tersajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 98.
Luas Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Rembang

No	Fungsi kawasan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	2,450.96
2	Hutan Produksi terbatas	1,801.48
3	Hutan Produksi	19,655.63
4	Kawasan Konservasi	62.20
	- CA Gunung Butak	45.10
	- TWA Sumber Semen	17.10
	Jumlah	23,970.27

Sumber : Perum Perhutani KPH Kebonharjo dan KPH Mantingan

Seiring dengan menurunnya luas areal tebangan, luas lahan reboisasi juga semakin berkurang selama kurun waktu tahun 2005-2009, kegiatan rehabilitasi dan reboisasi di kawasan hutan terus dilakukan oleh Perum Perhutani pada lahan kosong dan bekas tebangan. Selain didalam kawasan hutan upaya rehabilitasi lahan juga dilakukan diluar kawasan hutan khususnya lahan kritis. Luas lahan kritis di Kabupaten Rembang terjadi penurunan rata-rata sebesar 13,86% pertahun, hal ini karena telah dilaksanakannya berbagai upaya rehabilitasi lahan kritis melalui kegiatan penghijauan yaitu penanaman Hutan Rakyat, Pengkayaan Hutan Rakyat, dan Penanaman Hutan Mangrove.

Selain secara vegetative rehabilitasi lahan telah dilakukan pula melalui pendekatan sipil teknis berupa pembangunan sumur resapan dan dam penahan maupun dam kendali yang bertujuan untuk meningkatkan tinggi muka air tanah. Luas lahan kritis serta kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Rembang tahun 2005-2009 sebagaimana table berikut.

Tabel 2. 99.
Luas lahan kritis serta kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan
di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009

Jenis	Tahun					Rata-rata pertumb (%)
	2005	2006	2007	2008	2009	
luas lahan kritis (ha)	21.472,9	20.052,9	17.334,9	12.634,9	11.605,26	-13,86
Penanaman Hutan Rakyat (ha)	-	1.558	2.100	400	170	-34,55
Pengkayaan Hutan Rakyat (Ha)	820	560	2000	-	-	112,72
Penanaman Hutan Mangrove (ha)	100	65	100	-	-	9,42
Pembangunan Dam Penahan (unit)	-	15	-	2	-	0,00
Pembangunan Sumur Resapan (unit)	50	50	24	21	20	-17,32

Sumber : Dintanhut Kab Rembang

Luas hutan rakyat di Kabupaten Rembang terus mengalami peningkatan selama periode 2005-2009 rata-rata seluas 13,85 % dan tercatat pada tahun 2009 telah mencapai luasan 10.600 ha. Hal ini merupakan potensi bagi produksi kayu di Kabupaten Rembang disamping memberikan manfaat dalam menjaga keseimbangan ekosistem mikro.

Produksi hasil hutan Non KPH di Kabupaten Rembang terdiri dari kayu bulat, kayu gergajian, kayu olahan dan kayu bakar. Produksi Kayu bulat pada tahun 2009 mencapai 21.608 m³ terdiri dari produksi kayu Jati Perum Perhutani 15.055,2 m³, kayu jati rakyat 1.794,5 m³ dan kayu rimba 829 m³. Jumlah produksi kayu rakyat cenderung semakin menurun karena potensi tegakan dari luas hutan rakyat yang ada masih berada di KU I belum siap tebang, juga sebagian masyarakat yang masih enggan mengurus proses perijinan sehingga hasil tebangan kayu rakyat kurang bisa terpantau dan tidak terdata.

Tabel 2. 100.
Luas Hutan Rakyat dan Produksi Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Rembang
Tahun 2005-2009

Jenis	tahun					Rata-rata pertumb (%)
	2005	2006	2007	2008	2009	
Luas Hutan rakyat (ha)	6.942,15	8.500,55	12.600,65	13.000,65	10.600,00	13,85
Produksi Tebangan Kayu Hutan:						
- Kayu Jati (m3)	12.935,8	12.394,2	14.432,6	12.361,1	15.055,2	4,93
- Kayu rimba (m3)	2.412,5	833,2	2389,2	780,2	829,4	15,06
Produksi Tebangan Kayu Rakyat:						
- kayu jati (M3)	9.629,3	10.982,2	5.768,4	3.965,8	1.794,5	-29,86
- Kayu mahoni rakyat (M3)	240,4	299,3	31,96	3,3	3,4	-37,87

Sumber : Perum Perhutani & Dintanhut Kab Rembang

Penyelenggaraan pembangunan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya meningkatkan kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan cara, (1) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Luasan kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) dan atau pulau dengan sebaran proporsional, (2) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan

yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi, (3) Meningkatkan daya dukung DAS. (4) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, (5) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pembangunan kehutanan selama ini telah difungsikan sebagai penunjang pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan hasil hutan kayu secara berlebih, sementara masalah sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan hutan kurang mendapat perhatian yang memadai. Akibat dari itu, hutan Indonesia telah terdegradasi dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Perbaikan pengelolaan sumberdaya hutan dilakukan melalui penguatan kelembagaan pengelola hutan dengan membentuk unit-unit pengelola lapangan berupa kesatuan pengelola hutan (KPH) yang mencakup seluruh jenis hutan yaitu hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Kabupaten Rembang juga memiliki potensi mangrove seluas 133,5 ha. Penyebaran mangrove di Kabupaten Rembang antara lain di Kecamatan Kaliori seluas 57,5 ha, Kecamatan Rembang seluas 40 ha dan Kecamatan Lasem seluas 36 ha.

j. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Rembang memiliki panjang pantai ± 63 km, meliputi Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang. Sebagai Kabupaten yang terletak di wilayah pesisir, Kabupaten Rembang memiliki potensi perikanan yang besar baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Jenis potensi perikanan tangkap antara lain ikan layang, ikan tambang, ikan kembung, ikan selar, ikan tongkol, cumi-cumi, ikan kurisi, ikan teri, ikan manyung, ikan layur, ikan kakap, dan rajungan. Jumlah produksi perikanan tangkap dalam kurun waktu lima tahun (2005-2009) menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan dari sebanyak 31.433,46 ton senilai Rp 117.724.913.200,00 pada tahun 2005 menjadi 38.050,97 ton senilai Rp.189.569.252.900,00 pada tahun 2009. Perkembangan jumlah produksi perikanan laut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 101.
Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap
Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009

No	Tahun	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Nilai Perikanan Tangkap (Rupiah)
1	2005	31.433,46	117.702.785.300,00
2	2006	37.888,76	142.946.128.500,00
3	2007	26.728,21	126.823.250.400,00
4	2008	34.927,91	191.520.478.600,00
5	2009	38.050,97	189.569.253.900,00

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang (2005-2009)

Walaupun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir produksi perikanan tangkap Kabupaten Rembang cenderung meningkat, namun jika diamati ternyata produksi perikanan tahun 2009 masih jauh dibawah produksi tahun 2002 yang mencapai 55.281,52 ton. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya *overfishing* terutama pada wilayah penangkapan I dan wilayah penangkapan II, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan yang memperhatikan upaya konservasi dan rehabilitasi habitat hidup/ekosistem laut dan pesisir.

Pada sisi lain, tingginya potensi hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang belum diikuti dengan jumlah konsumsi ikan oleh masyarakat. Konsumsi ikan oleh masyarakat kabupaten Rembang sebesar 21,4 kg/kapita/tahun pada tahun 2005, menjadi sebanyak 21,8 kg/kapita/tahun (2006); 22,4 kg/kapita/tahun (2007); 24,03 kg/kapita/tahun (2008); dan 24,11 kg/kapita/tahun (2009).Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang nilai gizi ikan, sehingga diperlukan upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan.

Produksi perikanan yang besar belum juga didukung industri pengolahan ikan yang memadai. Pengolahan ikan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat sebagian besar masih tradisional, dengan cara dipindang, diasinkan dan diasap, sehingga nilai tambah produk perikanan masih rendah. Namun usaha pengolahan ikan cukup mampu menyerap tenaga kerja yang setiap tahunnya menunjukkan peningkatan dari 10.240 orang pada tahun 2006, menjadi 17.748 orang pada tahun 2007, dan 18.678 orang pada tahun 2009. Untuk mampu memberikan kontribusi lebih tinggi terhadap PDRB sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kedepan diperlukan upaya diversifikasi produk dan pengembangan kluster industri pengolahan ikan yang diikuti pemasaran yang semakin luas.

Jumlah nelayan di Kabupaten Rembang dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan peningkatan dari sebanyak 16.577 orang pada tahun 2005 menjadi 19.225 orang pada tahun 2009. Sebagian besar (80,2%) termasuk kategori nelayan pandega (nelayan yang tidak memiliki kapal/perahu sendiri atau bekerja pada pemilik kapal) dan lainnya adalah nelayan juragan (19,8%). Rata-rata pendapatan nelayan dalam kurun waktu lima tahun (2005-2009) menunjukkan kecenderungan meningkat dari sebesar Rp. 7.334.428,00 per tahun pada tahun 2005 menjadi Rp 9.671.462,00 per tahun pada tahun 2009. Perkembangan jumlah nelayan di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 102.
Jumlah Nelayan di Kabupaten Rembang
Tahun 2005-2009 (orang)

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
A	Jumlah nelayan	16.577	16.035	18.900	18.900	19.225
	Nelayan juragan	5.106	4.439	3.735	3.735	3.756
	Nelayan pandega	11.468	11.596	15.165	15.165	15.356
B	Rata-rata pendapatan nelayan/tahun	7.334.428	8.419.600	6.710.225	10.018.100	9.671.462

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang (2009)

Perikanan tangkap di Kabupaten Rembang didukung oleh sarana prasarana sebagai berikut:

1. Pelabuhan Perikanan

Di Kabupaten Rembang terdapat Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) sebanyak 1 unit berlokasi di Kelurahan Tasik Agung, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak 10 unit, tersebar di sepanjang pantai Rembang sejak Kecamatan Kaliori sampai Kecamatan Sarang.

2. Kapal perikanan

Jumlah perahu/kapal selama kurun waktu tahun 2005–2009 menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan dari sebanyak 4.632 unit menjadi 4.622 unit. Jenis kapal didominasi perahu motor tempel (90,29%), lainnya adalah kapal motor (9,09%) dan perahu tanpa motor (0,71%).

Tabel 2. 103.
Jumlah Kapal di Kabupaten Rembang
Tahun 2005-2009 (unit)

No	Jenis Kapal	2005	2006	2007	2008	2009
1	Kapal Motor	479	471	494	517	416
2	Perahu Motor Tempel	4.112	4.064	3.701	3.704	4.173
3	Perahu Tanpa Motor (Perahu Layar)	41	46	39	39	33
	Jumlah	4.632	4.581	4.234	4.260	4.622

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang (2009)

3. Alat tangkap

Sampai dengan tahun 2008 di Kabupaten Rembang masih ditemui jenis alat tangkap ikan yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem perairan, yaitu jaring cantrang. Jenis jaring ini merupakan alat tangkap ikan demersal (dasar laut) yang memiliki dampak negatif hampir sama dengan jaring *trawl* (pukat harimau). Jumlah pemilik jaring cantrang di Kabupaten Rembang menunjukkan kecenderungan berkurang dari sebanyak 231 unit pada tahun 2005 menjadi 94 unit pada tahun 2009.

Tabel 2. 104.
Jumlah Alat Tangkap (unit) di Kabupaten Rembang
Tahun 2005-2009

No	Jenis Alat	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Cantrang	231	225	65	111	94
2.	Purse seine	325	319	417	433	526
3.	Gill net	5.731	5.715	4.513	4.518	4.583
4.	Tramel net	2.600	2.591	1950	1.950	1.954
5.	Pancing	307	304	263	265	262
6.	Payang	41	41	68	68	93
7.	Dogol	1.739	1.733	1.358	1.358	1.567
8.	Lainnya	367	359	301	301	326
	Jumlah	11.341	11.287	8.935	9.004	9.405

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang (2009)

Potensi perikanan budidaya tambak di Kabupaten Rembang juga cukup besar, dengan jenis komoditas perikanan yang dibudidayakan antara lain Udang Windu, Udang Vanamei dan ikan Bandeng. Jumlah produksi perikanan budidaya air payau menunjukkan kecenderungan meningkat, dari sebanyak 172,29 ton senilai Rp 1.729.588.500,00 pada tahun 2005 menjadi 430.24 ton senilai Rp 7.573.495.000,00 pada tahun 2009. Perkembangan jumlah dan nilai produksi perikanan budidaya air payau selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 105.
Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Payau
Di Kabupaten Rembang Tahun 2005-2009

No	Tahun	Total Produksi (Ton)	Nilai (Rupiah)
1	2005	172,29	1.729.588.500
2	2006	545,77	5.741.534.000
3	2007	572,61	8.514.564.000
4	2008	325,21	5.808.950.000
5	2009	430.24	7,573,495,000

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang (2009)

Peningkatan produksi perikanan dipengaruhi adanya peningkatan luas tambak pembudidayaan ikan. Luas tambak di Kabupaten Rembang pada 2006 sebesar 1.655,70 ha, selanjutnya pada tahun 2007 dan 2008 sedikit menurun menjadi 1.664,10 ha, dan meningkat sangat drastis pada tahun 2009 menjadi 2.386,20 ha. Pembudidaya ikan di tambak dalam kurun waktu empat tahun (2006-2009) tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 834 orang.

Kabupaten Rembang juga memiliki potensi perikanan darat, meliputi perikanan budidaya air tawar dan perikanan tangkap di perairan umum. Kecamatan yang menjadi lokasi pembudidayaan antara lain Kecamatan Pamotan, Sale, Rembang, Bulu dan Sulang dengan luas kolam sebesar 9,5 ha. Jenis ikan yang dibudidayakan antara lain Ikan Lele, Ikan Nila dan Ikan Tawes. Perkembangan jumlah produksi budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Rembang dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan dari sebanyak 8,11 ton senilai Rp 66.972.500,00 pada tahun 2005, menjadi

131.72 ton senilai Rp 1,478,473,000,00 pada tahun 2009. Jumlah pembudidaya ikan di kolam dalam kurun waktu empat tahun (2006-2009) tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 339 orang.

Sementara itu hasil perikanan tangkap di perairan umum Kabupaten Rembang berasal dari sungai, waduk dan rawa dengan kecenderungan jumlah produksi menunjukkan penurunan fluktuatif dalam kurun waktu 2005-2008 dari sebanyak 19.85 ton senilai Rp 67.739.000,00 pada tahun 2005, menurun menjadi 5.13 ton senilai 22.830.000.00 pada tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2009 meningkat menjadi 15,42 ton senilai Rp. 86.381.050,00. Penurunan produksi ini menunjukkan adanya penurunan kualitas perairan yang disebabkan penggunaan bahan beracun dalam penangkapan ikan dan penggunaan insektisida untuk pertanian. Data jumlah dan nilai produksi perikanan darat selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 106.
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar
dan Perikanan Perairan Umum di Kabupaten Rembang
Tahun 2005-2009

No	Tahun	Perikanan Budidaya Air Tawar		Perikanan Perairan Umum	
		Total Produksi (Ton)	Nilai (Rupiah)	Total Produksi (Ton)	Nilai (Rupiah)
1.	2005	8,11	66.972.500	19,85	67.739.000
2.	2006	12,04	88.930.000	9,38	34.720.000
3.	2007	41,94	358.761.000	8,22	28.773.500
4.	2008	33,62	333.760.000	5,13	22.830.000
5.	2009	131,72	1.478.473.000	15,42	86.381.050

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang (2009)

Kabupaten Rembang juga memiliki potensi mangrove seluas 133,5 ha yang potensial untuk dikembangkan menjadi obyek wisata bahari. Penyebaran mangrove di Kabupaten Rembang antara lain di Kecamatan Kaliori seluas 57,5 ha, Kecamatan Rembang seluas 40 ha dan Kecamatan Lasem seluas 36 ha. Keberadaan mangrove ini sangat penting untuk melindungi pantai dari abrasi yang dapat merugikan masyarakat.

Terumbu karang di Kabupaten Rembang terbagi kedalam 19 gugusan terumbu karang, yaitu Karang Gondoh ($\pm$ 9 Ha); Karang Pulau Marongan ($\pm$ 2,5 Ha); Karang Pulau Penowo ($\pm$ 2,4 Ha); Karang Pulau Gede ($\pm$ 37 Ha); Karang Pulau Cilik ($\pm$ 7 Ha); Karang Pulau Tubanan ($\pm$ 1 Ha); Karang Pulau Tapa ($\pm$ 1 Ha); Karang Pulau Kelem ($\pm$ 7,1 Ha); Karang Pulau Wenwen ($\pm$ 4,2 Ha); Karang Pulau Masaran ($\pm$ 6,9 Ha); Karang Pulau Dorangan ($\pm$ 10 Ha); Karang Seliro ($\pm$ 6 Ha); Karang Moro ($\pm$ 6 Ha); Karang Pulau Gurian ($\pm$ 3,8 Ha); Karang Siwalan ($\pm$ 20 Ha); Karang Jetak ($\pm$ 21 Ha) dan Karang Gosong ($\pm$ 4,7 Ha). Terumbu karang ini memiliki peran yang sangat besar dalam proses perkembangbiakan dan pembesaran ikan, sehingga diperlukan upaya perlindungan dari ancaman kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari aspek keuangan. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Rembang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Beberapa prinsip penyusunan anggaran daerah adalah: (1) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah (*pusat*) dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Kinerja keuangan masa lalu adalah mengkaji kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Berikut ini diuraikan kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah.

a) Pendapatan Daerah

Keuangan daerah Kabupaten Rembang dapat terlihat dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang. Kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010 menunjukkan peningkatan. Tahun 2006 total pendapatan daerah sebesar Rp. 481,358,999,000,-, tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 510,249,537,172, - dan tahun 2010 meningkat menjadi Rp.696,509,030,000.-

Sumber pendapatan daerah juga bersumber dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana perimbangan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagi sebagian besar pemerintah kabupaten/kota, Dana Perimbangan menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah. Dengan demikian pendapatan daerah tersebut terbesar berasal dari DAU.

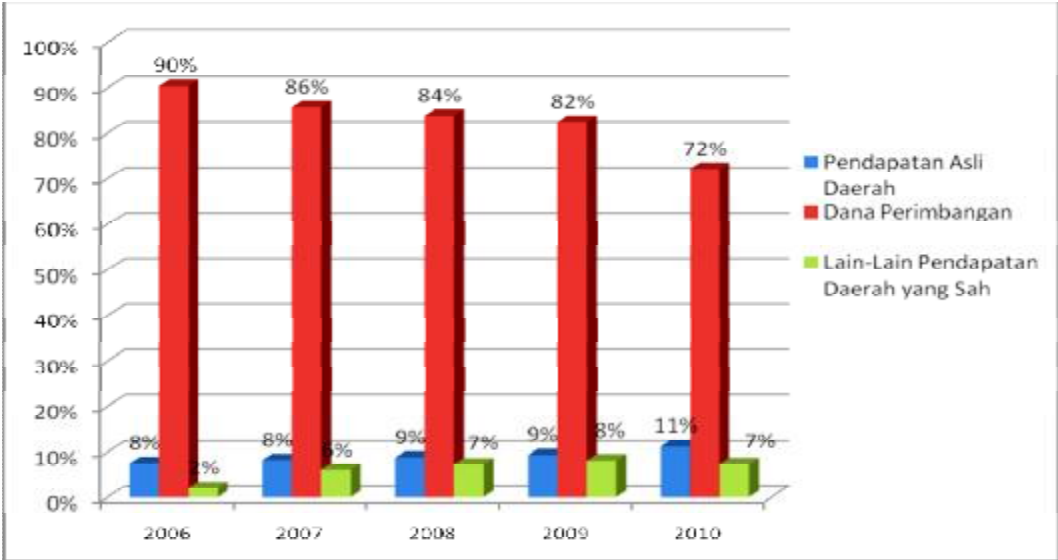
Dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Rembang komponen DAU merupakan sumber pendapatan daerah terbesar. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah Kabupaten Rembang terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi. Rata-rata proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah selama tahun (2006-2010) sebesar 85,65%. Sedangkan proporsi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 8,50%, dan sisanya proporsi pendapatan lain-lain yang sah terhadap pendapatan daerah sebesar 5,88%.

Prosentase dana perimbangan selama kurun waktu 2006–2010 mengalami penurunan, meskipun proporsinya masih tetap tinggi. Pada tahun 2006 proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan sebesar 90%, pada tahun 2010 turun menjadi sebesar 72%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daerah dari aspek keuangan untuk membiayai pembangunan daerah.

Sumber pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Jumlah dana dari sumber pendapatan ini cukup besar dan cukup berarti bagi pemerintah Kabupaten/kota.

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah secara nominal maupun proporsi terhadap total pendapatan mengalami peningkatan selama kurun waktu 2006–2010. Pada tahun 2006 proporsi sumber pendapatan ini sebesar 2 % dan pada tahun 2010 sebesar 7%. Sumbangan terbesar dari sumber pendapatan ini adalah dari bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya. Secara jelas gambaran proporsi PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah Kabupaten Rembang dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 3. 1.
Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Realisasi APBD tahun 2006-2009 dan APBD Perubahan Tahun 2010



Sumber DPPAKD Kabupaten Rembang (diolah), 2010.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rembang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2.
Pendapatan Asli Daerah (PAD dan Proporsi terhadap Total Pendapatan
Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010 (ribu Rupiah)

No	Uraian	2006	P (%)	2007	P (%)	2008	P (%)	2009	P (%)	2010	P (%)
1	Pendapatan	481.358.999.000		510.249.537.172		579.272.806.693		608.044.827.149		696.509.030.000	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	36.246.692.000	8%	42.255.838.407	8%	51.150.558.424	9%	56.887.895.318	9%	78.227.428.000	11%
1.1.1	Pajak Daerah	5.152.500.000	14%	6.174.551.576	15%	7.622.038.604	15%	9.859.879.106	17%	13.045.000.000	17%
1.1.2	Retribusi Daerah	22.656.876.000	63%	26.097.927.121	62%	33.259.283.610	65%	36.010.317.228	63%	25.610.047.551	33%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	945.000.000	3%	1.590.211.457	4%	4.467.267.722	9%	4.584.864.416	8%	4.287.386.328	5%
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	7.492.316.000	21%	8.393.148.253	20%	5.801.968.488	11%	6.432.834.568	11%	35.284.994.121	45%
1.2	Dana Perimbangan	435.208.307.000	90%	437.253.201.427	86%	485.820.547.535	84%	501.618.169.784	82%	503.036.678.000	72%
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	25.723.557.000	6%	34.372.201.427	8%	36.338.844.535	7%	37.826.498.784	8%	42.723.282.000	8%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	342.777.000.000	79%	361.876.000.000	83%	398.410.703.000	82%	407.158.671.000	81%	411.434.996.000	82%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	45.910.000.000	11%	41.005.000.000	9%	51.071.000.000	11%	56.633.000.000	11%	48.878.400.000	10%
1.2.4	Dana Perimbangan dari Propinsi	20.797.750.000	5%		0%		0%		0%		0%
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.904.000.000	2%	30.740.497.338	6%	42.301.700.734	7%	49.538.762.047	8%	51.355.299.000	7%
1.3.1	Hibah		0%	27.000.000	0%		0%		0%	2.000.000.000	4%
1.3.2	Dana Darurat		0%	-		2.500.000.000	6%	0	0%		0%
1.3.3	Pendapatan Lainnya		0%		0%		0%	13.262.250.000	27%		0%
1.3.4	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya		0%	16.703.438.548	54%	19.310.103.884	46%	25.095.812.047	51%	25.493.451.000	50%
1.3.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		0%	1.650.000.000	5%	5.929.952.600	14%	11.180.700.000	23%		0%
1.3.6	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya		0%	12.360.058.790	40%	14.561.644.250	34%		0%	23.861.848.000	46%
	Total Pendapatan	481.358.999.000		510.249.537.172		579.272.806.693		608.044.827.149		696.509.030.000	

Keterangan: r = Pertumbuhan

P = Proporsi terhadap total pendapatan

Sumber DPPAKD Kabupaten Rembang 2010.

Pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2007-2010 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2007 pendapatan daerah mengalami pertumbuhan sebesar 6%, tahun 2008 terjadi pertumbuhan pendapatan daerah mencapai 14%, namun tahun 2009 hanya meningkat sebesar 5% kemudian pada tahun 2010 mencapai 14.55%. Pendapatan asli daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif tahun 2007 sebesar 17%, tahun 2008 sebesar 21%, tahun 2009 sebesar 11% dan tahun 2010 sebesar 37.51%. Pajak daerah dan retribusi daerah juga mengalami pertumbuhan yang positif pada kurun waktu 2007-2010, namun untuk lain-lain PAD yang sah menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif tahun 2007 sebesar 12%, tahun 2008 menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar (- 31%), tahun 2009 sebesar 11% dan tahun 2010 sebesar 44.51%

Pertumbuhan dana perimbangan menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Tahun 2007 pertumbuhan dana perimbangan sebesar 0,5%, tahun 2008 meningkat menjadi 11% dan pada tahun 2009 turun menjadi 3%. Sementara itu untuk lain-lain pendapatan yang sah, Tahun 2007 sebesar 210%, tahun 2008 turun menjadi 38% dan pada tahun 2009 turun lagi menjadi 17%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 3.
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2007 - 2009

No	Uraian	2007	2008	2009
1	Pendapatan	6 %	14 %	5 %
1.1	Pendapatan Asli Daerah	17%	21%	11%
1.1.1	Pajak Daerah	20%	23%	29%
1.1.2	Retribusi Daerah	15%	27%	8%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	68%	181%	3%
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	12%	-31%	11%
1.2	Dana Perimbangan	0,5 %	11 %	3 %
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	34%	6%	4%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	6%	10%	2%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	-11%	-86%	11%
1.2.4	Dana Perimbangan dari Propinsi			
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	210 %	38 %	17 %
1.3.1	Hibah		-100%	
1.3.2	Dana Darurat			-100%
1.3.3	Pendapatan Lainnya			
1.3.4	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya		16%	30%

No	Uraian	2007	2008	2009
1.3.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		259%	89%
1.3.6	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya		18%	-100%

Sumber DPPAKD Kabupaten Rembang (diolah), 2010

b) Belanja Daerah

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:

- 1) **Belanja pegawai** dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta Bupati/Wakil Bupati dan biaya pemungutan pajak daerah.
- 2) **Belanja bunga** digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada pihak lainnya.
- 3) **Subsidi**, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- 4) **Belanja hibah**, yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat *cross cutting issue*.
- 5) **Bantuan sosial**, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik.
- 6) **Belanja bagi hasil**, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
- 7) **Bantuan keuangan** yang bersifat umum maupun khusus
- 8) **Belanja tak terduga**, untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak terulang.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :

- 1) **Belanja pegawai**, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur
- 2) **Belanja barang dan jasa**, untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, bea siswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya.
- 3) **Belanja modal**, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan di darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor,

alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Kinerja belanja daerah Kabupaten Rembang tahun 2007 – 2010 menunjukkan adanya peningkatan. Proporsi Belanja Tidak langsung dengan Belanja Langsung pada tahun 2010 sebesar 66% untuk Belanja Tidak Langsung dan 34% untuk Belanja langsung. Proporsi ini lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Proporsi pada tahun 2009 sebesar 72% berbanding 28%.

Belanja Tidak Langsung Kabupaten Rembang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Selama kurun waktu 2007 – 2010 Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16%. Proporsi belanja pegawai pada tahun 2010 sebesar 84% dari total belanja tidak langsung. Proporsi ini lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Proporsi belanja pegawai pada tahun 2009 sebesar 76%. Peningkatan proporsi belanja pegawai ini disebabkan oleh adanya kenaikan gaji pegawai dan adanya penerimaan pegawai baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Belanja Langsung selama kurun waktu 2007-2010 fluktuatif dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1%. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Alokasi dana terbesar pada belanja langsung adalah pada pos Belanja Modal yaitu sebesar 50% pada tahun 2010 dari total Belanja Langsung. Sedangkan belanja Barang dan Jasa pada tahun 2010 dialokasikan sebesar 34% dari total Belanja Langsung. (Lihat tabel 3.4).

Secara keseluruhan struktur belanja di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4.
Perkembangan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2007-2010

No	Uraian	2007	P	2008	R	P	2009	R	P	2010	R	P	rata-rata R
A	Belanja Tidak Langsung	293.014.416.000	52%	375.717.711.000	28%	60%	431.851.382.000	15%	72%	479.450.339.955	11%	66%	14%
1	Belanja Pegawai	226.981.226.000	77%	304.575.083.000	34%	81%	327.806.957.000	8%	76%	403.963.796.955	23%	84%	16%
2	Belanja Bunga	100.000.000	0%	503.000.000	403%	0%	1.445.000.000	187%	0%	65.000.000	-96%	0.0%	6%
3	Belanja Subsidi	-	0%	-		0%	-		0%			0.0%	0%
4	Belanja Hibah	-	0%	3.437.180.000		1%	40.434.895.000	1076%	9%	15.401.847.000	-62%	3.2%	7%
5	Belanja Bantuan Sosial	35.750.851.000	12%	40.127.698.000	12%	11%	34.168.040.000	-15%	8%	34.382.946.000	1%	7.2%	0%
6	Belanja Bagi Hasil	-	0%	-		0%	-		0%			0.0%	0%
7	Belanja Bantuan Keuangan	28.681.530.000	10%	22.924.750.000	-20%	6%	27.945.880.000	22%	6%	25.136.750.000	-10%	5.2%	6%
8	Belanja Tidak Terduga	1.500.809.000	1%	4.150.000.000	177%	1%	50.610.000	-99%	0%	500.000.000	888%	0.1%	3%
													0%
B	Belanja Langsung	272.897.433.000	48%	252.951.838.000	-7%	40%	171.391.873.000	-32%	28%	246.187.813.045	44%	34%	1%
1	Belanja Pegawai	36.554.698.000	13%	39.039.594.000	7%	15%	33.701.576.000	-14%	20%	40.327.071.500	20%	16%	3%
2	Belanja Barang dan jasa	65.857.294.000	24%	84.064.000.000	28%	33%	79.141.083.000	-6%	46%	83.590.729.945	6%	34%	7%
3	Belanja Modal	170.485.441.000	62%	129.848.244.000	-24%	51%	58.549.214.000	-55%	34%	122.270.011.600	109%	50%	8%
	Total Belanja Daerah	565.911.849.000		628.669.549.000	11%		603.243.255.000	-4%		725.638.153.000	20%		

Sumber DPPAKD Kabupaten Rembang 2010.

Keterangan: r = Pertumbuhan
P = Proporsi terhadap total Belanja

B. Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu merupakan langkah-langkah pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan pada kurun waktu 2006 – 2010. Analisis kebijakan keuangan masa lalu meliputi indikator proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Pembiayaan daerah adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

Pada pelaksanaan APBD tahun 2007 – 2010 terdapat defisit anggaran sebesar Rp 66.648.981.744,00 pada tahun 2007 dan sebesar Rp. -52.159.049.149,00 pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 sebesar Rp 14.955.710.693,00.

Tabel 3. 5.
Defisit riil Anggaran Realisasi APBD Kabupaten Rembang
Tahun 2007-2009 (Rupiah)

No	Uraian	2007	2008	2009
1	Pendapatan Daerah	510.249.537.172	579.272.806.693	608.044.827.149
	dikurangi			
2	Belanja Daerah	565.911.849.000	628.669.549.000	603.243.255.000
3	Pengeluaran pembiayaan daerah	10.986.669.916	2.762.306.842	19.757.282.842
	Defisit riil	-66.648.981.744	-52.159.049.149	-14.955.710.693

Sumber DPPAKD Kabupaten Rembang 2010.

Penutupan defisit anggaran Kabupaten Rembang sebagian besar dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah. Pada tahun 2007 dan 2008 penutupan anggaran dilakukan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah. Sementara itu Pada tahun 2009 dan 2010 penutupan defisit riil anggaran sebagian besar dilakukan menggunakan SiLPA. Secara rinci penutupan defisit riil anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Komposisi Defisit Riil Anggaran Realisasi APBD Tahun 2007-2009
Kabupaten Rembang

No	Uraian	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	510.249.537.172	579.272.806.693	608.044.827.149	696.509.030.000
	Dikurangi realisasi :				
2	Belanja Daerah	565.911.849.000	628.669.549.000	603.243.255.000	725.638.153.000
3	Pengeluaran pembiayaan Daerah	10.986.669.916	2.762.306.842	19.757.282.842	4.904.974.000
A	Defisit riil	(66.648.981.744)	(52.159.049.149)	(14.955.710.693)	(34.034.097.000)
	ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan :				
4	SiLPA	26.343.789.449	32.906.231.936	25.419.553.207	29312123000
5	Pencairan Dana Cadangan				
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	55.156.638.251	18.266.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinj Daerah	-	1.000.000.000	1.500.000.000	3.221.974.000
9	Penerimaan Piutang Daerah	-			
	Uang Kas dan Perhitungan				
B	Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah	81.500.427.700	52.172.231.936	28.419.553.207	34.034.097.000
	Sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan	14.851.445.956	13.182.787	13.463.842.514	-

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Rembang tahun 2007-2009 dan APBD perubahan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Pembiayaan Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2007-2010 (Rupiah)

	Uraian	2007*)	2008*)	r	2009*)	r	2010**)	r
3 . 1	Penerimaan Pembiayaan	72,761,610,824	41,433,676,441	-43%	28,419,385,207	-31%	34,034,097,000	20%
3 . 1 . 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	72,761,610,824	22,167,820,441	-70%	25,419,553,207	15%	29,312,123,000	15%
3 . 1 . 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-			
3 . 1 . 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-			
3 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	18,266,000,000		1,500,000,000	-92%	1,500,000,000	0%
3 . 1 . 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	999,856,000		1,499,832,000	50%	3,221,974,000	115%
3 . 1 . 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-		-	
3 . 2	Pengeluaran Pembiayaan	10,986,669,916	2,762,306,842	-75%	19,757,282,842	615%	4,904,974,000	-75%
3 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-		-	
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,903,000,000	147,000,000	-99%	-	-99%	128,000,000	-91%
3 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	83,669,916	1,615,450,842	1831%	18,257,450,842	1030%	1,555,000,000	115%
3 . 2 . 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	999,856,000		1,499,832,000	50%	3,221,974,000	236%
	Pembiayaan Netto	61,774,940,908	38,671,369,599	-37%	8,662,102,365	-78%	29,129,123,000	-91%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	32,906,231,936	25,419,553,207	-23%	29,312,122,883	15%	-	

*) Data CALK Tahun 2007 s/d 2009

*) APBD 2010 Perubahan

Sumber DPPAKD Kabupaten Rembang 2010

Berdasarkan data dan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa pendapatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan tergolong sangat tinggi, yaitu mencapai Rp 72.761.610.824,00 pada tahun 2007, Rp 22,167,820,441 pada tahun 2008, Rp 25,419,553,207,00 pada tahun 2009. Sebagian besar SILPA tersebut digunakan untuk penutupan defisit anggaran pada tahun berikutnya. Nilai SILPA yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat kurang cermatan dalam penetapan anggaran, baik target pendapatan daerah maupun penganggaran belanja daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah di Kabupaten Rembang diselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 jo Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Sesuai dengan PP No. 58 tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rembang dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rembang dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Tertib diartikan bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Efektif berarti bahwa pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Efisien berarti bahwa pencapaian keluaran diusahakan secara optimal menggunakan masukan terendah. Ekonomis diartikan bahwa perolehan masukan dilakukan pada tingkat harga yang terendah. Transparan diartikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara terbuka yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bertanggung jawab berarti bahwa pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan mengandung arti bahwa terdapat keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya serta keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. Kepatutan diartikan sebagai tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Manfaat untuk masyarakat diartikan bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat (pelayanan publik).

Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah, antara lain adalah: (1) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah (pusat) dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta

terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dan harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rembang antara lain diarahkan untuk :

- a) Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah.
- b) Menjamin ketersediaan pendanaan pada empat pilar pembangunan di Kabupaten Rembang.
- c) Menjamin ketersediaan pendanaan khususnya untuk membiayai program pembangunan yang memiliki potensi besar bagi penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan.
- d) Meminimalkan risiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.
- e) Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2003 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang.
- f) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.

C. Kerangka Pendanaan

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu merupakan langkah-langkah pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan pada kurun waktu 2006 – 2010. Analisis kebijakan keuangan masa lalu meliputi indikator proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

Proyeksi anggaran pada masa lima tahun ke depan mencerminkan ketersediaan dana untuk pembiayaan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan misi dalam RPJMD. Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan rata-rata pendapatan dan belanja terlalu tinggi sehingga penetapan rata-rata pertumbuhan ditetapkan dengan *expert judgement* berdasarkan perilaku past performance pertumbuhan masing-masing pos.
2. Pendapatan daerah mengalami peningkatan signifikan karena berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Pertumbuhan belanja diasumsikan meningkat namun proporsi Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung tetap dipertahankan pada tingkatan 63%:37%, walaupun belanja pegawai meningkat diperkirakan akan tertutup dari peningkatan pendapatan.

Berdasarkan asumsi tersebut, pendapatan dan belanja Kabupaten Rembang diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Hasil Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pendapatan Daerah	752,031,529,000	789,633,105,450	829,114,760,723	870,570,498,759	914,099,023,697
1	Pendapatan Asli Daerah	80,130,640,000	84,137,172,000	88,344,030,600	92,761,232,130	97,399,293,737
2	Dana Perimbangan	575,595,947,000	604,375,744,350	634,594,531,568	666,324,258,146	699,640,471,053
3	Lain- Lain Pendapatan yang sah	96,304,942,000	101,120,189,100	106,176,198,555	111,485,008,483	117,059,258,907
	Total Pendapatan					
B	Belanja Daerah	792,865,221,200	801,008,482,260	841,058,906,373	883,111,851,692	927,267,444,276
1	Belanja Tidak Langsung	507,838,905,000	501,730,850,250	526,817,392,763	553,158,262,401	580,816,175,521
	Proporsi (%)	64%	63%	63%	63%	63%
2	Belanja Langsung	285,026,316,200	299,277,632,010	314,241,513,611	329,953,589,291	346,451,268,756
	Proporsi (%)	36%	37%	37%	37%	37%

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Dengan bertumpu pada perkembangan kondisi umum Kabupaten Rembang dan prediksi permasalahan lima tahun mendatang, dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis beserta potensi permasalahan setiap urusan, yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan daerah selama periode tahun 2010-2015. Adapun isu-isu strategis beserta potensi permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Isu – Isu Strategis

1. Kemiskinan dan Pengangguran

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Rembang yang diprediksikan semakin meningkat dalam lima tahun mendatang akan berkorelasi positif dengan aspek penyediaan lapangan kerja dan penyiapan kualitas sumberdaya manusia, yang bila tidak tertangani dengan baik akan bermuara pada permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Kondisi kualitas SDM yang masih rendah yang digambarkan dengan rata-rata lama sekolah masih di bawah 7 tahun pada jenjang pendidikan dasar serta belum ditunjang dengan penguasaan ketrampilan, kecakapan dan keahlian yang profesional, seringkali menyebabkan angkatan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sebagai stakeholder utama dalam pembangunan, kualitas SDM diyakini menjadi modal dasar dalam persaingan di era pasar global yang semakin kompetitif sebab keberadaan SDM yang handal serta mempunyai etos kerja tinggi secara empiris telah terbukti berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi di sektor riil serta memperkuat daya saing daerah.

Sementara itu persoalan kemiskinan dan pengangguran masih merupakan isu penting yang perlu terus mendapat perhatian. Penanganan persoalan kemiskinan seolah tak kunjung tuntas disebabkan akar kemiskinan bukan hanya bersumber pada kelemahan dari kelompok masyarakat miskin itu sendiri, tetapi juga karena faktor-faktor struktural yang membuat sebagian anggota atau kelompok masyarakat tertentu mendominasi sarana ekonomi, sosial, politik dan budaya. Struktur ini menyebabkan tidak adanya pemerataan, tidak berkembangnya kualitas dan daya kreasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari krisis bukan saja menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja serta ambruknya sejumlah usaha mandiri yang ditekuni masyarakat, tetapi juga menyebabkan terjadinya proses perluasan dan pendalaman kemiskinan.

Namun demikian dengan memperhatikan berbagai asumsi dan perkembangan parameter kependudukan yang diprediksikan mengalami perbaikan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang maka perkembangan ini diharapkan mampu menjawab persoalan kemiskinan dan pengangguran. Berangkat dari asumsi pertumbuhan penduduk usia kerja sebesar 0,5% yang diikuti dengan peningkatan jumlah angkatan kerja secara proporsional maka penyediaan lapangan kerja baru diharapkan mampu mengikuti peningkatan ini. Dengan estimasi rata-rata pertumbuhan lapangan kerja pada kisaran 0,7% per tahun maka angka pengangguran dapat ditekan sampai dengan dibawah 5%. Untuk mencapai target tersebut maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam persaingan ekonomi dan usaha, membuka akses masyarakat terhadap berbagai peluang usaha dan sumber permodalan serta memberikan pelayanan dan insentif bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja baik di dalam maupun diluar daerah mengurangi praktek – praktek monopoli dan oligopoli baik oleh kalangan swasta maupun pihak – pihak lain serta memperkuat sokoguru perekonomian dengan membangkitkan kembali sektor perkoperasian.

2. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

Garis pantai Kabupaten Rembang yang membentang sepanjang 63,5 km mengandung potensi ekonomi bahari yang sangat besar dan beragam khususnya sektor kelautan dan perikanan yang dapat digambarkan dari perkembangan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya pantai yang meningkat dari tahun-ke tahun. Sementara keberadaan kawasan hutan mangrove, terumbu karang dan pulau-pulau kecil serta ditemukannya situs-situs sejarah maritim di Kabupaten Rembang juga sangat berpeluang untuk dikembangkan menjadi sektor pariwisata bahari unggulan maupun jasa-jasa lingkungan lainnya.

Dengan memperhatikan potensi dan peluang tersebut, maka upaya optimalisasi sumberdaya pesisir Kabupaten Rembang adalah keniscayaan dan perlu diakomodasi dalam konsep pembangunan komprehensif dan terpadu seperti dirumuskan melalui pendekatan *seafront city*. Filosofi pengembangan *seafront city* dilandasi pada perubahan paradigma masyarakat yaitu cara pandang serta perilaku masyarakat yang selama ini masih berorientasi daratan (*land based*) menjadi berorientasi pada lautan (*ocean based*). Perubahan paradigma ini diharapkan merubah orientasi masyarakat untuk menempatkan pengelolaan kawasan perairan laut sebagai “halaman depan” serta menuntut kearifan semua stakeholder terhadap pengelolaan sumberdayanya. Pengembangan *seafront city* bukan merupakan konsep baru bagi masyarakat Rembang yang secara sosio kultural telah mewarisi budaya maritim sejak berabad-abad silam serta pernah mengalami masa kejayaan maritim di masa lalu. Konsekuensi logis atas digunakannya konsep pembangunan ini adalah dibutuhkan komitmen segenap pemangku kepentingan serta terfokusnya kebijakan pada sektor maritim terutama dalam penyediaan dan peningkatan infrastruktur di kawasan pesisir Kabupaten Rembang yang dilakukan sejalan dengan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan. Upaya pemberdayaan masyarakat pesisir adalah aspek penting yang perlu menjadi perhatian utama dalam pengembangan *seafront city* mengingat karakteristik sosial budaya masyarakat pesisir yang rawan termarginalisasi.

Penyediaan infrastruktur dalam konsep *seafront city* perlu diinisiasi melalui pembangunan sarana dan prasarana ekonomi maupun sektor pendukungnya yang secara tidak langsung juga akan membawa perubahan paradigma masyarakat terhadap pembangunan *seafront city*. Upaya tersebut dilakukan secara integratif dan komprehensif dengan penguatan dan pemberdayaan masyarakat pesisir utamanya masyarakat nelayan yang ditekankan pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, pendidikan serta penguatan struktural dalam masyarakat sehingga kesejahteraannya meningkat, mengingat lebih dari 50 persen penduduk Rembang bermukim di kawasan pesisir dan sebagian menggantungkan hidupnya pada kegiatan ekonomi di sektor maritim. Pembangunan *seafront city* diprediksikan akan mampu menjadi sumber energi potensial dalam memicu pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan publik yang belum memadai

Posisi strategis Kabupaten Rembang yang secara geografis dilalui jalur pantura Pulau Jawa merupakan potensi yang sangat menjanjikan perkembangan ekonomi daerah. Jalan adalah infrastruktur pokok yang menghubungkan kesatuan sistem transportasi nasional, sistem transportasi wilayah maupun sistem transportasi lokal dalam mendorong pertumbuhan wilayah. Nilai strategis jalur pantura adalah jalan negara yang telah terkoneksi dengan jalan provinsi yang menghubungkan kabupaten sekitar maupun jaringan jalan kabupaten yang menghubungkan di semua wilayah kecamatan dan desa. Kondisi eksisting di sepanjang koridor jalan Pantura telah berkembang berbagai aktifitas ekonomi seperti industri, jasa, perdagangan maupun perhubungan darat dan perhubungan laut. Adanya infrastruktur jaringan jalan dan jembatan yang didukung infrastruktur pendukungnya seperti ketersediaan air baku, energi listrik dan telekomunikasi menjadikan kekuatan untuk pengembangan potensi pantai melalui pembangunan pelabuhan perikanan pantai dan pelabuhan umum yang dipadukan dengan pengembangan industri pengolahan berbasis pertambangan, pertanian dan perkebunan maupun perikanan dan kelautan.

Namun demikian pembangunan infrastruktur wilayah tersebut masih dihadapkan beberapa kelemahan seperti masih kurang meratanya pembangunan infrastruktur, kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman, belum memadainya kondisi sarana prasarana permukiman seperti air minum, drainase, persampahan maupun air limbah, masih terbatasnya infrastruktur pelabuhan maupun belum optimalnya pengelolaan sumber daya air permukaan yang mampu menampung kelebihan air pada musim hujan seperti melalui pembangunan embung, bendung dan *check dam* guna memenuhi kebutuhan air baku maupun air bersih bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

Peluang pengembangan infrastruktur wilayah untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Rembang sebagai simpul transportasi darat telah didukung dengan adanya potensi terminal barang untuk mengelola arus barang yang semakin meningkat. Di samping itu potensi Kabupaten Rembang menjadi *seafront city* akan memberikan peluang dalam pengembangan kota bahari yang dapat memicu pengembangan daerah sekitar. Namun demikian faktor resiko dalam pengembangan infrastruktur wilayah masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dan persoalan seperti resiko terjadinya berbagai bencana diantaranya bencana banjir, gelombang pasang/abrasi, maupun tanah longsor, serta masih rendahnya kualitas dan kapasitas berbagai infrastruktur wilayah untuk mengakomodasi beragam aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu di sisi pelayanan publik, proyeksi perkembangan demografi di Kabupaten Rembang telah diprediksikan akan berimplikasi pada peningkatan kebutuhan layanan publik baik secara kuantitas dan kualitas. Peningkatan kebutuhan layanan publik ini pasti akan berkorelasi dengan tuntutan terhadap kesiapan aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pemerintah daerah dalam lima tahun ke depan harus terus berupaya mencukupi dan meningkatkan kualitas layanan publik terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti di sektor pendidikan dan kesehatan. Perbaikan kuantitas dan kualitas layanan publik ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM sebagai modal dasar pembangunan di daerah.

4. Rendahnya investasi dan jalinan kemitraan di daerah

Kabupaten Rembang memiliki potensi sumberdaya yang sangat besar berbasis sumberdaya alam seperti pertambangan galian C, potensi kelautan dan perikanan serta potensi pertanian dan kehutanan disamping pula potensi daya tarik wisata berbasis sumberdaya alam. Kondisi tersebut didukung oleh ketersediaan angkatan kerja yang selama ini mencapai lebih dari 50 persen jumlah penduduk dan diprediksikan akan tumbuh sebesar rata-rata 1 persen per tahun hingga lima tahun mendatang. Selain itu kondisi wilayah yang relatif aman akan sangat mendukung pengembangan iklim investasi di Kabupaten Rembang.

Namun demikian minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Rembang sampai saat ini masih relatif rendah. Sampai dengan tahun 2009 investasi swasta di Kabupaten Rembang nilainya masih kecil dibanding investasi pemerintah. Masuknya PMA maupun PMDN masih tergolong lambat yaitu masing-masing hanya 1 (satu) perusahaan sepanjang lima tahun terakhir. Faktor penyebab rendahnya minat investor berinvestasi di Kabupaten Rembang ini antara lain terindikasi dari kurang memadainya sarana prasarana pendukung ekonomi seperti ketersediaan air bersih untuk kepentingan proses produksi maupun untuk kepentingan domestik, pasokan energi serta fasilitas transportasi khususnya belum tersedianya pelabuhan niaga. Faktor promosi investasi juga belum menjadi fokus perhatian dalam upaya peningkatan investasi di Kabupaten Rembang. Hal ini disebabkan oleh belum adanya lembaga promosi investasi yang menyebabkan fungsi promosi investasi kurang berjalan secara optimal. Demikian pula regulasi di bidang penanaman modal masih kurang memadai dalam memberikan pelayanan dan insentif bagi minat investasi di Kabupaten Rembang.

Sementara itu pembangunan daerah semestinya juga dapat didorong dengan membuka peluang kemitraan dengan lembaga non profit, lembaga donor maupun melalui kerjasama antar pemerintah. Pemerintah daerah selama ini kurang optimal dalam

menangkap dan memanfaatkan peluang kemitraan yang ada dikarenakan prosedur birokrasi yang cukup panjang, disamping sulitnya mempertemukan kesepahaman kepentingan serta lemahnya kapasitas lembaga yang berkompeten di daerah.

Dengan latar belakang potensi dan kendala tersebut sebenarnya Kabupaten Rembang cukup mempunyai peluang dalam meningkatkan penanaman modal serta kemitraan dengan pertimbangan bahwa penanaman modal dan pola kemitraan mempunyai nilai strategis dalam mengungkit perekonomian daerah. Peluang-peluang tersebut menyangkut peningkatan daya tarik Kabupaten Rembang dalam memberikan insentif bagi penanaman modal ditengah kecenderungan perilaku perekonomian global yang mencari efisiensi produksi, keringanan pajak, kemudahan perijinan, jaminan keamanan bagi investasi serta dukungan maupun fasilitasi pemerintah daerah dalam menarik investor dan menjalin kemitraan.

5. Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Iklim kompetitif di era perekonomian global saat ini yang dicirikan oleh adanya praktek liberalisasi, ekspansi pasar dan kecenderungan perilaku konsumtif di berbagai bidang kehidupan perlu segera diantisipasi oleh segenap pemangku kepentingan di daerah. Globalisasi bukan hanya melahirkan perubahan-perubahan baru dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat tetapi juga melahirkan perubahan sosiokultur masyarakat dan mempengaruhi kondisi perekonomian wilayah secara substansial, struktural maupun spasial di tingkat lokal maupun regional.

Munculnya sejumlah permasalahan yang menjadi fokus perhatian bagi Kabupaten Rembang dengan adanya globalisasi dan perdagangan bebas adalah kurang siapnya sektor usaha dalam menghadapi iklim persaingan yang sangat ketat serta lemahnya kualitas SDM terutama pengusaha maupun tenaga kerja yang mayoritas kurang menguasai teknologi dan inovasi maupun akses permodalan yang terbatas. Kendala-kendala ini mempengaruhi kurang efisiennya proses produksi sektor usaha dan kurang memenuhinya standar kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan produksi sektor usaha di daerah kurang mampu bersaing dengan negara lain yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih baik dan murah.

Namun demikian Kabupaten Rembang masih berpeluang untuk meningkatkan pangsa pasar dalam perdagangan bebas. Dari keterbukaan informasi dapat digarap pasar-pasar potensial bagi produk sektor usaha di Kabupaten Rembang yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif pada pasar global seperti produk lokal berupa kerajinan tangan yang banyak terdapat di Kabupaten Rembang. Disamping itu melimpahnya sumberdaya mineral, pertambangan dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Rembang berpotensi untuk dikelola, diolah dan dimanfaatkan menjadi produk yang berorientasi ekspor.

Terjalinnnya komitmen perdagangan bebas di kawasan Asia melalui perjanjian China-AFTA, NAFTA, dan WTO merupakan konsensus antar negara. Salah satu konsekuensi logis adanya perdagangan bebas adalah potensi ancaman bagi pasar hasil pertanian dan peternakan dari petani kecil dan para pengrajin dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di pasar lokal. Hasil pertanian, peternakan, usaha kecil, mikro dan menengah belum siap bersaing di pasar internasional maupun pasar lokal dengan banjirnya produk barang dan jasa dari negara lain. Untuk itu, dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal di pasar regional maupun global, ke depan perlu ditingkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada standar mutu nasional maupun standar mutu internasional. Pemerintah daerah perlu pro-aktif dalam melindungi petani kecil, nelayan dan industri kecil yang belum siap bersaing dengan produk pertanian, peternakan dan industri di pasar internasional serta menjalin kemitraan global.

6. Degradasi Lingkungan Hidup

Sebagai daerah yang sedang membangun, modal dasar pembangunan sebagian besar akan bertumpu pada eksploitasi sumberdaya alam. Pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak bijaksana akan berakibat pada degradasi lingkungan hidup serta berdampak pada kelestariannya. Ancaman yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah pengelolaan sumberdaya alam yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup seperti digambarkan dengan terjadinya penangkapan ikan yang berlebihan (*over fishing*), eksploitasi sumber-sumber air yang berlebihan, industrialisasi berbasis bahan tambang yang tidak berwawasan lingkungan serta ketergantungan terhadap sumberdaya hutan (deforestasi) cukup tinggi.

Dalam merespon ancaman degradasi lingkungan tersebut, maka strategi percepatan pembangunan daerah harus dilakukan selaras dengan kelestarian lingkungan sehingga daya dukung sumber daya alam dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Pendekatan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan sekaligus menopang pembangunan sektor ekonomi maupun sosial. Pembangunan berkelanjutan dapat diupayakan melalui pengembangan potensi hutan mangrove, hutan rakyat, pengelolaan sawah lestari, kawasan ruang terbuka publik, kawasan lindung di luar hutan lindung, Daerah Aliran Sungai (DAS), sumber mata air yang kesemuanya dikelola secara terpadu dari hulu ke hilir.

Peningkatan konservasi lingkungan hidup harus memperhatikan kondisi faktor-faktor internal yang bisa menghambat jalannya pembangunan di daerah, diantaranya adalah kerusakan hutan, terjadinya alih fungsi lahan pertanian untuk peruntukan permukiman, industri, dan lainnya, pemanfaatan air bawah tanah yang tidak memperhatikan kaidah pengelolaan ABT, kerusakan terumbu karang, kerusakan daerah tangkapan air (DTA) dan sekitar mata air, berkurangnya daerah resapan air, kerusakan area bekas pertambangan, keterbatasan informasi geologi dalam mendukung kegiatan penatausahaan tambang, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup, kurangnya kepedulian LSM lingkungan hidup, masih kurangnya pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat, serta lemahnya regulasi pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Adanya agenda dan target capaian millenium development goals (MDG's) 2015, ecolabelling, ISO, Kyoto Protokol mendorong Pemerintah Kabupaten Rembang agar dapat mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, mempersyaratkan agar produk-produk olahan yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria ramah lingkungan dan pengurangan emisi karbon, serta mendorong munculnya permintaan yang tinggi akan jasa lingkungan hutan diluar produksi kayu pokok seperti jasa lingkungan air, jasa lingkungan keanekaragaman hayati, serta jasa lingkungan ekowisata.

B. Potensi Permasalahan Masing-masing Urusan

1. Kelompok Urusan Pemerintahan

a. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Potensi permasalahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah:

- 1) Belum optimalnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk beraktivitas dan berusaha dengan aman dan nyaman serta menghadapi bencana alam.
- 2) Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dan jati-diri bangsa dalam masyarakat, ditandai oleh kurangnya pemahaman dasar negara, nasionalisme, hak dan kewajiban warga negara, kesadaran hukum dan penghargaan hak asasi manusia.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membentuk karakter/ watak nasional (*national character building*) dan kesadaran politik bagi warga negara.

b. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Potensi permasalahan di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian adalah:

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik.
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan kepala daerah untuk menunjang tata pemerintahan yang baik.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah terutama dalam pengendalian dan pengawasan anggaran dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- 4) Belum optimalnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

c. Perencanaan Pembangunan

Potensi permasalahan di bidang perencanaan pembangunan adalah :

- 1) Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral.
- 2) Belum efektifnya sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Hal ini ditandai dengan masih adanya kualitas yang rendahnya dalam pelaksanaan pembangunan.

d. Statistik

Potensi permasalahan di bidang statistik adalah:

- 1) Belum tersedianya sistem informasi data yang cepat, akurat dan akuntabel sehingga menjadi kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun untuk penyusunan dokumen lainnya
- 2) Pelayanan data/informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan akan data/informasi oleh masyarakat maupun stakeholder terkait belum optimal.

e. Kearsipan

Potensi permasalahan di bidang kearsipan adalah:

- 1) Belum optimalnya Sistem administrasi kearsipan disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sarana prasarana kearsipan dan masih lemahnya penanganan arsip di tingkat SKPD sehingga banyak arsip yang tidak dapat tersimpan dengan baik.

f. Keperpustakaan

Potensi permasalahan di bidang perpustakaan adalah:

- 1) Masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat berdasarkan data jumlah buku yang dibaca selama 5 tahun terakhir (2005-2009) terus menunjukkan penurunan.
- 2) Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan karena disebabkan oleh kurang memadainya sarana prasarana perpustakaan dan minimnya tenaga pengelola perpustakaan. Untuk mendukung pelayanan perpustakaan dibutuhkan dukungan sumberdaya antara lain tenaga pengelola, pustakawan dan prasarana pendukung lainnya, kondisinya masih kurang memadai terutama untuk tenaga pustakawan.

2. Kelompok Urusan Prasarana Wilayah

a. Pekerjaan Umum

Potensi permasalahan di bidang pekerjaan umum adalah:

Jalan dan Jembatan:

- 1) Belum memadainya kuantitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan, baik jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya beberapa ruas jalan dan beberapa jembatan yang rusak dan sudah tua yang perlu segera mendapatkan penanganan. Serta perlu adanya peningkatan jalan mengingat dari total jalan kabupaten masih ada jalan yang belum beraspal.

Bidang Sumber Daya Air

- 1) Belum optimalnya sistem jaringan pengelolaan sumber daya air terpadu baik dalam pembangunan jaringan irigasi, jaringan air bersih/air minum, saluran sungai, reservoir maupun sumber daya air yang lain.

Bidang Air Minum/Air Baku:

- 1) Masih rendahnya cakupan keluarga dengan akses air bersih di seluruh Kabupaten Rembang.

Bidang Air Limbah

- 1) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana sanitasi di wilayah Kabupaten Rembang. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar masyarakat masih menggunakan teknik pengelolaan air limbah secara *on site* komunal pada lingkungan permukiman yang padat.

Bidang Persampahan

Belum optimalnya pengelolaan persampahan, hal ini dilihat dari persentase sampah yang tidak terangkut masih cukup tinggi serta pengelolaan TPA yang belum optimal.

Bidang Perkotaan dan Perdesaan

- 1) Belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana pendukung dari kegiatan perkotaan dan perdesaan yang ada di wilayah Kabupaten Rembang serta Kurangnya penataan lingkungan permukiman penduduk.

Bidang Permukiman

- 1) Masih rendahnya kualitas rumah yang layak huni dan masih rendahnya upaya peningkatan kualitas permukiman. Hal ini dapat dilihat dari minimnya kegiatan peningkatan kualitas permukiman yang ada dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Rembang.

Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan

- 1) Belum optimalnya penataan lingkungan permukiman. Hal ini dikarenakan masih belum terlibatnya masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman, dan belum dilakukannya pengelolaan data base tentang bangunan gedung yang ada baik sebagai hunian ataupun kegiatan yang lain.

b. Perhubungan

Potensi permasalahan di bidang perhubungan adalah:

- 1) Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan. Terlihat dari masih belum optimalnya pengoperasian terminal dan pemberhentian angkutan umum.
- 2) Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan. Terlihat dari masih tingginya beban lalu lintas, banyaknya daerah rawan kecelakaan dan minimnya fasilitas perlengkapan jalan, dan tingginya kasus kecelakaan lalu lintas transportasi darat.

c. Perumahan

Potensi permasalahan di bidang perumahan adalah :

- 1) Rendahnya penyediaan rumah bagi masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Hal ini ditandai penyediaan perumahan oleh pihak pengembang hanya 3,32% dan 81,44% merupakan penyediaan secara swadaya masyarakat. Karena masih adanya warga yang tidak memiliki rumah yang layak huni sebagai rumah sehat.

d. Penataan Ruang

Potensi permasalahan di bidang penataan ruang adalah:

- 1) Belum optimalnya penegakan perda tata ruang dan masih banyaknya pelanggaran tataruang serta Belum optimalnya Pengendalian pemanfaatan ruang sebagai tindak lanjut Perda RTRW di Kabupaten Rembang. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Potensi kawasan-kawasan pemacu pertumbuhan ekonomi.
- 2) Belum tertatanya pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan di Kabupaten Rembang.

e. Pertanian

Potensi permasalahan di bidang pertanian adalah:

- 1) Belum optimalnya sistem pendaftaran tanah dilihat dari masih banyaknya tanah yang belum bersertifikat yang mencapai 343.646 bidang tanah (78,44%)
- 2) Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan peraturan yang ada

f. Komunikasi dan Informatika

Potensi permasalahan di bidang komunikasi dan informatika adalah:

- 1) Belum optimalnya penataan jaringan telekomunikasi terutama provider telepon seluler. Masih terbatasnya jaringan telekomunikasi dan media massa di perdesaan. Masih diakui bahwa jangkauan pelayanan telekomunikasi dan media massa belum mampu menjangkau luas hingga wilayah perdesaan.
- 2) Kurang optimalnya penyebaran informasi kepada publik karena belum tersedianya sarana dan prasarana penyebaran informasi yang memadai.

3. Kelompok Urusan Sosial Budaya

a. Pendidikan

Potensi permasalahan di bidang pendidikan meliputi:

- 1) **Pendidikan Anak Usia Dini**, yaitu belum optimalnya pengembangan PAUD Non Formal dan TK, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak pada PAUD, serta sebagian besar tenaga pendidik TK belum memenuhi standar kompetensi.
- 2) **Pendidikan Dasar**. Belum optimalnya akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar. Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs masih sekitar 83,99% untuk jenjang pendidikan SD/MI dan 66,53% untuk jenjang pendidikan SMP/MTs. Selain itu tingkat kerusakan ruang kelas SD/MI. Angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA masih sekitar 70,55%. Kurang mencukupinya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran pada tingkat SD dan SMP dimana sekitar 75,74 % SD belum memiliki gedung perpustakaan dan 95% belum memiliki laboratorium komputer. SMP/MTs yang memiliki laboratorium IPA dan komputer masih sekitar 40,66% serta belum optimalnya pengembangan Sekolah Dasar Standar Nasional.
- 3) **Pendidikan Menengah**. Kurang optimalnya akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar. APK dan APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA masih sekitar 50,79% dan APM sebesar 35,21%. Tingginya angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, pada tahun 2009 sebesar 0,46% dari jumlah murid yang ada. Kurangnya mutu dan relevansi pendidikan menengah khususnya SMK yang ditunjukkan tingkat serapan lulusan SMK yang diterima bekerja hanya sekitar 37,29%.
- 4) **Pendidikan Non Formal**. Relevansi pendidikan non formal dan *life skill* rendah, lulusan pendidikan non formal dan *life skill* yang bekerja sebesar 42,12%. Ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan non formal rendah. Kelompok Belajar Masyarakat masih belum memiliki panti atau balai tersendiri, sehingga belum dapat secara optimal mendidik para peserta didik karena peralatan terbatas.
- 5) **Pendidik dan Tenaga Kependidikan**. Rendahnya kualifikasi guru lulusan D4/S1 untuk jenjang pendidikan dasar dan masih rendahnya jumlah guru yang bersertifikasi pada semua jenjang pendidikan. Persentase guru yang memiliki kualifikasi D4/S1 untuk jenjang SD/MI sebesar 29,35%, dan untuk jenjang SMP/MTs sebesar 72,89%. Jumlah guru SD yang bersertifikasi sebesar 23,07%, untuk jenjang SMP/MTs sebesar 32,76%, dan untuk jenjang SMA/MA/SMK sebesar 17,92%.
- 6) **Pendidikan Luar Biasa**. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan luar biasa. Ditandai dengan masih rendahnya sarana dan prasarana pendidikan luar biasa.

- 7) **Manajemen Pelayanan pendidikan.** Belum optimalnya pengelolaan pendidikan ditandai dengan masih belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan sekolah melalui pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); Beberapa gedung kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan belum standar.

b. Kesehatan

Potensi permasalahan di bidang kesehatan adalah:

- 1) Belum optimalnya pelayanan kesehatan baik dasar dan rujukan. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya cakupan pelayanan neonates, kunjungan bayi dan penanganan ibu hamil resiko tinggi dan komplikasi. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Rembang belum merata di seluruh kecamatan. Jumlah Rumah sakit hanya ada 1 unit. Jumlah tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk masih kurang.
- 2) Masih ditemukannya gizi buruk pada balita dengan persentase gizi buruk yang lebih tinggi dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah.

c. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Potensi permasalahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah:

- 1) Masih kurang optimalnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk ditandai dengan : rata-rata angka pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 0.89 %, Total Fertility Rate (TFR) masih berkisar 2,03 %, meningkatnya angka DO peserta KB, prevalensi peserta KB aktif mengalami penurunan, angka unmet need yang masih berkisar 7,81% dan jumlah KB bagi pria yang hanya berkisar 1,35% dari PUS yang ada.
- 2) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana . Dalam pelayanan KB MOW hanya dilayani oleh RSUD sedangkan untuk MOP hanya dilayani oleh PKBI Cabang Rembang.

d. Kebudayaan

Potensi permasalahan di bidang kebudayaan adalah:

- 1) Masih rendahnya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya daerah
- 2) Masih rendahnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian khususnya kesenian tradisional dan kegiatan tradisi budaya.

e. Kependudukan Catatan Sipil

Potensi permasalahan di bidang kependudukan dan catatan sipil adalah:

- 1) Belum optimalnya pengelolaan sistem administrasi kependudukan, akte dan pencacatan sipil, sehingga menyebabkan masih banyaknya penduduk yang belum memiliki akta kependudukan (KK, KTP dan Akte Kelahiran). Hal ini dikarenakan : Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan. Terbatasnya sarana dan prasarana berdampak pada kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan cacatan sipil dan selama ini sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) belum terwujud sesuai dengan tuntutan masyarakat.

f. Kepemudaan dan Olahraga

Potensi permasalahan di bidang kepemudaan dan olahraga adalah:

- 1) Belum optimalnya peran pemuda dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Rembang. Hal ini disebabkan oleh kapasitas pemuda belum sesuai harapan, sehingga keterlibatan pemuda dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Rembang masih rendah serta akses pemuda dalam setiap tahapan pembangunan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan atau belum sepenuhnya dilibatkan.
- 2) Belum optimalnya peran kelembagaan/organisasi kepemudaan meningkatkan kapasitas dan kualitas pemuda. Organisasi kepemudaan selama ini masih bersifat formalistis dan belum secara substansial organisasi kepemudaan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan kualitas generasi muda.

- 3) Belum optimalnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga serta kelembagaan/organisasi olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga. Hal ini dikarenakan pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi belum berjalan dengan baik dan berkelanjutan dan upaya untuk mensosialisasikan gerakan memasyarakatkan olahraga belum berjalan secara terus menerus dan berkelanjutan.

g. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Potensi permasalahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah:

- 1) Masih tingginya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, terutama tingkat pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan upah yang ditunjukkan dengan perbandingan IPG yang lebih kecil daripada IPM.
- 2) Masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini ditunjukkan dari data meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

h. Pariwisata

Potensi permasalahan di bidang pariwisata adalah :

- 1) Masih rendahnya jumlah kunjungan wisata, daya saing dan daya jual destinasi pariwisata pada pasar regional, nasional maupun global. Masih rendahnya lama tinggal dan jumlah pengeluaran belanja wisatawan. Hampir semua wisatawan yang mengunjungi obyek wisata yang telah dikelola pemerintah daerah, sebagian besar berasal dari lokal kabupaten.

i. Sosial

Potensi permasalahan di bidang sosial adalah:

- 1) Masih tingginya jumlah fakir miskin (angka Kemiskinan).
- 2) Masih belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, hal ini dikarenakan masih belum optimalnya penanganan PMKS. Jenis PMKS yang ditangani baru sebanyak 4 jenis PMKS dari 26 jenis PMKS.

j. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Potensi permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah:

- 1) Kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa belum terwujud secara optimal dan belum berkembangnya kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat desa, hal ini dapat diketahui masyarakat belum mampu untuk menggali potensi dan memecahkan masalah yang dihadapi.

k. Ketenagakerjaan

Potensi permasalahan di bidang ketenagakerjaan adalah:

- 1) Masih relatif tingginya jumlah pengangguran terbuka dan rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang ditandai dengan masih banyaknya pencari kerja yang hanya berpendidikan SMA.

l. Ketransmigrasian

Potensi permasalahan di bidang ketransmigrasian adalah:

- 1) Rendahnya jumlah transmigran yang diberangkatkan ke daerah tujuan transmigrasi dan terbatasnya kuota penempatan transmigran di daerah tujuan.

4. Kelompok Urusan Ekonomi

a. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Potensi permasalahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah adalah:

- 1) Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan koperasi dan UMUM terbukti dengan Kurang kuatnya kelembagaan koperasi aktif dan kondusifitas iklim usaha sehingga koperasi belum mampu memberikan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Belum optimalnya upaya pengembangan usaha kecil, pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, jaringan pemasaran, peningkatan mutu produk, pengembangan teknologi tepat guna, dan pengembangan sentra UMKM.
- 3) Masih adanya praktek-praktek monopoli dan oligopoli di tingkat pelaku usaha.

b. Industri

Potensi permasalahan di bidang industri adalah:

- 1) Menurunnya kinerja industri yang ada sehingga kurang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, sumberdaya lokal dan kurangnya kemitraan strategis, Masih kurangnya kapasitas IPTEKS IKM yang menghasilkan kinerja dan inovasi produk yang masih rendah, Kurang kuatnya struktur industri yang terlihat dari masih kurangnya keterkaitan antara industri hulu dan hilir dan masih belum banyaknya klaster industri dan kawasan industri yang mendukung pengembangan industri Kabupaten Rembang

c. Perdagangan

Potensi permasalahan di bidang perdagangan adalah:

- 1) Belum optimalnya perlindungan dan jaminan usaha perdagangan skala kecil dan menengah dalam menghadapi persaingan usaha di daerahnya (khususnya di daerah perdesaan maupun di arena pasar tradisional) dan meningkatnya persaingan global yaitu dengan berlakunya kesepakatan CAFTA (2010), NAFTA dan WTO.
- 2) Belum optimalnya perlindungan konsumen.

d. Penanaman Modal

Potensi permasalahan di bidang penanaman modal adalah:

- 1) Belum optimalnya pengembangan peluang investasi daerah yang mampu menarik investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Rembang dan Masih rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Rembang.
- 2) Masih lemahnya pengawasan terhadap ijin usaha yang diberikan.

e. Energi dan Sumber Daya Mineral

Potensi permasalahan di bidang energi dan sumber daya mineral adalah:

- 1) Belum optimalnya pengembangan pertambangan dan energy serta rendahnya pengelolaan usaha pertambangan rakyat yang ramah lingkungan, dampak lingkungan.
- 2) Kurangnya pemahaman akan peta daerah rawan bencana alam geologi.

f. Pertanian

Potensi permasalahan di bidang pertanian adalah:

- 1) Masih rendahnya penerapan teknologi pertanian mulai dari teknik budidaya sampai teknik pengolahan hasil, yang berdampak pada semakin menurunnya kualitas dan kuantitas komoditas pertanian/perkebunan/peternakan.
- 2) Masih lemahnya jaringan pemasaran produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan, ditandainya masih lemahnya daya tawar produk.

g. Ketahanan Pangan

Potensi permasalahan di bidang ketahanan pangan adalah:

- 1) Belum optimalnya distribusi bahan kebutuhan pokok pangan ke seluruh pelosok daerah.
- 2) Masih tingginya ketergantungan pada beras menyebabkan tekanan terhadap peningkatan produksi beras semakin tinggi pula. Tingkat konsumsi beras 92,87 kg/kap/tahun, sedangkan jagung tingkat konsumsinya 16,51 kg/kap/tahun.
- 3) Belum optimalnya perwujudan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, antara lain sistem distribusi yang kurang efisien untuk menjamin penyebaran ketersediaan antar waktu dan wilayah sehingga terjadi gejala kerawanan pangan.

h. Lingkungan Hidup

Potensi permasalahan di bidang lingkungan hidup adalah :

- 1) Belum optimalnya kinerja pengelolaan persampahan dan masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- 2) Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Semakin meningkatnya polusi udara, ditandai dengan meningkatnya jumlah kendaraan tidak laik dari hasil uji emisi kendaraan bermotor. Sementara potensi pencemaran terpantau dari belum memadainya IPAL untuk industri seperti contohnya usaha batik dan industri pengolahan ikan.

- 3) Belum optimalnya pengendalian dan konservasi sumber daya alam, ditandai masih tingginya areal lahan kritis.
- 4) Belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau. Secara kuantitatif ruang terbuka hijau Kabupaten Rembang telah mencapai 21 ha, namun pengelolaannya belum optimal sehingga dikhawatirkan capaiannya akan menurun.

i. Kehutanan

Potensi permasalahan di bidang kehutanan adalah:

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya hutan termasuk pengembangan hasil hutan non kayu, penanaman bawah tegakan (padi gogorancah, palawija, dan tanaman obat)
- 2) Masih rendahnya rehabilitasi hutan (termasuk hutan pantai) dan lahan dibanding tingkat kerusakannya, ditandai dengan masih tingginya luas lahan kritis yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam sistem tata air yang berkaitan dengan masalah banjir, kekeringan, tanah longsor, dan erosi pantai.

j. Kelautan dan Perikanan

Potensi permasalahan di bidang kelautan dan perikanan adalah :

- 1) Masih terbatasnya produksi perikanan tangkap (laut). Hal ini disebabkan terjadinya overfishing pada wilayah penangkapan I dan II, serta belum memadainya sarana prasarana pendaratan dan pelelangan ikan.
- 2) Belum optimalnya peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.
- 3) Meningkatnya ancaman abrasi pantai dan intrusi air laut. Hal ini disebabkan perubahan iklim global yang dapat mempengaruhi dinamika lautan, terutama pada pantai yang terbuka.

BAB V

VISI DAN MISI

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

A. VISI

Berdasarkan data kondisi umum daerah Kabupaten Rembang, analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah lima tahun kedepan dirumuskan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Rembang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”

Penjelasan unsur-unsur visi diatas adalah sebagai berikut:

1. **Rembang yang Maju**, Kabupaten Rembang memiliki sarana prasarana yang memadai dengan tingkat pelayanan publik yang memuaskan, didukung oleh sistem pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan demokratis, ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi.
2. **Rembang yang Mandiri**, adalah Kabupaten Rembang memiliki proporsi PAD yang semakin besar dalam pendapatan daerah dan surplus bahan pangan khususnya palawija dan produk peternakan dengan tetap mempertahankan swasembada padi dan jagung serta produk perikanan yang telah dicapai. Dari sektor industri ditunjukkan oleh pemakaian bahan baku lokal yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan baku impor dalam proses produksinya.
3. **Rembang yang Dinamis**, adalah Kabupaten Rembang mampu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi lokal, nasional dan global di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.
4. **Rembang yang Sejahtera**, adalah kondisi Kabupaten Rembang dengan masyarakat yang bahagia baik lahir maupun batin. Kebahagiaan lahir ditunjukkan oleh tingginya derajat kesehatan, tingginya tingkat pendapatan per kapita, kecukupan sandang, pangan dan papan (perumahan). Sedangkan kebahagiaan batin yang dimaksudkan adalah tingginya religiusitas atau penghayatan terhadap agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ketenteraman dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.

B. Misi

Dalam rangka mencapai visi seperti tersebut diatas, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

1. Memacu pertumbuhan investasi dalam rangka menghidupkan dan meningkatkan perkembangan sektor riil dan peningkatan kesempatan kerja.
2. Meningkatkan akses UMKM terhadap sumber permodalan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
3. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas.
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sumber-sumber pendapatan non konvensional dan tidak membebani masyarakat.
5. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi pendidikan sejak dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang menengah dan pendidikan tinggi yang menjadi kewenangan kabupaten.

6. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan, baik pada tingkatan pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
7. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan aparatur yang profesional, berbudi pekerti luhur dan agamis.
8. Meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya Rembang Sea-front City .
9. Mengimplementasikan pembangunan yang selalu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi lokal, nasional dan global.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan misi-misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Rembang.
2. Meningkatkan penyaluran modal bagi pelaku UMKM
3. Meningkatkan Iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka pengembangan wilayah pesisir.
5. Mengoptimalkan intensifikasi, efisiensi dan pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
6. Mengoptimalkan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, perbaikan sarana dan prasarana, penyediaan sarana penunjang pembelajaran, penyediaan beasiswa dan kerjasama dengan pengguna pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal.
7. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan dan lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan.
8. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di segala bidang kompeten, profesional, mandiri dan bermanfaat dengan di dasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrasturktur pedesaan dan wilayah cepat tumbuh
10. Mengembangkan tata kelola wilayah pesisir yang mampu menjadi pemicu pergerakan ekonomi daerah
11. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan serta proaktif dalam mengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi yang memadai

D. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan-tujuan yang ada.

Tujuan-1: Meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Rembang. Sasarannya adalah :

1. Penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi.
2. Promosi peluang investasi.
3. Terjaminnya keamanan berusaha.
4. Tersedianya infrastruktur yang memadai.
5. Tersedianya dukungan SDM yang memadai.

Tujuan-2: Meningkatkan penyaluran modal bagi pelaku UMKM. Sasarannya adalah :

1. Penyediaan informasi ketersediaan dana pada perbankan dan pelayanan non bank serta persyaratan pengajuan pinjaman.
2. Penyebaran sarana pelayanan bank dan lembaga keuangan non bank ke pelosok daerah.
3. Ketersediaan skim kredit sesuai dengan perilaku jenis usaha.
4. Adanya kemampuan UMKM untuk menyusun rencana bisnis yang baik.
5. Dimilikinya legalitas asset pelaku usaha sebagai jaminan kredit.

Tujuan-3: Meningkatkan Iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM. Sasarannya adalah :

1. Jaminan keamanan oleh Pemda.
2. Ketersediaan infrastruktur yang memadai.
3. Penyebaran sarana perbankan.

Tujuan-4: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pengelolaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikulura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sasarannya adalah:

1. Mudah nya akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
2. Meningkatnya kemapuan petenai dalam pengelolaan usaha.
3. Tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian.

Tujuan-5: Mengoptimalkan intensifikasi, efisiensi dan pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
2. Meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah.
3. Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membani masyarakat

Tujuan-6: Mengoptimalkan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, perbaikan sarana dan prasarana, penyediaan sarana penunjang pembelajaran, penyediaan beasiswa dan kerjasama dengan pengguna pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal. Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.
2. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat profesi.
3. Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan.
4. Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan.
5. Tersedianya beasiswa bagi penduduk miskin.
6. Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan.

Tujuan-7: Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan dan lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan. Sasarannya adalah :

1. Tersedianya tenaga medis yang memadai.
2. Tersedianya obat-obatan yang memadai.
3. Tersedianya peralatan medis yang memadai.
4. Meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan.
5. Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan.
6. Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Tujuan-8: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di segala bidang kompeten, profesional, mandiri dan bermanfaat dengan di dasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasarannya adalah :

1. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.
2. Meningkatkan sarana peribadatan dan pendidikan agama.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat.

Tujuan-9: Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrasturktur pedesaan dan wilayah cepat tumbuh. Sasarannya adalah :

1. Meningkatkan kualitas prasarana jalan dan jembatan.
2. Meningkatkan kualitas saluran irigasi.
3. Meningkatkan kualitas saluran drainase.
4. Terbangunnya jalan poros desa dan kecamatan.

Tujuan-10: Mengembangkan tata kelola wilayah pesisir yang mampu menjadi pemicu pergerakan ekonomi daerah. Sasarannya adalah :

1. Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya *sea front city*.
2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.
3. Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan.
4. Terwujudnya kawasan wisata bahari.

Tujuan-11: Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan dan proaktif dalam mengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi yang memadai. Sasarannya adalah :

1. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance*.
2. Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien.
3. Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan.
4. Responsif terhadap perkembangan situasi.
5. Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional.
6. Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis.

E. Tahapan Pembangunan Kabupaten Rembang 2010 – 2015

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Rembang tahun 2010 – 2015 yaitu “Terwujudnya Rembang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”, telah ditetapkan 11 (sebelas) rumusan tujuan sebagai perincian atas visi sebagai ultimate goal. Untuk itu perlu dirumuskan pentahapan pembangunan yang dapat dipergunakan sebagai sasaran antara (milestone) dalam pencapaian visi pembangunan Kabupaten Rembang.

Penyusunan tahapan pembangunan tersebut merupakan perumusan prioritas pencapaian tujuan, yang memiliki arti bahwa tujuan tersebut diupayakan dapat diselesaikan pada tahap yang bersangkutan, serta untuk menunjukkan pemusatan perhatian pembangunan daerah, agar mendapatkan dukungan segenap *stakeholder* pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan yang lain. Tahapan pembangunan tersebut, dibagi menjadi tiga (3) tahap sebagai berikut :

1. Tahap I Tahun 2010-2011 Penguatan Kerangka Dasar Pembangunan Daerah melalui peningkatan SDM Aparatur, Pendidikan dan Kesehatan masyarakat serta kualitas infrastruktur. Pada tahap ini diprioritaskan pelaksanaan 4 (empat) tujuan, sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, perbaikan sarana dan prasarana, penyediaan sarana penunjang pembelajaran, penyediaan beasiswa dan kerjasama dengan pengguna pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal.

- b. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan dan lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan.
- c. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur perdesaan dan wilayah cepat tumbuh
- d. Mengembangkan tata kelola wilayah pesisir yang mampu menjadi pemicu pergerakan ekonomi daerah

2. Tahap II Tahun 2012-2013 Akselerasi Pertumbuhan Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Akses Modal UMKM, Pertumbuhan investasi, PAD. Pada tahap ini diprioritaskan pelaksanaan 5 (lima) tujuan, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Rembang.
- b. Meningkatkan penyaluran modal bagi pelaku UMKM
- c. Meningkatkan Iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka pengembangan wilayah pesisir.
- e. Mengoptimalkan intensifikasi, efisiensi dan pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

3. Tahap III Tahun 2014-2015 Tahap Perwujudan Masyarakat Rembang yang Sejahtera, Mandiri, Maju, dan Dinamis. Pada tahap ini diprioritaskan pelaksanaan 2 (dua) tujuan, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di segala bidang kompetensi, profesional, mandiri dan bermanfaat dengan di dasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan serta proaktif dalam mengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi yang memadai

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dengan berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Rembang 2005-2025, memasuki tahap pelaksanaan pembangunan lima tahun kedua periode 2010-2015, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dijabarkan sebagai berikut:

A. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari RPJP Daerah Kabupaten Rembang 2005-2025 tahap II. Dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, maka arah kebijakan pembangunan lima tahun kedepan guna mencapai tujuan sebagaimana tertuang dalam visi dan misi RPJM Daerah 2010-2015 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang Berkualitas.
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Memadai.
4. Mewujudkan Kehidupan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
5. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

B. Strategi

Adapun strategi untuk masing-masing arah kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang Berkualitas

- a. Peningkatan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agamanya.
 - 1) Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.
 - 2) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.
 - 3) Pengembangan sikap toleransi antar umat beragama.
- b. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan tatakelola dan pencitraan publik pendidikan.
 - 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang dititikberatkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 - 2) Peningkatan mutu relevansi pendidikan, sarana dan prasarana yang dititikberatkan pada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 - 3) Peningkatan tata kelola dan pencitraan publik pendidikan terutama pendidikan menengah.
 - 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal untuk mencapai rasio siswa SMK : SMA 60:40.
 - 5) Pendirian pendidikan tinggi.
 - 6) Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
- c. Peningkatan kesehatan diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM.
 - 1) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta ketersediaan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan pelayanan rujukan.
 - 2) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak.
 - 3) Peningkatan peran promosi dan kelembagaan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
 - 4) Pengembangan sistem jaminan kesehatan daerah.
 - 5) Peningkatan jumlah dan jenis tenaga kesehatan.
 - 6) Peningkatan gizi pada balita, remaja, ibu hamil dan Wanita Usia Subur (WUS).
 - 7) Penurunan angka kesakitan dan angka kematian penyakit serta mencegah meluasnya Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana.

- d. Peningkatan frekuensi dan kualitas komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera (KIE, KB dan KS) melalui :
 - 1) Pelaksanaan KIE, KB dan KS pada pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 tahun.
 - 2) Pelayanan PIK remaja melalui berbagai media komunikasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan PIK-remaja .
 - 4) Pembinaan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif.
 - 5) Pelayanan peserta KB baru untuk menurunkan Unmet Need.
 - 6) Peningkatan kesetaraan KB bagi anggota Bina Keluarga Balita (BKB).
 - 7) Peningkatan kunjungan keluarga yang mempunyai balita pada kelompok BKB.
 - 8) Peningkatan kesertaan ber KB bagi anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.
 - 9) Peningkatan kualitas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah (PPKBD).
 - 10) Penyediaan alat, obat dan kontrasepsi.
 - 11) Pelaksanaan pelayanan sesuai SOP di klinik KB.
 - 12) Pelaksanaan pembaharuan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan.

- e. Peningkatan kualitas, kompetensi dan daya saing tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja, pengurangan pengangguran dan meningkatkan kualitas keharmonisan hubungan industrial.
 - 1) Pemantapan sistem informasi ketenagakerjaan.
 - 2) Pengembangan kualitas, kompetensi daya saing tenaga kerja.
 - 3) Pengembangan produktifitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja.
 - 4) Peningkatan perlindungan pekerja.
 - 5) Pengembangan kualitas hubungan industrial.
 - 6) Penurunan angka pengangguran.

- f. Peningkatan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - 1) Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS.
 - 2) Penguatan sistem dan kelembagaan perlindungan sosial dan penanganan korban bencana.
 - 3) Pengembangan rasa kesetiakawanan dan jiwa gotong royong dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

- g. Peningkatan minat baca masyarakat, kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak/karya rekam dan pengembangan sarana/prasarana perpustakaan.
 - 1) Peningkatan minat baca masyarakat melalui peningkatan pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan sekolah dan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan sekolah dan masyarakat.

- h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 1) Pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak yang melapor pada unit pengaduan.
 - 2) Pelayanan kesehatan korban kekerasan perempuan dan anak oleh tenaga kesehatan terlatih di RS.
 - 3) Pelayanan pemulangan bagi korban kekerasan bagi perempuan dan anak oleh petugas/relawan yang terlatih di unit pelayanan terpadu.
 - 4) Pelayanan bimbingan rohani korban kekerasan bagi perempuan dan anak.
 - 5) fasilitasi kepada korban kekerasan bagi perempuan dan anak dalam proses penegakan bantuan hukum.
 - 6) Penyediaan sarana dan prasarana lembaga pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak (Posyandu) sehingga cakupannya meningkatkan kualitas dan kuantitas.
 - 7) Pembentukan kelompok kerja/focal point di setiap SKPD yang ada.

- 8) Penyediaan sarana dan prasarana Forum Anak Rembang (FAR).
- i. Pengembangan dan pembangunan jati diri bangsa untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang terbuka dan berakar pada aktualisasi nilai-nilai budaya setempat.
 - 1) Peningkatan wawasan kebangsaan.
 - 2) Peningkatan kualitas masyarakat yang terlatih dan berpartisipasi aktif, kreatif dan mandiri untuk mewujudkan situasi yang kondusif bagi pembangunan.
- j. Penurunan jumlah penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses kualitas hidup berbasis keluarga.
 - 1) Penyelenggaraan musrenbang perdesaan/kelurahan.
 - 2) Peningkatan peran serta dan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam proses pembangunan di desa/kelurahan.
 - 3) Peningkatan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam mewujudkan sarana dan prasarana dasar di desa/kelurahan.
 - 4) Penumbuhan semangat gotong royong masyarakat.
 - 5) Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok usaha ekonomi produktif di perdesaan.
 - 6) Peningkatan kemandirian desa melalui pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan bagi UED-SP serta pengembangan sarana dan prasarana pasar desa dan BUMDes.
 - 7) Penyediaan data dan informasi tentang status dan katagori (profil desa/kelurahan) di Desa/Kelurahan.
 - 8) Fasilitasi pengembangan SDA dengan menggunakan TTG di Desa/Kelurahan.
- k. Peningkatan kualitas Pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif yang memiliki karakter kebangsaan (nation building) serta memiliki wawasan kebangsaan dan berkepribadian bangsa Indonesia dan peningkatan kualitas olahraga untuk menciptakan SDM suportif dan berprestasi.
 - 1) Pengembangan kompetensi dan kemandirian generasi muda.
 - 2) Pengembangan jiwa kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi generasi muda.
 - 3) Pengembangan prestasi olahraga secara berjenjang dengan titik berat pada cabang olahraga unggulan.
 - 4) Peningkatan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan.
 - 5) peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga.
- l. Pelestarian nilai-nilai budaya yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat.
 - 1) Optimalisasi Penanaman nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat, khususnya generasi muda.
 - 2) Pengembangan dan pelestarian budaya lokal dan tradisional.
 - 3) pengembangan publikasi, sosialisasi dan pagelaran apresiasi seni budaya.
 - 4) penggalan nilai-nilai budaya yang menumbuhkan kreatifitas masyarakat.
- m. Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dan meningkatkan jumlah transmigran.
 - 1) Pengembangan kualitas penyelenggaraan transmigrasi secara umum.
 - 2) Peningkatan jumlah Transmigran baik fasilitasi pemerintah maupun swakarsa mandiri.

2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing

- a. Pemantapan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan struktur perekonomian daerah berbasis sektor primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier.
 - 1) Peningkatan keterkaitan sektor primer dengan sektor sekunder dan sektor tersier berbasis agrobisnis.
 - 2) Peningkatan usaha sektor primer, sekunder dan tersier.
- b. Pengembangan agrobisnis, melalui pengembangan dan penguatan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar.
 - 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas serta menjamin kontinuitas produk pertanian dalam rangka pemenuhan pasar dan ketahanan pangan.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana pertanian dan perdesaan.
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan.
 - 4) Optimalisasi pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
 - 5) Pengembangan agrobisnis berbasis keunggulan komparative dan competitive.
 - 6) Penguatan kemitraan jejaring pasar produk pertanian.
- c. Pengembangan sistem informasi pertanian dan deseminasi inovasi teknologi guna mendukung pengembangan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
 - 1) Pengembangan pasar produk pertanian.
 - 2) Pengembangan sistem informasi produksi, distribusi dan informasi pasar.
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mendapatkan nilai tambah produk pertanian.
 - 4) Pengembangan usaha *off farm* untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
- d. Peningkatan kemampuan kapasitas SDM pertanian dalam peningkatan produktivitas pertanian.
 - 1) Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya.
 - 2) Pengembangan sarana dan prasarana penyuluh serta SDM.
- e. Pemantapan ketersediaan dan cadangan pangan yang memenuhi kualitas, kuantitas dan kontinuitas bagi masyarakat serta diversifikasi produk pangan.
 - 1) Peningkatan ketersediaan pangan yang aman dan halal, serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.
 - 2) Pemantapan keragaman (diversifikasi) baik produksi maupun konsumsi pangan yang berbasis sumberdaya lokal.
 - 3) Terwujudnya kelembagaan pangan dalam mendukung ketersediaan dan cadangan pangan
 - 4) Peningkatan infrastruktur ketersediaan dan ketahanan pangan di daerah.
- f. Penguatan Struktur Industri yang diarahkan pada pengembangan sektor agroindustri berbasis industri kecil dan menengah melalui kemitraan yang sehat dengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai leading sektor dalam perekonomian Kabupaten Rembang.
 - 1) Penguatan klaster industri berbasis kekayaan alam daerah .
 - 2) Penguatan kemitraan usaha- usaha ekonomi lokal dengan usaha agro industri
- g. Optimalisasi perdagangan melalui peningkatan sarana prasarana perdagangan, sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau dan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.
 - 1) Pengembangan kapasitas kualitas sarana prasarana pasar, pengawasan peralatan perdagangan dan tersedianya sistem informasi pasar.
 - 2) Pengembangan jaringan distribusi dan akses perdagangan ke luar daerah baik regional, nasional maupun internasional.

- h. Pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.
 - 1) Pengembangan iklim usaha kondusif bagi koperasi dan UMKM dalam jaringan pasar produk untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
 - 2) Pengembangan kelembagaan dan SDM usaha skala mikro untuk peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
 - 3) Pengembangan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru melalui UMKM yang menampung lapangan kerja baru
- i. Optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran sertanya dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM
 - 1) Pengembangan intermediasi perbankan dalam penyediaan kredit untuk koperasi dan UMKM
 - 2) Pengembangan fasilitasi permodalan dan akses ke sumberdaya permodalan non perbankan untuk koperasi dan UMKM.
 - 3) Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit terhadap koperasi dan UMKM.
- j. Peningkatan realisasi penanaman modal diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi yang semakin kondusif dengan mendorong terwujudnya kepercayaan dunia usaha melalui penguatan dan penyederhanaan pelayanan penanaman modal, mengembangkan kebijakan pro penanaman modal, peningkatan infrastruktur ekonomi yang baik dan menekan *ekonomi biaya tinggi*.
 - 1) Optimalisasi pelayanan perijinan investasi satu pintu.
 - 2) Peningkatan promosi investasi berbasis potensi sumberdaya daerah.
 - 3) Peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi.
- k. Pengembangan Pariwisata yang diarahkan melalui peningkatan obyek wisata, pelestarian peninggalan budaya, tradisi, serta kesenian, dalam rangka membentuk karakteristik budaya masyarakat serta daya tarik kunjungan wisata.
 - 1) Pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata berbasis keragaman budaya, pesona alam dan keunikan lokal.
 - 2) Peningkatan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi atas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.
 - 3) Pembangunan jejaring promosi pariwisata ditingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
 - 4) Peningkatan kualitas produk pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, pengembangan kelembagaan, dan sarana-prasarana pendukung.
 - 5) Pengembangan kawasan wisata bahari terpadu untuk menunjang pengembangan *Sea-front city* dan wisata kota kuno (*heritage tourism*).

3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Memadai.

- a. Peningkatan pelayanan transportasi untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan, pemerataan dan keberlanjutan pembangunan daerah.
 - 1) Pengembangan jaringan jalan dan jembatan.
 - 2) Pengembangan interkoneksi antar kawasan.
 - 3) Peningkatan kualitas, kuantitas dan kapasitas jalan.
 - 4) Peningkatan pelayanan angkutan umum dan prasarana dan sarana terminal.
 - 5) Peningkatan pembangunan pelabuhan dan pemantapan manajemen kepelabuhanan.
 - 6) Pembangunan sarana transportasi antar dan intermoda.

- b. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan di dalam dan antar kawasan serta antar kepentingan melalui konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air. Pengembangan konservasi sumberdaya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.
 - 1) Peningkatan konservasi sumberdaya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.
 - 2) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku.
 - 3) Pengembangan fungsi prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi.
 - 4) Peningkatan pengendalian erosi melalui tahap pra bencana, darurat dan pasca bencana serta peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
 - 5) Penataan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air.
 - 6) Pembangunan embung, bendung dan PPST untuk mendukung ketersediaan air baku.
 - 7) Peningkatan pengendalian abrasi melalui tahap pra bencana, darurat dan pasca bencana serta peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), muara dan pesisir.
 - 8) Pembangunan reservoir di wilayah pesisir untuk mendukung ketersediaan air baku
- c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah dan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, aman, nyaman dan lestari sesuai dengan peruntukan dan fungsinya melalui menumbuhkembangkan potensi pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat, kredit mikro perumahan serta pemerataan pembangunan prasarana sarana dasar permukiman.
 - 1) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni pada perkotaan dan perdesaan.
 - 2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman.
 - 3) Stimulan pembangunan perumahan dan kredit mikro perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - 4) Peningkatan pengembang dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - 5) Penataan bangunan gedung/rumah negara.
 - 6) Pengembangan dan deseminasi teknologi tepat guna bidang permukiman bagi pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat.
 - 7) Pengembangan kelembagaan badan penyelenggara dan pelaksana Kasiba dan Lisiba
- d. Perwujudan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah.
 - 1) Pengembangan jaringan transportasi yang menghubungkan kawasan perkotaan dan perdesaan.
 - 2) Pengembangan infrastruktur pertanian, perikanan kelautan, pelabuhan, telekomunikasi dan informasi.
 - 3) Pembangunan prasarana kawasan strategis.
 - 4) Pembangunan kawasan industri.
 - 5) Pengembangan kelembagaan pengembangan kawasan strategis dan kawasan industri.
 - 6) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
 - 7) Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan pembangunan sektoral
 - 8) Penyusunan peraturan zonasi tata ruang wilayah
 - 9) Pengembangan kelembagaan tata ruang daerah.
 - 10) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang daerah.

- 11) Pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
 - 12) Penetapan RTRW pesisir dan pulau-pulau kecil.
- e. Perwujudan kawasan agropolitan sebagai pusat agrobisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui percepatan pembangunan prasarana sarana, pengembangan kelembagaan dan jejaring pemasarannya.
 - 1) Identifikasi kawasan agropolitan.
 - 2) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana kawasan agropolitan.
 - 3) Peningkatan usaha agrobisnis.
 - 4) Pengembangan kelembagaan pengembangan kawasan agropolitan.
 - 5) Pengembangan jejaring pemasaran agropolitan.
 - f. Perwujudan kawasan agroforestry sebagai pusat agrobisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui percepatan pembangunan prasarana sarana, pengembangan kelembagaan dan jejaring pemasarannya.

4. Mewujudkan Kehidupan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

- a. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kompetensi aparatur dan pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip *good and clean governance*.
 - 1) Profesionalisme aparatur dan peningkatan pelayanan publik.
 - 2) Pemantapan standar pelayanan minimal dalam pelayanan publik.
 - 3) Penguatan fasilitasi kelembagaan pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan dalam pelayanan publik.
 - 4) Peningkatan kelembagaan partisipasi masyarakat ditingkat desa/kelurahan.
- b. Peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kemandirian keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efisiensi, dan efektif.
 - 1) Pengembangan manajemen pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah yang mengarah pada efisiensi dan efektif.
 - 2) Optimalisasi penerimaan sumber-sumber keuangan daerah.
 - 3) Peningkatan alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan diluar PAD.
- c. Perwujudan masyarakat yang demokratis melalui peningkatan peran partai politik, lembaga perwakilan rakyat dan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan.
 - 1) Penguatan peran partai politik dan lembaga perwakilan rakyat.
 - 2) Peningkatan pendidikan politik masyarakat dalam mewujudkan partisipasi politik yang tinggi.
- d. Peningkatan Pembangunan komunikasi dan informasi melalui perwujudan masyarakat sadar informasi dan terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan.
 - 1) Peningkatan kesadaran terhadap kebutuhan informasi.
 - 2) Pelayanan informasi multi media.
 - 3) Perluasan jaringan sarana dan prasarana informasi seluruh kecamatan.
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat untuk mewujudkan suasana kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.
 - 1) Peningkatan sistem dan kelembagaan keamanan dan ketertiban lingkungan.
 - 2) Pengembangan kerjasama antar lembaga penegak hukum.
 - 3) Pemantapan Profesionalisme aparat penegak.
 - 4) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

- f. Peningkatan Sistem Administrasi Kearsipan secara efisien melalui pengelolaan arsip secara profesional dengan didukung teknologi informasi yang memadai.
 - 1) Peningkatan Pengelolaan dokumen/arsip daerah.
 - 2) Optimalisasi kualitas operator penyelenggaraan pelayanan kearsipan.
- g. Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan keterbukaan informasi publik yang memadai melalui pengembangan sarana dan komunikasi modern berbasis teknologi informasi dan *website*.
 - 1) Peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika.
 - 2) Peningkatan kapabilitas lembaga penyiaran dalam menyusun program siaran sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program.
 - 3) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam keterbukaan informasi publik.

5. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

- a. Pendayagunaan sumberdaya alam terbarukan melalui rehabilitasi dan pemulihan daya dukung lingkungan.
 - 1) Pemanfaatan SDA terbarukan sesuai dengan potensi dan daya dukungnya.
 - 2) Pencegahan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA terbarukan.
 - 3) Rehabilitasi dan pemulihan terhadap kerusakan daya dukung SDA terbarukan.
 - 4) Penertiban dan Penegakan hukum bagi perlindungan SDA yang terbarukan.
 - 5) Penerapan teknologi ramah lingkungan bagi pengelolaan SDA yang terbarukan.
- b. Pendayagunaan sumberdaya alam tak terbarukan dengan memperhatikan kelestarian daya dukung lingkungan hidup serta memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
 - 1) Pemanfaatan SDA tak terbarukan sesuai dengan potensi dan daya dukungnya.
 - 2) Pencegahan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA tak terbarukan.
 - 3) Rehabilitasi dan pemulihan terhadap kerusakan daya dukung SDA tak terbarukan.
 - 4) Penertiban dan Penegakan hukum bagi perlindungan SDA yang tak terbarukan
 - 5) Penerapan teknologi ramah lingkungan bagi pengelolaan SDA yang tak terbarukan.
 - 6) Pemberdayaan masyarakat lokal sekitar pengusahaan kawasan sumber daya alam tak terbarukan.
 - 7) Pemanfaatan air tanah dengan memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan.
- c. Peningkatan kualitas penanganan bencana dan pengendalian kerusakan lingkungan melalui berbagai upaya mitigasi bencana dan konservasi lahan dan air.
 - 1) Peningkatan kemampuan penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana.
 - 2) Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan bencana di kawasan rawan bencana.
 - 3) Pelibatan peran aktif dan keswadayaan masyarakat dalam penanganan bencana alam secara mandiri.
 - 4) Peningkatan upaya Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam setiap aktivitas pembangunan.
 - 5) Penanganan lahan kritis melalui rehabilitasi dan konservasi lahan.
 - 6) Peningkatan pengembangan hutan rakyat dan rehabilitasi hutan mangrove serta penyusunan regulasi tata bangunan di kawasan sempadan pantai dan sungai.

- d. Pengembangan energi melalui diversifikasi energi utama maupun energi terbarukan untuk pemerataan dan pemenuhan distribusi energi
 - 1) Peningkatan rasio elektrifikasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat dan industri.
 - 3) Pengembangan upaya penyediaan dan pemerataan energi alternatif yang ramah lingkungan.
 - 4) Peningkatan teknologi energi terbarukan yang ramah lingkungan.
- e. Peningkatan nilai tambah dan manfaat usaha pertambangan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.
 - 1) Peningkatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral serta menerapkan *good mining practice* di lokasi tambang yang sudah ada dengan selalu memperhatikan aspek sosial dan kelestarian lingkungan hidup.
 - 2) Pengembangan upaya peningkatan diversifikasi usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
 - 3) Penegakan regulasi tentang pengelolaan usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
 - 4) Penerapan teknologi usaha pertambangan yang ramah lingkungan.
- f. Pengelolaan hutan secara lestari melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan.
 - 1) Peningkatan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat sekitar hutan.
 - 2) Pengembangan Jaringan Kerja Kemitraan antara pengelola hutan negara dan masyarakat lokal sekitar.
 - 3) Peningkatan upaya pengendalian kerusakan hutan baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia.
 - 4) Peningkatan partisipasi dan upaya penyadaran masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian hutan.
 - 5) Peningkatan manajemen pengelolaan hutan yang semakin profesional.
- g. Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut yang berbasis ekosistem dan kelestarian daya dukung lingkungan.
 - 1) Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dengan fokus pada peningkatan ekstensifikasi (ekspansi *fishing ground*) dan pengembangan budidaya perikanan sesuai dengan daya dukung lingkungan.
 - 2) Peningkatan upaya penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dengan teknologi kelautan perikanan yang ramah lingkungan hidup.
 - 3) Peningkatan upaya diversifikasi usaha kelautan dan perikanan dengan memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan.
 - 4) Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan pesisir dan laut, serta pengembangan kluster pengolahan perikanan.
 - 5) Peningkatan kualitas SDM di bidang kelautan dan perikanan dalam pengelolaan pesisir dan laut.
 - 6) Peningkatan perbaikan kondisi wilayah pesisir dan laut dengan fokus pada pengembangan kawasan konservasi sumberdaya pesisir dan zona perlindungan laut.
 - 7) Penetapan kawasan minapolitan sebagai upaya pengembangan potensi kelautan dan perikanan
 - 8) Penetapan kawasan budidaya rumput laut dalam rangka pengembangan perikanan budidaya untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan.
 - 9) Penetapan kawasan sentra pengolahan ikan dalam rangka pengembangan kluster pengolahan ikan.
 - 10) Peningkatan daya saing produk perikanan dan kelautan melalui diversifikasi produk dengan teknologi modern.

- 11) Peningkatan promosi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan melalui penguatan jaringan pemasaran produk yang ramah lingkungan.
 - 12) Penegakan regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- h. Optimalisasi tata guna lahan melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan, penegakkan hukum pertanahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka tertib administrasi pertanahan untuk mempertahankan daya dukung lingkungan
- 1) Peningkatan teknologi sistem pelayanan administrasi pertanahan dan kerjasama multi pihak dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan administrasi pertanahan.
 - 2) Peningkatan media sosialisasi produk hukum dan administrasi pertanahan baik melalui media cetak maupun elektronik.
 - 3) Pengembangan kapasitas masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan dalam mempertahankan daya dukung lingkungan.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

A. Kebijakan Umum

Berdasarkan rumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan, pendekatan implementasi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang akan dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar kebijakan umum pembangunan daerah meliputi :

1. Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Publik Yang Representatif dan Komprehensif

- Fasilitasi Peningkatan jalan poros nasional dan propinsi untuk memudahkan akses hingga pedesaan.
- Optimalisasi jalan poros antar desa dengan lapis hotmix atau cor beton.
- Peningkatan dan penataan pemukiman.
- Tercukupinya air bersih dan irigasi di seluruh wilayah Kabupaten Rembang hingga 2015.
- Program Pembangunan Sungai Terpadu (PPST).
- Pembangunan embung-embung besar representatif untuk mencukupi kebutuhan irigasi & air bersih, diantaranya : 1) embung Trenggulun, 2) embung Gedari, 3) embung Kaliombo dan 4) embung Rowo Bolodewo dan embung Tlogo.
- Penyelesaian Pelabuhan Umum Nasional (PUN) beserta kawasan industri, serta dermaga TPI Sarang-Kragan-Rembang.
- Peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN).
- Peningkatan sarana dan prasarana layanan persampahan, drainase dan air limbah.
- Pengembangan terminal induk angkutan darat dan sub-sub terminal.

2. Pendidikan Gratis dan Bermutu

- Optimalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Meningkatkan kesejahteraan Guru dan peningkatan sarana prasarana pendidikan formal dan non formal sesuai kemampuan daerah.
- Pelaksanaan sekolah gratis untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) baik negeri maupun swasta.
- Peningkatan sekolah gratis untuk siswa SMA, SMK, MA, MAK baik negeri maupun swasta sampai kelas XII bagi siswa tidak mampu .
- Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi hingga jenjang pendidikan tinggi.
- Fasilitasi Pendirian politeknik kelautan dan perikanan.

3. Kesehatan Gratis Dan Berkualitas

- Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di Rumah sakit dr. R. Sutrasno Rembang (BLUD) untuk rawat jalan dan rawat inap kelas III serta rawat jalan dan rawat inap kelas II di seluruh Puskesmas di wilayah Rembang melalui program JKRS (Jaminan Kesehatan Rembang Sehat) dan Rujukan PPK III (rumah sakit provinsi) yang bekerja sama dengan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap.
- Peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas melalui tercukupinya jumlah SDM, rasio pasien dan tenaga kesehatan yang ideal dan jaminan ketersediaan obat serta sarana dan prasarana kesehatan yang lebih lengkap.
- Revitalisasi Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap di seluruh Kabupaten Rembang.
- Menjamin ketersediaan anggaran untuk menyelenggarakan program kesehatan gratis termasuk obat-obatan dan sarana prasarana pendukungnya (JKRS, ASKES dan Jamkesda Provinsi).
- Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan.

4. Pengembangan Ekonomi Rakyat

- Pengembangan infrastruktur pertanian (jalan usaha tani, jalan produksi, JIDES, JITUT, dan dam Parit).
- Pengembangan pertanian organik (*Rembang Go Organic*).
- Penyediaan sarana produksi dan peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan
- Pengembangan program dana talangan untuk pertanian dan perikanan.
- Peningkatan pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan (promosi hasil produksi dan fasilitasi temu usaha).
- Memajukan klaster-klaster industri, terutama industri produk khas Rembang seperti batik Lasem, bordir, batu bata dan genteng, penggaraman, perikanan, industri perkayuan dan lain-lain.
- Pembukaan kawasan industri terpadu (industri kimia, power plant, pabrik semen) menunjang kawasan pelabuhan umum nasional untuk menjamin peningkatan kesempatan dan peluang kerja.
- Optimalisasi usaha/industri bidang pertambangan (kapur, galian c) dengan mendatangkan investasi yang mendukung bidang pertambangan.
- Pengembangan industri pariwisata terpadu (jalan wisata bahari, pulau-pulau kecil, BBS I & BBS II, KBT) dan pemeliharaan cagar budaya Kabupaten Rembang.
- Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.
- Revitalisasi koperasi unit desa bidang organisasi, management dan usaha
- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kelautan dan perikanan

B. Program Pembangunan Daerah Masing-Masing Urusan.

Program pembangunan Daerah dalam RPJM Daerah Kabupaten Rembang 2010-2015 dijabarkan ke dalam kewenangan urusan wajib dan kewenangan urusan pilihan sebagai berikut:

1. Kelompok Urusan Pemerintahan

a. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a) Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, perbatasan dan wilayah terpencil.
- b) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban, penyakit masyarakat (Pekat) dalam masyarakat.
- c) Program pengembangan wawasan kebangsaan dalam masyarakat, terutama untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda.
- d) Program peningkatan kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat dalam rangka pengembangan pemahaman tentang dasar negara, wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa.
- e) Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan kamtibmas, mengurangi pekat dan tanggap bencana.
- f) Program peningkatan pendidikan politik masyarakat, untuk tokoh masyarakat, penduduk perdesaan, kaum perempuan dan pemilih pemula.
- g) Program peningkatan kapasitas dan kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Rakyat Terlatih (Ratih) dan Tagana dalam penanganan gangguan kamtibmas, penyakit masyarakat (Pekat) dan penanganan bencana.

b. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

- a) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
- b) Program Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- c) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan KDH.
- d) Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah .
- e) Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa .
- f) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- g) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h) Peningkatan perencanaan penerapan SPM untuk urusan wajib.
- i) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan.
- j) Program Penanganan pengaduan masyarakat.
- k) Program Peningkatan Pelayanan kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.

- l) Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum.
- m) Program Peningkatan fasilitas pelayanan publik.
- n) Program Pembinaan dan pengembangan tata laksana.
- o) Program Pembinaan dan pengembangan kelembagaan.
- p) Program Pengembangan budaya kerja aparatur.
- q) Program Peningkatan Kehumasan.
- r) Program peningkatan pemanfaatan persandian dan komunikasi.
- s) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- t) Program pemeliharaan kantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
- u) Program Pemantapan pengadaan barang dan jasa.
- v) Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi.

c. Perencanaan Pembangunan

- a) Pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan .
- b) Program penelitian dan pengembangan serta iptek.
- c) Perencanaan pembangunan daerah.
- d) Perencanaan pembangunan ekonomi.
- e) Perencanaan pembangunan sosial budaya.
- f) Kerjasama pembangunan.
- g) Pengembangan wilayah perbatasan.
- h) Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- i) Perencanaan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- j) Perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
- k) Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
- l) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
- m) Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan .

d. Statistik

- a) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

e. Kearsipan

- a) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
- b) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
- c) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.
- d) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

f. Keperpustakaan

- a) Program pengembangan budaya baca.
- b) Program pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan.
- c) Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan.

2. Kelompok Urusan Prasarana Wilayah

g. Pekerjaan Umum

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan (Bina Marga).

- a) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- b) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- c) Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan.
- d) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan.
- e) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
- f) Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan jembatan.

Bidang Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

- a) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
- b) Program Rehabilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan.

Bidang Sumber Daya Air

- a) Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.
- b) Program pengendalian Banjir dan penanganan pantai.
- c) Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

Bidang Air Minum / Air Baku

- a) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum.
- b) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
- c) Program Pengembangan SPAM Kota Rembang.

Bidang Air Limbah

- a) Program Pengembangan kinerja pengelolaan air limbah.
- b) Program pengembangan sanitasi dasar berbasis rumah tanggar dan masyarakat.

Bidang Persampahan

- a) Program peningkatan kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- b) Program Pengelolaan persampahan dari sumber timbulan sampah.
- c) Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan.

Bidang Perkotaan dan Perdesaan

- a) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- b) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

Bidang Pemukiman

- a) Program pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.

Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan

- a) Program pembinaan teknis bangunan dan gedung.
- b) Program penataan lingkungan permukiman perkotaan.
- c) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan dan gedung.

a. Perhubungan

- a) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dalam rangka mendukung konsep pengembangan sea front city.
- b) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan.
- c) Program peningkatan pelayanan angkutan.
- d) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
- e) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas.
- f) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
- g) Program peningkatan ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas.
- h) Program peningkatan ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran.

b. Perumahan

- a) Program pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.
- b) Program Pembangunan perumahan dan permukiman.

c. Penataan Ruang

- a) Program perencanaan tata ruang.
- b) Program pemanfaatan ruang.
- c) Program pengendalian pemanfaatan ruang.
- d) Program kerjasama perencanaan dan penataan dalam pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan.

d. Pertanahan

- a) Program pembangunan sistem pendaftaran tanah.
- b) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- c) Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

e. Komunikasi dan Informatika

- a) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.
- b) Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.
- c) Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi.
- d) Program penyusunan regulasi.

3. Kelompok Urusan Sosial Budaya

a. Pendidikan

- a) Program pendidikan anak usia dini.
- b) Program wajib belajar pendidikan dasar.
- c) Program pendidikan menengah.
- d) Program pendidikan non formal dan in formal
- e) Program pendidikan luar biasa dan pendidikan khusus.
- f) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- g) Program manajemen pelayanan pendidikan.

b. Kesehatan

- a) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
- b) Program perbaikan gizi masyarakat.
- c) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- d) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.
- e) Program pengembangan lingkungan sehat.
- f) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit.
- g) Program standarisasi pelayanan kesehatan.
- h) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin.
- i) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.
- j) Program obat dan perbekalan kesehatan.
- k) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
- l) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
- m) Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan.
- n) Program Pengawasan Obat dan Makanan.
- o) Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
- p) Program peningkatan kesehatan lansia.

c. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a) Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- b) Program Sarana dan Prasarana Pendukung Keluarga Berencana.
- c) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

d. Kebudayaan

- a) Program Pengembangan dan pengelolaan nilai, kekayaan dan keragaman Budaya.
- b) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
- c) Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

e. Kependudukan Catatan Sipil

- a) Program penataan administrasi kependudukan

f. Kepemudaan dan Olahraga

- a) Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda.
- b) Peningkatan peran serta kepemudaan.
- c) Pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- d) Pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga.
- e) Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga.
- f) Peningkatan sarana dan prasarana olah raga.

g. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Program peningkatan kualitas Hidup perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.
- b) Program Peningkatan Pemenuhan Hak-hak perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan.
- c) Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

h. Pariwisata

- a) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
- b) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- c) Program Pengembangan Kemitraan.

i. Sosial

- a) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
- b) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
- c) Program pembinaan anak terlantar.
- d) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.
- e) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

j. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a) Program penguatan kapasitas kelembagaan Masyarakat.
- b) Program Penanggulangan Kemiskinan.
- c) Program Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa.
- d) Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan.
- e) Program peningkatan Partisipasi Masyarakat.
- f) Program Pengelolaan Lingkungan Sosial.
- g) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan .

k. Ketenagakerjaan

- a) Program peningkatan kesempatan kerja.
- b) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- c) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

l. Ketransmigrasian

- a) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

4. Kelompok Urusan Ekonomi

a. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- a) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- b) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
- c) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
- d) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif.
- e) Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah.

b. Industri

- a) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
- b) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.
- c) Program Penataan Struktur Industri dan kawasan Industri.
- d) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
- e) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial.

c. Perdagangan

- a) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
- b) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.
- c) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

d. Penanaman Modal

- a) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi penanaman modal.
- b) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
- c) Program peningkatan prasarana dan sarana, penyiapan sumber daya bagi pengembangan penanaman modal.
- d) Program pembinaan dan fasilitasi dalam penanaman modal dalam rangka peningkatan dan pengembangan dunia usaha.

e. Energi dan Sumber Daya Mineral

- a) Program Peningkatan pengawasan dan pengendalian usaha bidang pertambangan dan ABT.
- b) Program pengawasan dan penertiban kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.
- c) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya mineral.
- d) Program pembinaan, pengembangan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan.
- e) Program Peningkatan Penyaluran penyediaan BBM bagi Masyarakat.
- f) Program Kerjasama Pertambangan dengan daerah sekitar.

f. Pertanian

- a) Program Peningkatan Kesejahteraan petani.
- b) Program pengembangan jaringan irigasi pertanian/perkebunan.
- c) Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan.
- d) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan.
- e) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
- f) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan.
- g) Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan.
- h) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
- i) Program peningkatan produksi hasil peternakan.
- j) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan.
- k) Program Peningkatan kapasitas kelembagaan petani.
- l) Program pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman.
- m) Program pengembangan agribisnis.
- n) Program pengembangan pertanian unggulan.

g. Ketahanan Pangan

- a) Program Peningkatan Ketahanan pangan (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan).

h. Lingkungan Hidup

- a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
- b) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- c) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- d) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.
- e) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- f) Program Peningkatan pengendalian polusi.

- g) Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan.
- h) Program pengendalian kebakaran hutan.
- i) Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- j) Program Penyedia dan Pengelolaan air baku.
- k) Program Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah.

i. Kehutanan

- a) Program Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan.
- b) Program rehabilitasi hutan dan lahan.
- c) Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan.
- d) Program Peningkatan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai.
- e) Program Pembinaan dan pengawasan industri primer hasil hutan.

j. Kelautan dan Perikanan

- a) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
- b) Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut.
- c) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.
- d) Program peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat.
- e) Program pengembangan perikanan tangkap.
- f) Program pengembangan budidaya perikanan.
- g) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
- h) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.
- i) Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan.
- j) Program peningkatan kapasitas SDM perikanan dan kelautan.
- k) Program Pengembangan Perencanaan, Informasi dan Statistik perikanan dan kelautan.
- l) Program kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan.

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam rangka memberikan kerangka sistematis terhadap pelaksanaan RPJM Daerah kabupaten Rembang 2010-2015, maka perlu disusun rencana indikatif program prioritas beserta kebutuhan penganggarnya sebagaimana penjabaran berikut:

A. PROGRAM INDIKATIF

Program indikatif disusun dengan mempertimbangkan urgensi pelaksanaan program terkait dengan pencapaian visi dan misi oleh setiap kewenangan urusan sebagai berikut:

1. Kelompok Urusan Pemerintahan

a. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a) Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, perbatasan dan wilayah terpencil.

- 1) Peningkatan kelembagaan kamtibmas di tingkat desa/kelurahan.
- 2) Revitalisasi kegiatan Siskamling.
- 3) Kerjasama antar desa di wilayah terpencil dan wilayah perbatasan dalam peningkatan kamtibmas.

b) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban, penyakit masyarakat (Pekat) dalam masyarakat.

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Siskamling di desa/kelurahan.
- 2) Bimbingan teknis tentang penanggulangan penyakit masyarakat (Pekat) bagi pengurus RT/RW dan aparat desa/kelurahan.
- 3) Bimbingan teknis tentang penyalahgunaan Napza bagi aparat desa/kelurahan dan tokoh masyarakat serta tokoh agama.

c) Program pengembangan wawasan kebangsaan dalam masyarakat, terutama untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda.

- 1) Pelatihan untuk pelatih (TOT) bagi toma, toga dan tokoh perempuan bagi peningkatan kesadaran politik.
- 2) Pelatihan untuk pelatih (TOT) bagi tokoh dan ormas kepemudaan untuk meningkatkan pendidikan politik bagi pemilih pemula.
- 3) Bintek bagi pengurus ormas dan LSM dalam meningkatkan kesadaran politik.

d) Program peningkatan kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat dalam rangka pengembangan pemahaman tentang dasar negara, wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa.

- 1) Pelatihan untuk pelatih (TOT) bagi pengurus ormas, LSM dan organisasi pemuda bagi peningkatan wawasan kebangsaan.
- 2) Bintek bagi pengurus partai politik, ormas dan LSM dalam meningkatkan pemahaman tentang dasar negara dan wawasan kebangsaan.
- 3) Penyelenggaraan forum dialog antar ormas, parpol dan LSM tentang wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa.

e) Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan kamtibmas, mengurangi pekat dan tanggap bencana.

- 1) Pelatihan untuk pelatih (TOT) bagi aparat desa/kelurahan dalam rangka peningkatan kelembagaan dalam rangka tanggap bencana.
- 2) Pelatihan untuk pelatih (TOT) bagi pengurus lembaga desa/kelurahan dalam rangka peningkatan tanggap bencana.
- 3) Bintek bagi pengurus lembaga desa/kelurahan dalam meningkatkan tanggap bencana.

- f) Program peningkatan pendidikan politik masyarakat, untuk tokoh masyarakat, penduduk perdesaan, kaum perempuan dan pemilih pemula.**
 - 1) Pelatihan untuk pelatih (TOT) bagi aparat desa/kelurahan dalam rangka peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan.
 - 2) Pelatihan pengurus lembaga desa/kelurahan dalam rangka pendidikan politik masyarakat.
- g) Program peningkatan kapasitas dan kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Rakyat Terlatih (Ratih) dan Tagana dalam penanganan gangguan kamtibmas, penyakit masyarakat (Pekat) dan penanganan bencana.**
 - 1) Peningkatan kapasitas bagi petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), Rakyat Terlatih (Ratih) dan Tagana dalam penanganan gangguan kamtibmas dan penanganan bencana.
 - 2) Bantuan peralatan bagi petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), Rakyat Terlatih (Ratih) dan Tagana dalam penanganan bencana.
 - 3) Fasilitasi bagi pembentukan kelembagaan Tagana di desa dan kelurahan.
 - 4) Fasilitasi bagi pembentukan forum kerjasama secara kelembagaan Tagana di tingkat kecamatan.
- b. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**
 - a) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**
 - 1) Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - 2) Sosialisasi Perundang-undangan dan Penyuluhan Hukum
 - 3) Rakor Aparat Penegak Hukum
 - 4) Diseminasi Rancangan
 - 5) Peningkatan JDI Hukum
 - b) Program Penanganan Pengaduan Masyarakat**
 - 1) Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah
 - c) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan KDH**
 - 1) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
 - 2) LKPJ Bupati
 - 3) LPPD Kabupaten Rembang
 - 4) LKPJ AMJ Bupati
 - 5) Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 6) Fasilitasi Penegakan Hukum dalam Pileg/Pilgub/ Pilkada/Pilkades
 - 7) Fasilitasi dan Koordinasi Kewilayahan
 - 8) Fasilitasi dan Koordinasi Pertanahan
 - 9) Bantuan Hibah ke KPU & Panwas Rembang
 - 10) Bantuan Fasilitasi Pilkades tingkat kecamatan
 - d) Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah**
 - 1) Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - 2) Fasilitasi asosiasi kerjasama pemerintah kabupaten.
 - e) Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa**
 - 1) Pengisian Perangkat Desa
 - 2) Fasilitasi peningkatan sumber daya Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa
 - 3) Penyusunan dan Konsultasi Publik Draft Raperda ttg Pemerintahan Desa
 - 4) Fasilitasi Pilkades
 - f) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**
 - 1) Fasilitasi bantuan dan Tunjangan Kades/Perangkat Desa
 - 2) Fasilitasi Bantuan Keuangan dari Pemprov ke Desa/Kelurahan
 - 3) Pendataan tanah kas desa
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan/Desa

- g) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
 - 1) Penyusunan sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- h) Peningkatan perencanaan penerapan SPM untuk urusan wajib**
 - 1) Penyusunan target capaian SPM untuk urusan wajib bagi Kabupaten Rembang.
- i) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan**
 - 1) Evaluasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Setda
 - 2) Evaluasi dan pelaporan kinerja program pembangunan
 - 3) Meningkatkan produktifitas aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan publik
- j) Program Penanganan pengaduan masyarakat**
 - 1) Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah
- k) Program Peningkatan Pelayanan kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah**
 - 1) Fasilitas penegakkan hukum dialog / audiensi dengan tokoh - tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial
 - 2) Fasilitas Pilkades
 - 3) Penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
 - 4) DESK pileg/ pilgun/ pilkada/ pilkades
 - 5) Bantuan pengamanan
 - 6) Pileg/ pilgub/ pilkada
 - 7) Bantuan hibah ke KPU & panwas Rembang
 - 8) Bantuan fasilitas penyelenggaraan rapat koordinasi kewilayahan
 - 9) Fasilitas dan koordinasi pertanahan
- l) Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum.**
 - 1) Pembakuan nama rupa bumi
 - 2) Penegasan batas daerah
 - 3) Pembangunan/ rehabilitasi
 - 4) Sarana prasaran pelayanan
 - 5) Umum di kecamatan/ desa
 - 6) Pembinaan kecamatan
- m) Program Peningkatan fasilitas pelayanan public**
 - 1) Fasilitas penyusunan standart pelayanan public
 - 2) Penyusunan target capaian SPM
 - 3) Fasilitas penerapan ISO 9001 – 2000 dalam pelayanan public
 - 4) Monitoring dan eavaluasi pelayanan publik
- n) Program Pembinaan dan pengembangan tata laksana**
 - 1) Fasilitas penyelenggaraan pemerintahan
 - 2) Pembuatan kartu identitas pegawai
 - 3) Fasilitas penyusunan standart Operaty Procedure
 - 4) Penyusunan dan sosialisasi tata naskah dinas
 - 5) Pengelolaan administrasi Kepegawaian setda
- o) Program Pembinaan dan pengembangan kelembagaan**
 - 1) Evaluasi tupoksi dan uraian jabatan structural
 - 2) Evaluasi kelembagaan
 - 3) Penyusunan kelembagaan perangkat daerah
- p) Program Pengembangan budaya kerja aparatur**
 - 1) Penyusunan standart kompetensi jabatan
 - 2) Penyusunan analisis beban kerja
 - 3) Sosialisasi SPIP

- 4) Forkompanda
- q) Program Peningkatan Kehumasan**
 - 1) Peningkatan kehumasan daerah
- r) Program peningkatan pemanfaatan persandian dan komunikasi**
 - 1) Peningkatan pemanfaatan persandian
- s) Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
 - 1) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - 2) Penyusunan LAKIP
- t) Program pemeliharaan kantibmas dan pencegahan tindak kriminal**
 - 1) Peningkatan kerjasama dan koordinasi aparat PAM terkait
- u) Program Pemantapan pengadaan barang dan jasa**
 - 1) Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
 - 2) Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
 - 3) Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang pengadaan barang/jasa pengadaan barang
- v) Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi**
 - 1) Penyelenggaraan pembinaan dan registrasi Usaha Jasa pelaksanaan konstruksi

c. Perencanaan Pembangunan

- a) Pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan**
 - 1) Pengumpulan, updating dan analisis informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
 - 2) Penyusunan Sistem Informasi dan profil daerah
 - 3) Penyusunan database perencanaan pembangunan daerah
 - 4) Pembuatan audio visual selang pandang
 - 5) Pengembangan data dan informasi secara on line sampai tingkat SKPD dan Kecamatan
- b) Penelitian dan pengembangan serta penerapan iptek**
 - 1) Peningkatan kualitas kreatifitas dan inovasi masyarakat (KRENOVA)
 - 2) Peningkatan kualitas jamboree teknologi (jamtek)
 - 3) Fasilitasi Pengadaan dan pengembangan tenaga peneliti bagi PNS
 - 4) Peningkatan kualitas pemahaman IPTEK melalui Studi banding
 - 5) Koordinasi peningkatan bidang litbang dan terapannya
 - 6) Pembentukan Dewan Riset Daerah
- c) Perencanaan pembangunan daerah**
 - 1) Penyusunan RKPD
 - 2) Koordinasi Penyusunan LAKIP
 - 3) Penyusunan RPJMD
 - 4) Penyusunan RPJPD
 - 5) Penyusunan KUA dan PPAS
 - 6) Koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
 - 7) Penyusunan aplikasi perencanaan pembangunan daerah
 - 8) Koordinasi penyusunan LPPD, LKPJ dan AMJ
- d) Perencanaan pembangunan ekonomi**
 - 1) Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
 - 2) Penyusunan indikator ekonomi daerah
 - 3) Perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat
 - 4) Penyusunan model penanggulangan kemiskinan
 - 5) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
 - 6) Koordinasi dan fasilitasi RPPK
 - 7) pengembangan ekonomi lokal (PEL)
 - 8) Pengembangan Agropolitan
 - 9) Pengembangan Agroforestry

- 10) Penyusunan Tabel Input-Output
 - 11) Kajian Potensi PAD
 - 12) Penyusunan Data Base Kemiskinan
 - 13) Penyusunan Masterplan Investasi Daerah
 - 14) Penyusunan Actionplan pengelolaan pertanian Terpadu (PPT)
 - 15) Penyusunan Masterplan kerjasama pemerintah swasta.
- e) Perencanaan pembangunan sosial budaya**
- 1) Penyusunan masterplan pendidikan
 - 2) Penyusunan masterplan kesehatan
 - 3) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
 - 4) Fasilitasi dan koordinasi pengarusutamaan gender
 - 5) Fasilitasi dan koordinasi pengembangan kabupaten layak anak
 - 6) Fasilitasi dan koordinasi pengarusutamaan hak anak
 - 7) Fasilitasi dan koordinasi pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik.
 - 8) Kajian pengelolaan potensi sosial dan budaya
- f) Kerjasama pembangunan**
- 1) Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
 - 2) Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
 - 3) Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
 - 4) Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
 - 5) Fasilitasi dan koordinasi program PLAN Indonesia
 - 6) Fasilitasi, koordinasi dan advokasi peningkatan program pembangunan SDM Dini
 - 7) Fasilitasi dan koordinasi Pembinaan lingkungan sosial
 - 8) Fasilitasi dan koordinasi Program penanggulangan kemiskinan daerah
- g) Pengembangan wilayah perbatasan**
- 1) Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah
 - 2) Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
- h) Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**
- 1) Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - 2) Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - 3) Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - 4) Studi pengembangan kawasan perdesaan
- i) Perencanaan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan LH**
- 1) Koordinasi penyusunan masterplan prasarana wilayah
 - 2) Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumberdaya alam dan LH
 - 3) Kajian pemanfaatan sumber daya alam
 - 4) Koordinasi penyusunan masterplan sumberdaya air
 - 5) Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah
 - 6) Koordinasi penyusunan perencanaan sanitasi total berbasis masyarakat
 - 7) Koordinasi Penyusunan masterplan pembangunan *sea front city*
- j) Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana**
- 1) Koordinasi penyusunan profil daerah rawan bencana
 - 2) Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
- k) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**
- 1) Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan
 - 2) bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
- l) Perencanaan pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang**
- 1) Penyusunan dan sosialisasi rencana tata ruang wilayah/kabupaten
 - 2) Koordinasi kebijakan pemanfaatan dan pengendalian ruang

m) Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan

- 1) Pelaksanaan Evaluasi kinerja kegiatan
- 2) Pelaksanaan monitoring kegiatan setiap tahun.
- 3) Penyusunan LKPJ
- 4) Penyusunan AMJ
- 5) penyusunan LPPD dan ILPPD

d. Statistik

a) Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah.

- 1) Kegiatan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, analisis serta penyajian data dan informasi statistik

e. Kearsipan

a) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.

- 1) Pengadaan sarana penyimpanan arsip
- 2) Pengembangan jaringan informasi kearsipan

b) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah.

- 1) Peningkatan kapasitas SDM bidang kearsipan di tingkat SKPD

c) Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan.

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

d) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

- 1) Pengembangan jenis dan sistem layanan informasi
- 2) Penyediaan sarana layanan informasi arsip

f. Keperpustakaan

a) Program pengembangan budaya baca

- 1) Promosi minat baca melalui pameran, lomba yang berkaitan dengan perpustakaan
- 2) Pengembangan layanan perpustakaan keliling

b) Program pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan

- 1) Pengembangan jaringan perpustakaan daerah, sekolah, desa/kelurahan dan perpustakaan khusus
- 2) Kerjasama pertukaran koleksi perpustakaan antara perpustakaan daerah, sekolah, desa/kelurahan dan perpustakaan khusus
- 3) Pengembangan SDM pengelola perpustakaan
- 4) Penyediaan sarana pelayanan perpustakaan

c) Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan

- 1) Pengalihmediaan koleksi perpustakaan dari tekstual menjadi digital
- 2) Penduplikasian koleksi perpustakaan

2. Kelompok Urusan Prasarana Wilayah

a. Pekerjaan Umum

a) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan (Bina Marga).

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- 1) Perencanaan pembangunan jalan
- 2) Survei kontur jalan dan jembatan
- 3) Pembangunan jalan
- 4) Perencanaan pembangunan jembatan
- 5) Pembangunan jembatan
- 6) Penataan akses jalan pantai

2. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- 1) Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
- 2) Perencanaan rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan
- 3) Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan
- 4) Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

3. Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan

4. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

- 1) Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
- 2) Rehabilitasi Jembatan dalam kondisi tanggap darurat

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

6. Program Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan jembatan

- 1) Penyusunan sistem Informasi/data base Jalan
- 2) Penyusunan sistem Informasi/data base jembatan

b) Bidang Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

1. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

- 1) Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- 2) Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong
- 3) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2. Program Rehabilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan

c) Bidang Sumber Daya Air

1. Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

2. Program pengendalian Banjir dan penanganan pantai

3. Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

- 1) Perencanaan pembangunan jaringan Irigasi
- 2) Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
- 3) Perencanaan pembangunan reservoir
- 4) perencanaan pembangunan pintu air
- 5) Perencanaan normalisasi saluran sungai
- 6) Pembangunan jaringan air bersih/air minum
- 7) Pembangunan reservoir
- 8) Pembangunan pintu air
- 9) Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
- 10) Pengelolaan sungai terpadu
- 11) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Irigasi
- 12) Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan air bersih/air minum
- 13) Rehabilitasi/Pemeliharaan reservoir
- 14) Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
- 15) Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai
- 16) Optimalisasi fungsi jaringan Irigasi yang telah dibangun
- 17) Pemberdayaan petani pemakai air

d) Bidang Bidang Air Minum / Air Baku

1. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum

- 1) Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan

rendah

- 2) Pengembangan teknologi pengolahan air minum
- 3) Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum
- 4) Pengembangan sistem distribusi air minum
- 5) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

- 1) Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
- 2) Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
- 3) Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
- 4) Pembangunan sumur-sumur air tanah
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
- 6) Peningkatan distribusi penyediaan air baku

3. Program Pengembangan SPAM Kota Rembang

e) Bidang Air Limbah

1. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air limbah

- 1) Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
- 2) Pengembangan teknologi pengolahan air limbah
- 3) Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah
- 4) Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
- 5) Peningkatan sanitasi dasar berbasis rumah tangga dan masyarakat

f) Bidang Persampahan

- 1) Program peningkatan kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
- 2) Program Pengelolaan persampahan dari sumber timbulan sampah
- 3) Peningkatan kinerja pengolahan persampahan

g) Bidang Perkotaan dan Perdesaan

1. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

- 1) Pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan secara terpadu dan terintegrasi.
- 2) Penataan lingkungan permukiman penduduk yang berwawasan lingkungan
- 3) Penataan dan penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan melalui pendekatan ekologi kota.

2. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

- 1) Mewujudkan NSPM pencegahan bahaya kebakaran di wilayah perkotaan
- 2) Meningkatkan proteksi kebakaran Kabupaten Rembang melalui Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)
- 3) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran

h) Bidang Pemukiman

1. Program pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan

- 1) Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan
- 2) Penataan lingkungan permukiman kawasan pesisir
- 3) Rehabilitasi kawasan permukiman kumuh nelayan
- 4) Pembangunan Jalan dan Jembatan perdesaan
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
- 6) Pembangunan pasar perdesaan
- 7) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan perdesaan
- 8) Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
- 9) Rehabilitasi/Pemeliharaan pasar perdesaan

i) Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan

1. Program pembinaan teknis bangunan dan gedung
2. Program penataan lingkungan permukiman perkotaan
3. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan dan gedung

b. Perhubungan

a) Program pembangunan prasarana dan sarana perhubungan dalam mendukung konsep pengembangan *sea front city*;

- 1) Pengembangan infrastruktur perhubungan pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 2) Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan;
- 3) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan penyeberangan;
- 4) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan umum dan barang;
- 5) Peningkatan pengelolaan pelabuhan umum nasional;
- 6) Peningkatan terminal angkutan umum, barang dan dermaga;
- 7) Pengadaan perlengkapan jalan;
- 8) Pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran;
- 9) Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
- 10) Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan;
- 11) Pengembangan angkutan Kereta Api.

b) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan.

- 1) Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor;
- 2) Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor;
- 3) Rehabilitasi / pemeliharaan terminal angkutan umum, barang dan dermaga;
- 4) Rehabilitasi / pemeliharaan perlengkapan jalan;
- 5) Rehabilitasi / pemeliharaan alat komunikasi.

c) Program peningkatan pelayanan angkutan

- 1) Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat pengguna angkutan umum;
- 2) Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang;
- 3) Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang;
- 4) Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya;
- 5) Kegiatan penciptaan keamanan dan pelayanan penumpang di lingkungan terminal;
- 6) Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal;
- 7) Kegiatan penataan tempat pemberhentian angkutan umum;
- 8) Pengumpulan dan analisis data base angkutan umum;
- 9) Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan;
- 10) Fasilitasi perijinan dibidang perhubungan;
- 11) Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
- 12) Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir teladan;
- 13) Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan;
- 14) Evaluasi pelayanan angkutan umum.

d) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

- 1) Rehabilitasi / pemeliharaan terminal;
- 2) Pembangunan halte bus;
- 3) Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran;
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan umum nasional.

e) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

- 1) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas;
- 2) Pengadaan marka jalan;

- 3) Pengadaan pagar pengaman jalan.

f) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

- 1) Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor;
- 2) Pengadaan alat uji kendaraan bermotor;
- 3) Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor.

g) Program peningkatan ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas.

- 1) Pengawasan dan penertiban lalu lintas jalan;
- 2) Pengawasan angkutan lebaran / syawalan;
- 3) Peningkatan fasilitas patroli dan pengawalan lalu lintas.

h) Program peningkatan ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran.

- 1) Peningkatan keamanan, ketertiban laut / patroli laut;
- 2) Peningkatan keselamatan pelayaran;
- 3) Peningkatan pelayanan surat tanda kebangsaan kapal;
- 4) Operasional keamanan laut (kamla)
- 5) Pengadaan sarana dan prasarana pelayaran;
- 6) Pengadaan lampu penerangan pantai;
- 7) Pengadaan baju pelampung dan alat keselamatan.

c. Perumahan

a) Program pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.

- 1) Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat perkotaan dan perdesaan
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

b) Program Pembangunan perumahan dan permukiman

- 1) Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
- 2) Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)
- 3) Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
- 4) Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
- 5) Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
- 6) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
- 7) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

d. Penataan Ruang

a) Program perencanaan tata ruang

- 1) Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
- 2) Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
- 3) Sosialisasi Peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang.
- 4) Penyusunan Rencana Tata ruang wilayah
- 5) Penyusunan rencana Detail Tata Ruang Kawasan
- 6) Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
- 7) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
- 8) Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang RTRW
- 9) Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
- 10) Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
- 11) Revisi rencana tata ruang
- 12) Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang
- 13) Survey dan pemetaan
- 14) Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota

b) Program pemanfaatan ruang

- 1) Penyusunan Kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
- 2) Penyusunan Norma, standar, dan Kriteria pemanfaatan ruang
- 3) Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

- 4) Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
- 5) Survey dan pemetaan
- 6) Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
- 7) Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
- 8) Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

c) Program pengendalian pemanfaatan ruang

- 1) Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
- 2) Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
- 3) Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
- 4) Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
- 5) Pengawasan pemanfaatan ruang
- 6) Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
- 7) Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

d) Program kerjasama perencanaan dan penataan dalam pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan

e. Pertanian

a) Program pembangunan sistem pendaftaran tanah

- 1) Penyusunan sistem pendaftaran tanah
- 2) Sosialisasi sistem pendaftaran tanah

b) Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

- 1) Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- 2) Penyuluhan hukum pertanahan

c) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanian

- 1) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

f. Komunikasi dan Informatika

a) Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

- 1) Pembangunan jaringan telekomunikasi seluler pada kawasan pelabuhan umum nasional Rembang;
- 2) Pengembangan jaringan telekomunikasi di pedesaan;
- 3) Peningkatan akses layanan internet bagi masyarakat di pedesaan;
- 4) Pengembangan program koran masuk desa;
- 5) Pengadaan alat studio dan komunikasi;
- 6) Pengadaan sarana dan prasarana LPSE.

b) Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi

- 1) Pendidikan / pelatihan / bimtek SDM aparatur di bidang komunikasi dan informasi;
- 2) Pembentukan LPSE;
- 3) Sosialisasi kegiatan komunikasi dan informatika.

c) Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi.

- 1) Pengawasan, pengendalian, pembinaan telekomunikasi dan teknologi informasi;
- 2) Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
- 3) Pengawasan dan pembinaan radio siaran dan radio komunikasi;
- 4) Pengawasan dan pembinaan penyedia jasa / barang, pos telekomunikasi dan informatika.

d) Program penyusunan regulasi.

- 1) Program Penyusunan regulasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

3. Kelompok Urusan Sosial Budaya

a. Pendidikan

a) Program pendidikan anak usia dini

- 1) Pembangunan gedung sekolah
- 2) Penambahan ruang kelas sekolah
- 3) Penambahan ruang guru sekolah
- 4) Pembangunan ruang locker siswa
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
- 6) Pembangunan sarana dan prasarana bermain
- 7) Pembangunan ruang serba guna/aula
- 8) Dan lainnya yang sesuai

b) Program wajib belajar pendidikan dasar

- 1) Pembangunan gedung sekolah
- 2) Penambahan ruang kelas sekolah
- 3) Penambahan ruang guru sekolah
- 4) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah

c) Program pendidikan menengah

- 1) Pembangunan gedung sekolah
- 2) Penambahan ruang kelas sekolah
- 3) Penambahan ruang guru sekolah
- 4) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, dan lain-lain)
- 5) Peningkatan jumlah dan kualitas guru sekolah kejuruan kelautan
- 6) Pengembangan kurikulum muatan lokal kemaritiman

d) Program pendidikan non formal dan in formal

- 1) Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
- 2) Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
- 3) Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
- 4) Pengembangan pendidikan keaksaraan
- 5) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
- 6) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
- 7) Pengembangan data dan Informasi pendidikan non formal
- 8) Pengembangan ketrampilan teknologi kemaritiman

e) Program pendidikan luar biasa dan pendidikan khusus

- 1) Pembangunan gedung sekolah
- 2) Penambahan ruang kelas sekolah
- 3) Dan lainnya yang sesuai

f) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

- 1) Pelaksanaan sertifikasi pendidik
- 2) Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- 3) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
- 4) Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
- 5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 6) Dan lainnya yang sesuai

g) Program manajemen pelayanan pendidikan

- 1) Perawatan dan pemeliharaan ICT Pendidikan
- 2) Perawatan Perangkat JARDIKNAS
- 3) Pengembangan ICT Pendidikan

- 4) Pemeliharaan Data Pendidikan
- 5) Pendampingan kegiatan Akreditasi Sekolah/Madrasah
- 6) Evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
- 7) Dan lainnya yang sesuai

b. Kesehatan

a) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

- 1) Penyuluhan kesehatan bagi Ibu hamil dari keluarga kurang mampu
- 2) Perawatan secara berkala bagi Ibu hamil bagi keluarga kurang mampu
- 3) Pertolongan persalinan bagi Ibu dari keluarga kurang mampu.

b) Program perbaikan gizi masyarakat

- 1) Pemberian tambahan makanan dan vitamin
- 2) Pemanggulungan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin-A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya
- 3) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
- 4) Penanggulungan Gizi-Lebih
- 5) Peningkatan survailance gizi kurang
- 6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

c) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

- 1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
- 2) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
- 3) Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
- 4) Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
- 5) Peningkatan peran lembaga masyarakat

d) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

- 1) Penyuluhan kesehatan anak balita
- 2) Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita
- 3) Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita
- 5) Pembangunan panti asuhan anak terlantar balita
- 6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

e) Program pengembangan lingkungan sehat

- 1) Pengkajian pengembangan Lingkungan sehat
- 2) Penyuluhan menciptakan Lingkungan sehat
- 3) Sosialisasi kebijakan Lingkungan sehat
- 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

f) Program pencegahan dan penanggulungan penyakit

- 1) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
- 2) Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
- 3) Pengadaan vaksin penyakit menular
- 4) Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
- 5) Pelayanan pencegahan dan penanggulungan penyakit menular
- 6) Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
- 7) Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
- 8) Peningkatan Imunisasi
- 9) Peningkatan Surveilllance Epidemiologi dan Penanggulungan Wabah
- 10) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

g) Program standarisasi pelayanan kesehatan

- 1) Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
- 2) Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
- 3) Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Kesehatan

- 4) Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan
- 5) Penyusunan Detail Engineering Design
- 6) Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

h) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

- 1) Pelayanan operasi katarak
- 2) Pelayanan kesehatan THT
- 3) Pelayanan operasi bibir sumbing
- 4) Pelayanan sunatan masal
- 5) Penanggulangan ISPA
- 6) Penanggulangan penyakit cacangan
- 7) Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin
- 8) Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar
- 9) Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu
- 10) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

i) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

- 1) Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
- 2) Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
- 3) Kemitraan Peningkatan kualitas dokter dan paramedis
- 4) Operasional Bank Darah Rumah Sakit
- 5) Pemberdayaan SDM untuk peningkatan kualitas pelayanan RS
- 6) Kemitraan dengan rumah sakit jiwa
- 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 8) Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan

j) Program obat dan perbekalan kesehatan

- 1) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 2) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
- 3) Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin
- 4) Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
- 5) Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 6) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

k) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- 1) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarpras Puskesmas dan Jaringannya
- 2) Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- 3) Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
- 4) Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
- 5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 6) Penyediaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

l) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

- 1) Rehabilitasi Sedang/Berat Pustu
- 2) Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
- 3) Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Dinas Medis dan Paramedis
- 4) Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD)
- 5) Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 6) Perluasan Puskesmas
- 7) Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Puskesmas dan Pustu
- 8) Peningkatan Kapasitas Sarana Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

m) Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- 2) Workshop, Sosialisasi Bidang Kesehatan

n) Program Pengawasan Obat dan Makanan

- 1) Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat Di Bidang Obat dan Makanan
- 2) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

o) Program Pengadaan Peningkatan Srana dan Prasanaran Rumah Sakit

- 1) Pengembangan ruang gawat darurat
- 2) Penambahan ruang rawat inap
- 3) Pembangunan gedung IBS
- 4) Pembangunan gedung ICU/ICCU
- 5) Pengadaan alat kedokteran

p) Program peningkatan kesehatan lansia

- 1) Pelayanan pemeliharaan kesehatan
- 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

c. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a) Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

- 1) Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
- 2) Pelayanan KIE
- 3) Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi individu
- 4) Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan KR
- 5) Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
- 6) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
- 7) Pelayanan KB medis operasi
- 8) Operasional kelompok masyarakat peduli KB
- 9) Penyusunan profil dan data base tentang UPPKS
- 10) Pengolahan data dan informasi program KB
- 11) Pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan.
- 12) Pencatatan dan pelaporan klinik KB
- 13) Operasional Tim Unit Pelaksana Keluarga Berencana
- 14) Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja
- 15) Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK)
- 16) Penyuluhan kesehatan Ibu dan Anak melalui kelompok di masyarakat
- 17) Pengumpulan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- 18) Pengembangan BKB-Posyandu Terintegrasi
- 19) Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan

b) Program Sarana dan Prasarana Pendukung Keluarga Berencana

- 1) Pengadaan alat kontrasepsi

c) Program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

- 1) Penyelenggaraan Rakerda dan Review Program Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- 2) Penyelenggaraan Rakercam Program PMPKB

d. Kebudayaan

a) Program Pengembangan dan pengelolaan nilai, kekayaan dan keragaman Budaya

- 1) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
- 2) Penatagunaan naskah kuno nusantara
- 3) Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
- 4) Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

- 5) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
- 6) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
- 7) Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
- 8) Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
- 9) Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
- 10) Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala
- 11) Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
- 12) Pengembangan nilai dan geografi sejarah
- 13) Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
- 14) Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala
- 15) Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya
- 16) Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
- 17) Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
- 18) Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala
- 19) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
- 20) Penyusunan sistem informasi bidang kebudayaan
- 21) Penyelenggaraan dialog kebudayaan
- 22) Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
- 23) Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
- 24) Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
- 25) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

b) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

- 1) Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta
- 2) Fasilitasi Pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah
- 3) Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
- 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

c) Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

- 1) Rakor Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Sarasehan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 3) Pembinaan Pelaku Budaya Spiritual
- 4) Perekaman tata ritual penghayatan
- 5) Kemah Budaya bagi Generasi Muda Penghayat
- 6) Kajian nilai-nilai luhur budaya spiritual

e. Kependudukan Catatan Sipil

a) Program penataan administrasi kependudukan, dengan kegiatan meliputi

1. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
2. Pelatihan tenaga pengelola SIAK
3. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan Pemeliharaan)
4. Pembentukan, dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK
5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan
6. Pengolahan dalam penyusunan laporan Informasi kependudukan
7. Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat
8. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
9. Pengembangan data base kependudukan
10. penyusunan kebijakan kependudukan
11. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
12. Sosialisasi kebijakan kependudukan
13. Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

f. Kepemudaan dan Olahraga

a) Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

- 1) Pendataan potensi kepemudaan

- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda
- 3) Penelitian dan penyajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan
- 4) Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-Youth
- 5) Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
- 6) Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda
- 7) Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat
- 8) Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan
- 9) Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda

b) Peningkatan peran serta kepemudaan

- 1) Pembinaan organisasi kepemudaan
- 2) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
- 3) Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
- 4) Fasilitasi pecan temu wicara organisasi kepemudaan
- 5) Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
- 6) Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
- 7) Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
- 8) Pameran prestasi hasil karya pemuda
- 9) Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
- 10) Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
- 11) Stimulan modal usaha ekonomi produktif bagi pemuda
- 12) Fasilitasi kemitraan usaha dikalangan pemuda dengan pihak-pihak terkait

c) Pencegahan penyalahgunaan narkoba, melalui kegiatan :

- 1) Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
- 2) Fasilitasi kerjasama kemitraan dengan lembaga-lembaga kepemudaan dalam mengkapanyekan bahaya narkoba

d) Pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga, melalui kegiatan :

- 1) Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
- 2) Pengembangan system sertifikasi dan standarisasi profesi
- 3) Pengembangan perencanaan olah raga terpadu
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
- 5) Pembinaan manajemen organisasi olahraga
- 6) Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga
- 7) Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga

e) Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga, melalui kegiatan :

- 1) Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
- 2) Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah
- 3) Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
- 4) Pembibitan cabang olahraga prestasi
- 5) Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
- 6) Penyelenggaraan kompetisi olahraga
- 7) Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
- 8) Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
- 9) Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga
- 10) Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacata
- 11) Pengembangan olahraga rekreasi
- 12) Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga
- 13) Peningkatan jaminan dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga
- 14) Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
- 15) Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan

- 16) Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga
- 17) Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/Instansi lainnya.

f) Peningkatan sarana dan prasarana olah raga, melalui kegiatan :

- 1) Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
- 2) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
- 3) Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga
- 4) Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
- 5) Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

g. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Program peningkatan kualitas hidup perempuan dalam berbagai bidang pembangunan

- 1) Pemberdayaan masyarakat berspektif Gender (P2MBG).
- 2) Penguatan Kelompok Tribina
- 3) Pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan di daerah
- 4) Peningkatan kapasitas kader
- 5) Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
- 6) Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
- 7) Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
- 8) Pemberian simpan pinjam perempuan

b) Program Peningkatan Pemenuhan hak-hak perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan

- 1) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

c) Program Kapasitas Kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak

- 1) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
- 2) Penguatan pokjanal Posyandu
- 3) Pelatihan peningkatan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
- 4) Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
- 5) Pengembangan sistem informasi gender dan anak
- 6) Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
- 7) Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang IPTEK.

h. Pariwisata

a) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- 1) Pengadaan Brosur dan Pemasangan iklan Kebudayaan dan Pariwisata
- 2) Pemilihan Duta Wisata
- 3) Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata
- 4) Penyelenggaraan Sepeda Wisata
- 5) Pengelolaan Tourism Information Center (TIC)
- 6) Pelaksanaan MICE Jasa Pariwisata
- 7) Peningkatan Kualitas Kompetensi Remaja Mbak Mas se Kab. Rembang
- 8) Penyelenggaraan Festival pantai dan Festival Kuliner
- 9) Optimalisasi Pengenalan Wisata Pelajar
- 10) Penyelenggaraan paket-paket wisata

b) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- 1) Penyusunan RIPP, RIPOW dan DED kawasan obyek dan daya tarik wisata

- 2) Pembangunan dan Pengembangan fasilitas obyek dan daya tarik wisata daerah
- 3) Pengelolaan dan pemeliharaan obyek dan daya tarik wisata

c) Program Pengembangan Kemitraan

- 1) Pembentukan dan Pembinaan Kampung/Desa Wisata
- 2) Pembinaan SDM, POK DARWIS, dan Usaha Pariwisata
- 3) Penyusunan Paket Wisata Daerah
- 4) Penyusunan Buku Profil Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- 5) Kerjasama Pengembangan Pariwisata PAKUJEMBARA PLUS dan RATUBANGNEGORO.

i. Sosial

a) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;

- 1) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
- 2) Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
- 3) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
- 5) Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

b) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

- 1) Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
- 2) Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
- 3) Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 4) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana Rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
- 6) penyusunan kebijakan pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan sosial
- 7) Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.

c) Program pembinaan anak terlantar

- 1) pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar
- 2) Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
- 3) penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar
- 4) Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
- 5) Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar

d) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

- 1) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
- 2) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
- 3) Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik

e) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

- 1) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
- 2) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

j. Pemberdayaan Masyarakat Desa

a) Program Penguatan kapasitas kelembagaan Masyarakat

- 1) Pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat perdesaan
- 2) Evaluasi pemberdayaan masyarakat
- 3) Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
- 4) Sosialisasi pendataan keluarga

5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

b) Program Penanggulangan kemiskinan

1) Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan

c) Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa

- 1) Pendampingan pelaksanaan TMMD regular dan sengkuyung
- 2) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- 3) Penyusunan profil desa/kelurahan
- 4) Pendampingan pemberdayaan kelompok masyarakat wilayah pesisir

d) Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan

- 1) Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro dan kecil di perdesaan dan kelurahan
- 2) Pendataan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan
- 3) Fasilitasi pengembangan ekonomi perdesaan
- 4) Pelatihan pengelolaan BUMDes

e) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

- 1) Pelatihan TTG
- 2) Pendampingan pengembangan TTG Alternatif
- 3) Penguatan Pos Pelayanan TTG (Posyantek)

f) Program Pengelolaan Lingkungan Sosial

- 1) Pembinaan kelompok bina lingkungan Keluarga sejahtera

g) Program Pemberdayaan komunitas perumahan

- 1) Fasilitasi pembangunan sarana prasarana perdesaan dan penataan lingkungan permukiman perdesaan

k. Ketenagakerjaan

a) Program peningkatan kesempatan kerja

- 1) Penyusunan Informasi bursa tenaga kerja
- 2) Penyebarluasan Informasi bursa tenaga kerja
- 3) Kerjasama pendidikan dan pelatihan
- 4) Penyiapan tenaga kerja siap pakai
- 5) Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
- 6) Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

b) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

- 1) Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja
- 2) Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan Instruktur BLK
- 3) Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja
- 4) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

c) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

- 1) Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
- 2) Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja
- 3) Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja

l. Ketransmigrasian

a) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

- 1) Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan
- 2) Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
- 3) Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
- 4) Penyediaan lembaga Keuangan Daerah yang membantu Modal Usaha di Kawasan

- Transmigrasi
- 5) Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi Kebutuhan SDM

4. Kelompok Urusan Ekonomi

a. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

a) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1. Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian
2. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
3. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
4. Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi
5. Revitalisasi koperasi mina

b) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
2. Pengembangan klaster bisnis
3. Pemberdayaan UMKM Mina
4. Pengembangan pusat perdagangan produk perikanan

c) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1. Fasilitas peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2. Fasilitas Pengembangan sarana promosi hasil produksi
3. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
4. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD

d) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

1. Fasilitas kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah
2. Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah
3. Fasilitas pengembangan Usaha Kecil Menengah
4. Fasilitas Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah

e) Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
2. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

b. Industri

a) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1. Fasilitas peningkatan kualitas produk bagi industri kecil dan menengah
2. Fasilitas penganekaragaman produk
3. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
4. Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
5. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
6. Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah
7. Fasilitas kemitraan teknologi produksi industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta untuk meningkatkan ekspor

b) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

1. Penyelenggaraan pelatihan dan bantuan peralatan
2. Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi
3. Penguatan Kemampuan Industri berbasis teknologi
4. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

c) Program Penataan Struktur Industri dan kawasan Industri

1. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
2. Penguatan layanan kepada masyarakat untuk pembentukan klaster
3. Pembentukan kelembagaan kawasan industri
4. Sosialisasi kawasan industri
5. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan industri
6. Promosi investasi kawasan Industri Kabupaten Rembang

d) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

1. Pembinaan dan pelayanan teknologi industri
2. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
3. Sosialisasi SNI/Haki untuk mendorong daya saing industri manufaktur
4. Fasilitasi layanan dan perlindungan Haki/patent/hak cipta
5. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur
6. Pengembangan kerjasama pengadaan bahan baku industri
7. Pengembangan kerjasama pemasaran produk IKM

e) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial

1. Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial
2. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

c. Perdagangan

a) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

- 1) Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
- 2) Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
- 3) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
- 4) Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah

b) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

- 1) Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa
- 2) Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan Jasa
- 3) Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional
- 4) Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang
- 5) Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional

c) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- 1) Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
- 2) Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
- 3) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
- 4) Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
- 5) Pengembangan pasar lelang daerah
- 6) Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
- 7) Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

d. Penanaman Modal

a) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi/ penanaman modal

- 1) Kegiatan peningkatan promosi dalam rangka peningkatan penanaman modal
- 2) Peningkatan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal
- 3) Peningkatan kerjasama antar daerah dalam melakukan kegiatan promosi

b) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

- 1) Fasilitasi pelayanan perijinan di bidang modal
- 2) Fasilitasi pelayanan non perijinan di bidang penanaman modal

c) Program peningkatan prasarana dan sarana, penyiapan sumber daya bagi pengembangan penanaman modal

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana perijinan penanaman modal
- 2) Penyusunan potensi daerah dan peluang investasi
- 3) Standarisasi ISO pelayanan perijinan
- 4) Penyusunan Data Base Perijinan

d) Program pembinaan dan fasilitasi dalam penanaman modal dalam rangka peningkatan dan pengembangan dunia usaha

- 1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- 2) Pembinaan dan fasilitasi penanaman modal dan pengembangan dunia usaha.
- 3) Pembinaan kegiatan usaha UMKM

e. Energi dan Sumber Daya Mineral

a) Program Peningkatan pengawasan dan pengendalian usaha bidang pertambangan dan ABT

- 1) Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C berwawasan lingkungan
- 2) Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
- 3) Pendataan/Monitoring, evaluasi dan pengendalian/pengawasan kegiatan penambangan bahan galian C
- 4) Pendataan hasil produksi di bidang pertambangan
- 5) Pendataan dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah

b) Program pengawasan dan penertiban kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

- 1) Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
- 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat
- 3) Penyebaran Peta daerah Rawan Bencana Alam Geologi

c) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya mineral

- 1) Optimalisasi eksplorasi dan pemanfaatan potensi air tanah
- 2) Optimalisasi eksplorasi sumberdaya mineral;
- 3) Optimalisasi pengolahan hasil *migas* sumur tua;
- 4) Pengembangan kawasan industri pertambangan strategis; dan
- 5) Kajian dan Penelitian pemanfaatan pengelolaan geologi yang berkelanjutan

d) Program pembinaan, pengembangan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan

- 1) Pengembangan tenaga listrik lokal dengan PLTS dan PLTB
- 2) Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan

e) Program Peningkatan Penyaluran penyediaan BBM bagi Masyarakat

- 1) Peningkatan penyaluran penyediaan BBM bagi masyarakat
- 2) Kampanye hemat energi, BBM dan pengembangan energi alternatif ramah lingkungan

f) Program Kerjasama Pertambangan dengan daerah sekitar

- 1) Pengembangan kerjasama bidang pertambangan

f. Pertanian

a) Program Peningkatan Kesejahteraan petani

- 1) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
- 2) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
- 3) Peningkatan kemampuan lembaga petani
- 4) Peningkatan sistem Insentif dan disinsentif bagi petani/keompok tani
- 5) Pemberdayaan kelompok tani

b) Program pengembangan jaringan irigasi pertanian/perkebunan

- 1) Pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)
- 2) Pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES)
- 3) Pembangunan/rehabilitasi Irigasi Tanah Dangkal TPH

- 4) Pembangunan/rehabilitasi Irigasi Tanah Dangkal Perkebunan
- 5) Pembangunan/rehabilitasi irigasi tanah dalam TPH
- 6) Pembangunan/rehabilitasi irigasi tanah dalam Perkebunan
- 7) Pompanisasi untuk pertanian TPH
- 8) Pompanisasi untuk pertanian Perkebunan
- 9) Pembangunan embung pertanian TPH
- 10) Pembangunan embung perkebunan
- 11) Pembangunan/rehabilitasi dam parit

c) Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna
- 2) Pelatihan dan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
- 3) Penyediaan peralatan dan mesin pra panen, pasca panen dan pengolah hasil pertanian
- 4) Penyediaan peralatan dan mesin pra panen, pasca panen dan pengolah hasil perkebunan
- 5) Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian
- 6) Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
- 7) Primatani

d) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

- 1) Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
- 2) Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
- 3) Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/ perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani
- 4) Pembangunan/ rehabilitasi jalan produksi pertanian TPH
- 5) Pembangunan/ rehabilitasi jalan produksi perkebunan

e) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

- 1) Bimbingan dan penyuluhan peningkatan produksi pertanian TPH
- 2) Bimbingan dan penyuluhan peningkatan produksi perkebunan
- 3) Penyediaan sarana produksi pertanian TPH
- 4) Penyediaan sarana produksi perkebunan
- 5) Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
- 6) Pengembangan bibit unggul pertanian TPH
- 7) Pengembangan bibit unggul perkebunan
- 8) Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura
- 9) Pengembangan tanaman perkebunan
- 10) Penyediaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan
- 11) Penyediaan sarana dan prasarana perbenihan hortikultura
- 12) Penyediaan sarana dan prasarana perbenihan/perbibitan perkebunan
- 13) Penyediaan sarana dan prasarana pembuatan pupuk organik

f) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

- 1) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
- 2) Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
- 3) Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

g) Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
- 2) Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
- 3) Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan
- 4) Penyediaan peralatan dan mesin pengolah hasil/budidaya peternakan
- 5) Pembangunan embung peternakan

- 6) Pembangunan sumur tanah dangkal peternakan

h) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

- 1) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
- 2) Pendataan masalah peternakan
- 3) Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
- 4) Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

i) Program peningkatan produksi hasil peternakan

- 1) Pengembangan sarana dan prasarana perbibitan peternakan
- 2) Pembibitan dan perawatan ternak
- 3) Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
- 4) Pembelian/pendistribusian vaksin dan pakan ternak
- 5) Pengembangan agribisnis peternakan
- 6) Pengembangan pakan ternak
- 7) Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak

j) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

- 1) Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
- 3) Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat
- 4) Pembangunan/ rehabilitasi jalan produksi peternakan

k) Program Peningkatan kapasitas kelembagaan petani

- 1) Penyuluhan dan pendampingan kelompok tani

l) Program pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman

- 1) Pelatihan pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman
- 2) Pencegahan dan penanggulangan hama/penyakit tanaman pangan dan hortikultura
- 3) Pengendalian hama/penyakit tanaman perkebunan.

m) Program pengembangan agribisnis

- 1) Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura
- 2) Pengembangan agribisnis peternakan
- 3) Pengembangan agribisnis perkebunan

n) Program pengembangan pertanian unggulan

- 1) Pengembangan pertanian organik terpadu
- 2) Pengembangan sentra produksi komoditas TPH
- 3) Pengembangan sentra produksi komoditas peternakan
- 4) Pengembangan sentra produksi komoditas perkebunan
- 5) Fasilitasi pengembangan klaster unggulan pertanian
- 6) Fasilitasi pengembangan klaster unggulan perkebunan
- 7) Fasilitasi pengembangan klaster unggulan peternakan

g. Ketahanan Pangan

a) Program Peningkatan Ketahanan pangan (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan)

- 1) penanganan daerah rawan pangan
- 2) Penyusunan data base potensi produksi pangan
- 3) Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
- 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
- 5) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

- 6) penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
- 7) Pengembangan cadangan pangan daerah
- 8) Pengembangan desa mandiri pangan
- 9) Pengembangan diversifikasi tanaman
- 10) Pengembangan lumbung pangan desa
- 11) Peningkatan mutu dan keamanan pangan

h. Lingkungan Hidup

a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- 1) Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
- 2) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- 3) Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
- 4) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- 5) Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
- 6) Bimbingan teknis persampahan
- 7) Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
- 8) Kerjasama pengelolaan sampah
- 9) Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah
- 10) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
- 11) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- 12) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

b) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- 1) Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
- 2) Koordinasi penilaian langit biru
- 3) Pemantauan Kualitas lingkungan
- 4) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
- 5) Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (peti)
- 6) Pengelolaan B3 dan limbah B3
- 7) Pengkajian dampak lingkungan
- 8) Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan
- 9) Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
- 10) Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
- 11) Pengembangan produksi ramah lingkungan
- 12) Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- 13) Koordinasi penyusunan AMDAL
- 14) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
- 15) Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif

c) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- 1) Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber air
- 2) Pengembangan Ekowisata dan Jasa lingkungan
- 3) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
- 4) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
- 5) Penyusunan AMDAL pembangunan kawasan pesisir dan pulau kecil
- 6) Peningkatan konservasi Daerah Tangkapan air dan Sumber-Sumber air
- 7) Pengembangan konservasi kawasan pesisir dan hutan mangrove
- 8) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
- 9) Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
- 10) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
- 11) Koordinasi pengendalian Kebakaran Hutan
- 12) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
- 13) Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi
- 14) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

d) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

- 1) Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 2) Rehabilitasi hutan dan lahan
- 3) Pengembangan kelembagaan Rehabilitasi hutan dan lahan
- 4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
- 5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

e) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- 1) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
- 2) Pengembangan data dan Informasi lingkungan
- 3) Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah
- 4) Penguatan jejaring Informasi lingkungan pusat dan daerah
- 5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

f) Program Peningkatan pengendalian polusi

- 1) Pengujian emisi kendaraan bermotor
- 2) Pengujian emisi/polusi udara, akibat aktivitas Industri
- 3) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
- 4) Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
- 5) Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
- 6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

g) Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan

- 1) Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi
- 2) Pengembangan konservasi hutan wisata
- 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

h) Program pengendalian kebakaran hutan

- 1) Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan
- 2) Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan
- 3) Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
- 4) Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan Sosialisasi
- 5) Kebijakan pencegahan kebakaran hutan
- 6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

i) Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- 1) Penyusunan kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH
- 2) Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH
- 3) Penyusunan dan analisis data informasi pengelolaan RTH
- 4) Penyusunan program pengembangan RTH
- 5) Penataan RTH
- 6) Pemeliharaan RTH
- 7) Pengembangan taman rekreasi
- 8) Pengawasan dan pengendalian RTH
- 9) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
- 10) Monitoring dan evaluasi
- 11) Koordinasi pelaksanaan program RTH

j) Program Penyedia dan Pengelolaan air baku

- 1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

k) Program Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah

- 1) Penyedia prasarana dan sarana air limbah

i. Kehutanan

a) Program Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan

- 1) Pengembangan hasil hutan non kayu
- 2) Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan
- 3) Penanaman padi gogo rancah, palawija dan tanaman obat (biofarma)

b) Program rehabilitasi hutan dan lahan

- 1) Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan
- 2) Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
- 3) Pengembangan Hutan rakyat
- 4) Pengkayaan hutan rakyat
- 5) Penghijauan lingkungan
- 6) Pengembangan agroforestry
- 7) Penghijauan turus jalan
- 8) Pembuatan sumur resapan
- 9) Pembuatan dam penahan, dam pengendali serta Gullyplug
- 10) Pelestarian sumber mata air

c) Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

- 1) Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan
- 3) Penyuluhan dan pendampingan kelembagaan kehutanan
- 4) Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

d) Program Peningkatan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai

- 1) Penyediaan bibit tanaman jenis mangrove
- 2) Penanaman pohon jenis mangrove
- 3) Rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai

e) Program Pembinaan dan pengawasan industri primer hasil hutan

- 1) Inventarisasi potensi tegakan hutan rakyat
- 2) Sosialisasi peraturan industri primer hasil hutan
- 3) Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan

j. Kelautan dan Perikanan

a) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

- 1) Bantuan sarana dan prasarana kepada petani garam
- 2) Penguatan modal kelompok petani garam
- 3) Pendampingan kegiatan IFAD (Internasional Fund for Agricultural Development)
- 4) Pendampingan PNPM Mandiri
- 5) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
- 6) Pengembangan minapolitan

b) Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

- 1) Sosialisasi UU Nomor 27/2007 dan Perda Nomor 8/2008
- 2) Sertifikasi tanah TPI
- 3) Intensifikasi perijinan usaha perikanan
- 4) Penanganan konflik nelayan dan penertiban alat tangkap
- 5) Pendampingan program Nasional sertifikasi tanah nelayan
- 6) Fasilitasi perijinan kapal penangkap ikan

c) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana Pokwasmas

d) Program peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat

- 1) Promosi produk perikanan dan kelautan
- 2) Pemberdayaan masyarakat kawasan pesisir dalam mendukung festival pantai

- 3) Pengembangan garam industri

e) Program pengembangan perikanan tangkap

- 1) Penertiban TPI dan pengamanaan usaha perikanan
- 2) Intensifikasi pendapatan daerah
- 3) Penertiban dan penanganan KPLI
- 4) Reklamasi PPI Tasikagung
- 5) Pembangunan Jetty
- 6) Pengelolaan TPI terpadu
- 7) Pembangunan/rehabilitasi TPI
- 8) Pengembangan TPI Binangun Terpadu (TPI, Docking Kapal, SPDN dan Jasa-Jasa).
- 9) Revitalisasi TPI se kabupaten rembang
- 10) Pemeliharaan sarana dan prasarana TPI se Kabupaten Rembang
- 11) Pengaspalan jalan dan rehab saluran drainase TPI Tasik agung 2
- 12) Refretment TPI Tanjungsari dan Karanganyar
- 13) Kerjasama bidang penangkapan ikan luar pulau
- 14) Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perikanan dan Kelautan
- 15) Pengembangan kawasan minapolitasn di Tasik agung
- 16) Fasilitasi Perijinan Usaha Penangkapan dan Kerjasama Antar Daerah
- 17) Modernisasi Kapal Penangkap Ikan

f) Program pengembangan budidaya perikanan

- 1) Rehabilitasi saluran tambak
- 2) Silvofishery
- 3) Demplot budidaya air tawar di sekitar hutan
- 4) Demplot budidaya air payau
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana budidaya air payau
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana budidaya air tawar
- 7) Pengembangan budidaya rumput laut
- 8) Peningkatan sarana dan prasarana UPR air tawar
- 9) Peningkatan sarana dan prasarana HSRT
- 10) Demplot pengembangan budidaya bandeng intensif
- 11) Demplot budidaya kerapu/kakap di tambak
- 12) Demplot budidaya vaname
- 13) Pengembangan budidaya lele terpal
- 14) Revitalisasi Kolam Rakyat
- 15) Pengadaan Benih Ikan
- 16) Pengadaan Induk Ikan Unggulan
- 17) Pembuatan Pabrik Pakan Ikan
- 18) Pengadaan pakan ikan
- 19) Pengembangan sistem budidaya karamba

g) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

- 1) Pengadaan alat-alat pengolahan
- 2) Pendampingan pada kelompok usaha pengolah ikan
- 3) Pengadaan peralatan laboratorium pengolahan ikan
- 4) Bantuan cool box dan cool storage
- 5) Pengembangan dan pembinaan pasca panen
- 6) Pembangunan peningkatan sarana dan prasarana kluster pengolahan ikan
- 7) Pengembangan cluster pengolahan ikan
- 8) Pengembangan usaha kemitraan dengan lembaga keuangan
- 9) Bantuan alat jaringan pemasaran ikan segar dengan sepeda motor
- 10) Demplot pengolahan hasil perikanan
- 11) Pemberdayaan wanita pengolah ikan
- 12) Pengembangan diversifikasi produk hasil perikanan
- 13) Fasilitasi permodalan bakul ikan
- 14) Bantuan permodalan bagi wanita pengolah ikan

- 15) Revitalisasi bangunan TPI Tasikagung lama untuk pasar ikan
- 16) Pembangunan Pasar Ikan
- 17) Pembangunan Pujasera (Pusat Jajanan Serba Ada) produk perikanan.

h) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

- 1) Kajian penetapan kawasan konservasi

i) Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan

- 1) Pemberdayaan penyuluh perikanan
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana penyuluh perikanan

j) Program peningkatan kapasitas SDM perikanan dan kelautan

- 1) Pelatihan pengolah ikan
- 2) Pembinaan manajemen dan permodalan bakul ikan
- 3) Pembinaan kelompok pengguna/penyewa kios KBT
- 4) Pelatihan dan pembinaan SDM pengelola TPI
- 5) Pelatihan petani garam
- 6) Study banding dan pelatihan pengembangan keterampilan pembudidaya ikan
- 7) Pelatihan nelayan
- 8) Pelatihan pengolahan/ pembudidayaan ikan air tawar dan air payau
- 9) Pendampingan kelompok tani pembudidaya ikan
- 10) Pelatihan ANKAPIN (Ahli Nautika Kapal)
- 11) Pelatihan ATKAPIN (Ahli Teknik Kapal Perikanan)

k) Program Pengembangan Perencanaan, Informasi dan Statistik perikanan dan kelautan

- 1) Statistik perikanan dan kelautan
- 2) Monitoring dan evaluasi kegiatan perikanan dan kelautan
- 3) Konsultan perencanaan dan pengawasan fisik.
- 4) Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan
- 5) Pengadaan Peta Laut

l) Program kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan

- 1) Rehabilitasi mangrove
- 2) Pembuatan dan pemasangan terumbu karang buatan
- 3) Penebaran bibit di perairan umum
- 4) Penataan Pulau – Pulau Kecil
- 5) Pembangunan breakwater
- 6) Pengadaan dan pemasangan alat penanda terumbu karang

B. Kebutuhan Pendanaan

Program prioritas indikatif disusun dengan mempertimbangkan urgensi pelaksanaan program terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang. Implementasi visi dan misi tersebut akan dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar kebijakan umum pembangunan daerah meliputi :

1. Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Publik Yang Representatif dan Komprehensif

- Fasilitasi Peningkatan jalan poros nasional dan provinsi untuk memudahkan akses hingga pedesaan
- Optimalisasi jalan poros antar desa dengan lapis hotmix atau cor beton
- Peningkatan dan penataan pemukiman
- Tercukupinya air bersih dan irigasi di seluruh wilayah Kabupaten Rembang hingga tahun 2015

- Program pembangunan sungai terpadu (PPST)
- Pembangunan embung-embung besar representatif untuk mencukupi kebutuhan irigasi & air bersih, diantaranya : 1) embung Trenggulun, 2) embung Gedari, 3) embung Kaliombo dan 4) embung Rowo Bolodewo
- Penyelesaian Pelabuhan Umum Nasional (PUN) beserta kawasan industri, serta dermaga TPI Sarang-Kragan-Rembang
- Peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

2. Pendidikan Gratis dan Bermutu

- Optimalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mendorong Insentif Guru dan peningkatan sarana prasarana Madin dan TPA sesuai dengan kemampuan daerah
- Pelaksanaan sekolah gratis untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) baik negeri maupun swasta.
- Peningkatan sekolah gratis untuk siswa SMA, SMK, MA, MAK baik negeri maupun swasta sampai kelas XII bagi siswa tidak mampu
- Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi hingga jenjang pendidikan tinggi
- Pendirian politeknik kelautan dan perikanan

3. Kesehatan Gratis Dan Berkualitas

- Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di Rumah sakit dr. R. Sutrasno Rembang (BLUD) untuk rawat jalan dan rawat inap kelas III serta rawat jalan dan rawat inap kelas II di seluruh Puskesmas di wilayah Rembang melalui JKRS (Jaminan Kesehatan Rembang Sehat) dan rujukan PKK III (Rumah sakit Provinsi yang bekerjasama dengan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah) dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap.
- Peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas melalui tercukupinya jumlah SDM; rasio pasien dan tenaga kesehatan yang ideal dan jaminan ketersediaan obat serta sarana dan prasarana kesehatan yang lebih lengkap
- Revitalisasi Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap di seluruh wilayah Kabupaten Rembang
- Menjamin ketersediaan anggaran untuk menyelenggarakan program kesehatan gratis termasuk obat-obatan dan sarana prasarana pendukungnya (JKRS, ASKES, dan Jamkesda Provinsi)
- Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan.

4. Pengembangan Ekonomi Rakyat

- Pengembangan infrastruktur pertanian (jalan usaha tani, jalan produksi, JIDES, JITUT, dan dam Parit).
- Pengembangan pertanian organik (Rembang Go Organic)
- Penyediaan ketersediaan sarana produksi dan peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan
- Pengembangan program dana talangan untuk pertanian
- Peningkatan pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan (promosi hasil produksi dan fasilitasi temu usaha).
- Memajukan klaster-klaster industri, terutama industri produk khas Rembang seperti batik Lasem, bordir, batu bata & genteng, per-garaman, perikanan, industri perkayuan dll.
- Pembukaan kawasan industri terpadu (industri kimia, power plant, pabrik semen) menunjang kawasan pelabuhan umum nasional untuk menjamin peningkatan kesempatan dan peluang kerja
- Optimalisasi usaha/industri bidang pertambangan (kapur, galian c) dengan mendatangkan investasi yang mendukung bidang pertambangan
- Pengembangan industri pariwisata terpadu (jalan wisata bahari, pulau-pulau kecil, BBS I & BBS II, KBT) dan pemeliharaan cagar budaya Kabupaten Rembang
- Pengembangan, revitalisasi, dan penataan pasar tradisional.
- Revitalisasi koperasi unit desa bidang organisasi, management dan usaha

Dalam rangka mencapai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJMD tersebut dibutuhkan alokasi dana bagi kegiatan-kegiatan dalam program yang direncanakan. Tabel berikut ini menunjukkan estimasi kebutuhan dana untuk mewujudkan program prioritas yang tercakup dalam empat pilar pembangunan. Sumber pembiayaan tersebut berasal dari APBD Kabupaten Rembang Tahun yang bersangkutan. Besarnya biaya untuk membiayai program dan kegiatan prioritas maksimal 40%, sedangkan non prioritas atau program keberlanjutan pembangunan minimal 60% dari total belanja langsung. Kebutuhan dana untuk mencapai prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Rembang

No		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (juta Rp)										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD	
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
					Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp
A		Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Publik Yang Representatif dan Komprehensif														
		Urusan Pekerjaan Umum														
		Program : Peningkatan jalan Dan Jembatan														
	1	Fasilitasi peningkatan jalan poros nasional dan propinsi untuk memudahkan akses hingga pedesaan	100% jalan dan jembatan dalam kondisi baik	71% kondisi baik	76%	10,000	82%	12,600	88%	13,200	94%	12,000	100%	14,400	100%	62,200
	2	Optimalisasi jalan poros antar desa dengan lapis hotmix atau cor beton	100% jln lapis hotmix atau cor beton	60% hotmix/cor	68%	8,000	76%	8,400	84%	8,800	92%	9,200	100%	9,600	100%	44,000
		Program : Pengembangan Kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan														
	3	Peningkatan dan penataan pemukiman	100% pemukiman terata	60%	68%	4,000	76%	4,200	84%	4,400	92%	4,600	100%	4,800	100%	22,000
		Program : pembangnan dan pengelolaan jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengarian lainnya														
	4	Tercukupinya irigasi di seluruh wilayah Kabupaten Rembang hingga tahun 2015 Program pembangunan sungai terpadu (PPST)	Cakupan Irigasi (%)	45%	56%	5,500	67%	5,775	78%	6,050	89%	6,325	100%	6,600	100%	30,250

No		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (juta Rp)										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD	
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
					Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp
		Program penyediaan dan pengelolaan air baku														
	5	Tercukupinya air bersih di seluruh wilayah Kabupaten Rembang hingga tahun 2015	100%	40%	52%	5,000	64%	5,250	76%	5,500	88%	5,750	100%	6,000	100%	27,500
	6	Pembangunan embung-embung besar representatif untuk mencukupi kebutuhan irigasi & air bersih, diantaranya : 1) embung Trenggulunan, 2) embung Gedari, 3) embung Kaliombo dan 4) embung Rowo Bolodewo	(%) embung terbangun	0	20%	10,000	40%	10,500	60%	11,000	80%	11,500	100%	12,000	100%	55,000
	7	Penyelesaian Pelabuhan Umum Nasional (PUN) beserta kawasan industri, serta dermaga TPI Sarang-Kragan-Rembang	terbangunnya PUN, kawasn Industri (%)	40%	52%	6,000	64%	6,300	76%	6,600	88%	6,900	100%	7,200	100%	33,000
	8	Peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)	Terbangunnya PPN	50%	60%	5,000	70%	5,250	80%	5,500	90%	5,750	100%	6,000	100%	27,500
B		Pendidikan Gratis dan Bermutu														
		Urusan Pendidikan														
		Program : PAUD														
	1	Optimalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD 90%	80,48%	83,50 %	2,500	85%	2,625	86,50 %	2,750	88,50%	3,220	90%	3,360	90%	14,455
	2	Mendorong Insentif Guru dan peningkatan sarana prasarana Madin dan TPA sesuai dengan kemampuan daerah	(%) peningkatan Insentif guru dan sarana dan prasarana	40%	52%	3,000	64%	3,150	76%	3,300	88%	3,450	100%	3,600	100%	16,500
	3	Peningkatan sekolah gratis untuk siswa SMA, SMK, MA, MAK baik negeri maupun swasta sampai kelas XII bagi siswa tidak mampu	(%) Pemberian biaya operasional siswa tidak mampu	0%	20%	1,200	40%	1,260	60%	1,320	80%	1,380	100%	1,440	100%	6,600

No		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (juta Rp)										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD	
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
					Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp
	4	Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi hingga jenjang pendidikan tinggi	(%) Pemberian Bea siswa prestasi	0%	20%	500	40%	525	60%	550	80%	575	100%	600	100%	2,750
	5	Pendirian politeknik kelautan dan perikanan	Berdirinya politeknik kelautan dan perikanan	0%	10%	2,000	20%	2,100	30%	2,200	40%	2,300	50%	2,400	50%	11,000
C		Kesehatan Gratis Dan Berkualitas														
		Urusan Kehatan														
		Program : Program pelayanan kesehatan penduduk miskin														
	1	Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di Rumah sakit dr. R. Sutrasno Rembang (BLUD) untuk rawat jalan dan rawat inap kelas III serta rawat jalan dan rawat inap kelas II di seluruh Puskesmas di wilayah Rembang melalui program JKRS (Jaminan Kesehatan Rembang Sehat) dan rujukan PKK III (Rumah sakit Provinsi yang bekerjasama dengan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah) dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin (%)	100%	100%	7,000	100%	7,350	100%	7,700	100%	8,050	100%	8,400	100%	38,500
	2	Menjamin ketersediaan anggaran untuk menyelenggarakan program kesehatan gratis termasuk obat-obatan dan sarana prasarana pendukungnya (JKRS, ASKES, dan Jamkesda Provinsi)	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan untuk masyarakat miskin (%)													

No		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (juta Rp)										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD		
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
					Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target
	3	Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan untuk masyarakat miskin (%)														
		Program : Obat dan Perbekalan Pelayanan Kesehatan															
	1	Peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas melalui tercukupinya jumlah SDM; rasio pasien dan tenaga kesehatan yang ideal dan jaminan ketersediaan obat serta sarana dan prasarana kesehatan yang lebih lengkap	Cakupan ketersediaan obat dan sarana dan prasarana kesehatan		70%	76%	3,000	82%	3,150	88%	3,300	94%	3,450	100%	3,600	100%	16,500
		Program :Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jaringannya														-	
	1	Revitalisasi Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap di seluruh wilayah Kabupaten Rembang	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	66.50%	72%	4,500	78%	4,725	84% %	4,950	90%	5,175	100%	5,400	100%	24,750	
																-	
D		Pengembangan Ekonomi Rakyat														-	
	1	Urusan : Pertanian														-	
		Program :: Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan														-	

No		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (juta Rp)										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD	
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
					Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp
		Pengembangan infrastruktur pertanian (jalan usaha tani, jalan produksi, JIDES, JITUT, dan dam Parit).	Peningkatan infrastruktur pertanian (%)	0%	20%	6,000	40%	6,300	60%	6,600	80%	6,900	100%	7,200	100%	33,000
		Pengembangan pertanian organik (Rembang <i>Go Organic</i>)	Pertanian organik	10%	20%	2,500	30%	2,625	40%	2,750	50%	2,875	60%	3,000	60%	13,750
		Pengembangan jaminan ketersediaan sarana produksi dan peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan	Peningkatan jaminan ketersediaan dan penerapan teknologi (%)	0%	20%	3,000	40%	3,150	60%	3,300	80%	3,450	100%	3,600	100%	16,500
		Peningkatan pemasaran dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan (promosi hasil produksi dan fasilitasi temu usaha).	Peningkatan pemasaran dan pengolahan (%)	0%	20%	2,000	40%	2,100	60%	2,200	80%	2,300	100%	2,400	100%	11,000
		Pengembangan program dana talangan untuk pertanian	Program dana talangan	0%	10%	2,500	20%	2,625	30%	2,750	40%	2,875	50%	3,000	50%	13,750
	2	Urusan : Kelautan dan Perikanan														-
		Program : Peningkatan Produksi Perikanan														-
		Pengembangan jaminan ketersediaan sarana produksi dan peningkatan penerapan teknologi perikanan.	Peningkatan sarana produksi dan penerapan teknologi perikanan (%)	0%	20%	3,000	40%	3,200	60%	3,300	80%	3,500	100%	4,200	100%	21,000
		Peningkatan pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (promosi hasil produksi dan fasilitasi temu usaha).	Peningkatan pemasaran dan pengolahan (%)	0%	20%	1,000	40%	1,050	60%	1,100	80%	1,150	100%	1,200	100%	5,500
		Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kelautan dan	Tersedianya sapras	0%	15%	3,000	40%	3,100	60%	3,300	80%	3,400	86%	3,000	100%	12,000

No		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (juta Rp)										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD	
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
					Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp
		perikanan	pendukung													
	3	Urusan : Industri														-
	4	Program :Program Penataan Struktur Industri dan kawasan Industri														-
		Memajukan klaster-klaster industri, terutama industri produk khas Rembang seperti batik Lasem, bordir, batu bata & genteng, per-garaman, perikanan, industri perkayuan dll.	Jumlah Klaster Industri	1	1	2,000	2	2,100	3	2,200	4	2,300	5	2,400	5	11,000
		Urusan : Industri														-
	5	Program :Pengembangan sentra-sentra industri potensial														-
		Pembukaan kawasan industri terpadu (industri kimia, power plant, pabrik semen) menunjang kawasan pelabuhan umum nasional untuk menjamin peningkatan kesempatan dan peluang kerja	Pembangunan kawasan industri (%)	0%	20%	2,000	30%	2,100	50%	2,200	70%	2,300	80%	2,400	80%	11,000
		Urusan : Energi Sumber Daya Mineral														-
		Program : Program Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya mineral														-
		Optimalisasi usaha/industri bidang pertambangan (kapur, galian c) dengan mendatangkan investasi yang mendukung bidang pertambangan	Potensi bahan galian golongan c baru termanfaatkan	20%	30%	1,000	40%	1,050	50%	1,100	60%	1,150	70%	1,200	70%	5,500
		Urusan : Pariwisata														-

No			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (juta Rp)										Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
						Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp	Target	Juta Rp
			Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata													-	
			Pengembangan industri pariwisata terpadu (jalan wisata bahari, pulau-pulau kecil, BBS I & BBS II, KBT) dan pemeliharaan cagar budaya Kabupaten Rembang	Pembangunan pariwisata terpadu	20%	30%	4,000	40%	4,200	50%	4,400	60%	4,600	70%	4,800	70%	22,000
			Urusan : Perdagangan														
			Program : Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan														
			Pengembangan, revitalisasi dan penataan pasar tradisional	berkembangan pasar tradisional	0%	20%	5,000	40%	5,250	60%	5,500	80%	5,750	100%	6,000	100%	27,500
			Jumlah Anggaran Yang Dibutuhkan				114,200		122,010		127,820		132,175		139,800		636,005

BAB IX **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

A. Indikator Agregat dan Indikator Makro

No.	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,55	72,27	72,78	73,30	73,82	74,34	74,80
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	63,7	63,84	64,12	64,40	64,68	64,97	65,25
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,8	67,86	68,39	68,93	69,46	70,01	70,55
4.	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,46	5,08	5,44	5,60	5,76	6,17	6,33
5.	Inflasi (%)	7,90	6,00-8,00	6,00-8,00	5,00-8,00	5,00-8,00	5,00-8,00	4,00-7,00
6.	NTP (%)	98,00	98,00	98,59	99,18	99,77	100,37	100,98
7.	PDRB ADHK tahun 2000 (juta rupiah)	2.186.736,49	2.297.755,42	2.422.753,31	2.558.427,50	2.705.792,92	2.872.650,15	3.054.548,66

B. Indikator Kinerja Urusan

a. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
8.	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, perbatasan dan wilayah terpencil. 1) Peningkatan kelembagaan kamtibmas di tingkat desa/kelurahan. 2) Revitalisasi kegiatan Siskamling. 3) Kerjasama antar desa di wilayah terpencil dan wilayah perbatasan dalam peningkatan kamtibmas.	Menurunnya angka kriminalitas	Menurunnya angka kriminalitas di seluruh wilayah. (kasus)	81	70	60	50	40	30	20
9.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban, penyakit masyarakat (Pekat) dalam masyarakat. 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Siskamling di desa/kelurahan. 2) Bimbingan teknis tentang penanggulangan penyakit masyarakat (Pekat) bagi pengurus RT/RW dan aparat desa/kelurahan. 3) Bimbingan teknis tentang penyalahgunaan Napza bagi aparat desa/kelurahan dan tokoh masyarakat serta tokoh agama.	Menurunnya gangguan keamanan dan Penyakit masyarakat	Tingkat gangguan keamanan menurun, kejadian (%/tahun); Angka kejadian penyakit masyarakat turun 5%/tahun	142 kasus	5%/th	5%/th	5%/th	5%/th	5%/th	5%/th

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
10.	Program pengembangan wawasan kebangsaan dalam masyarakat, terutama untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda. 1) Pelatihan untuk pelatih (TOT) bagi toma, toga dan tokoh perempuan bagi peningkatan kesadaran politik. 2) Pelatihan untuk pelatih (TOT) bagi tokoh dan ormas kepemudaan untuk meningkatkan pendidikan politik bagi pemilih pemula. 3) Bintek bagi pengurus ormas dan LSM dalam meningkatkan kesadaran politik.	Meningkatnya jumlah toma, toga, tokoh perempuan dan tokoh pemuda yang telah mengikuti pendidikan politik	Jumlah toma, toga, tokoh pemuda telah mengikuti pendidikan politik dan kesadaran warga Negara (orang)	150	200	250	300	350	400	450
11.	Program peningkatan kerjasama antara pemerintah, LSM dan kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan pemahaman tentang dasar negara, wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa. 1) Pelatihan untuk pelatih (TOT) bagi pengurus ormas, LSM dan organisasi pemuda bagi peningkatan wawasan kebangsaan. 2) Bintek bagi pengurus partai politik, ormas dan LSM dalam meningkatkan pemahaman tentang dasar negara dan wawasan kebangsaan. 3) Penyelenggaraan forum dialog antar ormas, parpol dan LSM tentang wawasan kebangsaan dan jatidiri bangsa.	Meningkatnya jumlah kegiatan yang diselenggarakan atas dasar kerjasama antara pemda dan LSM dan Pokmas	Jumlah kerja sama LSM, sekolah dan Ormas, kelompok masyarakat yang melaksanakan pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat (jumlah kerjasama)	-	15	20	25	30	35	40

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
12.	Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa/ kelurahan dalam upaya meningkatkan kamtibmas, mengurangi pekat dan tanggap bencana. 1) Pelatihan untuk pelatih (TOT) bagi aparat desa/kelurahan dalam rangka peningkatan kelembagaan dalam rangka tanggap bencana. 2) Pelatihan untuk pelatih (TOT) bagi pengurus lembaga desa/kelurahan dalam rangka peningkatan tanggap bencana. 3) Bintek bagi pengurus lembaga desa/kelurahan dalam meningkatkan tanggap bencana.	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan terlatih dalam Kamtibmas, Pekat dan tanggap bencana.	Jumlah desa/ kelurahan yang terlatih dalam Kamtibmas, Pekat dan tanggap bencana. (desa)	20	40	60	80	120	160	195
13.	Program peningkatan pendidikan politik masyarakat, untuk Tomas, penduduk perdesaan, kaum perempuan dan pemilih pemula. 1) Pelatihan untuk pelatih (TOT) bagi aparat desa/kelurahan dalam rangka peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. 2) Pelatihan pengurus lembaga desa/kelurahan dalam rangka pendidikan politik masyarakat.	Meningkatnya jumlah toma, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang telah mengikuti pendidikan politik	Jumlah tokoh masyarakat, pemuda dan perempuan mengikuti pendidikan politik. (orang)	150	200	250	300	350	400	450
14.	Program peningkatan kapasitas dan kelembagaan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Rakyat Terlatih (Ratih) dan Tagana dalam penanganan gangguan kamtibmas, penyakit masyarakat (Pekat) dan penanganan bencana.	Meningkatnya jumlah lembaga perlindungan masyarakat yang memiliki kemampuan	Persentase lembaga yang memiliki kemampuan menangani gangguan	-	20%	30%	40%	50%	60%	80%

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1) Peningkatan kapasitas bagi petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), Rakyat Terlatih (Ratih) dan Tagana dalam penanganan gangguan kamtibmas dan penanganan bencana. 2) Bantuan peralatan bagi petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), Rakyat Terlatih (Ratih) dan Tagana dalam penanganan bencana. 3) Fasilitasi bagi pembentukan kelembagaan Tagana di desa dan kelurahan. 4) Fasilitasi bagi pembentukan forum kerjasama secara kelembagaan Tagana di tingkat kecamatan.	menangani gangguan kamtibmas dan pekat	kamtibmas dan pekat. (%)							

b. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kpegawaian, dan Persandian

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1) Penyusunan Produk Hukum Daerah 2) Sosialisasi Perundang-undangan dan Penyuluhan Hukumnham 3) Rakor Aparat Penegak Hukum 4) Diseminasi Ranham 5) Peningkatan JDI Hukum	Peningkatan peran serta lembaga pemerintah dalam penegakkan hukum dan HAM	Jumlah Perda yang disusun	5	10	10	10	10	10	10
			Perbub yang disusun	53	50	50	60	60	60	60
			Keputusan Bupati	500	500	550	600	600	600	600
			Sosialisasi Hukum	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali
			penyuluhan Hukum	5 kali	5 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
			Rakor Aparat Penegak Hukum	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
			Desmininasi Ranham	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
			Tingkat JDI Hukum di Kab Rembang	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%
2.	Program Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah	Tertanganinya kasus pengaduan yang masuk	Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat	0	0	0	10%	10%	10%	10%
3.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan KDH 1) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah 2) LKPJ Bupati 3) LPPD Kabupaten Rembang 4) LKPJ AMJ Bupati 5) Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 6) Fasilitasi Penegakan Hukum dalam Pileg/Pilgub/Pilkada/Pilkades 7) Fasilitasi dan Koordinasi Kewilayahan 8) Fasilitasi dan Koordinasi Pertanahan	Meningkatnya kinerja SKPD	Persentase SKPD yang memiliki kinerja baik (tanpa catatan).	-	40%	60%	80%	100%	100%	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	9) Bantuan Hibah ke KPU & Panwas Rembang 10) Bantuan Fasilitas Pilkades tingkat kecamatan									
4.	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah 1) Fasilitas Kerjasama Daerah 2) Fasilitas asosiasi kerjasama pemerintah kabupaten.	Meningkatnya jumlah kerjasama antara Kabupaten Rembang dengan pihak ketiga.	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan atas dasar kerjasama antar daerah (buah)	8	12	16	20	25	30	30
5.	Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 1) Pengisian Perangkat Desa 2) Fasilitas peningkatan sumber daya Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa 3) Penyusunan dan Konsultasi Publik Draft Raperda ttg Pemerintahan Desa 4) Fasilitas Pilkades	Meningkatnya Fungsi pemerintahan Desa	Persentase desa yang telah memperoleh pembinaan (%)	20	30	45	60	75	90	100
6.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa 1) Fasilitas bantuan dan Tunjangan Kades/Perangkat Desa	Perwakilan aparat dari 287 desa/kel Meningkatnya jumlah desa yang mampu	Jumlah desa yang mampu mengelola keuangan desa dengan baik meningkat	35 desa	10%/th	10%/th	10%/th	10%/th	10%/th	10%/th

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	2) Fasilitas Bantuan Keuangan dari Pemprov ke Desa/Kelurahan 3) Pendataan tanah kas desa 4) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan/Desa	mengelola keuangan desa dengan baik	10%/tahun							
7.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Penyusunan sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya efisiensi penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah	Efisiensi penggunaan anggaran daerah di setiap SKPD (%)	60%	65%	75%	85%	95%	100%	100%
8.	Peningkatan perencanaan penerapan SPM untuk urusan wajib 1) Penyusunan target capaian SPM untuk urusan wajib bagi Kabupaten Rembang.	Meningkatnya jumlah SKPD yang telah berhasil melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM	Jumlah SKPD yang telah melaksanakan SPM semakin meningkat.	-	8	8	8	16	16	16
9.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan 1) Evaluasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Setda 2) Evaluasi dan pelaporan kinerja program pembangunan 3) Meningkatkan produktifitas aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pada SKPD	Jumlah SKPD yang mampu mengelola keuangan dengan baik semakin meningkat (%)	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
10.	Program Penanganan pengaduan masyarakat 1) Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Tertanganinya kasus pengaduan yang masuk pada Pemda	Tingkat pelayanan Pengaduaan Masyarakat	0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%
11.	Program Peningkatan Pelayanan kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah 1) Fasilitas penegakkan hukum dialog / audensi dengan tokoh - tokoh mayarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial 2) Fasilitas Pilkades 3) Penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 4) DESK pileg/ pilgun/ pilkada/ pilkades 5) Bantuan pengamanan 6) Pileg/ pilgub/ pilkada 7) Bantuan hibah ke KPU & panwas Rembang 8) Bantuan fasilitas penyelenggaraan rapat koordinasi kewilayahan 9) Fasilitas & koordinasi pertanahan	Terwujudnya kelancaran komunikasi & pelaksanaan demokrasi dalam pemerintahan	Jumlah Fasilitas penegakan hukum	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
			Jumlah dialog / audiensi	14 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec	14 Kec
			Jumlah fasilitasi pilkades	0	0	0	0	87%	8%	5%
			Jumlah kunjungan kerja pejabat Negara	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
			Jumlah fasilitasi partisipasi politik dalam pilkada	0 paket	1 paket	0 paket	0 paket	1 paket	1 paket	1 paket
			jumlah koordinasi dalam bidang pemerintahan	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
			jumlah koordinasi dalam bidang pertanahan	0 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
12.	Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum. 1) Pembakuan nama rupa bumi 2) Penegasan batas daerah 3) Pembangunan/ rehabilitasi 4) Sarana prasarana pelayanan 5) Umum di kecamatan/ desa 6) Pembinaan kecamatan	Peningkatan sarana prasaran dan fasilitas pelayanan di bidang pemerintah	Jumlah pembakuan nama rupa bumi dan penegasan batas daerah	0 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
			Jumlah kec./ ds yang direhab/ dibangun untuk pelayanan umum	294 Desa	294 Desa	294 Desa	294 Desa	294 Desa	294 Desa	294 Desa
			Jumlah kec. Yang dibina	14 kec	14 kec	14 kec	14 kec	14 kec	14 kec	14 kec
13.	Program Peningkatan fasilitas pelayanan public 1) Fasilitasi penyusunan standart pelayanan public 2) Penyusunan target capaian SPM 3) Fasilitasi penerapan ISO 9001 – 2000 dalam pelayanan public 4) Monitoring dan eavaluasi pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan aparatur pemerintahan yang berkualitas dan professional di bidang kelembagaan, tata laksana, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan. Peningkatan pelayanan public yang sesuai standart mutu pelayanan prima	- Jumlah sertifikasi ISO	5 buah	6 buah	7 buah	10 buah	15 buah	20 buah	20 buah
			- Tingkat monitoring dan evaluasi pelayanan public	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			- Jumlah ketersediaan KIP	-%	50%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
14.	Program Pembinaan dan pengembangan tata laksana 1) Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan 2) Pembuatan kartu identitas pegawai 3) Fasilitasi penyusunan standart Operaty Procedure 4) Penyusunan dan sosialisasi tata naskah dinas 5) Pengelolaan administrasi Kepegawaian setda	a. Terwujudnya tata laksana pemerintahan yang baik	- Jumlah SOP yang tersusun	-	-	-	46 SKPD	-	-	-
			Jumlah tata naskah dinas & perbub pedoman pakaian dinas	46 SKPD 1 pedoman	46 SKPD 1 pedoman	46 SKPD 1 pedoman	46 SKPD 1 pedoman	46 SKPD 1 pedoman	46 SKPD 1 pedoman	46 SKPD 1 pedoman
			Tingkat kelancaran pengelolaan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Program Pembinaan dan pengembangan kelembagaan 1) Evaluasi tupoksi dan uraian jabatan structural 2) Evaluasi kelembagaan 3) Penyusunan kelembagaan perangkat daerah	Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang efektif, efisien dan berbasis kinerja	Tingkat evaluasi tupoksi	-	160%	-	100%	-	-	100%
			Tingkat evaluasi kelembagaan	-	160%	-	100%	-	-	100%
			Penetapan / penyempurnaan perda SKPD sesuai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.	Program Pengembangan budaya kerja aparatur 1) Penyusunan standart kompetensi jabatan 2) Penyusunan analisis beban kerja 3) Sosialisasi SPIP 4) Forkompanda	Terwujudnya pemberdayaan aparatur secara tepat sesuai dengan kompetensi & profesionalisme aparatur	Tingkat kompetensi dan profesionalisme aparatur	60%	65%	70%	70%	70%	70%	70%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
17.	Program Peningkatan Kehumasan 1) Peningkatan kehumasan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan kehumasan	- Jumlah aparatur yang mengikuti bintek / workshop	2%	1%	2%	3%	3%	3%	3%
			- Jumlah SDM yang mengikuti diklat, bintek di bidang kehumasan	50 Orang	- Orang	- Orang	55 Orang	60 Orang	65 Orang	70 Orang
18.	Program peningkatan pemanfaatan persandian dan komunikasi 1) Peningkatan pemanfaatan persandian	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur sekretariat daerah sesuai analisis kebutuhan guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas	Tingkat ketersediaan sarpras sparatur	70%	70%	75%	80%	80%	80%	80%
			Tingkat pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah kabupaten rembang dengan pusat dan provinsi	70%	70%	75%	80%	80%	80%	80%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
19.	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2) Penyusunan LAKIP	Terwujudnya tertib administrasi, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah	Tingkat realisasi laporan fisik & keuangan kegiatan belanja langsung	95%	95%	97%	97%	100%	100%	100%
		Mewujudkan tertib adminitrasi perencanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah	Tingkat ketepatan & kelancaran penyusunan LAKIP	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
20.	Program pemeliharaan kantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dan koordinasi aparat PAM terkait	Terpeliharanya kerjasama dan koordinasi dalam pemeliharaan kerjasama	- Kerjasama dengan Pam terkait	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
21.	Program Pemantapan pengadaan barang dan jasa 1) Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 2) Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 3) Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang pengadaan barang/jasa pengadaan barang	Ter wujudnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan	Terbentuknya ULP & LPSE	-	-	50%	100%	100%	100%	100%
			% Tingkat eksistensi ULP/paket pengadaan yang tertangani	-	-	50%	75%	75%	100%	100%
			Tingkat kelulusan ujian sertifikasi pengadaan barang / jasa	20%	25%	30%	30%	30%	30%	30%
			Terselenggaranya sosialisasi prosedur pengadaan barang & jasa	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
22.	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi Penyelenggaraan pembinaan dan registrasi Usaha Jasa pelaksanaan konstruksi	Meningkatnya kualitas usaha jasa pelaksanaan jasa konstrukdi	Jumlah sosialisasi dan registrasi jasa kontruksi	2 kali 300 IUJK	2 kali 300 IUJK	2 kali 300 IUJK	2 kali 300 IUJK	2 kali 300 IUJK	2 kali 300 IUJK	2 kali 300 IUJK

c. Perencanaan Pembangunan

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan 1) Pengumpulan, updating dan analisis informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 2) Penyusunan Sistem informasi dan profil daerah 3) Penyusunan database perencanaan pembangunan daerah 4) Pembuatan audio visual selayang pandang 5) Pengembangan data dan informasi secara online sampai tk SKPD	Meningkatnya ketersediaan data perencanaan pembangunan	Jumlah penerbitan data yang tersedia untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah (%)	75%	80%	90%	95%	100%	100%	100%
2.	Penelitian dan pengembangan serta penerapan iptek 1) Peningkatan kualitas kreatifitas dan inovasi masyarakat (KRENOVA) 2) Peningkatan kualitas jamboree teknologi (jamtek) 3) Fasilitasi Pengadaan dan pengembangan tenaga peneliti bagi PNS 4) Peningkatan kualitas pemahaman IPTEK melalui Studi banding 5) Koordinasi peningkatan bidang litbang dan terapannya 6) Pembentukan Dewan Riset Daerah	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan iptek	Jumlah temuan yang mendapat peringkat propinsi Jateng	1	2	3	4	4	5	5
			Jumlah peserta bertambah dan minat pengunjung bertambah	0	3	4	4	5	5	0
			Jumlah peneliti dari unsur PNS	0	0	0	0	0	1	1
			Meningkatnya wawasan bidang IPTEK	0	0	1	2	2	3	4
			Terbentuknya dewan riset daerah	0	0	1	0	0	0	0

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.	Perencanaan pembangunan daerah 1) Penyusunan RKPD 2) Koordinasi Penyusunan LAKIP 3) Penyusunan RPJMD 4) Penyusunan RPJPD 5) Penyusunan KUA dan PPAS 6) Koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan 7) Penyusunan aplikasi perencanaan pembangunan daerah 8) Koordinasi penyusunan LPPD, LKPJ dan AMJ	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan	Dokumen perencanaan: RKPD, LAKIP, RPJMD, RPJPD, LPPD, LKPJ dan AMJ tersusun tepat waktu (%)	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Perencanaan pembangunan ekonomi 1) Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 2) Penyusunan indikator ekonomi daerah 3) Perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat 4) Penyusunan model penanggulangan kemiskinan 5) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 6) Koordinasi dan fasilitasi RPPK 7) pengembangan ekonomi lokal (PEL) 8) Pengembangan Agropolitan 9) Pengembangan Agroforestry 10) Penyusunan Tabel Input-Output	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	Dokumen : master plan pembangunan ekonomi, indikator ekonomi daerah, perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat, master plan penanggulangan kemiskinan, dan RPPK tersusun tepat waktu (1 dokumen/tahun)	1	1	1	1	1	1	1

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	11) Kajian Potensi Pendapatan Asli daerah (PAD) 12) Penyusunan Data Base Kemiskinan 13) Penyusunan Masterplan Investasi Daerah 14) Penyusunan Actionplan pengelolaan pertanian Terpadu (PPT) 15) Penyusunan Masterplan kerjasama pemerintah swasta.									
5.	Perencanaan pembangunan sosial budaya 1) Penyusunan masterplan pendidikan 2) Penyusunan masterplan kesehatan 3) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial ekonomi 4) Fasilitasi dan koordinasi pengarusutamaan gender 5) Fasilitasi dan koordinasi pengarusutamaan hak anak 6) Fasilitasi dan koordinasi pengembangan kabupaten layak anak 7) Fasilitasi dan koordinasi pengembangan tatakelola pemerintahan yang baik 8) Kajian pengelolaan potensi sosial budaya	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya	Dokumen masterplan pendidikan, masterplan kesehatan tersusun tepat waktu. (1 dokumen per tahun)	1	1	1	1	1	1	1

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
6.	Kerjasama pembangunan 1) Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan 2) Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 3) Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 4) Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 5) Fasilitasi dan koordinasi program PLAN Indonesia 6) Fasilitasi, koordinasi dan advokasi peningkatan program pembangunan SDM dini. 7) Fasilitasi dan koordinasi pembinaan lingkungan social 8) Fasilitasi dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan daerah	Terlaksananya koordinasi pembangunan dengan tetangga pemerintah kabupaten	Jumlah kegiatan koordinasi kerjasama dengan pemerintah kabupaten sekitarnya (jumlah Mou)	5	5	5	7	7	7	7
7.	Pengembangan wilayah perbatasan 1) Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 2) Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan	Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan daerah perbatasan	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah perbatasan dengan Kab. Tuban, Blora, Bojonegoro dan Pati tersusun (1 dokumen per tahun)	-	0	1	1	1	1	1

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
8.	Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1) Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 2) Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh 3) Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 4) Studi pengembangan kawasan perdesaan	Terlaksananya koordinasi dan Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	-	1	1	1	1	1	1
9.	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1) Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah 2) Koord. penyusunan masterplan pengendalian sumberdaya alam dan LH 3) Koordinasi penyusunan masterplan sumberdaya air 4) Koord. penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah 5) Koordinasi penyusunan perencanaan sanitasi total berbasis masyarakat 6) Penyusunan masterplan pembangunan sea front city	Tersusunnya dokumen perencanaan wilayah dan SDA	Jumlah dokumen perencanaan wilayah dan SDA yang berhasil disusun meningkat (1 dok/tahun)	-	0	1	1	1	1	1

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
10.	Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 1) Koordinasi penyusunan profil daerah rawan bencana 2) Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan untuk semua daerah rawan bencana telah tersusun (1 dok)	-	0	0	0	1	0	0
11.	Peningkatan kapasitas paratur kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1) Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 2) bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kemampuan aparatatur lembaga perencanaan pembangunan daerah	Jumlah aparat yang memiliki kemampuan dalam perencanaan pembangunan daerah (orang)	-	40	40	60	60	80	80
12.	Perencanaan pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang 1) Penyusunan dan sosialisasi rencana tata ruang wilayah/kabupaten 2) Koordinasi kebijakan pemanfaatan dan pengendalian ruang	Terlaksananya koordinasi dan Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian tata ruang	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian tata ruang		1	1	1	1	1	1
13.	Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan 1) Pelaksanan Evaluasi kinerja kegiatan 2) Pelaksanaan monitoring kegiatan setiap tahun. 3) Penyusunan LKPJ 4) Penyusunan AMJ 5) penyusunan LPPD dan ILPPD	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan	Jumlah kegiatan perencanaan yang berhasil di monitor dan dievaluasi mencapai 100%	-	100	100	100	100	100	100

d. Statistik

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah. Kegiatan : pengumpulan, penyusunan, pengolahan, analisis serta penyajian data dan informasi statistik	1. Terwujudnya penyediaan data/informasi/statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah 2. Terwujudnya kemudahan mengakses data statistik 3. Meningkatnya kesadaran petugas akan pentingnya data	Tersedianya data/informasi/statistik yang akurat dan handal.	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

e. Kearsipan

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan. 1) Pengadaan sarana penyimpanan arsip 2) Pengembangan jaringan informasi kearsipan	Meningkatnya kapasitas penyimpanan dokumen/arsip	Jumlah dokumen yang tersimpan pada depo penyimpanan	100 ribu berkas	120 ribu berkas	140 ribu berkas	160 ribu berkas	180 ribu berkas	200 ribu berkas	220 ribu berkas
2.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. 1) Peningkatan kapasitas SDM bidang kearsipan di tingkat SKPD	Meningkatnya jumlah SDM yang mampu mengolah dokumen/arsip sesuai dengan ketentuan	Jumlah dokumen/arsip SKPD yang diolah sesuai dengan ketentuan kearsipan	87.000	94.500	102.000	109.500	117.000	124.500	132.000
3.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan. 1) Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 2) Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah Kegiatan pemeliharaan terhadap sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan	-	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan
4.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi. 1) Pengembangan jenis dan sistem layanan informasi 2) Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Meningkatnya jumlah dokumen/arsip yang di sajikan pada pengguna	Jumlah dokumen/arsip yang disajikan untuk pengguna	87.000	94.500	102.000	109.500	117.000	124.500	132.000

f. Keperpustakaan

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program pengembangan budaya baca 1) Promosi minat baca melalui pameran, lomba yang berkaitan dengan perpustakaan 2) Pengembangan layanan perpustakaan keliling	Meningkatnya jumlah pengunjung dan koleksi perpustakaan	Jumlah Pengunjung perpustakaan Jumlah koleksi perpustakaan	25.000 orang -	30.000 orang 2000 eks	35.000 orang 3.500 eks	40.000 orang 4.000 eks	45.000 orang 4.500 eks	50.000 orang 5.000 eks	55.000 orang 6.000 eks
2.	Program pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan 1) Pengembangan jaringan perpustakaan daerah, sekolah, desa/kelurahan dan perpustakaan khusus 2) Kerjasama pertukaran koleksi perpustakaan antara perpustakaan daerah, sekolah, desa/kelurahan dan perpustakaan khusus 3) Pengembangan SDM pengelola perpustakaan 4) Penyediaan sarana pelayanan perpustakaan	Meningkatnya jumlah perpustakaan yang melakukan pengelolaan dan pelayanan sesuai dengan undang-undang	Persentase perpustakaan yang melakukan pengelolaan dan pelayanan sesuai dengan undang-undang	-	20%	30%	40%	50%	60%	80%
3.	Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan 1) Pengalihmediaan koleksi perpustakaan dari tekstual menjadi digital 2) Penduplikasian koleksi perpustakaan	Bertambahnya jumlah koleksi perpustakaan dari alihmedia dan duplikasi koleksi perpustakaan sebesar 50%	Persentase Kenaikkan koleksi perpustakaan berbentuk digital	-	20%	30%	40%	50%	60%	80%

g. Pekerjaan Umum

1) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan (Bina Marga).

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1) Perencanaan pembangunan jalan 2) Survei kontur jalan dan jembatan 3) Pembangunan jalan 4) Perencanaan pembangunan jembatan 5) Pembangunan jembatan 6) Penataan Akses Jalan Pantai	Meningkatnya kuantitas jaringan jalan dengan memperbaiki jalan yang rusak berat.	Meningkatnya persentase panjang jalan dalam kondisi baik	71%	71%	80%	85%	90%	95%	100%
		Meningkatnya prasarana jalan lokal yang menghubungkan antar kecamatan maupun antar desa								
		Meningkatnya kuantitas jaringan jembatan	Meningkatnya Jembatan dalam kondisi Baik (unit)	4	2	0	0	0	0	0
		Meningkatnya kualitas jaringan jalan dan jembatan dengan memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak berat.	Meningkatnya jumlah panjang jalan dalam kondisi baik total panjang jalan yang ada	71%	71%	80%	85%	90%	95%	100%

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1) Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan Jalan 2) Perencanaan rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan 3) Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan 4) Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Meningkatnya kuantitas jaringan jalan dengan memperbaiki jalan yang rusak. Meningkatnya prasarana jalan lokal yang menghubungkan antar kecamatan maupun antar desa Meningkatnya kuantitas jaringan jembatan Meningkatnya kualitas jaringan jalan dan jembatan dengan memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak Meningkatnya persentase panjang jalan dalam kondisi baik Meningkatnya Jembatan dalam kondisi Baik (unit)	Meningkatnya jumlah panjang jalan dalam kondisi baik total panjang jalan yang ada	71%	71%	80%	85%	90%	95%	100%

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.	Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan	Meningkatnya prasarana jalan lokal melalui peningkatan kualitas dan panjang jalan yang menghubungkan antar kecamatan maupun antar desa.	Berkurangnya intensitas kecelakaan lalu lintas sebesar (%)	-	-	3%/ tahun	3,5%/ tahun	4%/ tahun	4,5%/ tahun	5%/ tahun
4.	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 1) Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 2) Rehabilitasi Jembatan dalam kondisi tanggap darurat	Meningkatnya keamanan jalan dalam berlalulintas	Berkurangnya intensitas kecelakaan lalu lintas sebesar (%)	-	-	3%/ tahun	3,5%/ tahun	4%/ tahun	4,5%/ tahun	5%/ tahun
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Meningkatnya kualitas jaringan jalan dan jembatan	Meningkatnya jumlah panjang jalan dalam kondisi baik total panjang jalan yang ada	71%	71%	80%	85%	90%	95%	100%
6.	Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan jembatan 1) Penyusunan sistem Informasi/data base Jalan 2) Penyusunan sistem Informasi/data base jembatan	Meningkatnya sistem informasi/data base jalan/jembatan dalam perencanaan pembangunan jalan/jembatan dan pemanfaatan ruang kota secara terpadu dan terintegrasi.	Tersusunnya data base jaringan jalankabupaten rembang secara keseluruhan.	-	-	-	-	-	-	1 paket

2) Bidang Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong 1) Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2) Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong 3) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Meningkatnya drainase dalam kondisi baik	% Drainase dalam kondisi baik	40%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
2.	Program Rehabilitasi pembangunan sarana dan prasarana drainase lingkungan	Meningkatnya kualitas dan volume saluran drainase di perkotaan maupun perdesaan secara terpadu dan terintegrasi	% wilayah yang memiliki drainase	-	-	40%	50%	60%	70%	80%

3) Bidang Sumber Daya Air

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Meningkatnya pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan suberdaya air	Tersusunnya Masterplan Pengelolaan Sumber Daya Air	-	-	-	-	-	-	1 paket
2.	Program pengendalian Banjir dan penanganan pantai	Meningkatnya sistem pengendalian banjir/genangan. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian banjir	Tersusunnya Masterplan Pengelolaan Sumber Daya Air	-	-	-	-	-	-	1 paket
3.	Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1) Perencanaan pembangunan jaringan Irigasi 2) Perencanaan pembangunan jaringan air berslh/alr minum 3) Perencanaan pembangunan reservoir 4) perencanaan pembangunan pintu	1. Menigkatnya jaringan irigasi teknis 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian	% peningkatan sawah dengan irigasi teknis	-	-	10%	20%	30%	40%	50%
			Tersusunnya Materplan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Rembang.	-	-	-	-	-	-	1 paket

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	air 5) Perencanaan normalisasi saluran sungai 6) Pembangunan jaringan air bersih/air minum 7) Pembangunan reservoir 8) Pembangunan pintu air 9) Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 10) Pengelolaan sungai terpadu 11) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Irigasi 12) Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan air bersih/air minum 13) Rehabilitasi/Pemeliharaan reservoir 14) Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 15) Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai 16) Optimalisasi fungsi jaringan Irigasi yang telah dibangun 17) Pemberdayaan petani pemakai air	sumber daya air 3. Meningkatnya kualitas dan volume sarana dan prasarana penampungan potensi sumber daya air	Tersusunnya Materplan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Rembang.	-	-	-	-	-	-	1 paket

4) Bidang Bidang Air Minum / Air Baku

4) Bidang Air Minum/Air Baku

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum 1) Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 2) Pengembangan teknologi pengolahan air minum 3) Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum 4) Pengembangan sistem distribusi air minum 5) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	Meningkatnya kualitas pelayanan air bersih dan pengembangan jaringan air bersih Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program pembangunan sarana dan prasarana air bersih.	% penduduk yang dilayani air bersih	-	-	50%	60%	70%	80%	90%
2.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1) Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 2) Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa 3) Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 4) Pembangunan sumur-sumur air tanah 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air 6) Peningkatan distribusi penyediaan air baku melalui SPAM di wilayah Kabupaten Rembang	Meningkatnya dan berkembangnya sistem jaringan dan manajemen pengolahan air (IPA-IPAS) secara terpadu dan berkesinambungan.	% meningkatnya persediaan Air Baku/tahun	-	-	2%	4%	6%	8%	10%

5) Bidang Air Limbah

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air limbah 1) Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 2) Pengembangan teknologi pengolahan air limbah 3) Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah 4) Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah 5) P eningkatan sanitasi dasar berbasis rumah tangga dan masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sanitasi pada lingkungan pemukiman yang padat di wilayah Kabupaten Rembang.	% penyediaan sarana dan prasarana air limbah	-	-	2%	4%	6%	8%	10%
		Tersusunnya masterplan sistem perencanaan sanitasi dan pengelolaan air limbah secara terpadu dan terintegrasi.	Tersedianya masterplan air limbah Wilayah Kabupaten Rembang	-	-	-	-	-	-	1 paket
		Meningkatnya pengelolaan air limbah dalam skala komunitas (kelompok masyarakat)	% air limbah yang ditangani	-	-	50%	60%	70%	80%	90%

6) Bidang Persampahan

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program peningkatan kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Meningkatnya volume sampah terangkut	% peningkatan sampah terangkut	-	-	1%/ Tahun	2%/ Tahun	3%/ Tahun	4%/ tahun	5%/ tahun
2.	Program Pengelolaan persampahan dari sumber timbulan sampah	Meningkatnya kesadaran penduduk dalam pengelolaan sampah	% penduduk melaksanakan konsep 3R	-	-	10%	15%	20%	25%	30%
3.	Program Peningkatan kinerja pengolahan persampahan	Meningkatnya kinerja pengolahan persampahan	% peningkatan sampah terangkut	-	-	1%/ Tahun	2%/ Tahun	3%/ Tahun n	4%/ tahun	5%/ tahu

7) Bidang Perkotaan dan Perdesaan

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1) Pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan secara terpadu dan terintegrasi. 2) Penataan lingkungan permukiman penduduk yang berwawasan lingkungan 3) Penataan dan penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan melalui pendekatan ekologi kota.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pada wilayah strategis dan cepat tumbuh.	% Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan	-	-	1%/ tahun	2%/ tahun	3%/ tahun	4%/ tahun	5%/ tahun
			% Terlengkapinya 7 PSD lingkungan permukiman yang memadai pada kawasan permukiman	-	-	20%	40%	60%	80%	100%
			Terpenuhinya 20% RTH publik perkotaan	-	-	20%	40%	60%	80%	100%
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1) Mewujudkan NSPM pencegahan bahaya kebakaran di wilayah perkotaan 2) Meningkatkan proteksi kebakaran Kabupaten Rembang melalui Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) 3) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan benacn kebakaran	Tersusunnya Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) kabupaten rembang	-	-	-	-	-	-	1 paket
			Menurunnya kasus kebakaran	15	-	-	-	-	-	0

8) Bidang Pemukiman

No	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Program pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan 1) Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 2) Penataan lingkungan pemukiman kawasan pesisir 3) Rehabilitasi kawasan permukiman kumuh nelayan 4) Pembangunan Jalan dan Jembatan perdesaaan 5) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 6) Pembangunan pasar perdesaan 7) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan perdesaaan 8) Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 9) Rehabilitasi/Pemeliharaan pasar perdesaan	Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang layak	% Realisasi bantuan peningkatan Kualitas Permukiman	-	-	1%/ tahun	2%/ tahun	3%/ tahun	4%/ tahun	5%/ tahun
		Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman	Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang layak	-	-	50%	60%	70%	80%	90%
			Tersusunnya Peraturan Tentang Bangunan dan Gedung Kabupaten Rembang	-	-	-	-	-	-	1 paket

9) Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program pembinaan teknis bangunan dan gedung	Meningkatnya kualitas teknis bangunan dan penataan lingkungan perkotaan	% bangunan gedung dan lingkungan tertata baik	-	-	10%	20%	30%	40%	50%
2.	Program penataan lingkungan permukiman perkotaan	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan		-	-	-	-	-	-	-
3.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan dan gedung	Menurunnya kasus kebakaran	Jumlah kasus kebakaran	-	-	-	-	-	-	0 kasus

10) Bidang Jasa Konstruksi

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.	Program pembinaan teknis bangunan dan gedung	Meningkatnya kualitas teknis bangunan dan penataan lingkungan perkotaan	% bangunan gedung dan lingkungan tertata baik	-	-	10%	20%	30%	40%	50%
5.	Program penataan lingkungan permukiman perkotaan	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan		-	-	-	-	-	-	-
6.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan dan gedung	Menurunnya kasus kebakaran	Jumlah kasus kebakaran	-	-	-	-	-	-	0 kasus

h. Perhubungan

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam rangka mendukung konsep pengembangan sea front city. 1) Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan;; 2) Pengembangan infrastuktur perhubungan pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil 3) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan penyeberangan; 4) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan umum dan barang; 5) Peningkatan pengelolaan pelabuhan umum nasional; 6) Peningkatan terminal angkutan umum, barang dan dermaga; 7) Pengadaan perlengkapan jalan; 8) Pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran; 9) Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; 10) Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan; 11) Pengembangan angkutan Kereta Api.	Meningkatkan kualitas prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan dan laut dalam rangka mendukung program pengembangan sea front city .	1.Tersusunnya pedoman penataan transportasi wilayah kabupaten	-	-	1 paket	-	-	-	-
			2. Meningkatnya Kelancaran arus lalu lintas, orang barang dan jasa di Kab. Rembang dan antar wilayah.	30%	35%	50%	65%	70%	80%	90%

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. 1) Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor; 2) Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor; 3) Rehabilitasi / pemeliharaan terminal angkutan umum, barang dan dermaga; 4) Rehabilitasi / pemeliharaan perlengkapan jalan; 5) Rehabilitasi / pemeliharaan alat komunikasi. 6) Rehabilitasi / pemeliharaan terminal;	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan darat	% peningkatan kelancaran, kualitas dan kuantitas pelayanan LLAJ	-	-	10%	20%	30%	40%	50%
3.	Peningkatan pelayanan angkutan. 1) Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat pengguna angkutan umum; 2) Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang; 3) Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang; 4) Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya; 5) Kegiatan penciptaan keamanan dan pelayanan penumpang di lingkungan terminal; 6) Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal; 7) Kegiatan penataan tempat pemberhentian angkutan umum;	Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan	Tingkat pelayanan angkutan penumpang meningkat sebanyak 20 % dari armada pelayanan eksisting.	541 unit	541 unit	595 unit (10%)	615unit (13,75%)	636unit (17,5%)	656unit (21,25%)	676 unit (25%)

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	8) Pengumpulan dan analisis data base angkutan umum; 9) Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan; 10) Fasilitasi perijinan dibidang perhubungan; 11) Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; 12) Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir teladan; 13) Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan; 14) Evaluasi pelayanan angkutan umum.									
4.	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. 1) Pembangunan halte bus; 2) Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran; 3) Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan umum nasional. 4) Pembangunan Gedung Terminal 5) Pembangunan tempat parkir mobil barang 6) Pembangunan Kantor Dinas 7) Pembangunan Pelabuhan Umum Nasional 8) Pembangunan Jembatan penyeberangan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan	50% biaya subsidi pembangunan bidang sarana dan prasarana perhubungan diberikan pada pihak ketiga	-	-	10%	20%	30%	40%	50%
5.	Peningkatan dan pengamanan lalu lintas. 1) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas; 2) Pengadaan marka jalan; 3) Pengadaan pagar pengaman jalan.	Menurunnya kasus pelanggaran terhadap peraturan transportasi darat seperti kendaraan tidak laik jalan.	tingkat kecelakaan lalu lintas menurun sebesar 20 %	300 kejadian	300 kejadian	10%	12,5%	15%	17,5%	20%

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
6.	Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. 1) Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor; 2) Pengadaan alat uji kendaraan bermotor; 3) Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor.	Meningkatnya pelayanan uji kendaraan bermotor dalam rangka mengurangi kasus kecelakaan karena kondisi kendaran yang kurang baik.	% jumlah kendaraan yang layak dan lulus uji	-	-	10%	30%	50%	70%	90%
7.	Peningkatan ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas. 1) Pengawasan dan penertiban lalu lintas jalan; 2) Pengawasan angkutan lebaran / syawalan; 3) Peningkatan fasilitas patroli dan pengawalan lalu lintas.	Meningkatnya pengamanan lalu lintas dan keterpaduan sistem jaringan jalan	Meningkatnya kapasitas lalu lintas sebesar 30% dari kondisi yang ada	10%	10%	14%	18%	22%	26%	30%
8.	Peningkatan ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran. 1) Peningkatan keamanan, ketertiban laut / patroli laut; 2) Peningkatan keselamatan pelayaran; 3) Peningkatan pelayanan surat tanda kebangsaan kapal; 4) Operasional keamanan laut (kamla) 5) Pengadaan sarana dan prasarana pelayaran; 6) Pengadaan lampu penerangan pantai; 7) Pengadaan baju pelampung dan alat keselamatan.	Menurunnya kasus pelanggaran alat penangkap ikan dan pelanggaran dokumen kapal dan meningkatnya keamanan dan ketertiban transportasi di laut.	Menurunnya jumlah pelanggaran pelayanan transportasi laut sebanyak 30 %	64 kasus	64 kasus	58 kasus	54 kasus	51 kasus	48 kasus	45 kasus

i. Perumahan

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. 1) Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat perkotaan dan perdesaan 2) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Meningkatnya ketersediaan rumah bagi penduduk secara swadaya dan pengembang serta meningkatkan jumlah rumah layak huni	Tercapainya pembangunan rumah sederhana sehat bersubsidi dari pemerintah daerah 25% dari kegiatan program.	-	-	5%	10%	15%	20%	25%
			% penurunan jumlah rumah tidak/kurang layak huni	-	-	10%	15%	20%	25%	30%
2.	Program Pembangunan perumahan dan permukiman 1) Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 2) Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) 3) Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 4) Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan 5) Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha 6) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 7) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Terwujudnya kualitas permukiman yang layak di wilayah perkotaan dan perdesaan di wilayah Kabupaten Rembang.	Meningkatnya lingkungan permukiman yang layak bagi masyarakat sebanyak 12%/tahun	621 lingk permukiman kumuh	-	4%/ tahun	6%/ tahun	8%/ tahun	10%/ tahun	12%/ tahun

j. Penataan Ruang

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program perencanaan tata ruang 1) Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang 2) Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 3) Sosialisasi Peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang. 4) Penyusunan Rencana Tata ruang wilayah 5) Penyusunan rencana Detail Tata Ruang Kawasan 6) Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 7) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 8) Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang RTRW 9) Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang 10) Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 11) Revisi rencana tata ruang 12) Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang 13) Survey dan pemetaan 14) Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota	Mewujudkan Konsep pembangunan Water Front City (WFC) yang didukung oleh semua SKPD dalam pengembangan potensi yang ada.	Tersusunnya dokumen penataan ruang secara lengkap	-	-	20%	40%	60%	80%	100%

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.	Program pemanfaatan ruang 1) Penyusunan Kebijakan perizinan pemanfaatan ruang 2) Penyusunan Norma, standar, dan Kriteria pemanfaatan ruang 3) Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 4) Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang 5) Survey dan pemetaan 6) Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang 7) Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 8) Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	Terwujudnya penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Rembang sesuai dengan rencana peruntukannya	Menurunnya konversi lahan pertanian ke lahan pemukiman	-	-	1%/ tahun	2%/ tahun	3%/ tahun	4%/ tahun	5%/ Tahun
3.	Program pengendalian pemanfaatan ruang 1) Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 2) Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang 3) Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 4) Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 5) Pengawasan pemanfaatan ruang 6) Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten 7) Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang		Bekurangnya kasus pelanggaran tata ruang	-	-					2 kasus

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.	Program kerjasama perencanaan dan penataan dalam pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan	Meningkatnyakerjas ama dengan pulau, daerah lain, provinsi dan internasional, dalam pengembangan Konsep Sea Front city.	75% Dinas terkait sebagai anggota BKPRD berperan aktif dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Rembang.	-	-	15%	30%	55%	60%	75%
		Meningkatnya pemanfaatan ruang terpadu dalam Penataan kawasan perbatasan Kabupaten Rembang	Meningkatnya kerjasama dalam pemanfaatan ruang melalui penataan terpadu pada kawasan perbatasan Kabupaten Rembang	-	-	-	-	Perbatasan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati	Perbatasan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora	Perbatasan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Tuban Jawa Timur

k. Pertanian

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah 1) Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Terbangunnya sistem pendaftaran tanah	Pelaksanaan sosialisasi sistem pendaftaran (kecamatan)	2	3	3	3	3	3	3
2.	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Optimalnya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah tanah yang disertifikatkan (%)	25	33	42	50	58	67	75
3.	Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan 1) Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	Terselesaikannya permasalahan/konflik pertanahan	Jumlah kasus	6	1	1	1	1	1	1

I. Komunikasi dan Informatika

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. 1) Pembangunan jaringan telekomunikasi seluler pada kawasan pelabuhan umum nasional Rembang; 2) Pengembangan jaringan telekomunikasi di pedesaan; 3) Peningkatan akses layanan internet bagi masyarakat di pedesaan; 4) Pengembangan program koran masuk desa; 5) Pengadaan alat studio dan komunikasi; 6) Pengadaan sarana dan prasarana LPSE.	Meningkatnya jumlah SST terpasang dan pengguna internet sebesar 50 % Jumlah pengguna internet	Jumlah SST terpasang. Jumlah pengguna internet	6.000 SST -	6.500 SST -	7.000 SST -	7.500 SST -	8.000 SST -	8.500 SST -	9.000 SST -
2	Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. 1) Pendidikan / pelatihan / bimtek SDM aparatur di bidang komunikasi dan informasi; 2) Pembentukan LPSE; 3) Sosialisasi kegiatan komunikasi dan informatika.	Meningkatnya jumlah SDM yang mengikuti bimtek sebanyak 50 %	Jumlah SDM yang mengikuti bimtek bidang kominfo (orang)	7540 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	110 orang

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
3	Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi. 1) Pengawasan, pengendalian, pembinaan telekomunikasi dan teknologi informasi; 2) Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi; 3) Pengawasan dan pembinaan radio siaran dan radio komunikasi; 4) Pengawasan dan pembinaan penyedia jasa / barang, pos telekomunikasi dan informatika.	Menurunnya kasus pelanggaran terhadap peraturan di bidang kominfo	Menurunnya kejadian pelanggaran dan pelayanan kominfo sebanyak 20 %.	-	-	5%	5%	5%	10%	10%
4	Penyusunan regulasi. 1) Penyusunan regulasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.	Tersusunnya regulasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.	Tersusunnya 4 buah perda baru tentang regulasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.	9 perda	2 perda	1 perda	1 perda	1 perda	1 perda	-

m. Pendidikan

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program pendidikan anak usia dini 1) Pembangunan gedung sekolah 2) Penambahan ruang kelas sekolah 3) Penambahan ruang guru sekolah 4) Pembangunan ruang locker siswa 5) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 6) Pembangunan sarana dan prasarana bermain 7) Pembangunan ruang serba guna/aula 8) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan PAUD Rintisan 9) Pengembangan TK 10) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik TK	• Meningkatnya APK PAUD menjadi 90% • Meningkatnya sarana dan prasarana PAUD (50% dari lembaga PAUD yang ada). • Meningkatnya jumlah Lembaga PAUD (5%/tahun)	% anak usia 4-6 tahun mengikuti progrm TK/RA	80,48%	81,48%	83,50%	84,50%	86,50%	88,50%	90 %
			% TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	24%	28%	32%	36%	40%	44%	50%
			% TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah	30%	38%	46%	54%	62%	70%	80%
			% meningkatnya jumlah lembaga PAUD dan TK	400	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit (5%/th)
2.	Program wajib belajar pendidikan dasar 1. Pembangunan gedung sekolah 2. Penambahan ruang kelas sekolah 3. Penambahan ruang guru sekolah 4. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	a. Meningkatnya kondisi ruang kelas SD sebesar 36%.	% APK SD/MI	98,83%	99,86%	100,89%	101,92%	102,95%	103,98%	105%
			% APM SD/MI	84,01%	85,51%	87,01%	88,51%	90,01%	91,51%	93%
		b. Meningkatnya sarana penunjang pembelajaran untuk SD dan SMP. Perpustakaan SD 60% SD.	% APK SMP/MTs	95,42%	96,18%	96,94%	97,7%	98,46%	99,22%	100%
			% APM SMP/MTs	66,67%	68,23%	69,78%	71,34%	72,89%	74,45%	76 %
			% Angka Putus sekolah SD	0,08%	0,07%	0,05%	0,04%	0,03%	0,01%	0%
			% ruang kelas SD/MI sesuai standar	63,68%	65,73%	67,79%	69,84%	71,89%	73,95%	76 %
		c. Meningkatnya partisipasi penduduk usia sekolah SD dan SMP (APM SD	% SD/MI memiliki Laboratorium IPA dan Komputer	1,02%	4,18%	7,35%	10,51%	13,67%	16,84%	20 %
			% SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar	24,26%	30,22%	36,17%	42,13%	48,09%	54,04%	60 %

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
		d. Meningkatnya angka kelulusan UASBN dan UN (100% UASBN dan 99% UN SMP)	% SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan Komputer	51,68	54,73%	57,79%	60,84%	63,89%	66,95%	70 %
			% SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar	67,78	72,32%	76,85%	81,39%	85,93%	90,46%	95 %
			% Angka kelulusan UASBN	98,29%	98,58%	98,86%	99,15%	99,43%	99,72%	100 %
			% lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	98,92%	99,10%	99,28%	99,46%	99,64%	99,82%	100 %
			% Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,38%	0,33%	0,27%	0,22%	0,16%	0,11%	0,05%
			% Angka kelulusan Ujian nasional SMP/MTs	90,54%	91,62%	92,69%	93,77%	94,85%	95,92%	97 %
			% lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan %	71%	73,33%	75,67%	78,00%	80,33%	82,67%	85 %
			% SD memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya	0%	1,67%	3,33%	5,00%	6,67%	8,33%	10 %
	Program pendidikan menengah 1) Pembangunan gedung sekolah 2) Penambahan ruang kelas sekolah 3) Penambahan ruang guru sekolah	Meningkatnya APK SMA menjadi 70%	% APK SMA/MA/SMK	50,79%	53,99	57,19	60,40	63,60	66,80	70%
			%APM SMA/SMK/MA	35,21%	38,51	41,81	45,11	48,40	51,70	55%
		Meningkatnya angka kelulusan SMA 92%	% angka putus sekolah	0,46%	0,41	0,36	0,31	0,25	0,20	0,15%
			% Kelulusan UN SMA/MA/SMK	85,50%	86,58	87,67	88,75	89,83	90,92	92%

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	4) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, dan lain-lain) 5) Peningkatan jumlah dan kualitas guru sekolah kejuruan kelautan 6) Pengembangan kurikulum muatan lokal kemaritiman		% lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya	30%	33,33	36,67	40,00	43,33	46,67	50%
	Program pendidikan non formal dan in formal 1) Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 2) Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 3) Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 4) Pengembangan pendidikan keaksaraan 5) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 6) PPenyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 7) PPengembangan data dan Informasi pendidikan non formal 8) Dan lainnya yang sesuai 9) Program pendidikan luar biasa 10) Pembangunan gedung sekolah 11) Penambahan ruang kelas sekolah 12) Pengembangan ketrampilan teknologi kemaritiman 13) Dan lainnya yang sesuai	Meningkatnya penduduk yang bias membaca dan menulis (100%) Meningkatnya relevansi pendidikan life skill (50%) Meningkatnya penduduk putus sekolah atau tidak sekolah mengikuti program paket. (100%)	% penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan menulis Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun Tersedianya data dasar keksaraan yang diperbarui secara terus menerus % penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C	99,39% 6543 1 91,30%	99,49 5452,50 1 92,75	99,59 4362,00 1 94,20	99,70 3271,50 1 95,65	99,80 2181,00 1 97,10	99,90 1090,50 1 98,55	100% 0 1 100%

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
			% lulusan program paket C dapat memasuki dunia kerja	21,63%	26,36	31,09	35,82	40,54	45,27	50 %
			% tutor program paket A, B dan C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan	64,40%	66,17	67,93	69,70	71,47	73,23	75%
			% pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran	58,40%	62,00	65,60	69,20	72,80	76,40	80%
			Tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang diperbarui secara terus menerus. (unit)	1	1	1	1	1	1	1

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
			% penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan /kelompok belajarusaha/magang (%)	22,65%	25,54	28,43	31,33	34,22	37,11	40%
			% lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah	85%	87,50	90,00	92,50	95,00	97,50	100%
			% lembaga kursus dan lemabaga pelatihan terakreditasi	25,60%	33,83	42,07	50,30	58,53	66,77	75 %
			% lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja	19,26	23,55	27,84	32,13	36,42	40,71	45%

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
			% tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan	72,50%	75,42	78,33	81,25	84,17	87,08	90%
			% lembaga kursus/pelatihan /kelompok belajar usaha/ magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan	47,15%	51,79	56,43	61,08	65,72	70,36	75%
			Tersedianya data dasar kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbarui secara terus menerus.	1	1	1	1	1	1	1

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Program Pendidikan luar biasa dan pendidikan Khusus; 1) Pembangunan gedung sekolah 2) Penambahan ruang kelas sekolah	Meningkatnya penduduk difable penduduk difable yang dilayani (15%)	% penduduk difable menjadi peserta didik Sekolah LB	3%	5%	7%	9%	11%	13%	15%
			% angka kelulusan SLB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			% guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan	60%	63,5%	66,5%	69,5%	73,55%	77,5%	80%
			% SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran	35%	39%	43%	47%	50%	55%	60%
			Tersedianya data dasar pendidikan khusus yang diperbarui secara terus menerus.	1	1	1	1	1	1	1

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 1) Pelaksanaan sertifikasi pendidik 2) Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 3) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 4) Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6) Dan lainnya yang sesuai	1. Meningkatnya Guru TK/RA yang memiliki kualifikasi layak mengajar sebesar 55%	% guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	20,07%	25,89	31,71	37,54	43,36	49,18	55%
			% guru SD yang sertifikasi	23,07%	32,56	42,05	51,54	61,02	70,51	80%
		2. Meningkatnya guru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang bersertifikasi (80% Guru SD/MI; 90% guru SMP/MTs; 80% guru SM)	% guru SD/MI layak mengajar	29,35%	36,96	44,57	52,18	59,78	67,39	75%
			% guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan	72,89%	77,48	81,99	86,49	90,99	95,50	100%
			% guru SMP/MTs yang sertifikasi	32,76%	42,30	51,84	61,38	70,92	80,46	90%
			% guru SMA/SMK/MA yang sertifikasi	17,92%	27,43	36,95	46,46	55,97	65,49	80%
			% Guru SMA/SMK/MA layak mengajar	86,65%	88,88	91,10	93,33	95,55	97,78	100%

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Program manajemen pelayanan pendidikan 1) Perawatan dan pemeliharaan ICT Pendidikan 2) Perawatan Perangkat JARDIKNAS 3) Pengembangan ICT Pendidikan 4) Pemeliharaan Data Pendidikan 5) Pendampingan kegiatan Akreditasi Sekolah/Madrasah 6) Evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 7) Dan lainnya yang sesuai	Meningkatnya Lembaga pendidikan PAUD yang memiliki tatakelola baik (100%)	% Lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik.	85%	88%	90%	92%	95%	98%	100%
		Meningkatnya SD/MI yang menerapkan MBS (100%)	% SD/MI menerapkan Manajemen Ber-basis Sekolah (MBS).	99,27%	99,56%	99,67%	99,78%	99,88%	99,96%	100%
		Meningkatnya SMK yang memiliki manajemen mutu ISO 9001 – 2000 (60%)	% SMP/MTs menerapkan Manajemen Ber-basis Sekolah (MBS).	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			% SMA/SMK/MA melaksanakan Program MBS dengan Baik.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000.	15,38%	23,56%	32,5%	38,5%	48,50%	52,5%	60%

n. Kesehatan

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1) Penyuluhan kesehatan bagi Ibu hamil dari keluarga kurang mampu 2) Perawatan secara berkala bagi Ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 3) Pertolongan persalinan bagi Ibu dari keluarga kurang mampu.	Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak.	Menurunnya AKI per 100.000 KLH	163 (14 kasus)	162	161	160	159	158	157 (2 kasus)
			Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%)	84,06	85,5	87	88,5	90	91,5	93
			Cakupan pertolongan tenaga kesehatan (%)	89,72	90,4	91	91,6	92,2	92,5	93
			Cakupan neonatal resti/komplikasi yg ditangani (%)	26,24	35	44	53	62	71	80
			Cakupan kunjungan bayi (%)	94,27	94,9	95,4	95,9	96,4	96,9	98
			Cakupan pelayanan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%)	59,41	63	66	69	72	76	80
			Cakupan Pelayanan Nifas (%)	96,89	97,4	97,9	98,4	98,9	99,4	100

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.	Program perbaikan gizi masyarakat 1) Pemberian tambahan makanan dan vitamin 2) Pemanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin-A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya 3) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 4) Penanggulangan Gizi-Lebih 5) Peningkatan survailance gizi kurang 6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya status gizi masyarakat.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BGM (Bawah Garis Merah) dari keluarga miskin (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	52,38	56	60	64,5	67,5	70	73
3.	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 2) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 3) Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 4) Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 5) Peningkatan peran lembaga masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat.	Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	99,50	100	100	100	100	100	100
			% Cakupan pelayanan kesehatan rujukan untuk masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100	100	100
			% Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota	100	100	100	100	100	100	100
			Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam (%)	100	100	100	100	100	100	100

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1) Penyuluhan kesehatan anak balita 2) Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita 3) Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 4) Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita 5) Pembangunan panti asuhan anak terlantar balita 6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya derajat kesehatan Anak Balita	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat pelayanan (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Menurunnya AKB per 1.000 KLH	17,96 (154 kasus)	16 (145 kasus)	15 (139 kasus)	14 (133 kasus)	13 (126 kasus)	12 (120 kasus)	11 115 kasus
5.	Program pengembangan lingkungan sehat 1) Pengkajian pengembangan Lingkungan sehat 2) Penyuluhan menciptakan Lingkungan sehat 3) Sosialisasi kebijakan Lingkungan sehat 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya kesehatan lingkungan	Cakupan Jamban (%)	75,40	77	79	81	82	84	88
			Cakupan Rumah sehat di perkotaan (%)	67,51	68	69	70	72	73	75
			Cakupan Rumah Sehat di pedesaan (%)		20	25	35	45	54	60
			Cakupan Rumah tangga sehat (%)	69,44	70	72	73	75	77	80
			Cakupan SPAL (%)	63,08	64	67	70	73	77	80

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
6.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit 1) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 2) Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 3) Pengadaan vaksin penyakit menular 4) Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 5) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 6) Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 7) Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular 8) Peningkatan Imunisasi 9) Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 10) Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Menurunnya endemic penyakit	Cakupan CDR atau kesembuhan TB Paru (%)	40	45	50	55	60	65	70
			IR DBD per 10.000 penduduk	4,08	3,8	3,6	3,4	3	2,7	< 2,5/10.000
			CFR DBD (%)	2,84	2,74	2,63	2,41	2,31	2,1	<2
			CR DBD (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Cakupan penemuan dan penanganan Diare (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Cakupan penemuan dan penanganan HIV/AIDS (%)	100	100	100	100	100	100	100
7.	Program standarisasi pelayanan kesehatan 1) Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 2) Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 3) Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Kesehatan 4) Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan 5) Penyusunan Detail Engineering Design 6) Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan untuk masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota (%)	100	100	100	100	100	100	100

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
8.	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1) Pelayanan operasi katarak 2) Pelayanan kesehatan THT 3) Pelayanan operasi bibir sumbing 4) Pelayanan sunatan masal 5) Penanggulangan ISPA 6) Penanggulangan penyakit cacangan 7) Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin 8) Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar 9) Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu 10) Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya derajat kesehatan penduduk miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan untuk masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100	100	100
9.	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1) Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 2) Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 3) Kemitraan Peningkatan kualitas dokter dan paramedis 4) Operasional Bank Darah Rumah Sakit 5) Pemberdayaan SDM untuk peningkatan kualitas pelayanan RS 6) Kemitraan dengan rumah sakit jiwa 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8) Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan	Meningkatnya kemitraan dalam pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah kemitraan dalam pelayanan kesehatan	0	2	4	6	8	10	12

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
10.	Program obat dan perbekalan kesehatan 1) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 3) Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin 4) Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 5) Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 6) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya ketersediaan obat-obatan bagi masyarakat	Cakupan ketersediaan Obat	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
11.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 2) Peningkatan Kesehatan Masyarakat 3) Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 4) Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6) Penyediaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan	75%	77%	80%	83%	86%	89%	92%

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
12.	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1) Rehabilitasi Sedang/Berat Pustu 2) Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 3) Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Dinas Medis dan Paramedis 4) Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) 5) Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6) Perluasan Puskesmas 7) Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Puskesmas dan Pustu 8) Peningkatan Kapasitas Sarana Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas dalam kondisi baik	60%	66,5%	72%	78%	84%%	90%	95%
13.	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan 1) Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 2) Workshop, Sosialisasi Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan	829						5%/tahun

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
14.	Program Pengawasan Obat dan Makanan 1) Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat Di Bidang Obat dan Makanan 2) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya keamanan mengkonsumsi obat dan makanan	Menurunnya Kasus pelanggaran Obat dan makanan	13	10	7	4	3	1	0
15.	Program Pengandaan Peningkatan Srana dan Prasanaran Rumah Sakit 1) Pengembangan ruang gawat darurat 2) Penambahan ruang rawat inap 3) Pembangunan gedung IBS 4) Pembangunan gedung ICU/ICCU 5) Pengadaan alat kedokteran	Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit	Persentase peningkatan sarana dan prasarana Rumah sakit	70	75	80	85	90	95	100
16.	Program peningkatan kesehatan lansia 1) Pelayanan pemeliharaan kesehatan 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya status kesehatan pra usila dan usila	Meningkatnya Usia Harapan Hidup	70,06	70,4	70,8	71	71,4	71,6	72

o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana; 1) Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin; 2) Pelayanan KIE; 3) Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu; 4) Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR; 5) Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR); 6) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB; 7) Pelayanan KB medis Operasi; 8) Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB; 9) Penyusunan Profil dan Data Base tentang UPPKS; 10) Pengelolaan Data dan Informasi Program KB; 11) Pencatatan dan Pelaporan Pengendalin Lapangan 12) Pencatatan dan Pelaporan Klinik KB; 13) Operasional Tim Unit Pelaksana Keluarga Berencana; 14) Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi kelompok Remaja dan Kelompok	Meningkatkan frekuensi Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) melalui : - Pelaksanaan KIE KB dan KS pada Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun sebesar 3,5%. - Pelayanan PIK-Remaja melalui berbagai media komunikasi. - Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan PIK-Remaja dengan target 7 PIK Remaja Tegar, 8 PIK Remaja Tegak dan 47 PIK Remaja Tumbuh.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)	3.5	3.4	3.3	3.2	3.1	2.9	2.8
			Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%) (SDKI)	6.5	66.2	66.3	66.44	66.6	66.7	67
			Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%) (PLKB)	82	82	82	82	82	82	82.5

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Sebaya diluar Sekolah; 15) Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK); 16) Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak melalui kelompok di masyarakat; 17) Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; 18) Pengembangan BKB-Posyandu Terintegrasi; 19) Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan.	- Pembinaan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif sebesar 65% - (berdasarkan SDKI/Susenas). - Pelayanan peserta KB Baru untuk menurunkan Unmet Need menjadi 5%. - Meningkatkan kesertaan KB bagi anggota Bina Keluarga Balita (BKB) menjadi 70%. - Meningkatkan kunjungan keluarga yang mempunyai balita pada kelompok BKB sebesar 88 %. - Meningkatkan kesertaan ber KB bagi anggota Usaha Peningkatan Pendapatan	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) (%)	7.8	7.5	7.2	6.9	6.4	6.2	5

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Keluarga Sejahtera (UPPKS) sebesar 87%. - Meningkatkan kualitas Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap Desa/ Kelurahan. - Menyediaan alat, obat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 % pada tahun 2015. - Melaksanakan pelayanan sesuai SOP di klinik KB (Inform Concent 90 % tahun 2015). - Menyediakan data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan 100% yang diperbaharui setiap tahun								

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.	Program Sarana dan Prasana Pendukung Keluarga Berencana; 1) Pengadaan Alat Kontrasepsi;	Calon Peserta KB	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	0.0014	2	3	5	7	9	10
3.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana; 1. Penyelenggraan Rakerda dan Review Program Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 2. Penyelenggaraan Rakercam Program PMPKB.	Pengelola Program KB	Tersusunnya Rencana Kerja Program PMPKB dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (paket)	2	2	2	2	2	2	2
			Terlaksanannya Rakercam Program PMPKB (keg)	1	1	1	1	1	1	1

p. Kebudayaan

No	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program Pengembangan Nilai Budaya 1) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 2) Penatagunaan naskah kuno nusantara 3) Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah 4) Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 5) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 6) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 7) Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 8) Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 9) Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 10) Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala 11) Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 12) Pengembangan nilai dan geografi sejarah 13) Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	Lestarnya nilai-nilai budaya daerah.	Meningkatnya pengembangan nilai budaya							Nilai-nilai budaya daerah meningkat

No	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	14) Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala 15) Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya 16) Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Meningkatnya kekayaan kebudayaan yang dikelola	% kelompok kesenian yang dibina.	0	15%	30%	45%	60%	70%	80%
	17) Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 18) Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala 19) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 20) Penyusunan sistem informasi bidang kebudayaan 21) Penyelenggaraan dialog kebudayaan 22) Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 23) Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 24) Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal 25) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	Meningkatnya Pembinaan Kelompok Budaya dan Keagamaan	% kegiatan budaya dan keagamaan yang dibina	0	13%	26%	39%	52%	63%	75%

No	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 1) Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta 2) Fasilitasi Pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah 3) Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya pengelolaan asset budaya dan peninggalan sejarah (75%)	% asset budaya dan peninggalan sejarah yang dipelihara.	0	12%	24%	36%	48%	60%	75%
3.	Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. 1) Rakor Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2) Sarasehan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 3) Pembinaan Pelaku Budaya Spiritual 4) Perekaman tata ritual penghayatan 5) Kemah Budaya bagi Generasi Muda Penghayat 6) Kajian nilai-nilai luhur budaya spiritual	Meningkatnya pembinaan penghayat kepercayaan (75%)	% kelompok pengahayat yang dibina	0	13%	26%	39%	52%	63%	75%

q. Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program penataan administrasi kependudukan, dengan kegiatan meliputi 1) Terbangun dan berfungsinya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara optimal dan mudah diakses 2) Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan pengelolaan SIAK 3) Terbentuknya dan tertatanya system koreksi (Inter-Phase Tahap Awal) 4) Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan kependudukan 5) Tingkat kemudahan mengakses data kependudukan oleh dinas terkait maupun masyarakat yang membutuhkan 6) Target dan realisasi pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil 7) Terbangunnya data based kependudukan 8) Jumlah aparat kependudukan dan catatan sipil yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas 9) Jumlah kelompok sasaran kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan	Meningkatnya tatanan administrasi kependudukan	• Tersedianya data based kependudukan • % penduduk memiliki KTP dan • % kecamatan on line (SIAK)	10%	40%	60%	75%	80%	90%	100 %
				57,50%	63%	69%	75%	81%	87%	93%
				0%	0%	20%	40%	60%	80%	100%

r. Kepemudaan dan Olahraga

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 1) Pendataan potensi kepemudaan 2) Penelitian dan penyajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan 3) Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 4) Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan	Terwujudnya keserasian dan pengembangan kebijakan pemuda	1. Jumlah potensi kepemudaan yang terdata (%)	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
			2. Jumlah kegiatan Penelitian dan penyajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan (Kegiatan)	-	1	3	3	2	1	10
			3. Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan (kegiatan)	25	50	50	75	100	100	300
			4. Dokumen rencana aksi daerah bidang kepemudaan (Dok)	1	1	2	2	2	2	2

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.	Peningkatan peran serta kepemudaan 1) Pembinaan organisasi kepemudaan 2) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 3) Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 4) Fasilitasi pekan temu wicara organisasi kepemudaan 5) Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda 6) Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 7) Pameran prestasi hasil karya pemuda 8) Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 9) Stimulan modal usaha ekonomi produktif bagi pemuda 10) Fasilitasi kemitraan usaha dikalangan pemuda dengan pihak-pihak terkait	1. Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pelaksanaan pembangunan 2. Meningkatnya kapasitas dan peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan 3. Terwujudnya jaringan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif dikalangan pemuda	1. Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina (unit)	10	13	15	15	20	20	93
			2. Jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	20	30	25	25	50	50	200
			3. Jumlah kegiatan aksi bhakti sosial kepemudaan	-	1	2	2	2	3	10
			4. Jumlah kegiatan pekan temu wicara organisasi kepemudaan	1	1	2	2	2	2	10
			5. Jumlah kegiatan Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	-	1	1	1	1	1	5
			1. Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan pelopor keamanan lingkungan (orang)	25	50	50	75	100	100	300

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
			2. Jumlah kegiatan pameran prestasi hasil karya pemuda (orang)		1	2	2	2	3	10
			3. Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan kecakapan hidup (orang)	25	50	50	75	100	100	300
			4. Jumlah pemuda yang mendapatkan Stimulan modal usaha ekonomi produktif bagi pemuda (orang)	25	50	50	75	100	100	300
			5. Jumlah kegiatan Fasilitasi kemitraan usaha dikalangan pemuda dengan pihak-pihak terkait		1	2	2	2	3	10

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
9.	Pencegahan penyalahgunaan narkoba, melalui kegiatan : 1) Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 2) Fasilitasi kerjasama kemitraan dengan lembaga-lembaga kepemudaan dalam mengkapanyekan bahaya narkoba	Menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda	Menurunnya jumlah kasus narkoba di kalangan generasi muda (kasus)	10						0 kasus
10.	Pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga, melalui kegiatan: 1) Peningkatan mutu organisasi 2) Peningkatan kapasitas tenaga keolahragaan 3) Pembinaan manajemen organisasi olahraga 4) Penyusunan Kerjasama pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga	Meningkatnya implementasi kebijakan manajemen	1. Jumlah organisasi yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan (lembaga)	2	2	2	3	2	4	15
			2. Jumlah tenaga keolahragaan yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas (orang)	-	15	15	15	25	30	100
			3. Pembinaan manajemen organisasi olahraga (lembaga)	2	2	2	3	2	4	15
			4. Jumlah kerjasama kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga (jmlh kerjasama)		1	2	2	2	3	10

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
11.	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, melalui kegiatan : 1) Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 2) Pembibitan cabang olahraga prestasi 3) Penyelenggaraan kompetisi olahraga 4) Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 5) Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacata 6) Pengembangan olahraga rekreasi 7) Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga 8) Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat 9) Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan 10) Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga 11) Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/Instansi lainnya.	Meningkatnya pemasyarakatan olahraga	1. Pembibitan cabang olahraga prestasi (%)	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
			2. Penyelenggaraan kompetisi olahraga (event)		1	2	2	2	3	10
			3. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi (oang)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

s. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dalam Berbagai Bidang Pembangunan; 1) Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG); 2) Penguatan kelompok Tribina; 3) Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah; 4) Peningkatan Kapasitas Kader; 5) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender; 6) Pameran Hasil karya Perempuan di Bidang Pembangunan; 7) Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif; 8) Pembinaan Simpan Pinjam Perempuan.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PUG sampai dengan tahun 2015 sebesar 4 desa	Tersusunnya Pokja Kegiatan Pokja P2MBG dan terpilihnya lokasi	1 paket 1 desa	1 paket 1 desa	1 paket 1 desa	1 paket 1 desa	1 paket 1 desa	1 paket 1 desa	1 paket 1 desa
		meningkatnya kunjungan keluarga yang mempunyai balita aktif pada kelompok BKB sebesar 88%	tersusunnya profil TRIBINA dan terpilihnya TRIBINA unggulan	1paket, kelompok	1paket, kelompok	1paket, kelompok	1paket, kelompok	1paket, kelompok	1paket, kelompok	1paket, kelompok
		Meningkatnya KKG di berbagai sektor pembangunan sampai dengan tahun 2015 sebesar 87%	terbentuknya kelas bumil, terinventarisasi Data AKI dan AKB	1 kec kelas bumil pada KSIB dan 1 tahun data AKI dan AKB se-Kab	1 kec kelas bumil pada KSIB dan 1 tahun data AKI dan AKB se-Kab	1 kec kelas bumil pada KSIB dan 1 tahun data AKI dan AKB se-Kab	1 kec kelas bumil pada KSIB dan 1 tahun data AKI dan AKB se-Kab	1 kec kelas bumil pada KSIB dan 1 tahun data AKI dan AKB se-Kab	1 kec kelas bumil pada KSIB dan 1 tahun data AKI dan AKB se-Kab	1 kec kelas bumil pada KSIB dan 1 tahun data AKI dan AKB se-Kab

No	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
			terlaksannaya koordinasi dan konsolidasi kelembagaan PUG	470 kader	470 kader	470 kader	470 kader	470 kader	470 kader	470 kader
			terlatihnya kader PUG	30 kader KB	30 kader KB	30 kader KB	30 kader KB	30 kader KB	30 kader KB	30 kader KB
			terlaksananya Pameran produk TTG lokal unggulan pada event tk Nasional	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
			terlatihnya kelompok UEP yang dikelola oleh perempuan	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok
			terselenggaranya penelolaan administrasi pada kelompok SPP	28 kelompok	28 kelompok	28 kelompok	28 kelompok	28 kelompok	28 kelompok	28 kelompok

No	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.	Program Peningkatan Pemenuhan Hak-hak Perlindungan Perempuan dan anak Terhadap Berbagai Tindak Kekerasan; 1) Fasiltasi Upaya Perlindungan Perempuan dan anak Terhadap Tindak Kekerasan.	Meningkatnya pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak yang melapor pada unit pengaduan sampai dengan tahun 2015 sebesar 100%, yang dilakukan oleh petugas terlatih pada unit pelayanan terpadu; Meningkatnya pelayanan kesehatan korban kekerasan perempuan dan anak oleh tenaga kesehatan terlatih di Rumah Sakit, sebesar 100% sampai dengan 2015;	tersosialisasinya UPT kekerasan dan terlaksananya penanganan pra dan pasca korban tindak kekerasan thd perempuan dan anak	322 org	322 org	322 org	322 org	322 org	322 org	322 org

No	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Memfasilitasi pelayanan pemulangan bagi korban kekerasan bagi perempuan dan anak oleh petugas/relawan yang terlatih di unit pelayanan terpadu, sebesar 75% sampai dengan 2015; Memberikan layanan bimbingan rohani korban kekerasan bagi perempuan dan anak, sebesar 75 % sampai dengan 2015; Memberikan fasilitas kepada korban kekerasan bagi perempuan dan anak dalam proses penegakan dan bantuan hukum sebesar 80% sampai dengan 2015;								

No	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Jejaring Serta Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Pencapaian Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak; 1) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 2) Penguatan Pokjanal Posyandu; 3) Pelatihan Peningkatan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK); 4) Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak; 5) Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak; 6) Pemberdayaan lembaga Perlindungan Anak; 7) Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender; 8) Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan 1) dan Teknologi.	Mewujudkan sarana prasarana lembaga pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak (posyandu) sehingga cakupan peningkatan strata posyandu menjadi sebesar 40% dari Pratama menjadi Madya, Madya ke Purnama dan Purnama ke Mandiri sampai 2015; Membentuk kelompok kerja/focal point di setiap SKPD yang ada, dengan target 26 SKPD; Menyediakan sarana dan prasarana Forum Anak Rembang (FAR);	Tersusunnya dokumen Parahita Terpilihnya Posyandu Unggulan Terlatihnya kader Posyandu Tersusunnya data posyandu tersedianya sarana posyandu terlaksananya rapat koordinasi Pokjanal Posyandu Tk Kecamatan Terlatihnya para orang tua tentang Metode Pengajaran bagi Anak berkebutuhan Khusus	1 paket 6 kelompok 112 kader 1 buku 99 des 14 kec 125 org	1 paket 6 kelompok 112 kader 1 buku 99 des 14 kec 125 org	1 paket 6 kelompok 112 kader 1 buku 99 des 14 kec 125 org	1 paket 6 kelompok 112 kader 1 buku 99 des 14 kec 125 org	1 paket 6 kelompok 112 kader 1 buku 99 des 14 kec 125 org	1 paket 6 kelompok 112 kader 1 buku 99 des 14 kec 125 org	1 paket 6 kelompok 112 kader 1 buku 99 des 14 kec 125 org

No	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
			Terlaksananya Pesta Ceria anak dan penjangkaran kreatifitas anak serta bantuan kesejahteraan anak dengan kecacatan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
			Tersusunnya data statistik Gender Kab Rembang	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
			Sosialisasi Perbub pemberdayaan lembaga berbasis Gender dan sosialisasi Program Responsif gender	2 kali 2 kali	2 kali 2 kali	2 kali 2 kali	2 kali 2 kali	2 kali 2 kali	2 kali 2 kali	2 kali 2 kali
			Terselenggaranya Nikah Massal	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
			Terbentuknya Focal point di tiap SKPD	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket

t. Pariwisata

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1) Pengadaan Brosur dan Pemasangan iklan Kebudayaan dan Pariwisata 2) Pemilihan Duta Wisata 3) Pameran dan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata 4) Sepeda Wisata 5) Pengelolaan Tourism Information Center (TIC) 6) Pelaksanaan MICE Jasa Pariwisata 7) Peningkatan Kualitas Kompetensi Remaja Mbak Mas se Kab. Rembang 8) Festival pantai & Festival Kuliner 9) Optimalisasi Pengenalan Wisata Pelajar	Meningkatnya jumlah wisatawan dan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata (orang) (5% per tahun)	315.822	331.613	348.194	365.603	383.884	403.078	403.078
			Meningkatnya jumlah pendapatan daerah dari obyek wisata (10% per tahun)	859.847.400,00	931.501.350,00	1.003.155.300,00	1.074.809.250,00	1.146.463.200,00	1.218.117.150,00	1.289.771.100,00
			Meningkatnya jumlah obyek wisata yang memiliki kelengkapan bahan promosi (buah)	3	3	4	4	4	5	5
			Meningkatnya jumlah event pariwisata daerah dalam setahun (kali).	2	2	2	3	3	4	4

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1) Penyusunan RIPP, RIPOW dan DED kawasan obyek dan daya tarik wisata 2) Pembangunan dan Pengembangan fasilitas obyek dan daya tarik wisata daerah 3) Pengelolaan dan pemeliharaan obyek dan daya tarik wisata.	Meningkatnya daya saing destinasi pariwisata di tingkat provinsi.	Meningkatnya jumlah obyek pariwisata dan daya tarik wisata yang memiliki sarana prasarana penunjang lengkap (unit)	1	1	2	2	3	4	5
			Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan (hari) (5% per tahun)	1,58	1,66	1,74	1,83	1,92	2,02	2,12
3.	Program Pengembangan Kemitraan 1) Pembentukan dan Pembinaan Kampung/Desa Wisata 2) Pembinaan SDM, POK DARWIS, dan Usaha Pariwisata 3) Penyusunan Paket Wisata Daerah 4) Penyusunan Buku Profil Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 5) Kerjasama Pengembangan Pariwisata PAKUJEMBARA PLUS dan RATUBANGNEGORO.	Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.	Meningkatnya jumlah anggota kelompok sadar wisata (10% per tahun)	352	387	426	469	515	567	624

u. Sosial

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; 1) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 2) Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 3) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 4) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 5) Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan keberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Berkurangnya jumlah keluarga miskin (orang)	210.695	183.913	157.130	130.348	103.565	76.783	50.000
			Berkurangnya jumlah lanjut usia terlanter (orang)	7.076	6.063	5.051	4.038	3.025	2.013	1.000
			Berkurangnya jumlah wanita rawan social dan ekonomi (orang)	5.748	5.123	4.499	3.874	3.249	2.625	2.000
			Pelaksanaan pelatihan ketrampilan bagi keluarga fakir miskin dan wanita rawan sosial ekonomi (kegiatan/tahun)	1	2	2	2	3	3	3
			Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	30	36	42	48	54	60	70
			Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	30	36	42	48	54	60	70

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
			Jumlah PSKS yang dibina (lembaga)	20	35	50	65	80	90	100
			Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasana pelayanan sosial	30	36	42	48	54	60	70
			Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasana pelayanan sosial	12	20	28	36	44	52	60
2.	Program pembinaan anak terlantar 1) pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar 2) Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 3) Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar		Berkurangnya jumlah anak dan balita terlantar (orang)	10.198	8.832	7.465	6.099	4.733	3.366	2.000
			pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar /tahun	1	2	2	2	3	3	3
3.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 2) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Meningkatnya pembinaan penyandang cacat dan trauma	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang cacat (/tahun)	1	2	2	2	3	3	3

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya) 1) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang eks penyakit sosial 2) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Terbina dan terberdayanya eks penyandang penyakit sosial	Pelatihan bagi eks penyandang penyakit sosial (/tahun)	1	2	2	2	2	2	2
			Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang ditangani (/tahun) :							
			a. bekas NAPI (orang)	10	20	30	40	50	60	70
			b. pekerja migran bermasalah (orang)	200	250	300	350	400	450	500
5.	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 1) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 2) Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya keberdayaan sosial	Meningkatnya Jumlah pekerja social masyarakat PSM (5%/tahun)	996	5%/th	5%/th	5%/th	5%/th	5%/th	1.400

v. Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program Penguatan kapasitas kelembagaan Masyarakat : 1) Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan; 2) Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat; 3) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes); 4) Sosialisasi Pendataan Keluarga; 5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.	1. Penyelenggaraa n musyawarah perencanaan pembangunan perdesaan/kelu rahan di desa/kelurahan 2. Peningkatan Peran Serta dan Fungsi Lembaga Kemasyarakata n dalam proses pembangunan di desa/kelurahan	Pelatihan LSOM	28 desa/kel	28 desa/kel	28 desa/kel	28 desa/kel	28 desa/kel	28 desa/kel	28 desa/kel
			Terselenggarakan nya keg.Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat	3 des/Kel	3 des/Kel	3 des/Kel	3 des/Kel	3 des/Kel	3 des/Kel	3 des/Kel
			Terselenggaranya musrenbangdes	294 desa/kel	294 desa/kel	294 desa/kel	294 desa/kel	294 desa/kel	294 desa/kel	294 desa/kel
			Melaksanakan ekspose hasil pendataan keluarga	Kab.Remba ng	Kab.Rem bang	Kab.Re mbang	Kab.Rem bang	Kab.Remba ng	Kab.Remb ang	Kab.Remba ng
			Terselenggarakan nya monev, pelaporan Lemb. Ekonomi Masy	14 Kecamatan	14 Kecamat an	14 Kecamat an	14 Kecamat an	14 Kecamatan	14 Kecamata n	14 Kecamatan

No	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.	Program Penanggulangan Kemiskinan 1) Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan.	Peningkatan Kemandirian dan Keberdayaan Masyarakat dalam mewujudkan sarana dan prasarana dasar di desa/kelurahan	Pendampingan PNPM Mandiri	12 Kec. Program	12 Kec. Program	12 Kec. Program	12 Kec. Program	12 Kec. Program	12 Kec. Program	12 Kec. Program
3.	Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa 1) Pendampingan Pelaksanaan TMMD Reguler dan Sengkuyung; 2) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM); 3) Penyusunan Profil Desa/Kelurahan; 4) Pendampingan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Wilayah Pesisir;	Penumbuhan semangat gotong royong masyarakat di desa/kelurahan Penyediaan Data dan Informasi tentang status dan kategori (Profil Desa/Kelurahan) di desa/kelurahan	Terlaksanannya TMMD	2 desa Lokasi	2 desa Lokasi	2 desa Lokasi	2 desa Lokasi	2 desa Lokasi	2 desa Lokasi	2 desa Lokasi
			Terselenggarakannya kegiatan BBGRM	Desa Lokasi Pencanaan	Desa Lokasi Pencanaan	Desa Lokasi Pencanaan	Desa Lokasi Pencanaan	Desa Lokasi Pencanaan	Desa Lokasi Pencanaan	Desa Lokasi Pencanaan
			Menyusunan dokumen Profil Desa/Kelurahan	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang
			Membentuk kelompok masyarakat pesisir di kecamatan	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang

No	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan 1) Fasilitasi Permodalan bagi usaha Mikro dan Kecil di Perdesaan/Kelurahan; 2) Pendataan Sarana dan Prasarana Ekonomi Perdesaan; 3) Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Perdesaan; 4) Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok usaha ekonomi produktif di perdesaan Peningkatan kemandirian desa melalui pengelolaan sarana prasarana ekonomi perdesaan bagi pengelola UED-SP serta pengembangan sarana dan prasarana pasar desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Terselenggaranya fasilitasasi permodalan bagi usaha mikro dan kecil	14 kelompok	14 kelompok	14 kelompok	14 kelompok	14 kelompok	14 kelompok	14 kelompok
			Terdatanya Sarana dan Prasarana Ekonomi Perdesaan	14 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan
			10 BUMDes	10 BUMDes	16 BUMDes	10 BUMDes	10 BUMDes	10 BUMDes	10 BUMDes	10 BUMDes
5.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat : 1) Pelatihan Tekonologi Tepat Guna; 2) Pendampingan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Alternatif; 3) Penguatan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek). 4) Pengelolaan Lingkungan Sosial : 5) Pembinaan Kelompok Bina 6) Lingkungan Keluarga Sejahtera;	Fasilitasi pengembangan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi tepat guna di desa/kelurahan	Memfasilitasi pelatihan pengolahan produk lokal daerah melalui TTG (2 klp)	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang
			Mewujudkan Pioneer-pioneer pencipta TTG, bantuan peralatan TTG bagi kelompok industri kecil di 14 kec	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang

No	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
			Melaksanakan Posyantek Percontohan Tk Nasional dan Kabupaten (10 Posyantek)	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang
			Pembinaan ke desa unggulan BLKS	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang
6.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan : 1) Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan dan Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan.		Memfasilitasi desa/kel untuk mendapatkan stimulan pembangunan sarana prasarana lingkungan permukiman dan perdesaan	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang	Kab.Rembang

w. Ketenagakerjaan

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program peningkatan kesempatan kerja 1) Penyusunan Informasi bursa tenaga kerja 2) Penyebarluasan Informasi bursa tenaga kerja 3) Kerjasama pendidikan dan pelatihan 4) Penyiapan tenaga kerja siap pakai 5) Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,3	70	72	74	76	78	80
			Pencari kerja yang ditempatkan (5%/th)	324	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Jumlah pengangguran terbuka (menurun 3%/tahun)	15.720	-3%	-3%	-3%	-3%	-3%	-3%
			Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,61	5,09	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50
			Penempatan tenaga kerja (orang): a. AKL b. AKAD c. AKAN	148 165 29	207 224 88	265 282 146	324 341 205	383 400 264	441 458 322	500 650 750
2.	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 1) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Masyarakat yang mendapatkan pelatihan ketrampilan kerja (orang)	496	663	831	998	1.165	1.333	1500

x. Ketransmigrasian

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1) Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan 2) Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 3) Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi 4) Penyediaan lembaga Keuangan Daerah yang membantu Modal Usaha di Kawasan Transmigrasi 5) Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi Kebutuhan SDM	Meningkatnya jumlah ransmigran yang diberangkatkan	Terwujudnya nota kesepakatan antar wilayah untuk pengembangan transmigrasi (/tahun)	3	3	3	3	3	3	3
			Jumlah transmigrasi yang diberangkatkan (KK)	50	50	50	50	50	60	60
			Sosialisasi program transmigrasi (per tahun)	3	3	3	3	3	3	3
			Bertambahnya Daerah Tujuan Transmigrasi (/tahun)	1	2	2	2	2	2	2

y. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Aktif dan Peningkatan Iklim Usaha Kondusif 1) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian dan pelatihan motivasi 2) Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 3) Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 4) Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi 5) Revitalisasi Koperasi mina	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi aktif melalui penataan kelembagaan, pemahaman prinsip koperasi, kualitas SDM.	% Tertatanya kelembagaan koperasi sesuai UU Nomor 25 Taun 1992 dan PP Nomor 9 tahun 1995 1. % Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi 2. % Meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu 3. Pembinaan dan pengawasan koperasi	516	518	518	518	518	518	518

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Pemda dalam Fasilitasi Permodalan dan Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM 1) Kemitraan pembiayaan Koperasi UMKM dg BRI, BNI, BPD, BUMN, PT Teh Sosro, Lembaga Keuangan 2) Kemitraan pembiayaan pengembangan Kampung batik Lasem 3) Pengembangan UMKM Mina 4) Pengembangan pusat perdagangan produk mina	Meningkatnya peran serta lembaga perbankan dan usaha besar dalam kemitraan pembiayaan koperasi dan UMKM	Peningkatan penyaluran dana ke koperasi dan Usaha mikro kecil (%)			5	5	5	5	5
3.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Wirausaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1) Perluasan promosi produk unggulan daerah 2) Fasilitasi promosi produk unggulan daerah 3) Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi (showroom, media iklan, teknologi informasi)	Terwujudnya sistem pendukung wirausaha UMKM melalui promosi dan fasilitasi pengembangan sarana pemasaran	Terselenggaranya promosi bagi usaha mikro kecil menengah (% dari jumlah usaha mikro)			5	10	15	20	25

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.	Program Penguatan Sentra UKM dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil 1) Pembinaan organisasi usaha mikro kecil 2) Penyuluhan pedagang kaki lima 3) Pembangunan tempat usaha 4) Fasilitasi modal usaha pedagang kaki lima	Meningkatnya kekuatan dan mengembangkannya kemampuan usaha mikro kecil	Jumlah organisasi usaha mikro kecil yang dibina /dikuatkan (5%/th)	37	39	41	43	45	47	49
5.	Program Perlindungan UMKM dan Peningkatan Kerjasama Sinergis 1) Kerjasama dengan pihak ketiga Penataan tempat usaha Mikro Kecil (penyeragaman fasilitas tenda dan kios) 2) Kerjasama dengan pihak ketiga penyediaan tempat usaha baru 3) Pengawasan mutu dagangan usaha mikro kecil	Meningkatnya kerjasama sinergis dengan berbagai pihak dalam penataan dan penyediaan tempat usaha UMKM maupun mutu dagangan UMK	1. Tersedianya tempat usaha mikro kecil baru (Rembang, Lasem Binangun, Pamotan ex pasar/depan masjid, Pancur) 2. Pengawasan mutu dagangan UMK melalui PIRT	- 25	- 55	1 85	2 115	4 145	5 175	6 215

z. Urusan Industri

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1) Fasilitasi peningkatan kualitas produk bagi industri kecil dan menengah 2) Fasilitasi penganeekaragaman produk 3) Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 4) Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah 5) Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 6) Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah 7) Fasilitasi kemitraan teknologi produksi industri industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta untuk meningkatkan ekspor	Meningkatnya kinerja industri kecil dan menengah.	- % industri menggunakan bahan baku lokal - Jumlah penganeekaragaman batik - Meningkatnya kualitas garam (%) - Peningkatan ijin usaha IKM (1%/tahun) - jumlah kemitraan atau jejaring industri (1 kemitraan per tahun)			50	55	60	65	70
						3	3	3	3	3
						80	85	90	95	100
						1	1	1	1	1
						1	1	1	1	1
2.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 1) Penyelenggaraan pelatihan dan bantuan peralatan 2) Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi 3) Penguatan Kemampuan Industri berbasis teknologi 4) Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Meningkatnya kapasitas IPTEK sistem produksi IKM.	- Jumlah Industri yang meningkat kemampuan Ipteknya (%)	20	25	30	35	40	45	50

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.	Program Penataan Struktur Industri dan Kawasan Industri 1) Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 2) Penguatan layanan kepada masyarakat untuk pembentukan klaster 3) Pembentukan kelembagaan kawasan industri 4) Sosialisasi kawasan industri 5) Penyediaan sarana dan prasarana kawasan industri 6) Promosi investasi kawasan industri Kabupaten Rembang	Tertatanya atau terbentuknya sebuah kawasan industri di Kabupaten Rembang	- Jumlah kawasan industri (penataan kawasan industri meliputi sosialisasi, pembentukan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana promosi investasi Kabupaten Rembang)			1	1	1	1	1
4.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1) Pembinaan dan pelayanan teknologi industri 2) Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 3) Sosialisasi SNI/Haki untuk mendorong daya saing industri manufaktur 4) Fasilitasi layanan dan perlindungan Haki/patent/hak cipta 5) Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur 6) Pengembangan kerjasama pengadaan bahan baku industri 7) Pengembangan kerjasama pemasaran produk IKM	Meningkatnya kemampuan teknologi industri yang terwujud dalam adanya kegiatan dan jumlah hak patent/hak cipta	- jumlah sosialisasi (paket) - jumlah patent dan hak cipta (buah)			1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
5.	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial 1) Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial 2) Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Terwujudnya pengembangan sentra-sentra industri potensial di Kabupaten Rembang	Jumlah Sentra Industri (1 sentra per tahun)	2	1	1	1	1	1	1

aa. Perdagangan

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Peningkatan jumlah prasarana dan sarana perdagangan di perdesaan dan perkotaan. 1) Penataan pasar tradisional melalui revitalisasi pasar 2) Peningkatan manajemen pengelolaan pasar 3) Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Meningkatnya jumlah prasarana dan sarana perdagangan di perdesaan dan perkotaan dan tertatanya pasar tradisional	- Jumlah prasarana dan sarana perekonomian daerah : a. Pasar tradisional daerah (unit) b. Pasar Tradisional desa (unit) c. Pasar Perkulakan (sepeda) (unit) d. Pasar khusus (buah) (unit) - Penataan pasar tradisional daerah - Penataan pasar tradisional desa - Pusat informasi jaringan pasar (PIP)	12 24 3 1 - - 1	12 24 3 1 - - 1	12 24 3 1 1 1 1	12 24 3 1 1 2 1 1	12 24 3 1 2 1 1	12 24 3 1 2 1 1	12 24 3 1 2 1 1

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.	Pengembangan layanan pusat perkulakan di sentra-sentra produksi komoditas unggulan daerah 1) Sosialisasi layanan pusat perkulakan di sentra produksi komoditas unggulan daerah 2) Pembentukan kelembagaan layanan pusat perkulakan di sentra produksi komoditas unggulan daerah	Tersosialisasikannya dan terbentuknya kelembagaan layanan pusat perkulakan di sentra-sentra produk komoditas unggulan daerah Jumlah Sarana Perkulakan (batik+bordir) Jumlah kelembagaan	2 1 1 1 1	2	2	2	2	2	2	2
3.	Peningkatan fasilitasi perijinan usaha/status hukum dan pembinaan bagi pelaku usaha perdagangan skala mikro (PKL dan asongan), kecil dan menengah 1) Pembinaan organisasi PKL (pedagang kaki lima) dan asongan 2) Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan pedagang asongan 3) Fasilitasi permodalan usaha PKL dan pedagang asongan 4) Fasilitasi perijinan usaha bagi pelaku usaha perdagangan skala mikro (PKL/asongan), kecil dan menengah 5) Peningkatan status hukum bagi pelaku usaha perdagangan skala mikro (PKL/asongan), kecil dan menengah	Meningkatnya fasilitasi perijinan usaha dan pembinaan perdagangan skala mikro, kecil dan menengah	a. Jumlah ijin perdagangan skala kecil (unit). b. Jumlah bantuan permodalan usaha (unit)	-	-	20 10	20 10	20 10	20 10	20 10

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.	Peningkatan fasilitas kemitraan usaha dan akses pasar pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah dan industri kreatif 1) Fasilitas kemitraan strategis antara pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah 2) Fasilitas kemitraan pemasaran untuk jejaring akses pasar ekspor	Meningkatnya fasilitas kemitraan usaha dan akses pasar pelaku usaha kecil dan menengah serta industri kreatif dalam jejaring ekspor	Jumlah fasilitas usaha dan akses	-		1	1	1	1	1
5.	Fasilitas dan pelatihan bagi peningkatan mutu komoditas dan standarisasi produk perdagangan sesuai peraturan perundangan (perlindungan konsumen) maupun sesuai mutu perdagangan bebas internasional 1) Fasilitas peningkatan mutu komoditas dan standarisasi produk perdagangan 2) Pelatihan peningkatan mutu sesuai perdagangan bebas internasional	Terfasilitasinya dan terlatihnya para pelaku usaha dalam meningkatkan mutu komoditas, standarisasi produk perdagangan dan sesuai mutu perdagangan bebas internasional	% UMKM yang terfasilitasi	10	15	20	25	30	35	40
6.	Fasilitas dan pemberdayaan perlindungan konsumen dan pelaku usaha perdagangan sesuai dengan peraturan perundangan perlindungan konsumen dan aturan perdagangan bebas. 1) Sosialisasi perlindungan konsumen dan pelaku usaha perdagangan (usaha PKL, asongan, pedagang pasar dan toko-toko kelontong) 2) Pemberdayaan perlindungan konsumen dan pelaku usaha perdagangan sesuai peraturan perundangan perdagangan bebas	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha perdagangan melalui sosialisasi dan pemberdayaan perlindungan konsumen dan pelaku usaha perdagangan	Jumlah kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	1	1	1	1	1	1	1

bb. Penanaman Modal

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi/penanaman modal 1) Kegiatan peningkatan promosi dalam rangka peningkatan penanaman modal 2) Peningkatan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal 3) Peningkatan kerjasama antar daerah dalam melakukan kegiatan promosi	Terwujudnya kepeminatan bagi calon investor untuk berinvestasi	Meningkatnya pelaks pameran investasi	-	-	2	3	3	3	3
			Tersampainya informasi potensi dan peluang investasi kepada calon investor	-	-	25%	25%	25%	25%	25%
			Terjalannya kerjasama investasi dgn para pengusaha	-	-	1	1	1	1	1
2.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1) Fasilitasi Pelayanan perijinan di bidang penanaman modal 2) Fasilitasi pelayanan non perijinan di bidang penanaman modal	Meningkatnya kualitas pelayanan investasi dlm rangka realisasi investasi yang berkualitas	Tercapainya pelayanan prima dibidang perijinan kepada investor	-	-	30%	30%	30%	30%	30%
			Tersedianya informasi dan fasilitasi bagi penanaman modal	-	-	1	1	1	1	1
			Tersusunnya regulasi tentang pengaturan penanaman modal	-	-	1	1	1	1	1
			Meningkatnya Realisasi Investasi	-	-	20%	20%	20%	20%	20%

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana penyiapan sumberdaya bagi pengembangan penanaman modal 1) Peningkatan sarana dan prasarana perijinan penanaman modal 2) Penyusunan potensi daerah dan peluang investasi 3) Standarisasi ISO pelayanan perijinan 4) Penyusunan database perijinan	a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas di dalam pelaksanaan penanaman modal	Tercukupinya data informasi perijinan di bidang penanaman modal	-	-	1	1	1	1	1
			Terciptanya standarisasi ISO perijinan	-	-	1	1	1	1	1
			Tersedianya database perijinan	-	-	1	1	1	1	1
4.	Program Pembinaan dan Fasilitasi dalam penanaman modal dalam rangka peningkatan dan pengembangan dunia usaha 1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal 2) Pembinaan dan fasilitasi penanaman modal 3) Pembinaan kegiatan usaha UMKM	Terpantaunya pelaksanaan penanaman modal	Kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan penanaman modal	-	-	1	1	1	1	1
			Tersedianya data realisasi pelaksanaan penanaman modal	-	-	1	1	1	1	1
			Terwujudnya sinergitas antar SKPD di bidang penanaman modal	-	-	1	1	1	1	1

cc. Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program Peningkatan pengawasan dan pengendalian usaha bidang pertambangan dan ABT 1) Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C berwawasan lingkungan 2) Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C 3) Pendataan/Monitoring, evaluasi dan pengendalian/pengawasan kegiatan penambangan bahan galian C 4) Penyusunan database, pemetaan dan layanan informasi pertambangan 5) Penyusunan sistem informasi dan database air tanah (ABT)	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan dan air tanah (ABT)	Jumlah regulasi bidang pertambangan Jumlah sosialisasi regulasi Database pemetaan dan layanan informasi Sistem informasi dan dabase air tanah (ABT)			1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
2.	Program pengawasan dan penertiban kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 1) Pilot project reklamasi dan penataan bekas Pertambangan tanpa izin (PETI) 2) Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat 4) Penyebaran Peta daerah Rawan Bencana Alam Geologi	Meningkatnya ketertiban usaha pertambangan rakyat dan terwujudnya reklamasi PETI	Jumlah ijin pertambangan Menurunnya PETI (1%/Th)	80%	82%	83% 1%	86% 1%	87% 1%	88% 1%	90% 1%

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya mineral 1) Pendirian jembatan timbang bahan galian 2) Optimalisasi eksplorasi dan pemanfaatan potensi air tanah 3) Optimalisasi eksplorasi sumberdaya mineral; 4) Optimalisasi pengolahan hasil <i>migas</i> sumur tua; 5) Pengembangan kawasan industri pertambangan strategis; dan 6) Kajian dan Penelitian pemanfaatan pengelolaan geologi yang berkelanjutan	Terwujudnya pemanfaatan potensi pertambangan sumberdaya mineral	Jumlah jembatan timbang bahan galian Jumlah kajian geologi			1	1	1	1	1
						1	1	1	1	1
4.	Program pembinaan, pengembangan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan 1) Pengembangan tenaga listrik lokal dengan PLTS dan PLTB 2) Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan	Meningkatnya pembinaan, pengembangan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan	Jumlah listrik lokal dengan PLTS - SHS (unit) - komunal (unit) Dan PLTB (unit)	-	-	20 20 10	20 20 10	20 20 10	20 20 10	20 20 10

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
5.	Program Peningkatan Penyaluran penyediaan BBM bagi Masyarakat 1) Peningkatan penyaluran penyediaan BBM bagi masyarakat 2) Kampanye hemat energi, BBM dan pengembangan energi alternatif ramah lingkungan	Meningkatnya penyaluran penyediaan BBM bagi masyarakat	Jumlah kampanye hemat BBM	-	-	1	1	1	1	1
6.	Program Kerjasama Pertambangan dengan daerah sekitar 1) Pengembangan kerjasama bidang pertambangan dengan daerah sekitar	Terwujudnya kerjasama pertambangan dengan daerah sekitar	Jumlah kerjasama	-	-	1	1	1	1	1

dd. Pertanian

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Peningkatan Kesejahteraan petani 1) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 3) Peningkatan kemampuan lembaga petani 4) Peningkatan sistem Insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani 5) Pemberdayaan kelompok tani	Meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani dan semakin kokohnya kelembagaan petani.	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	98	98	99	100	100	101	102
2	Program pengembangan jaringan irigasi pertanian/perkebunan 1) Pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) 2) Pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES) 3) Pembangunan/rehabilitasi Irigasi Tanah Dangkal TPH 4) Pembangunan/rehabilitasi Irigasi Tanah Dangkal Perkebunan 5) Pembangunan/rehabilitasi irigasi tanah dalam TPH 6) Pembangunan/rehabilitasi irigasi tanah dalam Perkebunan 7) Pompanisasi untuk pertanian TPH 8) Pompanisasi untuk pertanian Perkebunan 9) Pembangunan embung pertanian TPH 10) Pembangunan embung perkebunan 11) Pembangunan/rehabilitasi dam parit	Meningkatnya jaringan irigasi pertanian/perkebunan	Bertambahnya luas lahan pertanian dan perkebunan yang teraliri jaringan irigasi (ha)	650	800	800	800	800	800	800

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
3	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 1) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna 2) Pelatihan dan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 3) Penyediaan peralatan dan mesin pra panen, pasca panen dan pengolah hasil pertanian 4) Penyediaan peralatan dan mesin pra panen, pasca panen dan pengolah hasil perkebunan 5) Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian 6) Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 7) Primatani	Meningkatnya produksi pertanian melalui penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	% peningkatan ketersediaan alsintan dan pemanfaatannya untuk kegiatan budidaya, panen, dan pengolahan hasil pertanian/ perkebunan	3,51	5	5	5	5	5	5
4	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 1) Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 2) Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 3) Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/ perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan 4) Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	% peningkatan nilai jual hasil produksi pertanian/ perkebunan per tahun	-	5	5	5	5	5	5

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	5) Pembangunan/ rehabilitasi jalan produksi pertanian TPH 6) Pembangunan/ rehabilitasi jalan produksi perkebunan									
5	Program peningkatan produksi pertanian /perkebunan 1) Bimbingan dan penyuluhan peningkatan produksi pertanian TPH 2) Bimbingan dan penyuluhan peningkatan produksi perkebunan 3) Penyediaan sarana produksi pertanian TPH 4) Penyediaan sarana produksi perkebunan 5) Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan 6) Pengembangan bibit unggul pertanian TPH 7) Pengembangan bibit unggul perkebunan 8) Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura 9) Pengembangan tanaman perkebunan 10) Penyediaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan 11) Penyediaan sarana dan prasarana perbenihan hortikultura 12) Penyediaan sarana dan prasarana perbenihan/perbibitan perkebunan 13) Penyediaan sarana dan prasarana pembuatan pupuk organik	Meningkatnya produksi pertanian/ perkebunan	% peningkatan produksi tanaman pangan per tahun	2,5	+3%	+3%	+3%	+3%	+3%	+3%
			% peningkatan produksi tanaman hortikultura per tahun	1,5	+3%	+3%	+3%	+3%	+3%	+3%
			% peningkatan produksi tanaman perkebunan per tahun	1,2	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
6	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 1) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 2) Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 3) Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Meningkatnya pemberdayaan penyuluh pertanian/perkenan lapangan	Meningkatnya kapasitas penyuluh dan pendamping pertanian/perkebunan	-	3	3	3	3	3	3
7	Pogram Peningkatan penerapan teknologi peternakan 1) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 2) Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna 3) Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan 4) Penyediaan peralatan dan mesin pengolah hasil/budidaya peternakan 5) Pembangunan embung peternakan 6) Pembangunan sumur tanah dangkal peternakan	Meningkatnya produksi peternakan melalui penerapan teknologi peternakan	% peningkatan ketersediaan alsintan dan pemanfaatannya untuk kegiatan budidaya, panen, dan pengolahan hasil peternakan	2,5	3	4	5	5	5	5
8	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 2) Pendataan masalah peternakan 3) Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 4) Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	% penurunan kasus penyakit ternak per tahun	2,8	3	3	3	5	5	5

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
9	Program peningkatan produksi hasil peternakan 1) Pengembangan sarana dan prasarana perbibitan peternakan 2) Pembibitan dan perawatan ternak 3) Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 4) Pembelian/pendistribusian vaksin dan pakan ternak 5) Pengembangan agribisnis peternakan 6) Pengembangan pakan ternak 7) Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak	Meningkatnya produksi hasil peternakan	% peningkatan populasi ternak per tahun.	4,8	5	5	5	6	6	6
10	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 1) Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah 2) Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 3) Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat 4) Pembangunan/ rehabilitasi jalan produksi peternakan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan	% peningkatan nilai jual hasil produksi peternakan per tahun	-	3	3	3	3	3	3

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
11	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan petani 1) Penyuluhan dan pendampingan kelompok tani	Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani	Meningkatnya kelas kelompok tani	-	+3%	+3%	+3%	+3%	+3%	+3%
12	Program pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman 1) Pelatihan pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman 2) Pencegahan dan penanggulangan hama/penyakit tanaman pangan dan hortikultura 3) Pengendalian hama/penyakit tanaman perkebunan.	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman	% penurunan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) per tahun	3,8	5	5	5	6	6	6
13	Program pengembangan agribisnis 1) Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura 2) Pengembangan agribisnis peternakan 3) Pengembangan agribisnis perkebunan	Mengembangkan usaha-usaha agribisnis yang menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi.	% peningkatan jumlah pelaku usaha pertanian, peternakan dan perkebunan per tahun	-	3	3	3	5	5	5

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Program pengembangan pertanian unggulan 1) Pengembangan pertanian organik terpadu 2) Pengembangan sentra produksi komoditas TPH 3) Pengembangan sentra produksi komoditas peternakan 4) Pengembangan sentra produksi komoditas perkebunan 5) Fasilitasi pengembangan klaster unggulan pertanian 6) Fasilitasi pengembangan klaster unggulan perkebunan 7) Fasilitasi pengembangan klaster unggulan peternakan	Mengembangkan kawasan sentra komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan peternakan	% perkembangan kawasan sentra komoditas unggulan per tahun	-	5	5	5	5	5	5

ee. Ketahanan Pangan

No	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program Peningkatan Ketahanan pangan 1) penanganan daerah rawan pangan 2) Penyusunan data base potensi produksi pangan 3) Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian 5) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 6) penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 7) Pengembangan cadangan pangan daerah 8) Pengembangan desa mandiri pangan 9) Pengembangan diversifikasi tanaman 10) Pengembangan lumbung pangan desa 11) Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Meningkatnya ketahanan pangan.	1. Meningkatnya ketersediaan pangan (2%/th)	-	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%
			2. Meningkatnya distribusi pangan (2%/th)	-	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%	+2%
			3. meningkatnya diversifikasi dan mutu pangan	-	10	10	10	10	10	10

ff. Lingkungan Hidup

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1) Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 2) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 3) Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan 4) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 5) Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 6) Bimbingan teknis persampahan 7) Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 8) Kerjasama pengelolaan sampah 9) Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah 10) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 11) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Meningkatnya volume pegangkutan sampah		5	7	10	10	15	15
				71,75	71,75	72,75	73,75	74,75	75,75	76,75
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola sampah	-	3	3	3	3	3	3

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1) Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 2) Koordinasi penilaian langit biru 3) Pemantauan Kualitas lingkungan 4) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 5) Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (peti) 6) Pengelolaan B3 dan limbah B3 7) Pengkajian dampak lingkungan 8) Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan 9) Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 10) Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 11) Pengembangan produksi ramah lingkungan 12) Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 13) Koordinasi penyusunan AMDAL 14) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 15) Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif	Meningkatnya pengendalian dan perusakan lingkungan hidup	Meningkatnya pemantauan kualitas lingkungan, pengelolaan dampak pencemaran, penyusunan Amdal, dan pencapaian Adipura	-	1	1	1	1	1	1
				-	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
				-	5	10	15	15	20	20
					7	10	15	20	25	30

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	%sumberdaya air yang dilindungi	0	-	-	20	20	25	25
	1) Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber air 2) Pengembangan Ekowisata dan Jasa lingkungan 3) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 4) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 5) Penyusunan AMDAL pembangunan kawasan pesisir dan pulau kecil 6) Peningkatan konservasi Daerah Tangkapan air dan Sumber-Sumber air 7) Pengembangan konservasi kawasan pesisir dan hutan mangrove 8) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 9) Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 10) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 11) Koordinasi pengendalian Kebakaran Hutan 12) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 13) Koordnansi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi		Meningkatnya Pengelolaan keanekaragaman hayati, dan peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam.	-	2	2	2	2	2	2

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
4	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1) Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 2) Rehabilitasi hutan dan lahan 3) Pengembangan kelembagaan Rehabilitasi hutan dan lahan 4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Meningkatnya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan, (3%/th)	-	7.500	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
				-	10	15	15	15	20	20
				-	20	10	15	20	20	20
				-	-	2	2	4	4	4
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam		2	2	2	2	2	2
5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 2) Pengembangan data dan Informasi lingkungan 3) Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah 4) Penguatan jejaring Informasi lingkungan pusat dan daerah	Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan, pengembangan data dan informasi lingkungan, membangun jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah.	-	-	1	2	2	3	3
				-	1	1	1	1	1	1
				-	3	5	8	10	10	10
					1	1	1	1	1	1

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
6	Program Peningkatan pengendalian polusi 1) Pengujian emisi kendaraan bermotor 2) Pengujian emisi/polusi udara, akibat aktivitas Industri 3) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 4) Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi 5) Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Meningkatnya pengendalian polusi	Meningkatnya pengujian emisi udara, pengujian polusi limbah padat dan cair, pembangunan tempat pembuangan polutan padat/cair, dan penyuluhan kepada masyarakat		1	2	2	2	3	4
					1	1	1	1	1	1
					1	1	1	1	1	1
					-	-	1.200	1.500	1.500	2.000
7	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan 1) Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi 2) Pengembangan konservasi hutan wisata	Meningkatnya pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan	Meningkatnya ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi, dan pengembangan konservasi hutan wisata		1	1	1	1	1	1
8	Program pengendalian kebakaran hutan 1) Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan 2) Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan 3) Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 4) Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan Sosialisasi 5) Kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Meningkatnya pengendalian kebakaran hutan	Meningkatnya kinerja pengendalian kebakaran dan pencegahan kebakaran hutan.		1	1	1	1	1	1

No.	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
9	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1) Penyusunan kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH 2) Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH 3) Penyusunan dan analisis data informasi pengelolaan RTH 4) Penyusunan program pengeb RTH 5) Penataan RTH 6) Pemeliharaan RTH 7) Pengembangan taman rekreasi 8) Pengawasan dan pengendalian RTH 9) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 10) Koordinasi pelaksanaan program MIH	Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase ruang terbuka hijau (%)		10	10	10	10	10	10
10	Program Penyedia dan Pengelolaan air baku 1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya penyedia dan pengelolaan air baku	Meningkatnya monitoring dan evaluasi pengelolaan air baku.		1	1	1	1	1	1
11	Program Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah 1) Penyedia prasarana dan sarana air limbah	Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Meningkatnya pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan air minum dan air limbah		1	1	1	1	1	1

gg. Kehutanan

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan 1) Pengembangan hasil hutan non kayu 2) Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan 3) Penanaman padi gogorancah, palawija dan tanaman obat (biofarma)	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan	% peningkatan produksi hasil hutan kayu maupun non kayu per tahun	-	5	5	5	5	5	5
2	Program rehabilitasi hutan dan lahan 1) Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan 2) Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 3) Pengembangan Hutan rakyat 4) Pengkayaan hutan rakyat 5) Penghijauan lingkungan 6) Pengembangan agroforestry 7) Penghijauan turus jalan 8) Pembuatan sumur resapan 9) Pembuatan dam penahan, dam pengendali serta Gullyplug 10) Pelestarian sumber mata air	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	Berkurangnya luasan lahan kritis per tahun (Ha)	11.900	500	500	500	500	500	500

No.	Program /Kegiatan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
3	Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 1) Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan 2) Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan 3) Penyuluhan dan pendampingan kelembagaan kehutanan 4) Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	% penurunan kasus pencurian hutan per tahun	10	8	8	8	5	5	5
4	Program Peningkatan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai 1) Penyediaan bibit tanaman jenis mangrove 2) Penanaman pohon jenis mangrove 3) Rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai	Meningkatnya fungsi hutan mangrove dan hutan pantai	Terehabilitasinya hutan mangrove (ha)	25	25	25	25	25	25	25
5	Program Pembinaan dan pengawasan industri primer hasil hutan 1) Inventarisasi potensi tegakan hutan rakyat 2) Sosialisasi peraturan industri primer hasil hutan 3) Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan industri primer hasil hutan	% peningkatan pelaku usaha di sektor kehutanan per tahun	-	5	5	5	5	5	5

hh. Kelautan dan Perikanan

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 1) Bantuan sarana dan prasarana kepada petani garam 2) Penguatan modal kelompok petani garam 3) Pendampingan kegiatan IFAD (Internasional Fund for Agricultural Development) 4) Pendampingan PNPM Mandiri 5) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 6) Pengembangan minapolitan	Meningkatnya keberdayaan ekonomi kelompok masyarakat pesisir, terutama petani garam.	Meningkatnya rata-rata pendapatan petani garam (Rp. 000)	1.800.000		62.209.000	64.698.000	69.388.400	72.163.650	76.974.800
			Meningkatnya Produksi garam rakyat (ton) (4% per tahun)	151,35	157,40	163.709	170.258	177.919	185.035	192.437
2.	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 1) Sosialisasi UU Nomor 27/2007 dan Perda Nomor 8/2008 2) Sertifikasi tanah TPI 3) Intensifikasi perijinan usaha perikanan 4) Penanganan konflik nelayan dan penertiban alat tangkap 5) Pendampingan program Nasional sertifikasi tanah nelayan 6) Fasilitasi perijinan kapal penangkap ikan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pendayagunaan sumberdaya laut.	Berkurangnya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan	218	195	172	149	126	103	80

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 1) Pengadaan sarana dan prasarana Pokwasmas	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pengendalian sumberdaya kelautan.	Meningkatnya jumlah anggota Pokwasmas (orang)	891	909	927	945	963	981	1.000
4.	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 1) Promosi produk perikanan dan kelautan 2) Pemberdayaan masyarakat kawasan pesisir dalam mendukung festival pantai 3) Pengembangan garam industry	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk perikanan dan kelestarian sumberdaya perikanan.	Meningkatnya Tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun) (3% per tahun)	24,11	24,83	25,58	26,35	27,14	27,95	28,89

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
5.	Program pengembangan perikanan tangkap 1) Penertiban TPI dan pengamanaan usaha perikanan 2) Intensifikasi pendapatan daerah 3) Penertiban dan penanganan KPLI 4) Reklamasi PPI Tasikagung 5) Pembangunan Jetty 6) Pengelolaan TPI 7) Pembangunan/rehabilitasi TPI 8) Pengembangan TPI Binangun Terpadu (TPI, Docking Kapal, SPDN dan Jasa-Jasa). 9) Revitalisasi TPI se kabupaten rembang 10) Pemeliharaan sarana dan prasarana TPI se Kabupaten Rembang 11) Pengaspalan jalan dan rehab saluran drainase TPI Tasik agung 2 12) Refretment TPI Tanjungsari dan Karanganyar 13) Kerjasama bidang penangkapan ikan luar pulau 14) Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perikanan dan Kelautan 15) Pengembangan kawasan minapolitasn di Tasik agung 16) Fasilitasi Perijinan Usaha Penangkapan dan Kerjasama Antar Daerah 17) Modernisasi Kapal Penangkap Ikan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap (laut)	Meningkatnya produksi perikanan tangkap (ton) (20% per tahun)	38.050,97	=	39.953,52	41.951,19	44.098,75	46.251,19	48.563,75

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
6.	Program pengembangan budidaya perikanan 1) Rehabilitasi saluran tambak 2) Silvofishery 3) Demplot budidaya air tawar di sekitar hutan 4) Demplot budidaya air payau 5) Peningkatan sarana dan prasarana budidaya air payau 6) Peningkatan sarana dan prasarana budidaya air tawar 7) Pengembangan budidaya rumput laut 8) Peningkatan sarana dan prasarana UPR air tawar 9) Peningkatan sarana dan prasarana HSRT 10) Demplot pengembangan budidaya bandeng intensif 11) Demplot budidaya kerapu/kakap di tambak 12) Demplot budidaya vaname 13) Pengembangan budidaya lele terpal 14) Revitalisasi Kolam Rakyat 15) Pengadaan Benih Ikan 16) Pengadaan Induk Ikan Unggulan 17) Pembuatan Pabrik Pakan Ikan 18) Pengadaan pakan ikan 19) Pengembangan sistem budidaya karamba	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya air payau (ton) (5% per tahun)	427,240	448,600	471,032	494,584	519,313	545,278	654,334
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya air tawar (ton) (5% per tahun)	131,720	138,306	145,218	152,479	160,103	168,108	201,729

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
7.	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1) Pengadaan alat-alat pengolahan 2) Pendampingan pada kelompok usaha pengolah ikan 3) Pengadaan peralatan laboratorium pengolahan ikan 4) Bantuan cool box 5) Pengembangan dan pembinaan pasca panen 6) Pembangunan peningkatan sarana dan prasarana kluster pengolahan ikan 7) Pengembangan cluster pengolahan ikan 8) Pengembangan usaha kemitraan dengan lembaga keuangan 9) Bantuan alat jaringan pemasaran ikan segar dengan sepeda motor 10) Demplot pengolahan hasil perikanan 11) Pemberdayaan wanita pengolah ikan 12) Pengembangan diversifikasi produk hasil perikanan 13) Fasilitasi permodalan bakul ikan 14) Bantuan permodalan bagi wanita pengolah ikan 15) Revitalisasi bangunan TPI Tasikagung lama untuk pasar ikan 16) Pembangunan Pasar Ikan 17) Pembangunan Pujasera (Pusat Jajanan Serba Ada) produk perikanan.	Meningkatnya usaha pengolahan ikan dan pemasaran produk perikanan.	Meningkatnya jumlah usaha pengolahan ikan	1.734	2.023	2.312	2.601	2.890	3.179	3.468
			Meningkatnya jumlah tenaga kerja pengolah ikan (3% per tahun)	18.678	19.394	20.110	20.826	21.542	22.258	22.972

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
8.	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 1) Kajian penetapan kawasan konservasi	Tersedianya hasil kajian kawasan konservasi dan kawasan budidaya.	Tersusunnya hasil kajian kawasan konservasi dan kawasan budidaya.	0						100
9.	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 1) Pemberdayaan penyuluh perikanan 2) Peningkatan sarana dan prasarana penyuluh perikanan	Meningkatnya peran penyuluh perikanan dalam peningkatan produksi perikanan.	Meningkatnya persentase penyuluh perikanan yang telah memperoleh pelatihan (%)	40	50	60	70	80	90	100
10.	Program peningkatan kapasitas SDM perikanan dan kelautan 1) Pelatihan pengolah ikan 2) Pembinaan manajemen dan permodalan bakul ikan 3) Pembinaan kelompok pengguna/penyewa kios KBT 4) Pelatihan dan pembinaan SDM pengelola TPI 5) Pelatihan petani garam 6) Study banding dan pelatihan pengembangan keterampilan pembudidaya ikan 7) Pelatihan nelayan 8) Pelatihan pengolahan/ pembudidayaan ikan air tawar dan air payau 9) Pendampingan kelompok tani pembudidaya ikan 10) Pelatihan ANKAPIN (Ahli Nautika Kapal) 11) Pelatihan ATKAPIN (Ahli Teknik Kapal Perikanan)	Meningkatnya kapasitas SDM dibidang Perikanan.	Meningkatnya Rata-rata pendapatan nelayan (8% per tahun).	9.671.462	10.445.179	11.297.512	12.210.351	13.196.947	14.263.260	15.415.732

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2009	Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
11.	Program Pengembangan Perencanaan, Informasi dan Statistik perikanan dan kelautan 1) Statistik perikanan dan kelautan 2) Monitoring dan evaluasi kegiatan perikanan dan kelautan 3) Konsultan perencanaan dan pengawasan fisik. 4) Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 5) Pengadaan Peta Laut	Tersedianya data statistik yang up to date untuk mendukung perencanaan pembangunan perikanan dan kelautan.	Terlaksananya penyusunan statistik perikanan setiap tahun (%)	100	100	100	100	100	100	100
12.	Program Kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan 1) Rehabilitasi mangrove 2) Pembuatan dan pemasangan terumbu karang buatan 3) Penebaran bibit di perairan umum 4) Penataan Pulau – Pulau Kecil 5) Pembangunan breakwater 6) Pengadaan dan pemasangan alat penanda terumbu karang	Berkurangnya kerentanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap abrasi.	Meningkatnya luas mangrove (ha) (seluas 2 ha per tahun).	178,7	180,7	182,7	184,7	186,7	188,7	190,7
			Penetapan Kawasan Zonasi pulau-pulau kecil di Kab. Rembang (%)	0						100

BAB X

KAIDAH PELAKSANAAN DAN KETENTUAN PERALIHAN

A. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJM Daerah Kabupaten Rembang tahun 2010-2015 ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pasangan Bupati - Wakil Bupati terpilih, yang telah dikampanyekan pada saat menjelang pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Dalam penyusunan RPJM Daerah ini telah memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam sejumlah peraturan perundangan yaitu Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 jo Undang-Undang No 8 tahun 2005 jo Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan dan perumusan program dan indikator kinerja dalam RPJM Daerah ini mengacu sejumlah program yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu RPJM-Nasional Indonesia 2009-2014, RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah 2008-2013, dan RPJP Daerah Kabupaten Rembang 2005-2025 serta produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, dalam hal ini yang dimaksud antara lain adalah RTRW Kabupaten Rembang, Perencanaan Kawasan Bahari Terpadu dan Perencanaan Kawasan Bonang Binangun Sluke.

Idealnya dalam menyusun dokumen RPJM Daerah ini dapat memuat seluruh program-program atau rencana kerja seluruh tugas Bupati - Wakil Bupati meliputi tugas-tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas pemerintahan umum. Namun demikian dalam menjalankan peran sebagai wakil pemerintah pusat (atau provinsi) yaitu dalam menjalankan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan program tidak bisa direncanakan oleh daerah sejak awal, namun program tersebut lebih banyak merupakan program yang telah disusun oleh pemerintah (pusat) maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tinggal melaksanakannya. Dengan demikian tidak dapat direncanakan sejak awal.

RPJM Daerah ini merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan tata kala yang sama yaitu 2010-2015. Disamping itu RPJM Daerah ini akan menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan RKPD setiap tahun anggaran. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka pada tahun 2015 yang merupakan tahun terakhir penyusunan RKPD untuk tahun 2016 sebagai RKPD Transisi. Disisi yang lain Penyusunan RPJM Daerah ini telah melalui tahap konsultasi publik yaitu melalui forum musrenbang, dengan harapan program-program yang ada di dalam RPJM Daerah ini sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

RPJM Daerah ini nantinya juga akan menjadi dasar bagi Bupati-Wakil Bupati dalam menyusun LKPJ dan LKPJ-AMJ di akhir periode masa jabatan Bupati-Wakil Bupati dan dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan monitoring dan penilaian. RPJM Daerah ini merupakan suatu dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, namun diharapkan dapat menjadi acuan bagi segenap stakeholder di Kabupaten Rembang dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Rembang tahun 2010-2015.

Mengingat dokumen RPJM Daerah ini memiliki tata kala selama 5 tahun, ditengah waktu pelaksanaannya dapat dilakukan evaluasi paruh waktu (*mid term evaluation*) untuk mengetahui sejauhman terjadi ketidaksesuaian atau distorsi. Jika hal semacam ini terjadi maka perlu dilakukan langkah-langkah penyempurnaan dokumen.

B. Ketentuan Peralihan

Sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RPJM Daerah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pasangan Bupati – Wakil bupati terpilih dilantik. Dengan demikian pada periode kepemimpinan Bupati- Wakil Bupati periode selanjutnya penyusunan RKPD dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun 2016 belum memiliki dasar, untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka RPJM Daerah 2010-2015 dapat diberlakukan sebagai pedoman sementara dalam penyusunan RKPD tahun 2016.

BUPATI REMBANG

ttd.

H. MOCH. SALIM